



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN 2016 - 2021



KABUPATEN
KLATEN | **2018**



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun, pedoman penyusunan rencana kerja tahunan serta pedoman pengendalian dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 masih menyebutkan nomenklatur Perangkat Daerah dan belum menyebutkan urusan pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaannya belum terdapat kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 harus disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016-2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Klaten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi

Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

19. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJM Daerah.
20. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJM Daerah.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
25. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
26. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah

nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
 30. Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah Kabupaten Klaten.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 32. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - i. BAB IX : Penutup.

- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2015.
- (2) RPJM Daerah berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota lainnya dan RPJMN.
4. Ketentuan BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah; dan
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah;
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah; dan
 - c. hasil RPJM Daerah.
- (4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
 - (7) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
 - (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 - (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

Tahapan penyusunan RPJM Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJM Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 16 Agustus 2018
BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (13/2018)

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019	I-7
1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	I-9
1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029	I-11
1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025	I-11
1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	I-13
1.3.6 Keselarasan dan Kesenambungan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Tetangga	I-15
1.3.7 Keterkaitan RPJMD dengan RENSTRA – Perangkat Daerah	I-16
1.3.8 Keterkaitan RPJMD dengan RKPD	I-16
1.4 Sistematika RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	I-16
1.5 Maksud dan Tujuan	I-18
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-14
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-31
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-90
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2017.....	III-12
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III-19
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	VI-1
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	VI-2
4.1.1 Permasalahan Pembangunan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	VI-2
4.1.2 Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum.....	VI-5
4.1.3 Permasalahan Pada Aspek Daya Saing Daerah.....	VI-10
4.2 Isu-isu Strategis.....	VI-14
4.2.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Klaten.....	VI-14
4.2.2 Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Klaten.....	VI-17
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Visi.....	V-1
5.2 Misi.....	V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran.....	V-4
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	VI-1
6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi.....	VI-1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan.....	VI-1
6.3 Program Pembangunan Daerah.....	VI-1
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pentahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	I-2
Gambar 1.2	Bagan alir perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	I-4
Gambar 1.3	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah	I-7
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Klaten	II-1
Gambar 2.2	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klaten	II-10
Gambar 2.3	Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Klaten	II-11
Gambar 2.4	Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2014	II-12
Gambar 2.5	Perkembangan Jumlah KK pada Tahun 2013-2017	II-14
Gambar 2.6	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2013-2017	II-14
Gambar 2.7	Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-17
Gambar 2.8	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-17
Gambar 2.9	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	II-18
Gambar 2.10	Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.	II-20
Gambar 2.11	Perkembangan Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2017	II-31
Gambar 2.12	Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-31
Gambar 2.13	Angka Kelulusan (AL)	II-36
Gambar 2.14	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-37
Gambar 2.15	Rasio Murid dan Guru Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-39
Gambar 2.16	Komparasi Angka Melek di Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	II-42
Gambar 2.17	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-49
Gambar 2.18	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-52
Gambar 2.19	Kecenderungan Prevalensi Stunting dan Underweight pada Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017	II-58
Gambar 2.20	Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)	II-61
Gambar 2.21	Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2009-2018	II-67
Gambar 2.22	PMKS yang Memperoleh Bantuan	II-68
Gambar 2.23	Perkembangan Lahan Kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II-73
Gambar 2.24	Trend Jumlah Tenaga Kerja Di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2013 – 2017	II-81
Gambar 2.25	Angka Kriminalitas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-83
Gambar 2.26	Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017	II-88
Gambar 3.1	Tingkat Pertumbuhan PAD di Kab Klaten Tahun 2013- 2017 (%)	III-2
Gambar 3.2	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kab Klaten Tahun 2013 - 2017 (%)	III-3
Gambar 3.3	Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan APBD (%)	III-23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019	I-8
Tabel 1.2	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	I-10
Tabel 1.3	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025	I-12
Tabel 1.4	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	I-14
Tabel 1.5	Keselarasan dan Kesenambungan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Lainnya	I-15
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014-2017 dan Laju Pertumbuhan di Kabupaten Klaten	II-13
Tabel 2.2	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rp.Juta)	II-15
Tabel 2.3	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rp.Juta)	II-16
Tabel 2.4	Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-18
Tabel 2.5	Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Klaten	II-19
Tabel 2.6	Beberapa Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2015	II-20
Tabel 2.7	Persentase UMK terhadap KHL di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II-21
Tabel 2.8	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Klaten Tahun 2011– 2015	II-21
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Periode 2013-2017	II-22
Tabel 2.10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2013-2017	II-22
Tabel 2.11	Data Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten	II-23
Tabel 2.12	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2011-2015	II-23
Tabel 2.13	Program dan Kegiatan Penunjang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017	II-23
Tabel 2.14	Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2016	II-26
Tabel 2.15	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2013 - 2017	II-26
Tabel 2.16	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sampai dengan tahun 2017	II-26
Tabel 2.17	Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2013-2017	II-27
Tabel 2.18	Produksi dan Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2013 - 2017	II-27
Tabel 2.19	Realisasi Pemberangkatan Transmigrasi PIR	II-28
Tabel 2.20	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-29
Tabel 2.21	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2017	II-29
Tabel 2.22	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2017	II-30
Tabel 2.23	Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten tahun 2017	II-32
Tabel 2.24	Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-32
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Kasar PAUD, Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-33
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017	II-34
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017	II-35
Tabel 2.28	Perkembangan Prosentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-35

Tabel 2.29	Perkembangan Persentase Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-36
Tabel 2.30	Perkembangan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-36
Tabel 2.31	Perkembangan Penanganan Pendidikan Keaksaraan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-37
Tabel 2.32	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-38
Tabel 2.33	Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2017	II-38
Tabel 2.34	Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-39
Tabel 2.35	Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-40
Tabel 2.36	Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-40
Tabel 2.37	Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-41
Tabel 2.38	Komparasi Angka Melek di Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2017	II-42
Tabel 2.39	Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah Dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK	II-42
Tabel 2.40	Gedung, Ruang Kelas Sekolah Negeri Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-43
Tabel 2.41	Gedung, Ruang Kelas Sekolah Swasta Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-43
Tabel 2.42	Perkembangan Prosentase ruang kelas Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-44
Tabel 2.43	Data Pokok SD/MI Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-45
Tabel 2.44	Data Pokok SMP/MTs Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-45
Tabel 2.45	Jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUS TS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	II-46
Tabel 2.46	Perkembangan Prosentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.47	Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-47
Tabel 2.48	Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017	II-49
Tabel 2.49	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.50	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.51	Jumlah Tenaga Medis Menurut Puskesmas dan Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-51
Tabel 2.52	Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2017	II-52
Tabel 2.53	Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-53
Tabel 2.54	Perkembangan Jumlah Penderita AIDS/HIV Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-54
Tabel 2.55	Kasus Hipertensi dan Diabetusmilitus yang Terlaporkan lewat Puskesmas Tahun 2013-2017	II-55
Tabel 2.56	Jumlah Kasus Gizi Buruk Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-56
Tabel 2.57	Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-57
Tabel 2.58	Capaian Rumah tangga Sehat Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2017	II-59
Tabel 2.59	Sarana Kesehatan Yang Berizin di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-59
Tabel 2.60	Jumlah Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-60
Tabel 2.61	Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017*	II-63
Tabel 2.62	Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang	II-64

Tabel 2.63	Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Klaten	II-64
Tabel 2.64	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Pelacuran	II-66
Tabel 2.65	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Miras	II-66
Tabel 2.66	Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum di Kabupaten Klaten	II-67
Tabel 2.67	Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2009-2018	II-67
Tabel 2.68	Perkembangan Pemberian Bantuan Kepada PMKS Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	II-69
Tabel 2.69	Perkembangan Penanganan PMKS Kabupaten Klaten tahun 2016-2017	II-69
Tabel 2.70	Penderita Disabilitas Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Klaten Tahun 2012 - 2016	II-70
Tabel 2.71	Timbulan Sampah dan Kapasitas Terangkut di Kabupaten Klaten	II-71
Tabel 2.72	Data Izin Lingkungan/ Perlindungan Lingkungan	II-72
Tabel 2.73	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.74	Penduduk Kabupaten Klaten Belum Memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.75	Sosialisasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-75
Tabel 2.76	Lembaga Ekonomi Perdesaan	II-76
Tabel 2.77	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2013-2017	II-76
Tabel 2.78	Pelatihan Siskeudes	II-77
Tabel 2.79	Lokasi Pengembangan Wisata	II-78
Tabel 2.80	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-79
Tabel 2.81	Data Pelayanan KB Berdasarkan PUS	II-79
Tabel 2.82	Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-79
Tabel 2.83	Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2013 – 2017	II-81
Tabel 2.84	Data Jumlah Kejahatan Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	II-83
Tabel 2.85	Data Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Klaten	II-84
Tabel 2.86	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-84
Tabel 2.87	Jumlah Pengunjung berdasarkan kalangan	II-84
Tabel 2.88	Jenis Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-85
Tabel 2.89	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2017	II-85
Tabel 2.90	Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	II-86
Tabel 2.91	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-87
Tabel 2.92	Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-87
Tabel 2.93	Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD 2013 - 2017	II-88
Tabel 2.94	Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten	II-89
Tabel 2.95	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitka Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2015-2017	II-90
Tabel 2.96	Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2011–2015	II-90
Tabel 2.97	Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011– 2015	II-91
Tabel 2.98	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-91
Tabel 2.99	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisnus dan Wisman Tahun 2013-2017	II-93
Tabel 2.100	Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-93
Tabel 2.101	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisnus dan Wisman Tahun 2013-2017	II-94
Tabel 2.102	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-95

Tabel 2.103	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-95
Tabel 2.104	Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-96
Tabel 2.105	Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2013-2017	II-96
Tabel 2.106	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2013-2017	II-96
Tabel 2.107	Produksi Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-97
Tabel 2.108	Produksi Holtikultura (Buah-buahan dan Sayuran) Tahun 2013-2017	II-97
Tabel 2.109	Populasi Ternak Tahun 2013-2017	II-98
Tabel 2.110	Produksi Peternakan Tahun 2013-2017	II-98
Tabel 2.111	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.112	Data Pemasangan Perlengkapan Jalan	II-100
Tabel 2.113	Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Klaten	II-100
Tabel 2.114	Alat Uji Sarana dan Prasaran Angkutan	II-101
Tabel 2.115	Data Uji Sarana dan Prasarana Angkutan	II-101
Tabel 2.116	Jumlah Perlintasan Sebidang Kereta Api	II-101
Tabel 2.117	Data Operasional Penertiban Lalu Lintas	II-102
Tabel 2.118	Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-102
Tabel 2.119	KWH Terjual PLN Menurut Bulan Tahun 2015	II-103
Tabel 2.120	Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2015	II-103
Tabel 2.121	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (Km)	II-104
Tabel 2.122	Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam km)	II-105
Tabel 2.123	Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten	II-105
Tabel 2.124	Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-105
Tabel 2.125	Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2013-2017	II-106
Tabel 2.126	Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2013-2017	II-108
Tabel 2.127	Pasar Menurut Jenisnya Tahun 2013–2017	II-109
Tabel 2.128	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-110
Tabel 2.129	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2017	II-110
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-2
Tabel 3.2	Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-2
Tabel 3.3	Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-3
Tabel 3.4	Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-3
Tabel 3.5	Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-4
Tabel 3.6	Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-5
Tabel 3.7	Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah)	III-6
Tabel 3.8	Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III-8
Tabel 3.9	Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-9
Tabel 3.10	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah)	III-11
Tabel 3.11	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Klaten	III-13
Tabel 3.12	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-15
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III-16
Tabel 3.14	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III-17
Tabel 3.15	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-17

Tabel 3.16	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2017	III-18
Tabel 3.17	Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III-19
Tabel 3.18	Proyeksi Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021	III-22
Tabel 3.19	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021	III-25
Tabel 3.20	Prediksi Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021	III-26
Tabel 3.21	Prediksi Perkembangan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021	III-28
Tabel 3.22	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Guna Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021	III-29
Tabel 3.23	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten 2016 -2021	III-30
Tabel 3.24	Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II dan III Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021	III-31
Tabel 3.25	Proyeksi APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021	III-32

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun dengan mempedomani pada tahap ketiga (tahun 2015-2020) atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005–2025. Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran atas visi, misi, janji dan program Pasangan Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, program pembangunan daerah prioritas, kerangka kebutuhan pendanaan bersifat indikatif, indikator kinerja tujuan/sasaran/program prioritas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah pasangan kepala daerah dilantik. Adapun Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Klaten periode tahun 2016–2021 dilantik pada tanggal 17 Februari 2016, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-502 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah Atas Nama Hj. Sri Hartini, SE sebagai Bupati Klaten, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-503 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah Atas Nama Hj. Sri Mulyani sebagai Wakil Bupati.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten periode Tahun 2016-2021 menyusun Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi, misi, janji dan program Bupati dan Wakil Bupati yang diselaraskan dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2014-2019.

Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD), Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Klaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Adapun pentahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana Gambar 1.1



Gambar 1.1 Pentahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Sumber : *Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.*

Saat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 telah memasuki tahun ketiga (2018), Pemerintah Kabupaten Klaten akan melakukan perubahan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Hal ini didasarkan adanya : **(1)** Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 15 Juni 2016 ; **(2)** Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Audit “Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Aspek Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014-2016” merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten guna melaksanakan “*evaluasi, penyesuaian dan melengkapi data*” materi Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dan **(3)** Pergantian kepemimpinan kepala daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut selanjutnya dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam bentuk ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru hasil penggabungan ataupun pengurangan urusan sehingga indikator kinerja OPD yang ada dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas obyek pemeriksaan (*obrik*) Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten guna melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi dan menyesuaikan :
1. Data jalan kabupaten
 2. Indikator prosentase irigasi dalam keadaan baik pada Bab V
 3. Permasalahan pada RPJMD dengan kondisi yang sebenarnya melalui pembahasan dengan SKPD terkait
 4. Kondisi awal ketercapaian 11 indikator capaian kinerja yang disajikan pada Bab V RPJMD tetapi tidak dijelaskan pada Bab II
 5. Target awal dan target akhir 6 indikator yang ditetapkan berbeda pada Bab V dan Bab VII
 6. Target akhir rata-rata lama sekolah dan rasio Rumah Tidak Layak Huni yang ditetapkan berbeda pada Bab V dan Bab VII
 7. Target capaian pada Bab VIII yang melebihi 100%
 8. Program-program pada Bab VII dan VIII
 9. Sasaran yang berbeda antara Bab V dan Bab VII
- b. Mengevaluasi dan menyesuaikan :
- Melengkapi 20 Indikator kinerja Daerah pada Bab IX RPJMD yang tidak ditetapkan target capain setiap tahunnya.
- c. Menetapkan Renstra SKPD dengan SK Kepala SKPD.

Mengingat obyek pemeriksaan (*obrik*) berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten maka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK itu juga harus disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten. Adapun tata laksana penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 itu wajib mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

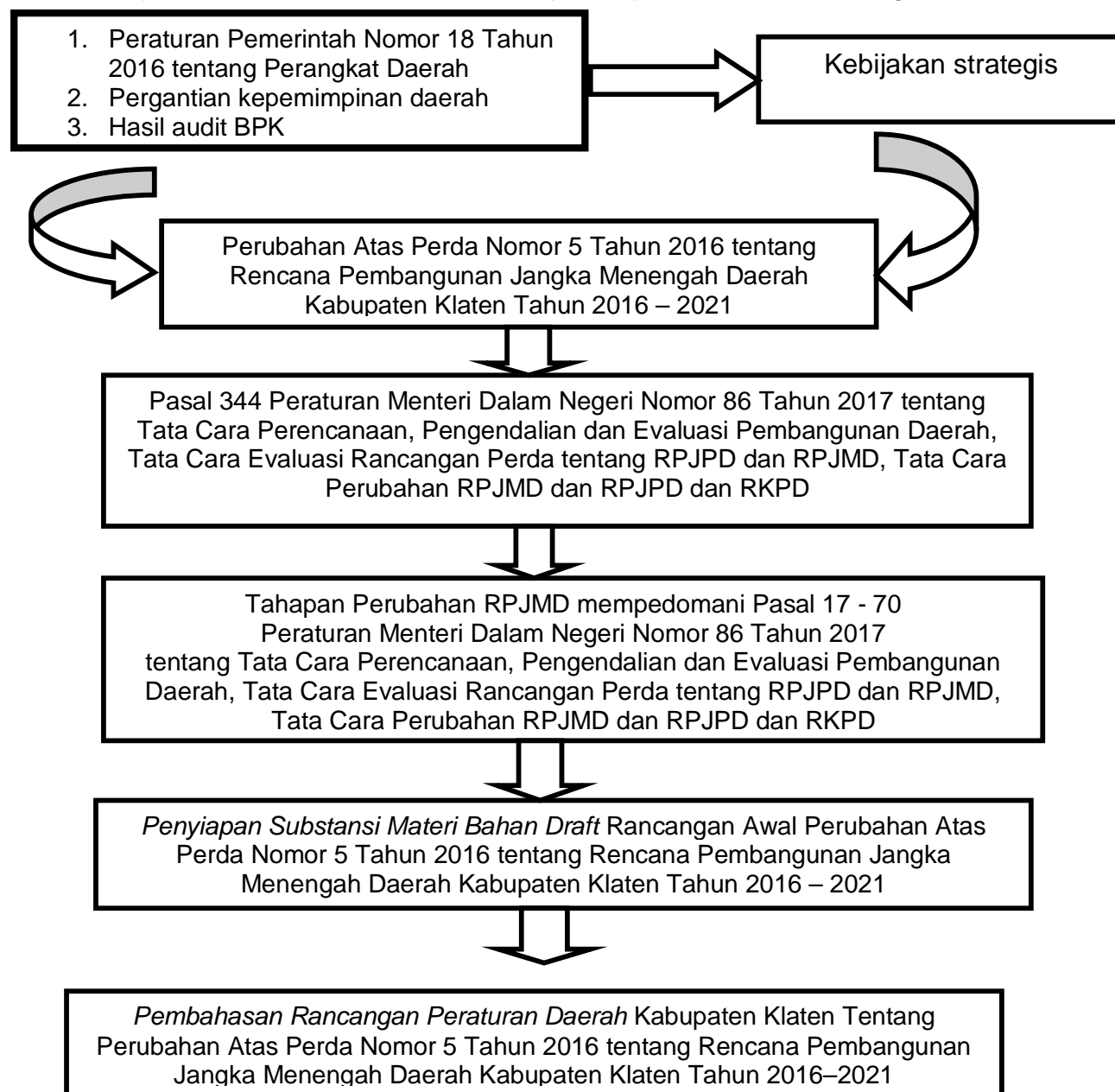
Adapun perubahan kepemimpinan kepala daerah yang terjadi adanya pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Klaten Atas Nama Hj. Sri Mulyani sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia *Nomor 131.33-8601 Tahun 2017* tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah. Meskipun terjadi perubahan kepemimpinan daerah namun dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 nantinya tetap mendasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih periode 2016-2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, LHP BPK dan pergantian kepemimpinan daerah itu dikategorikan sebagai **kebijakan strategis yang layak menjadi dasar pertimbangan perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.**

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa *Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai dengan pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.*

Bagan alir perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut :



Gambar 1.2 Bagan alir perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 didasarkan pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Polusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan

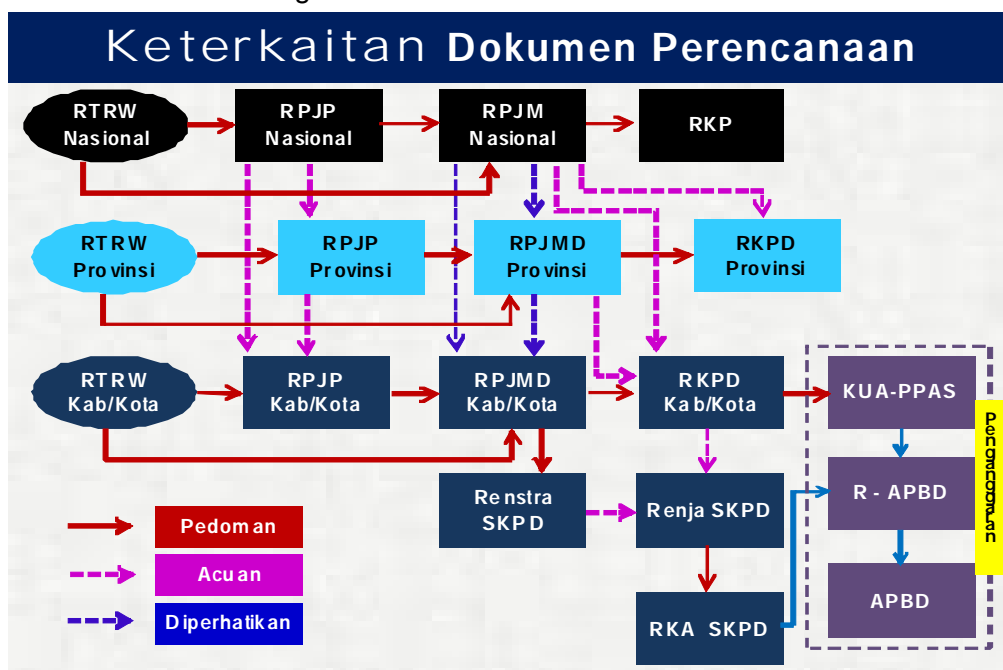
- Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMD merupakan *sub sistem* dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 wajib mengacu pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.

Sehingga dokumen RPJMD yang disusun harus menjamin adanya kesinambungan dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain dengan: RPJPD, RTRW, RKPD, Renstra-PD, Renja Kerja Perangkat Daerah, dan RAPBD yang merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan dan penganggaran yang tidak terpisahkan.

Adapun sebagai gambaran, hubungan antar dokumen perencanaan dapat disajikan pada Gambar 1.3 sebagai berikut:



Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah

Sumber : *Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*

Dari Gambar 1.3 di atas tampak keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

RPJMN Tahun 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan visi: “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dengan agenda misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan ;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati-diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari uraian di atas, keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 1.1. Dari Tabel 1.1 di bawah ini dapat dijelaskan bahwa :

- a. **Misi 1 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 1, 2, 3 dan 6 RPJMD Kabupaten Klaten
- b. **Misi 2 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 2 RPJMD Kabupaten Klaten
- c. **Misi 3 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 2 dan 6 RPJMD Kabupaten Klaten
- d. **Misi 4 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 1 dan 6 RPJMD Kabupaten Klaten
- e. **Misi 5 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 5 dan 7 RPJMD Kabupaten Klaten
- f. **Misi 6 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 8 RPJMD Kabupaten Klaten
- g. **Misi 7 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 6 RPJMD Kabupaten Klaten

Tabel 1.1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	RPJMN	RPJMD KABUPATEN KLATEN
1.	VISI	<i>Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</i>	<i>Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing</i>
2.	MISI	1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1) Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya. 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 3) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal. 6) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
		1) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 6) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
		3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
		4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.	1) Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya. 6) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
		5) Mewujudkan bangsa yang berdaya	5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan

NO	URAIAN	RPJMN	RPJMD KABUPATEN KLATEN
		saing.	kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah. 7) Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
		6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	8) Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.
		7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	6) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014.

Salah satu klausul menyatakan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah harus berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 juga akan wajib memperhatikan dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi* " dengan misi sebagai berikut:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan: *mboten korupsi, mboten ngapusi*;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah Lingkungan.

Berdasarkan uraian itu, hubungan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No (1)	Uraian (2)	RPJM Provinsi Jawa Tengah (3)	RPJM Kabupaten Klaten (4)
1	VISI	<i>Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Boten Korupsi, Boten Ngapusi</i>	<i>Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing</i>
2	MISI	<p>1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.</p> <p>2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran</p> <p>5) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan: <i>mboten korupsi, mboten ngapusi.</i></p> <p>4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.</p> <p>5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.</p> <p>6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat</p> <p>7) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah Lingkungan</p>	<p>2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.</p> <p>3) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.</p> <p>6) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.</p> <p>1) Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.</p> <p>2) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.</p> <p>2) Mewujudka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.</p> <p>8) Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.</p> <p>1) Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.</p> <p>6) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian</p> <p>5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah.</p> <p>7) Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.</p> <p>2) Mewujudka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.</p> <p>8) Meningkatkan kapasitas pelayanan publik</p> <p>4) Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat</p>

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Misi 1 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 2, 3 dan 6 RPJMD Kabupaten Klaten
2. Misi 2 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 1 dan 2 RPJMD Kabupaten Klaten
3. Misi 3 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 2 dan 8 RPJMD Kabupaten Klaten
4. Misi 4 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 1 dan 6 RPJMD Kabupaten Klaten
5. Misi 5 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 5 dan 7 RPJMD Kabupaten Klaten
6. Misi 6 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 2 dan 8 RPJMD Kabupaten Klaten
7. Misi 7 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 4 RPJMD Kabupaten Klaten.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dinyatakan bahwa dalam rangka pengembangan wilayah maka Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 8 sistem perwilayahan (*regionalisasi*) berdasarkan perpaduan aspek homogenitas, modalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan dimaksud adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukawonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Banglor. Kabupaten Klaten merupakan bagian dari perwilayahan Subosukowonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) dengan cakupan wilayah, potensi dan arah pengembangan sebagai berikut :

1. Klaten ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga menjadi kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
2. Delanggu dan Prambanan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sehingga menjadi kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
3. Dalam sistem perwilayahan Kabupaten Klaten yang termasuk dalam Wilayah Subosukawonosraten berfungsi sebagai pengembangan Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional.
4. Klaten ditetapkan sebagai bagian pengembangan kawasan strategis ditinjau dari sudut pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Perkotaan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten dan koridor Perbatasan Klaten-Sukoharjo-Wonosari/Gunung Kidul (Kesukosari).

1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang (20 tahun), disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten disusun dengan berpedoman pada Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten dipakai sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pasangan Kepala Daerah.

Prioritas pembangunan daerah Tahap Ketiga (2015-2020) dalam dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.
3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab serta didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.
6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi (BERSINAR).

Berdasarkan program prioritas di atas maka RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada tahap ketiga (tahun 2015-2020) RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025. Konsistensi ini dapat dilihat pada keterkaitan antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan agenda program prioritas RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 ditunjukkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

No	Program Prioritas RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2015	Misi RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
(1)	(2)	(3)
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, mandiri, dan berbudaya.	Butir pertama program prioritas RPJPD, selanjutnya diacu dan dipedomani dalam rumusan misi ke-1 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya</i>
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.	Butir kedua program prioritas RPJPD, selanjutnya diacu dan dipedomani dalam rumusan misi ke-3 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.</i>
3	Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), demokratis dan bertanggung jawab serta didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.	Butir ketiga program prioritas RPJPD, selanjutnya dirumuskan menjadi misi ke-2 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</i> dan misi ke-8 yang berbunyi <i>Meningkatkan kapasitas pelayanan publik</i>
4	Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.	Butir keempat program prioritas RPJPD, selanjutnya diacu dan dipedomani dalam rumusan misi ke-4 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat</i>
5	Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.	Butir kelima program prioritas RPJPD, selanjutnya diacu dan dipedomani dalam rumusan misi ke-7 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian</i>
6	Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi (BERSINAR).	Butir keenam program prioritas RPJPD, selanjutnya diacu dan dipedomani dalam rumusan misi ke-5 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah</i>

1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten juga berpedoman pada RTRW Kabupaten Klaten dalam bentuk penyelarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031. Hal ini mengingat peran RTRW Kabupaten Klaten merupakan acuan guna mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten.

Penyelarasan RPJMD dengan rencana tata ruang kabupaten guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten lainnya terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Selain itu penyelarasan RPJMD dengan RTRW juga untuk menjawab isu-isu strategis yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten, antara lain :

1. Perkembangan Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta yang sangat cepat berdampak pada perubahan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Klaten khususnya sebagai penyangga kebutuhan perumahan dan permukiman bagi kedua kota itu.
2. Volume lalu lintas jalan raya nasional Surakarta-Yogyakarta yang semakin meningkat selain mengakibatkan meningkatnya tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas juga berdampak meningkatnya waktu tempuh proses produksi distribusi barang/jasa dari Klaten ke kota/wilayah lain begitu juga sebaliknya.
3. Perlunya Kabupaten Klaten membuat kebijakan *dis-insentif* dalam rangka mengendalikan tingginya angka perubahan pemanfaatan lahan dari pertanian ke non pertanian mengingat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 mengamanatkan bahwa Kabupaten Klaten merupakan penyangga produksi pangan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C (*pasir , kerikil dan batu*) khususnya yang tidak berijin dan lokasinya di luar zona yang ditentukan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 di kawasan Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko yang fungsinya sebagai kawasan resapan air selain mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten mengakibatkan kerusakan lingkungan (perubahan bentang alam dan menurunnya potensi air tanah) yang diperlukan bagi kehidupan dan pengairan pertanian selain itu juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan

- dan jembatan yang dilewati armada pengangkut mengingat beban armada pengangkut melebihi kemampuan kualifikasi teknis jalan yang dilewati.
5. Terjadinya kesenjangan (*disparitas*) perkembangan wilayah di mana wilayah/jalur tengah sepanjang jalan nasional Surakarta-Yogyakarta memiliki perkembangan sangat pesat sedangkan wilayah utara dan selatan relatif kurang berkembang/*stagnan*.
 6. Terjadinya ketimpangan (*disparitas*) ketersediaan air bersih perdesaan di mana Wilayah Kecamatan Kalunharjo plus (Karanganom, Tulung, Polanharjo dan Delanggu) berlimpah air bersih sedangkan wilayah Kecamatan Kemalang dan beberapa wilayah selatan (Bayat, Cawas dan Karangdowo) rawan air bersih.
 7. Wilayah Kabupaten Klaten dapat dikatakan sebagai "*laboratorium bencana alam*" mengingat memiliki kawasan rawan terjadinya bencana alam (gempa bumi, letusan Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, angin serta kekeringan).

Adapun konsistensi keterkaitan antara Misi RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dan kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 ditunjukkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

No	RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
(1)	(2)	(3)
1	Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mendorong Pertumbuhan wilayah sehingga meminimalisir ketimpangan antar wilayah.	Misi ke-3 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi : <i>Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal</i> konsisten dengan Butir kesatu kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031. Misi ke-1, ke-2 dan ke-5 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 dalam konstelasi kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 berfungsi sebagai pendukung dan penyumbang konsistensi pelaksanaan RTRW diukur dengan ketaatan pelaksanaan RTRW.
2	Peningkatan aksesibilitas, layanan sarana dan prasarana melalui pengembangan sistem transportasi ke seluruh wilayah dalam rangka pemerataan pertumbuhan Kabupaten Klaten.	Misi ke-4 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat</i> konsisten dengan Butir kedua kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031
3	Pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung.	Misi ke-5 Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah konsisten dengan Butir ketiga kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031.
4	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang dikelola secara optimal, terintegrasi, sesuai dengan daya dukung wilayah dan ramah lingkungan.	Misi ke-4 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat</i> dan Misi ke-5 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah</i> konsisten dengan Butir keempat kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031.

No	RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
(1)	(2)	(3)
5	Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian sumber daya alam, hayati, dan budaya Kabupaten Klaten.	Misi ke-3, RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal</i> ; dan ke-5 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah</i> konsisten dengan Butir ke-5 kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031.
6	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan.	Misi ke-8 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas pelayanan publik</i> , konsisten dengan Butir ke-6 kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031.

1.3.6 Keselarasan dan Kesenambungan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Tetangga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun saat RPJPD Kabupaten Klaten memasuki tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025. Serta memperhatikan huruf f ayat (2) Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa penelaahan RPJMD kabupaten/kota lainnya wajib diperhatikan keselarasannya, dan kesinambungan pembangunan antar wilayah.

Adapun keselarasan dan kesinambungan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 dengan RPJMD kabupaten/kota lainnya, ditunjukkan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Keselarasan dan Kesenambungan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 dengan RPJMD Kabupaten Lainnya

No	RPJMD SLEMAN	RPJMD GUNUNG KIDUL	RPJMD KLATEN	RPJMD BOYOLALI	RPJMD SUKOHARJO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI					
	Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sitem <i>e-government</i> menuju <i>smart regency</i> pada Tahun 2021	Gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera Tahun 2025	Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing	Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera	Terus Membangun Sukoharjo yang lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang professional
MISI					
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya	Boyolali Melanjutkan semangat Pro Investasi Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan
2	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Boyolali membangun untuk perubahan	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

No	RPJMD SLEMAN	RPJMD GUNUNG KIDUL	RPJMD KLATEN	RPJMD BOYOLALI	RPJMD SUKOHARJO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatkan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan	Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian	Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal	Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera	Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan menggerakkan Sektor Unggulan Daerah
4	Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan	Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah	Meningkatkan kapa- sitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat	Boyolali sehat, produktif, berdaya saing	Meningkatkan kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat
5	Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional	Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai	Meningkatkan kapasi- tas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah	Boyolali Lumbung Padi dan Pangan Nasional	Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang tenteram, aman dan dinamis
6		Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian	Boyolali, kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan	
7			Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Boyolali lebih maju dan berteknologi	

1.3.7 Keterkaitan RPJMD dengan RENSTRA – Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

1.3.8 Keterkaitan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemertintah Kabupaten Klaten yang memuat program prioritas dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan dimaksud merupakan pengganti atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan. Bagian ini menjelaskan gambaran umum agar substansi pada bab-bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Klaten yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/ misi kepala daerah dan arah kebijakan daerah yang mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan serta kerangka pendanaan yang mencakup proyeksi pendapatan dan belanja, analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah yang relevan dan juga isu-isu strategis yang berasal dari dunia internasional, nasional maupun regional yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016–2021 yang mana merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini diuraikan keterkaitan antara tujuan, sasaran dan strategi dalam rangka pencapaian sasaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan antara program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan secara singkat fungsi dan peran dokumen perubahan RPJMD yang ditetapkan.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Maksud adanya Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 dalam rangka menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintahan daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih masa bakti tahun 2016-2021 sehingga seluruh upaya yang dilakukan dapat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi serta tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Melakukan penajaman penjabaran visi dan misi daerah dalam agenda pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan atau sampai periode tahun 2021, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Merumuskan kembali gambaran keuangan daerah dengan aspek-aspek di dalamnya agar sinergis terkait dengan kerangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan atau sampai periode tahun 2021;
- c. Merumuskan kembali dan menajamkan program pembangunan prioritas daerah yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan atau sampai periode tahun 2021;
- d. Merumuskan kembali indikator capaian kinerja keberhasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta indikator capaian kinerja perangkat daerah jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan atau sampai periode tahun 2021.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografis

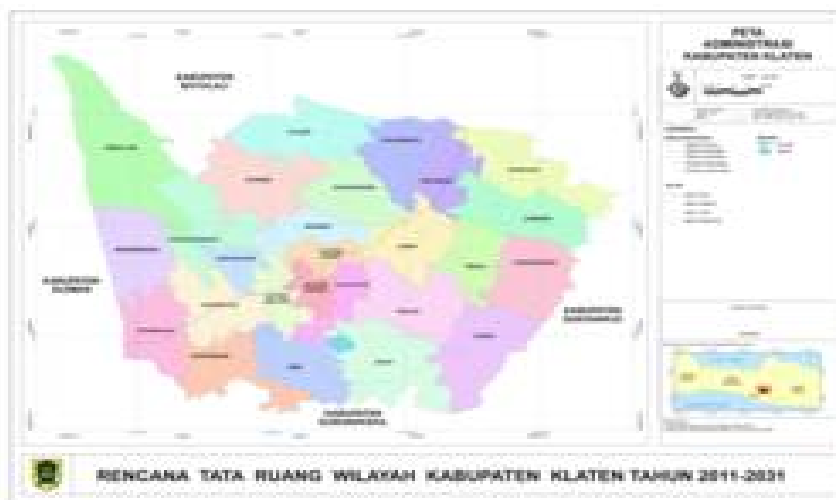
Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7^o32'19" Lintang Selatan sampai 7^o48'33" Lintang Selatan dan antara 110^o26'14" Bujur Timur sampai 110^o47'51" Bujur Timur.

2.1.2. Letak Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY); dan,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Gambar Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten
Sumber : RTRW Kabupaten Klaten 2009-2031

2.1.3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dan dengan ketinggian antara 76-1.600m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

- Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
- Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan-kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.
- Wilayah berbukit/ gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dirinci sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100m dpl meliputi sebagian dari kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas.
- Wilayah dengan ketinggian antara 100-200m dpl meliputi Kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 200-400m dpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum(di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000m dpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
- Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

2.1.4. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28-30⁰C, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20-25 km/jam. Pada tahun 2015 curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Kecamatan Ngawen yaitu 374 mm, sedangkan jumlah intensitas hujannya 13.308mm/tahun. Sedangkan curah hujan terendah tercatat di Stasiun Bayat.

2.1.5. Kondisi Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Klaten dapat diklasifikasikan berdasar jenis tanah, yaitu :

- Litosol, merupakan bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.
- Regosol Kelabu, sejenis bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten

Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

- Grumusol Kelabu Tua, bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat didaerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
- Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua, adalah sejenis bahan induk berupa batu apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.
- Regosol Coklat Kekelabuan, sejenis bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

2.1.6. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (duapuluh) Kecamatan. Dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

2.1.7. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2013-2017 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.220 Ha pada tahun 2013, menjadi 33.116 Ha pada tahun 2014, menjadi 33.111 Ha pada tahun 2015, menjadi 33.066 Ha pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 33.022 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2014 seluas 54,1504 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 40,4893 Ha dan Industri 13,6611 Ha. Sedangkan pada tahun 2015 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 40,8997 Ha dan Industri 13,6631 Ha. Kemudian tahun 2016 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45,392 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 33,058 Ha, Industri 8,910 Ha, Perusahaan 0,113 Ha dan Jasa 3,311 Ha. Untuk tahun 2017 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45,761 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 40,298 Ha, Industri 4,515 Ha dan Jasa 0,948 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian maupun agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah bahkan nasional. Selanjutnya untuk meningkatkan tata kelola penggunaan lahan, perlu ada pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai potensi wilayah yang diselaraskan dengan tata ruang wilayah.

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah disusun dengan mengacu pada Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, serta memperhatikan kondisi eksisting wilayah di Kabupaten Klaten diarahkan dengan memperhatikan pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis.

2.1.8.1. Pola Ruang

Pola Ruang Kabupaten Klaten yang direncanakan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya

A. Kawasan lindung terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung, mencakup luas kurang lebih 29 hektar berada di Kecamatan Bayat.
2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya (resapan air) meliputi wilayah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
3. Kawasan Perlindungan Setempat, merupakan sempa dan sungai mencakup luasan kurang lebih 3.963 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dataran sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar,
 - b. Dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 meter dari tepi sungai; dan
 - c. Dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 meter dari tepi sungai.
4. Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk ; yang dimaksud adalah kawasan sekitar danau atau waduk berupa daratan dengan jarak 50 meter sampai dengan 100 meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi, dengan luas kurang lebih 34 hektar berada di sekitar Rawa Jombor Kecamatan Bayat.
5. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, adalah kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 8.557 Ha atau 42% dari luas kawasan perkotaan yang sekitar 20.018 Ha.
6. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya yang terdiri atas:
 - a. Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 893 Ha yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemalang; dan
 - b. Kawasan cagar budaya meliputi:
 - 1) Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi

Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67Ha.

- 2) Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko dengan luas kurang lebih 1 Ha.
- 3) Kawasan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 Ha.

B. Kawasan budidaya terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi, yang terdiri atas:
 - a. Hutan produksi terbatas mencakup luasan kurang lebih 185 Ha berada di Kecamatan Bayat.
 - b. Hutan produksi tetap mencakup luasan kurang lebih 429 Ha meliputi kecamatan Bayat dan Kalikotes.
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat, yang mencakup luasan kurang lebih 1.514 Ha meliputi kecamatan Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung dan Wedi.
3. Kawasan peruntukan pertanian, mencakup luasan kurang lebih 28.949 Ha berada diseluruh kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kawasan peruntukan hortikultura mencakup luasan kurang lebih 2.422 Ha meliputi kecamatan: Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi dan Wonosari.
 - b. Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan kurang lebih 1.080 Ha meliputi komoditas:
 - 1) Kelapa deres meliputi kecamatan: Bayat, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo dan Wedi.
 - 2) Kapuk meliputi kecamatan: Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Kalikotes, Ngawen, Prambanan, dan Tulung.
 - 3) Kopi meliputi kecamatan: Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Tulung dan Manisrenggo.
 - 4) Tembakau rajangan dan asepan meliputi kecamatan: Bayat, Ceper, Kalikotes, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Prambanan, Karangnongko, Tulung, Manisrenggo dan Kemalang.
 - 5) Tembakau Virginia meliputi kecamatan: Pedan, dan Trucuk.
 - 6) Tembakau Vorsternland meliputi kecamatan: Gantiwarno, Jogonalan, Kebonarum, Klaten Selatan, Klaten Utara dan Wedi.

- 7) Cengkeh meliputi kecamatan: Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo dan Tulung.
 - 8) Tebu meliputi kecamatan: Bayat, Ceper, Pedan, Jatinom, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Klaten Utara dan Prambanan.
- c. Kawasan peruntukan peternakan diantaranya: penangkaran burung, sapi, kelinci, ayam, kambing dengan luasan kurang lebih 434 Ha meliputi:
- 1) Kecamatan Bayat;
 - 2) Kecamatan Cawas;
 - 3) Kecamatan Gantiwarno;
 - 4) Kecamatan Jatinom;
 - 5) Kecamatan Jogonalan;
 - 6) Kecamatan Karangdowo;
 - 7) Kecamatan Karangnongko;
 - 8) Kecamatan Kebonarum;
 - 9) Kecamatan Kemalang;
 - 10) Kecamatan Manisrenggo;
 - 11) Kecamatan Ngawen;
 - 12) Kecamatan Prambanan;
 - 13) Kecamatan Tulung; dan
 - 14) Kecamatan Wedi.
- d. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 32.451 Ha ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).
4. Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi :
- a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap, dengan area luasan mencakup seluruh perairan badan sungai di wilayah Kabupaten.
 - b. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya, yang meliputi:
 - 1) Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 170 Ha Kecamatan Bayat.
 - 2) Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 113 Hahektar meliputi kecamatan: Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan, Wonosari dan Tulung.
 - 3) Pengembangan budidaya perikanan berbasis sistem ke wilayahan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditasikan nila meliputi kecamatan: Karanganom, Polanharjo, dan Tulung.
5. Kawasan Peruntukan Pertambangan, adalah suatu kawasan yang

terdiri atas mineral serta minyak dan gas bumi, yang terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi:
 - 1) Pertambangan andesit berada di Kecamatan Karangdowo.
 - 2) Pertambangan batu gamping di Kecamatan Kalikotes.
 - 3) Pertambangan lempung alluvial meliputi kecamatan: Ceper, Gantiwarno, Jogonalan, Karanganom, Karangnongko dan Ngawen.
 - 4) Pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 69Ha berada di Kecamatan Kemalang
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten.
6. Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan industri besar meliputi:
 - 1) Kecamatan Ceper dengan luas kurang lebih 342 Ha.
 - 2) Kecamatan Pedan dengan luas kurang lebih 147 Ha; dan
 - 3) Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 127 Ha.
 - b. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi:
 - 1) Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 71Ha.
 - 2) Kecamatan Karanganom dengan luas kurang lebih 22Ha.
 - 3) Kecamatan Delanggu dengan luas kurang lebih 51 Ha, dan
 - 4) Kecamatan Jogonalan dengan luas kurang lebih 56 Ha.
 - c. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi:
 - 1) industri pengecoran logam berada di Kecamatan Ceper.
 - 2) industri pandai besi meliputi kecamatan: Delanggu, Jatinom, Karanganom, Manisrenggo dan Polanharjo.
 - 3) industri tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi kecamatan: Bayat, Cawas, Juwiring, Karangdowo dan Pedan.
 - 4) industri konveksi meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes, Klaten Selatan, Ngawen, Pedan, dan Wedi.
 - 5) industri genteng meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes, Karanganom, Klaten Selatan, Ngawen, dan Wonosari.
 - 6) industri meubel/ furniture meliputi kecamatan Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten Utara, Ngawen, Trucuk dan Wonosari.
 - 7) industri gerabah/keramik berada di wilayah kecamatan Bayat, Wedi dan Wonosari.
 - 8) industri pengolahan tembakau meliputi kecamatan Gantiwarno, Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk dan Wedi.
 - 9) industri soon berada di wilayah kecamatan Ngawen dan

Tulung.

- 10) industri makanan kecil meliputi kecamatan Jogonalan dan Polanharjo.
7. Kawasan Peruntukan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, mencakup;
 - 1) Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/ Gana, Candi Lor/ Candi rejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan.
 - 2) Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko.
 - 3) Museum Gula Jawa Tengah berada di Kecamatan Jogonalan.
 - 4) Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi Yaqowiyu berada di Kecamatan Jatinom.
 - 5) Makam Ki Ageng Pandanaran berada di Kecamatan Bayat.
 - 6) Makam Ki Ageng Ronggowarsito berada di Kecamatan Trucuk.
 - 7) Makam Ki Ageng Perwito berada di Kecamatan Wonosari; dan
 - 8) Keunikan local desa wisata meliputi desa :
 - a) Desa Wisata Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan;
 - b) Desa Wisata Melikan Kecamatan Wedi;
 - c) Desa Wisata Duwet Kecamatan Ngawen;
 - d) Desa Wisata Soran Kecamatan Ngawen;
 - e) Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo;
 - f) Desa Wisata Plawikan Kecamatan Jogonalan;
 - g) Desa Wisata Jimbung Kecamatan Kalikotes;
 - h) Desa Wisata Krakitan Kecamatan Bayat;
 - i) Desa Wisata Pokak Kecamatan Ceper; dan
 - j) Desa Wisata lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam mencakup lokasi :
 - 1) Deles Indah berada di Kecamatan Kemalang.
 - 2) Gunung Watu Prau dan Pegunungan Kidul berada di Kecamatan Bayat.
 - 3) Kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat.
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan mencakup lokasi :
 - 1) Rawa Jombor Permai berada di Kecamatan Bayat.
 - 2) Obyek Wisata Mata Air Cokro (OMAC), Pemandian

Lumban Tirto, Kecamatan Tulung dan Pemancingan Janti berada di Kecamatan Polanharjo.

- 3) Pemandian Umbul Ponggok berada di Kecamatan Polanharjo
- 4) Pemandian Jolotundo berada di Kecamatan Karangnom, dan
- 5) Pemandian Tirto mulyono dan Pemandian Tirto mulyani berada di Kecamatan Kebonarum.

8. Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi :

- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan mencakup luasan kurang lebih 10.480 Ha meliputi desa dan kelurahan pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten.
- b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan mencakup luasan kurang lebih 19.935 Ha meliputi desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten.
- c. Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) mandiri di kawasan perkotaan.

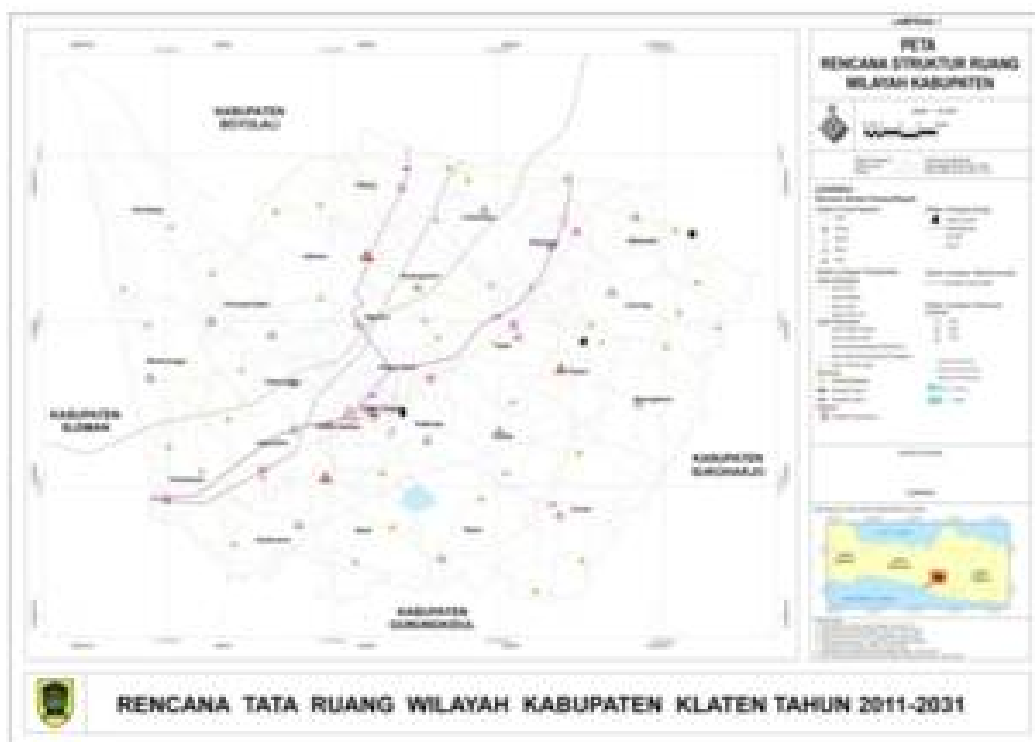
9. Kawasan Peruntukan Lainnya, yang meliputi:

- a. Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur) berada di Kecamatan Klaten Selatan dengan luas kurang lebih 29 Ha.
- b. Komando Distrik Militer (Kodim) Klaten berada di Kecamatan Klaten Tengah dengan luas kurang lebih 1 Ha.
- c. Kepolisian Resor (Polres) Klaten berada di Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 3 Ha.
- d. Lapangan tembak berada di Kecamatan Trucuk dengan luas kurang lebih 5 Ha.
- e. Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah Kabupaten; dan
- f. Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di wilayah Kabupaten.

2.1.8.2. Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri dari sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem pusat kegiatan ini perlu direncanakan untuk mengurangi disparitas perkembangan wilayah dimana kawasan/jalur tengah memiliki perkembangan yang sangat pesat, dan wilayah bagian utara dan selatan kurang berkembang. Sistem perkotaan terdiri dari PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) meliputi Kecamatan Klaten Selatan, Klaten Tengah, dan Klaten Utara; PKL (Pusat Kegiatan Lokal) meliputi Kecamatan Delanggu dan Kecamatan Prambanan, PKLP (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) meliputi Kecamatan Jatinom, Pedan, dan Wedi, PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi 18 kecamatan yang lain.

Sedangkan pada sistem perdesaan dikembangkan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Pengembangan Struktur Ruang dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klaten
Sumber : RTRW Kabupaten Klaten 2009-2031

2.1.8.3. Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten Klaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Klaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berdasarkan kawasan strategis provinsi meliputi:

a. kawasan perkotaan Surakarta–Boyolali – Sukoharjo –Karanganyar–Wonogiri–Sragen–Klaten (Subosukawonosraten); dan

b. kawasan koridor perbatasan Klaten–Sukoharjo–Wonosari (Kesukosari).

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

a. Kawasan Perkotaan Klaten, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama perdagangan, industri dan permukiman perkotaan;

b. Kawasan Perkotaan Prambanan, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama pariwisata, perdagangan, industri dan permukiman perkotaan;

c. Kawasan Perkotaan Delanggu, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama perdagangan, dan permukiman perkotaan;

d. Kawasan Perkotaan Wedi, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama perdagangan, industri kecil, dan permukiman perkotaan;

e. Kawasan Perkotaan Pedan, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama perdagangan, industri, dan permukiman perkotaan;

f. Kawasan Perkotaan Jatinom, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama perdagangan dan permukiman perkotaan;

g. Kawasan agropolitan yang tersebar di wilayah Kabupaten; dan

h. Kawasan minapolitan meliputi:

1. Kecamatan Polanharjo;
2. Kecamatan Tulung; dan
3. Kecamatan Karangnom.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya kawasan strategis nasional berupa Kawasan Candi Prambanan berada di Kecamatan Prambanan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berdasarkan kawasan strategis nasional berupa Kawasan Gunung Merapi dan Sekitarnya meliputi:

- a. Kecamatan Kemalang;
- b. Kecamatan Manisrenggo; dan
- c. Kecamatan Karangnongko.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari:

a. kawasan resapan air meliputi:

- 1) Kecamatan Kemalang;
- 2) Kecamatan Manisrenggo;
- 3) Kecamatan Karangnongko;
- 4) Kecamatan Jatinom; dan
- 5) Kecamatan Tulung.

b. kawasan DAS Bengawan Solo dan Sub DAS Sungai Dengkeng



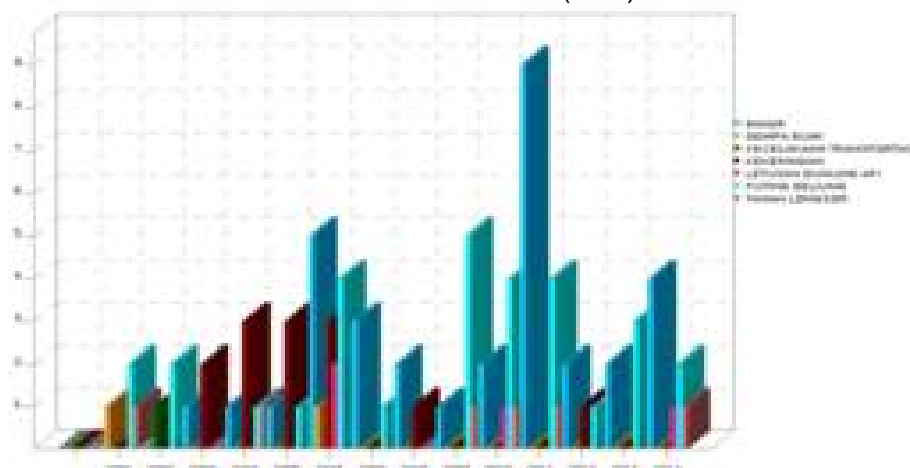
Gambar 2.3 Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Klaten
Sumber : RTRW Kabupaten Klaten 2009-2031

2.1.9. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam. Jenis dan kawasan rawan bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- A. Kawasan rawan bencana alam tanah longsor mencakup wilayah :
1. Kecamatan Bayat.
 2. Kecamatan Cawas.
 3. Kecamatan Gantiwarno.
 4. Kecamatan Kemalang.
 5. Kecamatan Manisrenggo.
 6. Kecamatan Prambanan, dan
 7. Kecamatan Wedi.
- B. Kawasan rawan bencana alam banjir mencakup wilayah :
1. Kecamatan Bayat.
 2. Kecamatan Cawas.
 3. Kecamatan Ceper.
 4. Kecamatan Gantiwarno.
 5. Kecamatan Juwiring.
 6. Kecamatan Karangdowo.
 7. Kecamatan Pedan.
 8. Kecamatan Prambanan.
 9. Kecamatan Trucuk.
 10. Kecamatan Wedi, dan
 11. Kecamatan Wonosari.
- C. Kawasan rawan bencana angin topan mencakup seluruh wilayah di Kabupaten.

Potensi ancaman bencana yang sudah ada di Kabupaten Klaten akan semakin membesar seiring meningkatnya kerentanan masyarakat. Berbagai persoalan mendasar yang dihadapi Kabupaten Klaten seperti perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang mendorong masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman bencana. Berikut adalah rekaman kejadian bencana di Kabupaten Klaten yang terekam di dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dalam 15 tahun terakhir:



Gambar 2.4 Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2014

Sumber: <http://dibi.bnppb.go.id>

Dari Gambar 2.4 bencana banjir adalah kejadian yang paling sering terjadi dalam lima belas tahun terakhir di Kabupaten Klaten (33 kali), kemudian

cuaca ekstrim (30 kali), kekeringan (13 kali), tanah longsor (6 kali), erupsi gunung berapi (4 kali) dan gempa bumi (2 kali).

Kejadian bencana tersebut berdampak kepada penduduk seperti menimbulkan korban jiwa, luka-luka dan mengungsi. Selain itu, bencana juga menyebabkan kerusakan bangunan (rumah, fasilitas pendidikan dan kesehatan) serta lahan pertanian. Gambar 2.4 di atas juga menunjukkan bahwa:

1. Kejadian banjir memiliki kecenderungan meningkat, dengan puncaknya pada Tahun 2011.
2. Cuaca ekstrim (Puting Beliung) cenderung meningkat, dengan puncaknya pada Tahun 2009.
3. Kekeringan dan tanah longsor cenderung menurun.
4. Gempa bumi dan gunung api cenderung tetap.

2.1.10. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2014 sebanyak 1.261.606 jiwa, naik menjadi sebanyak 1.308.712 jiwa pada tahun 2017, dengan rata-rata laju pertumbuhan 1,22% dan kepadatan penduduk 19.963 jiwa/km². Gambaran jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.1

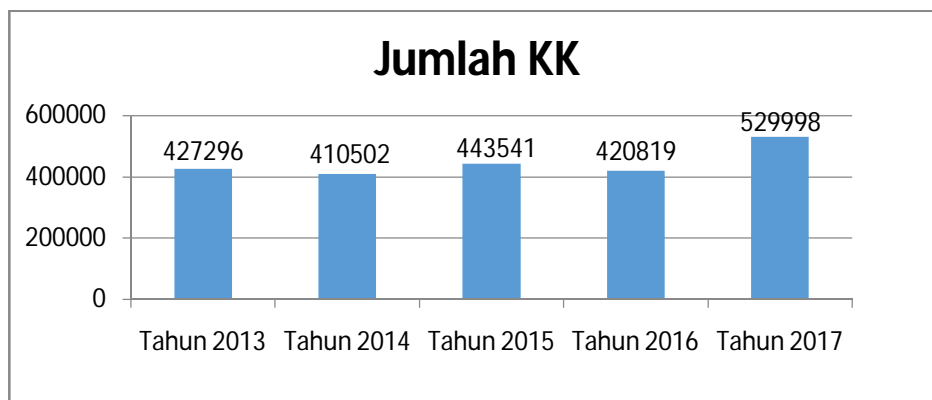
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 Dan Laju Pertumbuhan di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Tahun					Pertumbuhan Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		2013	2014	2015	2016	2017*)			
1	Prambanan	58,448	58,712	59,790	59,818	52,112	-7,706	-12,88%	2,133
2	Gantiwarno	49,498	49,631	50,004	50,036	41,060	-8,976	-17,94%	1,601
3	Wedi	64,400	64,290	64,397	64,447	54,068	-10,379	-16,10%	2,218
4	Bayat	74,425	74,836	75,891	75,912	64,680	-11,232	-14,80%	1,640
5	Cawas	69,967	70,071	70,067	70,117	60,047	-10,070	-14,36%	1,742
6	Trucuk	87,397	87,526	87,721	87,780	79,409	-8,371	-9,54%	2,349
7	Kebonarum	23,890	23,861	23,916	23,919	20,532	-3,387	-14,16%	2,123
8	Jogonalan	68,250	68,260	69,670	69,676	59,808	-9,868	-14,16%	2,240
9	Manisrenggo	47,902	48,084	48,834	48,858	43,245	-5,613	-11,49%	1,604
10	Karangnongko	41,888	42,082	42,585	42,615	37,371	-5,244	12,31%	1,398
11	Ceper	73,337	73,735	75,496	75,524	66,196	-9,328	-12,35%	2,707
12	Pedan	54,408	54,507	55,184	55,210	48,592	-6,618	-11,99%	2,535
13	Karangdowo	53,061	53,061	53,316	53,340	46,144	-7,196	-13,49%	1,579
14	Juwiring	68,172	68,271	68,677	68,692	60,953	-7,739	-11,27%	2,046
15	Wonosari	70,221	70,626	71,480	71,505	64,494	-7,011	-9,80%	2,071
16	Delanggu	49,736	49,739	49,966	49,982	43,917	-6,065	-12,13%	2,338
17	Polanharjo	48,438	48,610	48,585	48,629	42,886	-5,743	-11,81%	1,799
18	Karanganom	51,879	52,034	52,551	52,610	47,102	-5,508	-10,47%	1,958
19	Tulung	61,865	62,049	62,920	62,938	55,386	-7,552	-12,00%	1,731
20	Jatinom	66,301	66,804	68,594	68,620	61,475	-7,145	-10,41%	1,730
21	Kemalang	41,625	41,905	42,990	43,015	39,467	-3,548	-8,25%	764
22	Ngawen	51,168	51,388	51,630	51,640	46,697	-4,943	-9,57%	2,752
23	Kalikotes	40,724	41,052	41,461	41,553	37,877	-3,676	-8,85%	2,918
24	Klaten Utara	50,480	50,804	51,773	51,797	48,315	-3,482	-6,72%	4,641
25	Klaten Tengah	47,033	47,245	47,712	47,731	42,361	-5,370	-11,25%	4,749
26	Klaten Selatan	50,010	50,070	50,400	50,462	44,518	-5,944	-11,78%	3,085
JUMLAH		1.464.523	1.469.253	1.480.271	1.486.426	1.308.712	-177.714	-11,96%	-11,96%

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

Berdasar Tabel 2.1 Pertumbuhan penduduk di semua Kecamatan mengalami penurunan atau minus. Hal ini berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa diketemukan adanya data ganda dan data tidak normal, sehingga setelah dibersihkan/validasi administrasi kependudukan oleh pusat maka jumlah penduduk Kabupaten Klaten mengalami kenaikan dari semula 1.300.706 jiwa pada tahun 2016 menjadi 1.308.712 jiwa pada tahun 2017.

Ada peningkatan jumlah KK yang semula sejumlah 420.819 KK pada tahun 2016 menjadi 529.998 KK pada tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya penertiban administrasi kependudukan (setiap penduduk yang sudah menikah wajib memiliki KK tersendiri). Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.5



Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kab.Klaten tahun 2013-2017
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

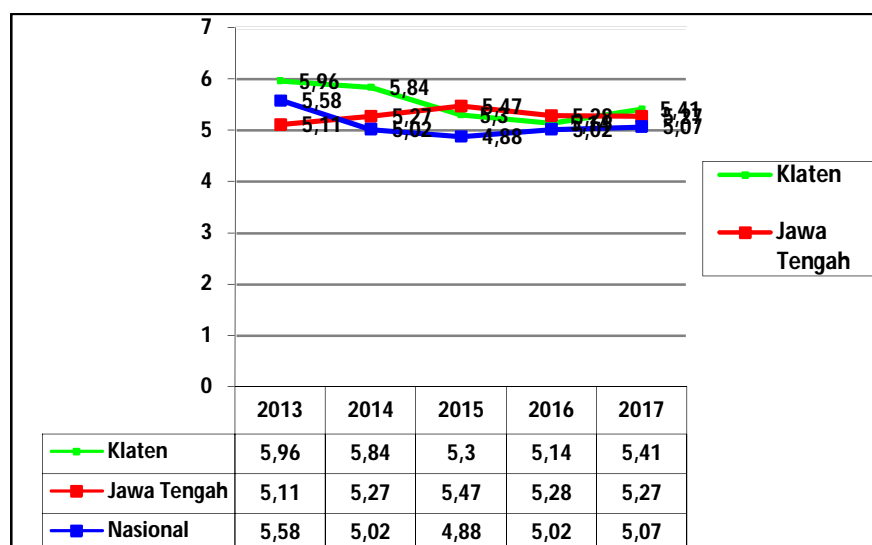
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten dapat dilihat pada aspek pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga serta agama.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2013 tumbuh 5,96%, dan tahun 2014 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 5,84%, pada tahun 2015 dan 2016 juga mengalami penurunan (atau hanya tumbuh 5,30% dan 5,14%) sebagai akibat pengaruh perekonomian nasional, sedangkan tahun 2017 tumbuh sebesar 5,41%. Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Gambar 2.6



Gambar 2.6 Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kab. Klaten,Provinsi JawaTengah dan Nasional selama tahun 2013-2017
Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten, 2018

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2013-2017 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.583.620,33	4,56	2.606.035,81	0,87	2.732.275,47	4,84	2.814.072,17	2,99	2.907,217.96	3.31
2	Pertambangan dan Penggalian	557.451,35	6,45	597.551,15	7,19	617.439,64	3,33	635.253,28	2,89	666,761.84	4.96
3	Industri Pengolahan	6.506.551,46	8,60	7.093.268,56	9,02	7.540.801,78	6,31	8.001.139,74	6,10	8,601,225.22	7.50
4	Pengadaan Listrik dan gas	37.301,57	7,98	38.526,20	3,28	39.160,62	1,65	41.588,12	6,20	43,576.03	4.78
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.062,16	3,46	11.527,87	4,21	11.793,17	2,30	12.047,34	2,16	12,412.37	3.03
6	Konstruksi	1.254.970,42	4,65	1.294.690,29	3,17	1.356.317,55	4,76	1.435.985,49	5,87	1,502,184.42	4.61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.000.471,06	2,24	4.094.285,55	2,35	4.209.074,39	2,80	4.358.461,18	3,55	4,477,883.02	2.74
8	Transportasi dan Pergudangan	469.346,14	10,63	515.457,41	9,82	544.592,24	5,65	566.772,32	4,07	609,506.95	7.54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	755.159,55	2,91	792.087,87	4,89	832.820,90	5,14	883.280,17	6,06	925,235.98	4.75
10	Informasi dan Komunikasi	749.129,31	3,72	794.978,71	6,12	844.708,79	6,26	908.151,37	7,51	961,823.12	5.91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	675.611,17	5,94	718.614,58	6,37	767.642,41	6,82	823.297,85	7,25	877,635.51	6.60
12	Real Estate	290.530,05	6,80	316.062,61	8,79	339.893,73	7,54	360.869,45	6,17	387,285.09	7.32
13	Jasa Perusahaan	60.535,96	18,84	65.626,24	8,41	70.961,66	8,13	77.484,45	9,19	86,116.22	11.14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	543.501,77	2,39	546.822,57	0,61	574.874,57	5,13	591.863,52	2,96	608,258.14	2.77
15	Jasa Pendidikan	1.193.988,37	10,03	1.333.544,38	11,69	1.438.627,68	7,88	1.519.264,74	5,61	1,652,960.04	8.80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	200.873,15	9,90	224.011,39	11,52	241.260,27	7,70	260.076,42	7,80	284,081.47	9.23
17	Jasa Lainnya	351.325,20	10,03	381.431,17	8,57	396.731,26	4,01	428.323,40	7,96	46,104,730.78	7.64
Produk Domestik Regional Bruto		20.241.429,01	5,96	21.424.522,36	5,84	22.558.976,15	5,30	23.717.931,02	5,14	25.001.071.09	5.41

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2017

Dari Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.20.241.429,01 juta pada tahun 2013, meningkat menjadi sebesar Rp.25.001.071,09 juta pada tahun 2017.

Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang mengalami penurunan, seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor teknis lapangan yaitu adanya serangan hama wereng batang coklat dan tikus

termasuk terkena bencana banjir, sehingga berpengaruh terhadap produksi maupun produktifitasnya.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 di Kab. Klaten Tahun 2013-2017 (dlm Juta Rupiah)

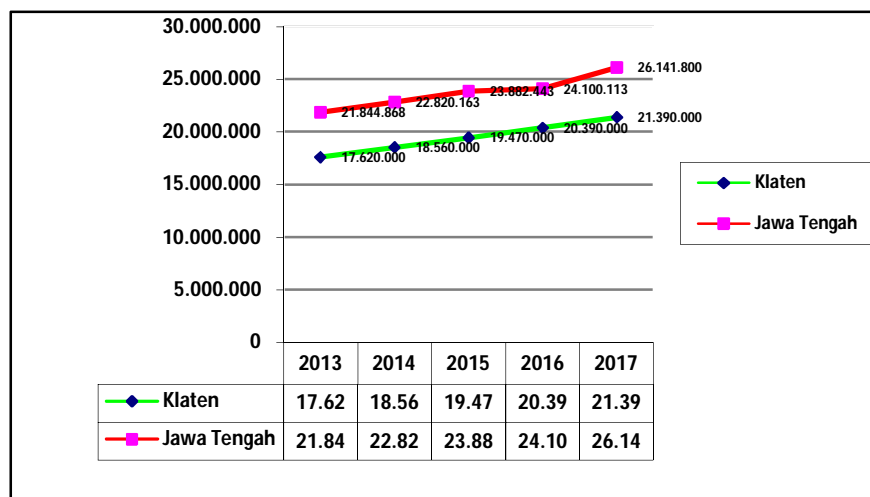
No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.092.353,37	13,24	3.210.623,71	12,3	3.606.172,55	12,32	3,807,648.99	5.12	4,105,407.14	7.82
2	Pertambangan dan Penggalian	662.226,32	2,84	779.207,55	2,98	804.142,19	3,20	1,013,913.84	6.13	1,157,078.47	14.12
3	Industri Pengolahan	7.656.350,45	32,79	9.062.902,26	34,71	12.210.448,21	34,73	11,342,482.65	11.44	12,819,273.89	13.02
4	Pengadaan Listrik dan gas	34.573,28	0,15	37.059,00	0,14	37.122,00	0,17	45,832.98	15.56	49,517.95	8.04
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.475,50	0,05	14.555,27	0,06	14.566,91	0,08	13,246.78	4.32	13,931.64	5.17
6	Konstruksi	1.417.692,47	6,07	1.604.897,56	6,15	1.703.759,25	6,16	1,914,709.83	7.56	2,106,755.23	10.03
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.398.186,49	18,84	4.624.131,37	17,17	5.419.481,97	17,20	5,290,031.30	6.92	5,624,890.28	6.33
8	Transportasi dan Pergudangan	482.687,50	2,07	553.015,86	2,12	564.961,00	2,16	645,983.06	5.03	714,844.85	10.66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	802.421,78	3,44	878.387,98	3,36	908.253,17	3,40	1,091,004.92	11.92	1,188,213.46	8.91
10	Informasi dan Komunikasi	795.566,86	3,41	836.098,10	3,2	863.271,29	3,25	948,513.65	7.72	1,005,139.91	5.97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	809.724,85	3,47	872.413,56	3,34	901.639,41	3,35	1,084,247.12	9.99	1,199,394.16	10.62
12	Real Estate	298.881,50	1,28	343.172,57	1,31	347.736,77	1,33	409,138.03	7.36	451,729.30	10.41
13	Jasa Perusahaan	71.050,05	0,30	79.657,41	0,31	79.912,31	0,32	102,385.38	13.18	119,043.48	16.27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	622.229,09	2,66	664.379,58	2,54	681.254,82	2,54	790,819.46	8.19	850,130.92	7.50
15	Jasa Pendidikan	1.548.658,63	6,63	1.805.978,48	6,92	1.931.132,79	6,93	2,159,132.68	8.82	2,447,160.98	13.34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	262.302,13	1,12	303.146,41	1,16	306.662,91	1,16	371,819.69	9.57	424,134.72	14.07
17	Jasa Lainnya	381.500,21	1,63	441.155,71	1,69	448.655,36	1,70	527,780.71	12.13	592,961.63	12.35
Produk Domestik Regional Bruto		23.348.880,48	100	26.110.782,38	100	30.829.172,92	100	31,558,691.06	8.87	34.869.608,02	10.27

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2017

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.23.348.880,48 juta pada tahun 2013, meningkat menjadi sebesar Rp.34.869.608,02 juta pada tahun 2017.

B. PDRB Perkapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Adapun perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja yang cenderung meningkat. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2013 sebesar Rp.17,62 juta, pada tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp.18,56 juta, pada tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp.19,47 juta, dan pada tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp.20,39 juta, sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp.21,39 juta. Gambaran selengkapnya Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.7.

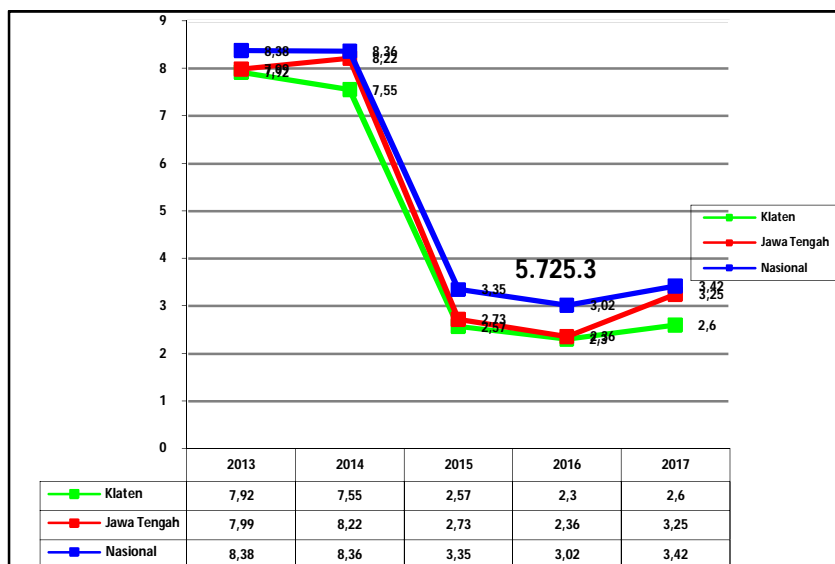


Gambar 2.7 Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2017 & BPS Kabupaten Klaten Tahun 2017 (Ket: Data Tahun 2016 dan 2017 sangat sementara)

C. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama 5 tahun dari tahun 2013-2017 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2013 sebesar 7,92%, atau lebih tinggi dibanding tahun 2017 sebesar 2,60%. Fluktuasi Inflasi ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti adanya fluktuasi harga komoditas pangan maupun harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap laju inflasi. Perbandingan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.8



Gambar 2.8 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2017.

Berdasarkan Gambar 2.8 di atas, laju inflasi selama tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya, dan juga di bawah inflasi nasional maupun provinsi. Inflasi pada tahun 2013 sebesar 7,92% dapat disampaikan cukup stabil. Untuk inflasi pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 7,55% dan dilihat dari komponen pembentuknya, kenaikan inflasi pada tahun 2014 disebabkan oleh perubahan musim yang berpengaruh pada

kenaikan harga barang terutama bahan pangan strategis seperti beras, jagung dan bawang, maupun cabe.

Selanjutnya untuk inflansi pada tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,57% untuk tahun 2015 dan sebesar 2,30% untuk tahun 2016. Penurunan ini utamanya dipicu oleh stabilnya harga pangan beberapa komoditas utama dan naiknya daya beli masyarakat, meskipun ada sedikit kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar 41-42 Listrik (TDL).

Mengingat BBM dan TDL sebagai faktor produksi utama, maka secara langsung menyebabkan perubahan harga barang-barang strategis yang sangat mempengaruhi laju inflansi. Sedangkan untuk tahun 2017 inflansi di Kabupaten Klaten sebesar 2,60% disebabkan oleh masih terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berjalannya fungsi Tim Pengendali Inflansi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

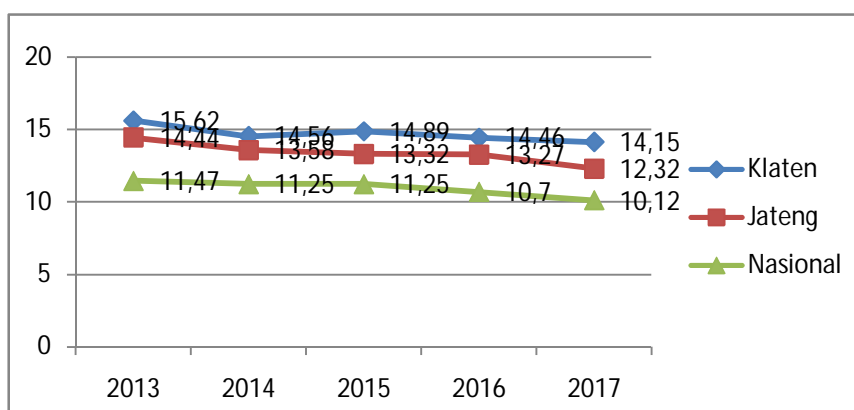
D. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat disajikan dengan 2 pendekatan pendataan, yaitu persentase penduduk miskin, dan Jumlah rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kriteria yang berbeda.

Tabel 2.4 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk Disdukcapil (Jiwa)	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Prosentase Penduduk Miskin
1	2013	1.246.944	1.149.002	179.500	15,62
2	2014	1.261.606	1.154.028	168.180	14,56
3	2015	1.292.013	1.158.295	172.300	14,89
4	2016	1.300.706	1.163.218	168.010	14,46
5	2017	1.308.712	1.166.100	164.990	14,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018



Gambar 2.9 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

1. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 mengalami penurunan namun penurunannya masih relatif kecil. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin sebesar 15,62% turun menjadi

14,56% pada Tahun 2014, namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,89%, pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi sebesar 14,46% dan pada tahun 2017 kembali menurun sebesar 14,15%.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, maupun nasional sesuai Gambar 2.9 dan Kabupaten Klaten masih masuk ke dalam 15 Kabupaten miskin di Provinsi Jawa Tengah. Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten masih relatif tinggi, hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pendapatan masyarakat miskin dan non miskin, dan *base data* awal kemiskinan yang masih bias. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di antaranya dengan memberikan pembekalan ketrampilan dan akses modal usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, serta melaksanakan Pemuktakhiran *base data* kemiskinan.

2. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Kondisi rumah tangga miskin dihitung berdasarkan variabel jenis dan jumlah permasalahan yang dihadapi rumah tangga atau kepala rumah tangga. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan variabel tersebut, kondisi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Klaten tahun 2015 berdasarkan pada data hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 dengan menggunakan data status kesejahteraan 40% terendah secara nasional, maka dapat digambarkan hasil pemutakhiran data Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Klaten dengan jumlah KK sebanyak 168.543 (atau 531.673 jiwa), dan gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5 Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Klaten

NAMA KECAMATAN	Jumlah KK	Jumlah Individu
Jumlah Total	168.543	531.673
BAYAT	11.047	36200
CAWAS	9.838	29307
CEPER	7.899	25557
DELANGGU	4.846	14516
GANTIWARNO	7.072	21351
JATINOM	8.876	27467
JOGONALAN	7.127	2.2790
JUWIRING	8.095	2.6243
KALIKOTES	3.431	1.1473
KARANGANOM	6.045	18.956
KARANGDOWO	6.808	21.229
KARANGNONGKO	4.772	14.917
KEBONARUM	2.331	6.695
KEMALANG	6.494	21.278
KLATEN SELATAN	3.077	9.628
KLATEN TENGAH	2.717	8.701
KLATEN UTARA	2.908	9.703
MANISRENGGO	6.269	20.016
NGAWEN	5.551	17.507
PEDAN	6.124	20.948
POLANHARJO	4.548	13.295
PRAMBANAN	6.681	20.814

NAMA KECAMATAN	Jumlah KK	Jumlah Individu
Jumlah Total	168.543	531.673
TRUCUK	12.395	39.694
TULUNG	7.296	22.211
WEDI	8.086	24.957
WONOSARI	8.210	26.220

Sumber : Pemutakhiran Basis Data Terpadu TNP2K, 2016

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Bidang Tenaga Kerja

Kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai korelasi positif yang cukup erat dengan suksesnya program-program pembangunan. Dalam hal ini gambaran profil SDM merupakan suatu informasi untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi pada tahap sebelumnya, dan merencanakan tahapan pembangunan berikutnya. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Secara teori, penduduk dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) penduduk usia kerja, dan (ii) penduduk bukan usia kerja, seperti pada Gambar 2.10



Gambar 2.10 Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Gambaran indikator kependudukan dan ketenagakerjaan selama Tahun 2013-2017, dapat dilihat seperti pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Beberapa Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017

INDIKATOR	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk Usia Kerja	orang	993.961	975.789	963.189	894.546	894.536
Kegiatan utama penduduk usia kerja						
Bekerja	%	38,87	60,15	52,44	42,84	54,56
Mencari pekerjaan	%	33,8	12,98	15,11	26,03	18,77
Sekolah	%	11,44	12,79	14,19	14,25	16,34
Mengurus rumah tangga	%	24,64	22,48	26,91	26,42	9,08
Lainnya	%	1,25	1,6	1,35	1,46	1,25

INDIKATOR	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,03	72,22	73,1	70,46	70,46
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,34	4,75	2,51	3,94	4,35
Lapangan Pekerjaan Penduduk Yang Bekerja						
Pertanian	%	16,89	17,26	16,79	16,68	7,43
Penggalian	%	1,32	1,3	1,31	1,38	-
Industri	%	21,16	20,72	20,35	20,75	0,15
Listrik, gas & Air Bersih	%	0,81	0,84	0,83	0,91	0,01
Konstruksi	%	7,37	7,29	8,09	7,37	0,05
Perdagangan	%	29,77	29,9	30,11	30,4	10,15
Angkutan	%	3,1	3,15	3,12	3,16	0,52
Lembaga Keuangan	%	4,08	4,1	4,08	4,27	0,00
Jasa dan Lainnya	%	15,5	15,44	15,32	15,08	81,69
Status pekerjaan penduduk yang bekerja						
Berusaha sendiri	%	24,97	22,39	21,29	23,29	55,57
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	%	13,15	17,03	19,2	19,2	13,73
Berusaha dibantu buruh tetap	%	3,42	4,25	2,5	2,5	24,54
Buruh/karyawan & pekerjaan bebas	%	48,08	44,14	45,82	42,82	6,05
Pekerja keluarga	%	10,38	12,19	11,19	12,19	0,10

**) data diolah berdasarkan Database Pelayanan SIAK Dinas Dukcapil, 2018*

Kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2013-2017 selalu meningkat karena disesuaikan dengan meningkatnya persentase Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Data KHL pada Tahun 2016-2017 kosong karena sudah tidak dilakukan survey lagi. Persentase UMK terhadap KHL dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7 Persentase UMK terhadap KHL di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017

Tahun	Rata-Rata UMK (Rp)	KHL (Rp)	Persentase UMK Terhadap KHL
2013	871.500	1.015.262	85,84
2014	1.170.000	1.169.976	100,00
2015	1.400.000	1.365.550	102,52
2016	1.528.500,00	0	100,00
2017	1.661.632,35	0	100,00

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten, 2018

Tenaga kerja di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 sebagian besar bekerja di sektor primer (pertanian), namun telah terjadi pergeseran ke sektor sekunder (perdagangan dan industri) serta sektor tersier (bidang jasa dan lainnya). Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017

Tahun	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	3.097	26.800	9.721	1.085	6.794
2014	1.418	19.507	9.221	3.387	7.321
2015	32.773	1.488	17.795	2.504	49.714
2016	32.093	1.348	16.957	6.351	42.762
2017	25.972	699	13.635	287.472	880.934

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, 2017

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam kurun waktu tahun 2013-2015 menunjukkan perkembangan yang meningkat, prosentase tertinggi

terlihat pada tabel 2.9 tahun 2015 sebesar 96,42, namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang optimal.

Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Periode 2013-2017

No	Indikator	Periode							
		2013		2014		2015		2016	2017
		L	P	L	P	L	P		
1	Usia Harapan Hidup	70,18	74,03	74,51	78,46	74,52	78,49	76,59	76,62
2	Harapan Lama Sekolah	96,29	86,26	12,58	12,96	12,59	13,06	12,85	12,97
3	Rata-rata Lama Sekolah	9,13	7,66	8,7	7,2	8,8	7,56	8,22	8,23
4	Pengeluaran per kapita	63,08	36,92	12.117	10.894	12.214	10.908	11.227	11.369
5	IPG	95,16		95,90		95,90		96,42	73,97

Sumber : Dinsos P3AKB, 2018

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam kurun waktu tahun 2013-2015 menunjukkan perkembangan yang meningkat, prosentase tertinggi terlihat pada tabel 2.10 pada Tahun 2015 sebesar 96,42, namun relatif rendah dibandingkan Propinsi Jawa Tengah (IDG Tahun 2015 sebesar 74,80) dan Nasional (IDG tahun 2015 sebesar 70,83). Peningkatan ini disebabkan Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan peningkatan anggaran program untuk PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Tabel 2.10 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2013-2017

No.	Indikator	Periode									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	70,18		74,51		74,52		94	6	94	6
2	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	96,29		12,58		12,59		50,3	49,7		
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	9,13		8,7		8,8					
4	IDG	95,16		95,90		96,42					

Sumber : Dinsos P3AKB, 2018

2. Peran Perempuan dalam Pemerintahan

Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Klaten seperti terlihat pada tabel 2.11 pada Tahun 2017 sebesar 6% relatif rendah dibandingkan Propinsi Jawa Tengah (sebesar 24,24 %) dan Nasional (sebesar 17,32). Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kesadaran dan kemampuan perempuan untuk berdaya masih rendah dan masih kurangnya daya saing perempuan, Daya Saing yang kompetitif. Akan tetapi Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Klaten didukung dengan adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi PPRG dengan fokus Anggaran berbasis PPRG.

Tabel 2.11 Data Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif Dan Legislatif di Kabupaten Klaten

No.	Jenis Jabatan	Periode				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Eksekutif (%)	(7.441/22.379) = 33,25	(7.159/24.195) = 29,6	(7.417/26.518) = 27,97	(7.072/27.344) = 25,86	n/a
2	Legislatif (%)	(9/50) = 18,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka (2018).

3. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat pada Tabel 2.12

Tabel 2.12 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2013-2017

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Traficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2017	8	5	5	13	1	11	-	5	-	-	48
2016	11	-	2	-	-	28	-	-	-	-	41
2015	-	-	-	2	-	15	-	-	-	-	17
2014	6	-	-	-	-	30	-	-	-	-	36
2013	-	39	1	2	-	8	1	16	-	-	66

Sumber : P2TP2A Kabupaten Klaten, 2016

Kondisi kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dipengaruhi dengan belum optimalnya sarana dan prasarana kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak, masih lemahnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah, dan belum tersedianya data berbasis gender dan anak. Namun hal tersebut dapat didorong dengan adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota atau Kabupaten Layak Anak.

Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik perlu didukung dengan adanya regulasi/kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan PUG dan PPRG dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah melalui koordinasi lintas sektor serta penambahan anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender. Berikut tabel program dan kegiatan serta anggaran yang responsif gender dan anak.

Tabel 2.13 Program dan Kegiatan Penunjang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017

No.	Program & Kegiatan	Pagu Anggaran
	TAHUN 2013	TH 2013
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000
	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	100.000.000

No.	Program & Kegiatan	Pagu Anggaran
2.	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	82.000.000
	Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)	30.000.000
	Pertemuan Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu	12.000.000
	Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan	4.000.000
	Fasilitasi Forum Anak	8.000.000
	Pendidikan Ketrampilan Perempuan	8.000.000
	Fasilitasi Replikasi Desa Layak Anak	5.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan	15.000.000
	Total	182.000.000
	TAHUN 2014	TH 2014
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000
	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	100.000.000
2.	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	87.000.000
	Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)	30.000.000
	Pertemuan Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu	12.000.000
	Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan	4.000.000
	Fasilitasi Forum Anak	13.000.000
	Pendidikan Ketrampilan Perempuan	8.000.000
	Fasilitasi Replikasi Desa Layak Anak	5.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan	15.000.000
	Total	187.000.000
	TAHUN 2015	TH 2015
1.	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	65.000.000
	Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)	26.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan	27.000.000
	Pendidikan Ketrampilan Perempuan	12.000.000
2.	Program Perlindungan Anak	122.000.000
	Sosialisasi Pembinaan tentang Perlindungan Anak	26.000.000
	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	32.000.000
	Pendampingan 9 Desa Layak Anak (DLA)	27.000.000
	Rintisan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Kec	15.000.000
	Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan	4.000.000
	Fasilitasi Forum Anak	13.000.000
	Replikasi Desa Kelurahan Layak Anak (DLA) Kelurahan Tonggalan Kec. Klaten tengah	5.000.000
	Total	187.000.000
	TAHUN 2016	2016
1.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	70.000.000
	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	50.000.000
	Advokasi Keadilan Restoratif	20.000.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	66.500.000
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)	12.000.000
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	4.500.000
	Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG	50.000.000
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.000.000
	Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking	4.000.000
4.	Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	125.500.000
	Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan forum anak pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)	4.000.000
	Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi	15.500.000
	Fasilitasi Peningkatan Peran serta Organisasi Wanita	6.000.000
	Total	266.000.000

	TAHUN 2017	TH 2017
1.	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	131.500.000
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	26.500.000
	Advokasi Keadilan Restoratif	30.000.000
	Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	75.000.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	60.000.000
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)	10.000.000
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	5.000.000
	Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG	35.000.000
	Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak	10.000.000
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	114.000.000
	Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking	4.000.000
	Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak	10.000.000
	Penyusunan Kebijakan tentang Perlindungan Anak	100.000.000
4.	Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	169.500.000
	Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan forum anak	4.000.000
	pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)	10.000.000
	Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi	55.500.000
	Fasilitasi Peningkatan Peran serta Organisasi Wanita	100.000.000
	Total	475.000.000

C. Bidang Pangan

Kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini ada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun demikian masih perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai kedaulatan pangan melalui pengembangan pola pertanian terpadu dengan berbasis pada teknologi. Hal tersebut mengingat potensi pertanian di Kabupaten Klaten cukup besar.

Dengan demikian kedaulatan pangan menjadi isu penting dalam pembangunan Kabupaten Klaten ke depan, melalui kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode dan ramah lingkungan, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan bagi petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan.

Kedaulatan pangan di Kabupaten Klaten diwujudkan dalam 4 (empat) pilar, yaitu :

- a. Regulasi terkait lahan pertanian berkelanjutan
- b. Pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi dan kearifan lokal;
- c. Menciptakan lumbung-lumbung pangan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pangan dan harga di Kabupaten Klaten.; dan
- d. Mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 dengan produksi padi sawah 380.268 ton per tahun (Gabah Kering Panen), produksi

jagung 90.343 ton (tongkol), dan produksi kedelai sebanyak 4.440 ton (Kedelai Kering Panen). Adapun jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun 2016 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2016

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus/ Minus (Ton)	Konsumsi per kapita (kg/kap/th)	Faktor Konversi (100-angka susut)
1	Padi sawah	426,028	244,539	108,439	136,100	83.93	*)
2	Jagung	72,583	64,599	4,238	60,361	3.28	89.00%
3	Kedelai	2,759	2,612	29,729	-27,118	23.01	94.66%
4	Kacang tanah	1,784	1,543	711	832	0.55	86.49%
5	Kacang Hijau	260	242	271	-30	0.21	93.00%
6	Ubi Kayu	32,224	30,893	11,047	19,846	8.55	95.87%
7	Ubi Jalar	356	313	2,481	-2,167	1.92	88.00%
8	Daging	1,099	1,088,342	16,162	-15,073,658	1.97	99,02%
9	Gula	5,041,545	4,789,468	15,692	-10,902,532	10.68	95,00%
10	Telur	9,167,179	8,979,252	5,877	3,102,252	4.0	97,95%
11	Susu	3,198,765	2,696,599	5,231	-2,534,401	3.56	84,31%
12	Ikan	22,550,802	21,874,278	13,664	8,210,278	10.96	97,00%

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2017

Dari Tabel 2.14 di atas diketahui bahwa untuk data pada tahun 2016 ketersediaan beras mencapai 244.539 ton yang berasal dari produksi padi sawah 380.268 ton per tahun (Gabah Kering Panen), sedangkan untuk kebutuhan beras 108.439 ton sehingga masih surplus beras 136.100 ton. Ketersediaan beras dan surplus beras pada tahun 2016 ini.

Tabel 2.15 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2013 - 2017

Kelompok Pangan	2013	2014	2015	2016	2017
1. Padi-padian	16.5	16.7	18.8	20.2	20.8
2. Umbi-umbian	2.5	2.5	2.1	1.2	1.4
3. Pangan Hewani	24.0	24.0	24.0	24	24
4. Minyak dan Lemak	5.0	5.0	4.3	3.8	3,7
5. Buah/Biji Berminyak	1.0	1.0	0.3	0.5	0.7
6. Kacang-kacangan	10.0	10.0	10.0	10	10.0
7. Gula	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9
8. Sayur dan Buah	30.0	30.0	30.0	30	30.0
9. Lain-lain	0.0	0.0	0.0	0	0
Total	91.5	91.7	91.4	91.6	92,5

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan Kabupaten Klaten, 2017

Dari Tabel 2.15 tersebut di atas terlihat bahwa Skor Pola Harapan Pangan terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun belum signifikan. Pada tahun 2013 sebesar 91,5 dan tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 92,5. Masih rendahnya tingkat pendapatan dikarenakan dengan ketersediaan lapangan kerja yang masih terbatas, sedangkan jumlah angkatan kerja meningkat.

Tabel 2.16 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sampai dengan tahun 2017

No	Nama Gapoktan	Desa	Kecamatan
1	Krida Tani	Bowan	Delanggu
2	Agawe Santoso	Jimbung	Kalikotes
3	Karya Bumi	Jurang Jero	Karanganom
4	Tani Bahagia	Sribit	Delanggu
5	Konco Tani	Kemiri	Tulung
6	Ngudi Makmur	Senden	Ngawen
7	Towangsan Makmur	Towangsan	Gantiwarno
8	Kerto Raharjo	Ngemplak	Kalikotes
9	Sri Mulih	Cokro	Tulung

No	Nama Gapoktan	Desa	Kecamatan
10	Sumber Untung	Sidowarno	Wonosari
11	Tani Manunggal	Babadan	Karangdowo
12	Sidowayah	Sidowayah	Polanharjo
13	Tani Makmur	Kepanjen	Delanggu
14	Tani Mulyo	Kajen	Ceper
15	Tirto Mulyo	Kujon	Ceper
16	Tunas Makmur	Demangan	Karangdowo

Sumber data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2017

Sampai dengan tahun 2017 Kabupaten Klaten memiliki 389 Gapoktan, tetapi berdasarkan table tersebut di atas terlihat bahwa baru terdapat 16 Gapoktan yang telah mendapatkan kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), sehingga masih banyak Gapoktan yang perlu mendapatkan penguatan sebagai Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Tabel 2.17 Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2013-2017

No	Tahun	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kelompok
1	2013	26	14	26
2	2014	37	24	37
3	2015	29	15	29
4	2016	20	14	20
5	2017	22	13	22
	Jumlah	132	80	132

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, Tahun 2018

Dari tabel 2.18 dapat dilihat bahwa lokasi pemanfaatan lahan pekarangan/rumah pangan lestari mengalami perkembangan yang fluktuatif, walaupun jika dibandingkan pada tahun 2014 di tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat. Sampai dengan tahun 2017 ini baru tersebar di 132 kelompok di 132 desa/kelurahan dari 401 desa/kelurahan yang ada. Namun demikian program tersebut tetap berjalan dan dikembangkan di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten.

D. Bidang Kelautan dan Perikanan

Daya dukung dan melimpahnya air mendorong petani dan masyarakat setempat memanfaatkan potensi air untuk berbudidaya ikan di sawah dan kolam. Gambaran Produksi Ikan dan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.18

Tabel 2.18 Produksi dan Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2013 - 2017

No.	Tahun	Produksi Benih (ekor)	Produksi Ikan (Kg)	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)
1.	2013	90.915.000	19.257.599	12,92
2.	2014	78.511.000	25.624.538	13,06
3.	2015	119.057.900	27.344.097	15,14
4.	2016	133.000.780	28.316.544	17,78
5.	2017	131.106.900	25.029.969	18,49

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018

Dari Tabel 2.18 dapat dilihat pada tersebut di atas dapat disampaikan bahwa produksi benih ikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif, hanya sedikit penurunan di tahun

2017. Benih tersebut kebanyakan dihasilkan dari Unit Perkolaman Rakyat (UPR) dan Unit Benih Ikan (UBI). Sedangkan untuk produksi ikan juga mengalami perkembangan yang cukup tinggi dan hanya mengalami penurunan di tahun 2017. Hal ini disebabkan disamping adanya penurunan ketersediaan benih ikan juga terus naiknya harga pakan ikan dan menurunnya jumlah populasi budidaya ikan air tawar.

Produksi ikan dalam daerah yang dihasilkan pada Kawasan Minapolitan (Kecamatan Karangnom, Tulung, Polanharjo, Ngawen, Klaten Selatan dan Kebonarum) maupun diluar Kawasan Minapolitan didominasi oleh jenis ikan Nila dan Lele. Untuk belut, produksi dalam daerah belum mencukupi, setiap tahun masih mendatangkan dari luar daerah khususnya dari daerah Jawa Timur. Produksi perikanan ini terkait erat dengan pola atau tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten. Untuk memahami tingkat konsumsi ikan dapat diturunkan dari jumlah produksi ikan (kg) sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.18 dibagi dengan kapita setiap tahun.

Untuk perkembangan tingkat konsumsi ikan sebagaimana tabel tersebut diatas setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebesar 12,92 Kg per kapita per tahun meningkat menjadi 18,49 Kg per kapita per tahun. Pencapaian tersebut masih jauh dari target nasional yang sebesar 47 Kg per kapita per tahun.

E. Bidang Transmigrasi

Kepadatan penduduk yang semakin besar serta daya dukung dari sektor ekonomi tidak memungkinkan untuk tetap meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang merantau, pilihan lain bertransmigrasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama 3 (tiga) tahun terakhir ada 5 (lima) pulau yang menjadi tujuan transmigrasi yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Namun, dalam kurun waktu dari Tahun 2013-2017 tujuan transmigrasi masyarakat yang tercatat di dalam dokumen transmigrasi hanya pada tujuan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Pada tahun 2017 terjadi penurunan angka pemberangkatan transmigrasi karena dipengaruhi oleh kondisi beberapa transmigran pada tahun sebelumnya yang kembali ke kampung halaman. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 2.19

Tabel 2.19 Realisasi Pemberangkatan Transmigrasi PIR, Umum Menurut Kecamatan dan Daerah Yang Dituju di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Sumatera		Kalimantan	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	8	26	307	1.198
2014	16	52	614	2.396
2015	32	104	1.228	4.792
2016	64	208	2.456	9.584
2017	4	13	-	-
Jumlah	124	403	4.605	17.970

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan jumlah organisasi kepemudaan mengalami peningkatan, sedangkan kegiatan keolahragaan dan jumlah organisasi olahraga relatif stabil, hanya saja kegiatan keolahragaan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah. Jumlah klub/cabang olahraga mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pembinaan terhadap klub/cabang olahraga masih kurang. Sedangkan jumlah gedung olah raga sudah cukup merata disetiap kecamatan, namun yang memenuhi standar sarana dan prasarana gedung olahraga baru ada dua yaitu GOR Gelar Sena dan Stadion Trikoyo. Jumlah perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 2.20

Tabel 2.20 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun 2013-2017				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jml klub/cabang olahraga	Cabang	21	31	31	31	31
2.	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26
3.	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	26	26	26	29	29
4.	Jml Organisasi Olahraga	Organisasi	8	8	8	35	35

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

Lembaga atau organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar secara organisasi bisa berjalan namun kualitas dan kapasitasnya masih rendah, sehingga masih perlu adanya pembinaan secara simultan oleh pihak-pihak yang terkait.

B. Bidang Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel 2.21

Tabel 2.21 Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun 2013-2017				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan Budaya	kegiatan	52	52	52	52	52
2	Jumlah sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya	Tempat	12	12	12	12	12

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

Dengan banyaknya keaneka ragaman seni budaya adat lokal yang lahir sejak zaman nenek moyang dan berproses turun menurun, kemudian

berpadu dengan munculnya seni budaya barulainnya merupakan wujud kekayaan aset seni dan budaya di Kabupaten Klaten. Sejumlah festival seni dan budaya digelar di Kabupaten Klaten, namun masih dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang relatif sangat terbatas, hal ini bisa berakibat pada rapuhnya ketahanan budaya di Kabupaten Klaten.

Promosi, Pengembangan dan pembinaan terhadap seni budaya daerah telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten, yaitu dengan pengiriman tim kesenian Kabupaten ke TMII, ke Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain; pagelaran wayang kulit, pentas seni dan festival seni budaya; Pembinaan seni budaya daerah dengan pemberian bantuan keuangan kepada sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Klaten untuk pembelian sarana dan prasana kesenian. Namun kegiatan promosi, pengembangan dan pembinaan tersebut baru dilakukan kepada kelompok seni budaya yang masih sangat terbatas jumlahnya, belum menyentuh pada keseluruhan dari kelompok seni budaya yang ada di Kabupaten Klaten. Sehingga kegiatan promosi, pengembangan dan pembinaan kepada kelompok seni budaya di Kabupaten Klaten masih perlu terus ditingkatkan.

Kabupaten Klaten memiliki kekayaan budaya daerah yang mendesak perlu perlindungan dan pelestarian, dan akan didaftarkan melalui HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual). Kekayaan budaya daerah yang akan didaftarkan tersebut adalah:

- a. Lurik ATBM
- b. Tari Lurik Payung
- c. Tari Lurik Asri

Namun sampai dengan tahun 2017 belum ada kekayaan seni budaya di Kabupaten Klaten yang didaftarkan melalui HAKI.

Terkait dengan pelestarian nilai luhur, bahasa dan sastra yang semakin melemah, maka Kabupaten Klaten menaruh perhatian cukup serius dalam pemasyarakatan kembali penggunaan bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta yang diimplementasikan dalam bentuk lomba dongeng Bahasa Jawa, Lomba Dalang Muda, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa halus setiap hari Kamis di semua OPD Kabupaten Klaten.

2. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten relatif tidak ada perubahan, sebagai informasi, Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22 Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun 2013-2017				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	Jumlah	4	4	4	4	4
3	Pemandangan Alam	buah	2	2	2	2	2

No	Uraian	Satuan	Tahun 2013-2017				
			2013	2014	2015	2016	2017
4	Museum	buah	1	1	1	1	1

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

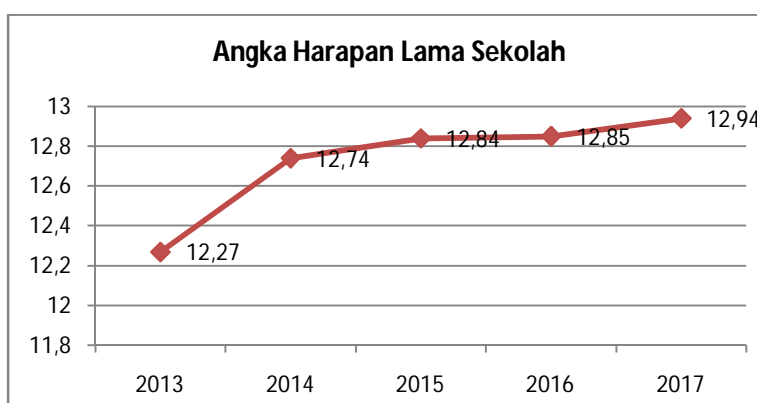
2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Pelayanan Dasar

A. Bidang Pendidikan

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.8 bahwa Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017, yaitu dari sebesar 12,12 pada tahun 2013 menjadi sebesar 12,27 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka harapan lama sekolah dapat dilihat pada gambar 2.11

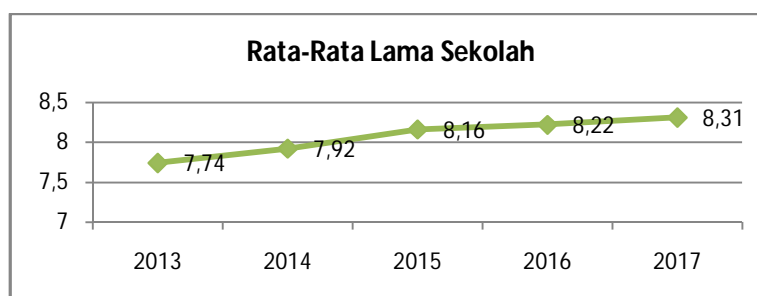


Gambar 2.11 Perkembangan Angka Harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2018

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.9 bahwa perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Dari 7,74 pada tahun 2013 naik menjadi 8,31 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dari tahun 2013-2017 semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Gambaran perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.12



Gambar 2.12 Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2018

3. Jumlah Anak Umur 0-6 tahun yang mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Salah satu upaya perluasan dan pemerataan pelayanan akses pendidikan adalah dilakukannya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia dini (*umur 0-6 tahun*) yang dilakukan melalui penyelenggaraan PAUD yang bertujuan untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Adapun perkembangan akses dan partisipasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten tahun 2017

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	p		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PAUD		1,428				
1	Satuan PAUD sejenis	122	1,364	1,502	2,866	338
2	Taman Penitipan Anak	32	383	331	714	98
3	Kelompok Bermain	402	4,331	4,551	8,882	1,234
4	RA/ BA	345	6,902	6,568	13,470	867
5	TK	527	8,871	8,464	17,335	1,594

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan data Tabel 2.23 tersebut di atas, dapat diketahui beberapa hal yang perlu diantisipasi terhadap penyelenggaraan PAUD kedepan, diantaranya:

- a. Rasio ketersediaan Sekolah terhadap penduduk anak usia sekolah pada jenjang PAUD sebesar 0,025 (*dengan catatan jumlah lembaga PAUD ada 1.428 lembaga dan jumlah anak usia 4-6 tahun pada tahun 2017 sebanyak 43.267 anak*) dengan jumlah guru sebanyak 4.131 guru.
- b. Rasio siswa per sekolah (R-S/Sek) sebesar 30,30
- c. Rasio murid terhadap guru sebesar 10,78

Sedangkan angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) cenderung bersifat fluktuatif, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendidikan anak usia dini sebenarnya menjadi budaya dan kebutuhan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan, dan seiring dengan munculnya kebijakan pendidikan non formal bagi pengembangan Anak Usia Dini (PAUD). Sebagai gambaran Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.24

Tabel 2.24 Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
APK PAUD	55,73	58,32	92,19	92,37	78,61

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Gambaran selengkapnya Penyebaran Angka Partisipasi Kasar PAUD, Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Menurut Kecamatan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Angka Partisipasi Kasar PAUD, Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun	APK PAUD	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prambanan	1,995	2,170	91.94	50	209
Gantiwarno	1,130	1,626	69.50	47	134
Wedi	2,117	2,015	105.06	51	194
Bayat	1,966	2,705	72.68	63	191
Cawas	1,618	2,188	73.95	62	195
Trucuk	1,974	3,408	57.92	72	185
Kalikotes	1,058	850	124.47	30	80
Kebonarum	784	2,338	33.53	28	117
Jogonalan	1,563	2,019	77.41	65	173
Manisrenggo	1,666	1,474	113.03	51	149
Karangnongko	1,027	2,811	36.54	53	108
Ngawen	1,109	1,993	55.64	45	83
Ceper	1,588	1,715	92.59	83	185
Pedan	1,944	2,603	74.68	56	164
Karangdowo	1,176	2,902	40.52	47	111
Juwiring	2,171	1,838	118.12	63	171
Wonosari	1,600	1,810	88.40	64	189
Delanggu	1,906	2,094	91.02	47	185
Polanharjo	1,238	2,482	49.88	50	123
Karanganom	2,100	2,830	74.20	72	191
Tulung	1,717	1,747	98.28	57	136
Jatinom	2,273	2,091	108.70	65	173
Kemalang	1,118	1,589	70.36	37	100
Klaten Selatan	1,531	2,140	71.54	51	162
Klaten Tengah	2,688	1,785	150.59	58	218
Klaten Utara	2,210	1,819	121.50	61	205
Jumlah 2017	43,267	55,042	78.61	1,428	4,131

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2013 sudah mencapai 108,10% namun turun menjadi 97,45% pada tahun 2017, hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A ingin sekolah di luar daerah yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya, juga dikarenakan proporsi penduduk anak usia sekolah jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A mengalami penurunan.

Adapun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 90,35% pada tahun 2013 menjadi 90,93% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena keinginan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B meningkat dikarenakan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga ditunjang angka melanjutkan dan proporsi jumlah penduduk anak usia SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga meningkat.

Untuk jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C pada tahun 2013 mencapai 65,07%, meningkat menjadi 81,00% pada tahun 2016, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan anak usia SMA/SMK/MA/SMALB/PaketC disamping semakin baiknya peningkatan layanan pendidikan. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.26.

Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

No	Tahun	SD/ MI/ SDLB/ Paket A	SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	SMA/ MA/ SMK/ SMALB/ Paket C
1	2013	108.20	90.35	65.07
2	2014	92.27	87.26	68.69
3	2015	94.53	87.58	93.06
4	2016	105.23	97.57	81.00
5	2017	97.45	90.93	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten untuk semua Jenjang Pendidikan terutama di daerah perbatasan dan pedesaan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan, oleh karena itu perlu adanya pemerataan mutu dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan di semua tingkatan perlu mendapat perhatian agar penyelenggaraan pendidikan tidak terkonsentrasi di sekolah-sekolah unggulan dan perkotaan.

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A mengalami penurunan, pada tahun 2013 sudah mencapai 92,84% turun menjadi 86,84% pada tahun 2017. Kondisi ini disebabkan karena adanya anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A ingin bersekolah di luar daerah yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya, juga dikarenakan proporsi penduduk anak usia sekolah jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A mengalami penurunan.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Sekolah Menengah jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B cenderung bersifat fluktuatif, pada tahun 2013 sudah mencapai 64,61% meningkat menjadi 72,77%, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 68,22%, hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B ingin bersekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C perkembangannya pada tahun 2013-2016

mengalami peningkatan, pada tahun 2013 mencapai 42, 75% meningkat menjadi 54,41% pada tahun 2016, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan anak usia SMA/SMK/MA/SMALB/PaketC disamping semakin baiknya peningkatan layanan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C. Secara lengkap perkembangan APM di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.27

Tabel 2.27 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

No	Tahun	SD/ MI/ SDLB/ Paket A	SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	SMA/ MA/ SMK/ SMALB/ Paket C
1	2013	92.84	64.61	42.75
2	2014	79.13	62.48	44.08
3	2015	81.60	63.94	60.46
4	2016	91.26	72.77	54.41
5	2017	86.84	68.22	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua Jenjang Pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

6. Angka Putus Sekolah

Selama kurun waktu tahun tahun 2013-2017 angka putus sekolah semakin menurun, hal ini dikarenakan adanya dana alokasi khusus bidang pendidikan, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Sebagai gambaran perkembangan persentase angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28. Perkembangan Prosentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/ MI						
1) Dalam Jumlah	Kasus	32	31	27	33	44
2) Dalam Persentase	%	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/ MTs						
1) Dalam Jumlah	Kasus	81	36	56	43	92
2) Dalam Persentase	%	0.16	0.07	0.10	0.08	0.23
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/ MA/ S						
1) Dalam Jumlah	Kasus	374	285	295	283	
2) Dalam Persentase	%	0.92	2.12	0.73	0.69	

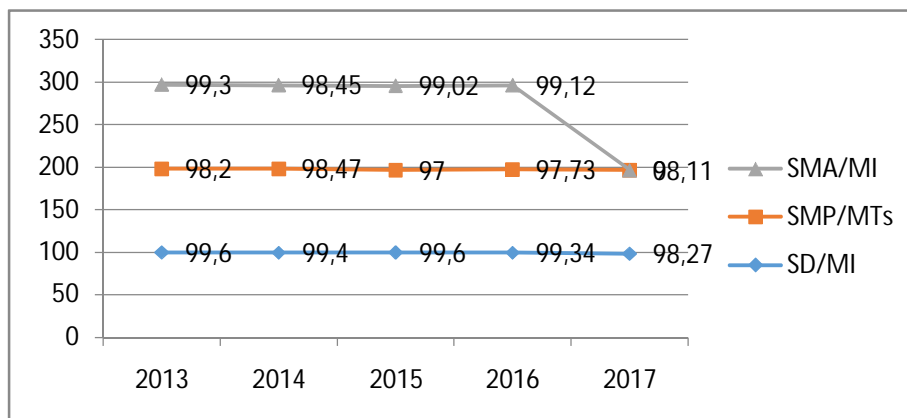
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

NB : Untuk data jenjang SMA/ MA/ SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis administrasi sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 2.28 di atas, perkembangan angka putus sekolah, untuk jenjang pendidikan SMK terutama di SMK swasta, mengindikasikan bahwa kualitas lembaga yang bersangkutan hanya dapat memperoleh siswa yang kurang berprestasi, disamping layanan pendidikan kejuruan belum bisa memberi jaminan kebutuhan lapangan kerja. Dipihak lain, anak usia sekolah jenjang pendidikan SMA/MA/SMK lebih ingin cepat bekerja di sektor non formal (pekerja/tukang perumahan) daripada sekolah formal berlama-lama.

7. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL) menunjukkan bobot prestasi kelulusan untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif, dan gambaran selengkapnya perkembangan angka kelulusan di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.13 dan Tabel 2.29.



Gambar 2.13 Angka Kelulusan (AL)
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Tabel 2.29 Perkembangan Persentase Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Uraian	Satuan	Tahun	
		2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	99.34	98.27
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	97.73	98.11
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK	%	99.12	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2018

Berdasarkan data pada Tabel 2.29 di atas, angka kelulusan jenjang SD/MI pada dua tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2016 mencapai 99,34 namun menurun menjadi 98,27 pada tahun 2017. Akan tetapi untuk kelulusan jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 97,73% naik menjadi 98,11% pada tahun 2017 dan untuk jenjang SMA/SMK/MA mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 99,02% pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar 99,12%.

8. Pendidikan Non Formal

Selain menempuh pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan, dalam rangka menunjang kecakapan hidup upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten adalah dengan menyelenggarakan pendidikan non formal. Adapun data pendidikan non formal di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.30

Tabel 2.30 Perkembangan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Klaten Tahun 2017

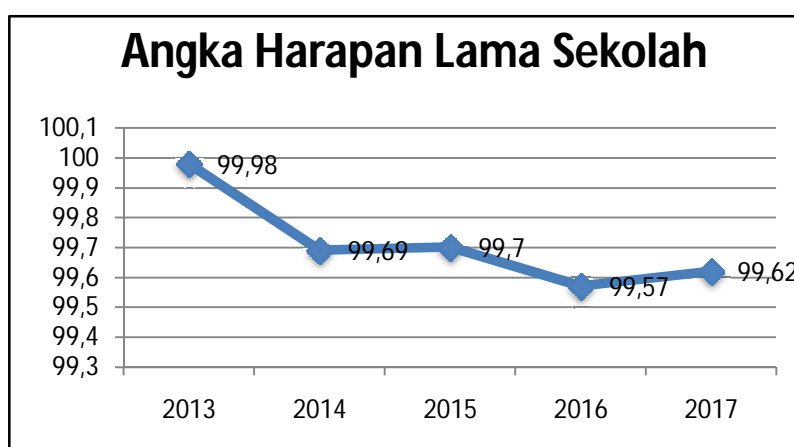
No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kejar Paket A	3	16	37	53	7
2	Kejar Paket B	6	98	85	183	31
3	Kejar Paket C	9	148	131	279	64

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

9. Pendidikan Keaksaraan & Perkembangan Capaian Keaksaraan Kabupaten Klaten

Indikator keberhasilan pembangunan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 tahun ke atas. Beberapa langkah nyata telah ditunjukkan oleh pemerintah kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 tahun ke atas dirumuskan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat disajikan pada Gambar 2.14



Gambar 2.14 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Berdasarkan Gambar 2.14 sebagaimana tersebut di atas, angka melek huruf di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun sudah berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, maupun nasional. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Klaten sudah lebih maju dibanding rerata kabupaten/kota lainnya yang berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional.

10. Akses dan Partisipasi Program Keaksaraan

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dalam menangani pendidikan keaksaraan adalah sebagaimana Tabel 2.31.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dalam menangani pendidikan keaksaraan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.31 Perkembangan Penanganan Pendidikan Keaksaraan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	Keaksaraan Fungsional (KF)	95	-	1.200	1.200	91
	Taman bacaan Masyarakat	33	434	753	1.187	32
2014	Keaksaraan Fungsional (KF)	116	129	1.510	1.639	128
	Taman Bacaan Masyarakat	42	985	1.351	2.336	44
2015	Keaksaraan Fungsional (KF)	77	75	1.036	1.111	87
	Taman Bacaan Masyarakat	33	230	200	430	33

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	Keaksaraan Fungsional (KF)	88	18	818	836	95
	Taman Bacaan Masyarakat	22	466	690	1.156	-
2017	Keaksaraan Fungsional (KF)	53	10	607	617	67
	Taman Bacaan Masyarakat	13	240	327	567	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2018

11. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV selama lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya dana tunjangan profesi guru yang sudah memiliki sertifikat profesi, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitasnya. Sebagai gambaran perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	63.53	72.32	79.09	81.99	84.16
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	89.54	90.70	92.09	91.51	60.33
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK	%	95.10	96.11	96.71	97.06	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Keterangan: Untuk data jenjang SMA/ MA/ SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis pengelolaan administrasi sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Perkembangan jenjang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan, dari 63,53% tahun 2013 menjadi 84,16% pada tahun 2017. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs perkembangan bersifat fluktuatif, dan pada tahun terakhir (2017) mengalami penurunan sangat tajam.

Adapun data guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD/MI/SMP/MTS berkualifikasi S1/D.IV dan bersertifikat Kepala Sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2011-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.33

Tabel 2.33 Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2017

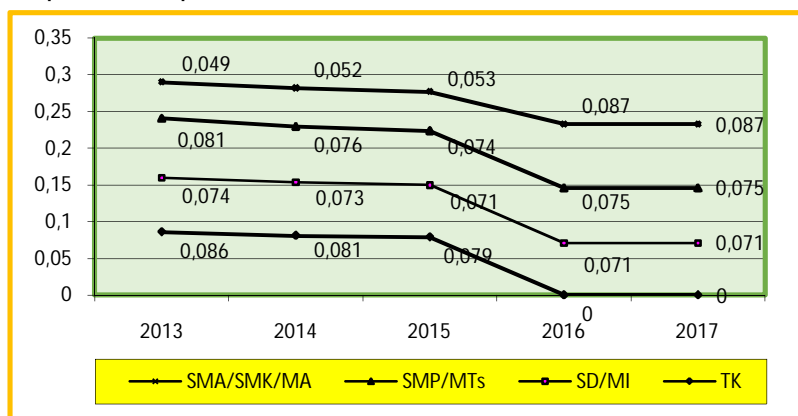
Uraian	Satuan	Tahun 2013-2017				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/MI	Orang	713	713	713	713	713
Jenjang Pendidikan SMP/MTS	Orang	81	81	81	81	81

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.33 tersebut di atas, Kepala Sekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS yang telah memenuhi kulaifikasi S1/D4 standar sistem Pendidikan Nasional. Kepala Sekolah masing-masing telah tercapai 100%. Hal ini menandakan bahwa tingkat mutu guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dipersyaratkan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

12. Rasio Murid terhadap Guru

Rasio murid dan guru menunjukkan perbandingan antara guru dan murid per 10.000 mengidentifikasi ketersediaan tenaga pengajar. Kondisi di Kabupaten Klaten dari semua jenjang pendidikan pada Tahun 2013-2017 cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena banyak guru yang pensiun, serta formasi pengadaan guru baru tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga pendidikan yang dibutuhkan. Adapun gambaran selengkapnya Rasio Murid dan Guru di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.15



Gambar 2.15. Rasio Murid dan Guru Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Tabel 2.34 Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	31	3,718	249	120	8	15
2	Gantiwarno	23	2,595	208	113	9	12
3	Wedi	28	3,681	254	131	9	14
4	Bayat	34	3,681	288	108	8	13
5	Cawas	39	3,596	361	92	9	10
6	Trucuk	39	4,586	312	118	8	15
7	Kalikotes	21	2,593	188	123	9	14
8	Kebonarum	11	1,011	97	92	9	10
9	Jogonalan	26	4,259	243	164	9	18
10	Manisrenggo	28	3,034	219	108	8	14
11	Karangnongko	25	2,611	186	104	7	14
12	Ngawen	23	2,628	203	114	9	13
13	Ceper	30	3,945	262	132	9	15
14	Pedan	24	3,189	235	133	10	14
15	Karangdowo	30	2,435	212	81	7	11
16	Juwiring	33	3,564	300	108	9	12
17	Wonosari	38	4,469	321	118	8	14
18	Delanggu	25	3,461	236	138	9	15
19	Polanharjo	28	2,350	230	84	8	10
20	Karanganom	26	2,382	200	92	8	12
21	Tulung	29	2,536	235	87	8	11
22	Jatinom	35	4,693	319	134	9	15
23	Kemalang	25	3,004	199	120	8	15
24	Klaten Selatan	20	2,579	193	129	10	13
25	Klaten Tengah	20	4,068	218	203	11	19
26	Klaten Utara	14	2,997	156	214	11	19
Jumlah 2017		705	83,665	6,124	119	9	0,071
2016		710	85,849	6,258	124	9	0,071
2015		716	87,698	6,322	125	9	0,071
2014		727	90,413	6,469	127	9	0,073
2013		741	92,818	6,777	129	9	0,074

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Tabel 2.35 Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	2	480	31	240	16	15
2	Gantiwarno	2	448	29	224	15	15
3	Wedi	7	1,753	98	250	14	18
4	Bayat	3	597	38	199	13	16
5	Cawas	3	990	79	330	26	13
6	Trucuk	2	268	25	134	13	11
7	Kalikotes	-	-	-	-	-	-
8	Kebonarum	1	244	21	244	21	12
9	Jogonalan	2	315	29	158	15	11
10	Manisrenggo	1	65	7	65	7	9
11	Karangnongko	-	-	-	-	-	-
12	Ngawen	1	415	22	415	22	19
13	Ceper	3	301	26	100	9	12
14	Pedan	2	573	40	287	20	14
15	Karangdowo	2	112	16	56	8	7
16	Juwiring	4	502	59	126	15	9
17	Wonosari	3	356	31	119	10	11
18	Delanggu	5	1,573	89	315	18	18
19	Polanharjo	1	166	12	166	12	14
20	Karanganom	3	656	62	219	21	11
21	Tulung	1	319	28	319	28	11
22	Jatinom	2	606	39	303	20	16
23	Kemalang	-	-	-	-	-	-
24	Klaten Selatan	2	186	15	93	8	12
25	Klaten Tengah	10	2,699	156	270	16	17
26	Klaten Utara	4	1,355	79	339	20	17
Jumlah							
	2017	66	14,979	1,031	227	16	15
	2016	65	14,280	973	188	13	12
	2015	57	13,015	883	191	14	11
	2014	53	11,437	789	177	13	11
	2013	53	10,364	750	154	12	10

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Tabel 2.36 Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	2	1155	77	578	39	15
2	Gantiwarno	3	1720	106	573	35	16
3	Wedi	2	1574	87	787	44	18
4	Bayat	3	1624	118	541	39	14
5	Cawas	3	1378	113	459	38	12
6	Trucuk	3	1602	106	534	35	15
7	Kalikotes	1	867	42	867	42	21
8	Kebonarum	1	655	39	655	39	17
9	Jogonalan	2	1408	83	704	42	17
10	Manisrenggo	3	1883	111	628	37	17
11	Karangnongko	2	1102	68	551	34	16
12	Ngawen	1	751	38	751	38	20
13	Ceper	3	1662	116	554	39	14
14	Pedan	3	1958	118	653	39	17
15	Karangdowo	3	2109	117	703	39	18
16	Juwiring	2	1238	80	619	40	15
17	Wonosari	2	1532	93	766	47	16
18	Delanggu	4	2536	159	634	40	16
19	Polanharjo	3	1229	92	410	31	13
20	Karanganom	4	1965	131	491	33	15
21	Tulung	3	1461	99	487	33	15
22	Jatinom	3	1890	110	630	37	17
23	Kemalang	2	873	67	437	34	13
24	Klaten Selatan	1	694	44	694	44	16
25	Klaten Tengah	3	2435	136	812	45	18

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	Klaten Utara	3	2626	158	875	53	17
Jumlah	2017	65	39,927	2,508	614	39	16
	2016	65	40,672	2,721	640	42	15
	2015	65	40,927	2,740	637	42	15
	2014	65	40,441	2,777	633	43	15
	2013	65	39,354	2,842	616	44	14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

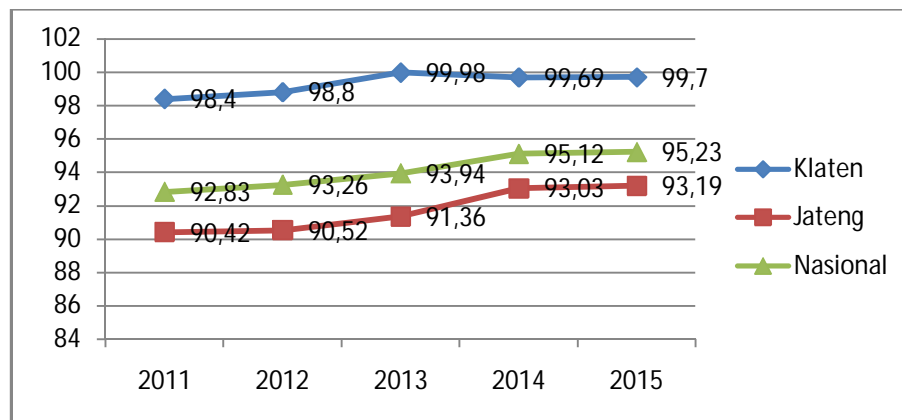
Tabel 2.37 Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	1	212	12	212	12	18
2	Gantiwarno	2	146	12	73	6	12
3	Wedi	3	386	27	129	9	14
4	Bayat	2	377	24	189	12	16
5	Cawas	3	265	18	88	6	15
6	Trucuk	4	139	27	35	7	5
7	Kalikotes	-	-	-	-	-	-
8	Kebonarum	-	-	-	-	-	-
9	Jogonalan	1	138	17	138	17	8
10	Manisrenggo	1	66	7	66	7	9
11	Karangnongko	1	21	4	21	4	5
12	Ngawen	3	490	35	163	12	14
13	Ceper	-	-	-	-	-	-
14	Pedan	1	33	2	33	2	17
15	Karangdowo	1	47	5	47	5	9
16	Juwiring	2	186	17	93	9	11
17	Wonosari	2	61	14	31	7	4
18	Delanggu	4	304	27	76	7	11
19	Polanharjo	-	-	-	-	-	-
20	Karanganom	2	173	14	87	7	12
21	Tulung	1	67	6	67	6	11
22	Jatinom	2	268	17	134	9	16
23	Kemalang	2	72	14	36	7	5
24	Klaten Selatan	2	559	38	280	19	15
25	Klaten Tengah	3	379	28	126	9	14
26	Klaten Utara	4	1,242	63	311	16	20
Jumlah	2017	47	5,631	428	120	9	3
	2016	46	4,855	611	106	13	9
	2015	45	5,357	607	99	12	7
	2014	42	5,379	627	105	13	7
	2013	44	5,534	662	108	14	7

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

13. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 tahun ke atas dirumuskan dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan komparasi angka melek di Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar 2.16 dan Tabel 2.38.



Gambar 2.16 Komparasi Angka Melek di Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017

Tabel 2.38 Komparasi Angka Melek di Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2017

TAHUN	PENDUDUK > 15 TAHUN			BUTA HURUF > 15 TAHUN			MELEK HURUF > 15 TAHUN			ANGKA MELEK HURUF > 15 TAHUN		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
2016	511,774	524,126	1,035,900	888	3,563	4,451	510,886	520,563	1,031,449	99.83	99.32	99.57
2017	503,982	516,308	1,020,290	615	3,299	3,914	503,367	513,009	1,016,376	99.88	99.36	99.62

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2018

Berdasar tabel 2.38 perkembangan angka melek di kabupaten Klaten tahun 2011-2017 mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2013 mencapai 98,4% naik menjadi 99,62% pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan angka melek huruf sangat optimal.

14. Manajemen Pelayanan Pendidikan

Angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten di tahun 2013-2017 ditunjukkan pada Tabel 2.39

Tabel 2.39 Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah Dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	99.30	98.47	99.02	92.43	88.28

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.39 sebagaimana tersebut di atas, Peserta didik di jenjang pendidikan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 perkembangannya bersifat fluktuatif, namun didua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu dari 92,43 pada tahun 2016 menjadi 88,28 pada tahun 2017.

15. Sarana dan Prasarana Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan juga sangat berpengaruh terhadap capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten.

Data ketersediaan sarana prasarana berupa Gedung, Ruang Kelas Sekolah Negeri menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.40

Tabel 2.40 Gedung, Ruang Kelas Sekolah Negeri Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Gedung Sekolah				Ruang Kelas			
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prambanan	31	2			193	31		
2	Gantiwarno	23	3			138	52		
3	Wedi	28	2			173	45		
4	Bayat	34	3			205	56		
5	Cawas	39	3			202	55		
6	Trucuk	39	3			159	52		
7	Kalikotes	21	1			144	21		
8	Kebonarum	11	1			71	9		
9	Jogonalan	26	2			163	44		
10	Manisrenggo	28	3			173	61		
11	Karangnongko	25	2			151	29		
12	Ngawen	23	1			133	24		
13	Ceper	30	3			174	55		
14	Pedan	24	3			100	59		
15	Karangdowo	30	3			125	62		
16	Juwiring	33	2			200	44		
17	Wonosari	38	2			228	36		
18	Delanggu	25	4			171	85		
19	Polanharjo	28	3			169	49		
20	Karanganom	26	4			140	77		
21	Tulung	29	3			152	54		
22	Jatinom	35	3			225	47		
23	Kemalang	25	2			119	36		
24	Klaten Selatan	20	1			128	12		
25	Klaten Tengah	20	3			154	69		
26	Klaten Utara	14	3			108	35		
	Jumlah 2017	705	65	-	-	4,098	1,199	-	-
	2016	710	65	15	11	4,518	1,304	382	320
	2015	716	65	16	11	4,574	1,212	349	288
	2014	727	65	16	11	4,709	1,222	370	250
	2013	741	65	16	11	4,768	1,216	395	261

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Tabel 2.41 Gedung, Ruang Kelas Sekolah Swasta Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Gedung Sekolah				Ruang Kelas			
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prambanan	2	1			19	8		
2	Gantiwarno	2	2			21	9		
3	Wedi	7	3			70	29		
4	Bayat	3	2			24	22		
5	Cawas	3	3			35	21		
6	Trucuk	2	4			10	11		
7	Kalikotes	-	-			-	4		
8	Kebonarum	1	-			11	12		
9	Jogonalan	2	1			15	7		
10	Manisrenggo	1	1			6	3		
11	Karangnongko	-	1			-	8		
12	Ngawen	1	3			15	22		
13	Ceper	3	-			22	-		
14	Pedan	2	1			18	4		
15	Karangdowo	2	1			11	4		
16	Juwiring	4	2			22	11		
17	Wonosari	3	2			15	9		
18	Delanggu	5	4			41	14		
19	Polanharjo	1	-			9	-		
20	Karanganom	3	2			13	12		
21	Tulung	1	1			-	4		
22	Jatinom	2	2			24	24		
23	Kemalang	-	2			-	4		
24	Klaten Selatan	2	2			14	32		

No	Kecamatan	Gedung Sekolah				Ruang Kelas			
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	Klaten Tengah	10	3			94	24		
26	Klaten Utara	4	4			48	79		
Jumlah 2017		66	47	-	-	557	377	-	-
	2016	65	46	12	43	682	279	100	635
	2015	57	45	12	44	579	322	97	657
	2014	53	42	13	45	494	292	108	642
	2013	53	44	13	42	467	319	109	630

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Gedung sekolah dan ruang kelas sudah tersedia merata di setiap kecamatan, hal itu dapat dilihat pada kedua tabel di atas. Namun demikian sampai pada tahun 2017 masih terdapat 3 kecamatan yang tidak ada gedung SD swasta dan 4 kecamatan yang tidak ada gedung SLTP swasta. Hal ini tidak begitu menjadi permasalahan yang berarti mengingat pada kecamatan-kecamatan tersebut sudah berdiri gedung SD dan SLTP negeri, selain itu juga mempertimbangkan bahwa pendirian gedung sekolah harus memperhitungkan jumlah murid yang memadai. Untuk jenjang pendidikan SD dengan jumlah murid sedikit tentunya akan menjadi pertimbangan untuk dilakukan regrouping dalam rangka efisiensi dan perwujudan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Dari gedung yang sudah ada tersebut kondisi ruang kelas maupun induk gedungnya tidak semua dalam kondisi baik dan layak untuk kegiatan belajar mengajar. Terdapat beberapa gedung rusak berat/ringan dan perlu dilakukan rehab atau perbaikan. Gambaran kondisi gedung sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.42

Tabel 2.42 Perkembangan Prosentase ruang kelas Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	71,55	69,67	69,29	73	79
Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	%	89,20	89,61	88,23	89	92

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2018

Tabel di atas menggambarkan perkembangan lima tahun terakhir kondisi ruang kelas gedung sekolah di Kabupaten Klaten. Masih terdapat ruang kelas dalam kondisi tidak layak meskipun prosentasenya kecil namun tetap harus diperhatikan.

Selain sarana prasarana berupa gedung/ruang kelas dalam rangka mewujudkan peserta didik yang cerdas, kompeten dan berkualitas, dibutuhkan fasilitas pendukung proses belajar mengajar yang memadai, seperti perpustakaan, lapangan olahraga, UKS, laboratorium, tempat ibadah, komputer/laptop, dan sebagainya. Karena hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pendidikan di Kabupaten Klaten. Tabel 2.43 dan tabel 2.44 merupakan data pokok pendidikan yang terkait dengan ketersediaan sarana prasarana pendukung tersebut.

Tabel 2.43 Data Pokok SD/MI Di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Indikator	SD	MI	SD+MI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekolah			
	a. Negeri	705	3	708
	b. Swasta	66	77	143
2	Siswa Baru Kelas I			
	a. Laki-laki	7,751	1,521	9,272
	b. Perempuan	7,462	1,403	8,865
3	Siswa			
	a. Laki-laki	50,916	7,172	58,088
	b. Perempuan	47,728	6,571	54,299
4	Lulusan	15,388	1,357	16,745
5	Ruang Kelas (Milik)			
	a. Baik	3,116	426	3,542
	b. Rusak Ringan	1,456	154	1,610
	c. Rusak Berat	292	28	320
6	Ruang Kelas Bukan Milik	213	76	289
7	Kelas/Rombel	5,144	2,261	7,405
8	Guru			
	a. Layak Mengajar	5,955	799	6,754
	b. Tidak Layak	1,200	71	1,271
9	Fasilitas			
	a. Perpustakaan	561	42	603
	b. Lapangan Olahraga	427	43	470
	c. UKS	443	39	482
	d. Tempat Ibadah	282	44	326
	e. Toilet	2,980	285	3,265
	f. Air Bersih	771	80	851

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.43 terlihat bahwa belum semua Sekolah Dasar memiliki sarana prasarana (perpustakaan, lapangan olahraga, UKS dan tempat ibadah) yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perpustakaan dari 771 SD memiliki perpustakaan hanya 561, jumlah lapangan olahraga 427, UKS 443 dan tempat ibadah 282, sehingga masih diperlukan penambahan sarana prasarana untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Tabel 2.44. Data Pokok SMP/MTs Di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Indikator	SMP	MTs	SMP+MTs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekolah			
	a. Negeri	65	8	73
	b. Swasta	47	10	57
2	Siswa Baru Kelas			
	a. Laki-laki	7,729	1,390	9,119
	b. Perempuan	7,220	1,149	8,369
3	Siswa			
	a. Laki-laki	23,535	3,822	27,357
	b. Perempuan	22,023	3,449	25,472
4	Lulusan	13,611	2,465	16,076
5	Ruang Kelas (Milik)			
	a. Baik	345	236	581
	b. Rusak Ringan	1,194	22	1,216
	c. Rusak Berat	37	7	44
6	Ruang Kelas Bukan Milik	10	5	15
7	Kelas/Rombel	1,557	268	1,825
8	Guru			
	a. Layak Mengajar	1,625	466	2,091
	b. Tidak Layak	1,311	64	1,375
9	Fasilitas			
	a. Perpustakaan	105	17	122
	b. Lapangan Olahraga	20	5	25
	c. UKS	95	18	113
	d. Laboratorium	247	29	276
	e. Tempat Ibadah	95	13	108
	f. Toilet	518	136	654
	g. Air Bersih	112	18	130
	h. Listrik	112	18	130

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.44 terlihat bahwa belum semua Sekolah Menengah Pertama memiliki sarana prasarana (perpustakaan, lapangan olahraga, UKS dan tempat ibadah) yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perpustakaan dari 112 SMP yang memiliki perpustakaan hanya 105, jumlah lapangan olahraga 20, UKS 95 dan tempat ibadah 95, sehingga masih diperlukan penambahan sarana prasarana untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

16. Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUS TS)

Pendidikan untuk semua menjadi salah satu tujuan dari SDG's 2016 – 2030. Namun demikian kebijakan Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang selama ini ada belum mampu mengentaskan masalah pendidikan di Kabupaten Klaten. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah di Kabupaten Klaten.

Jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUS TS) di Kabupaten Klaten bisa dilihat pada tabel 2.45

Tabel 2.45 Jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUS TS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016

NO.	KECAMATAN	DATA PBDT 2015						DATA TAMBAHAN			GRAND TOTAL		TOTAL
		DATA PBDT 2015			HASIL VALIDASI			L	P	Grand Total	L	P	
		L	P	Grand Total	L	P	Grand Total				(6)+(9)	(7)+(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	BAYAT	310	297	607	244	233	477	37	34	71	281	267	548
2	CEPER	187	172	359	76	90	166	19	16	35	95	106	201
3	DELANGGU	122	102	224	74	56	130	25	14	39	99	70	169
4	CAWAS	231	238	469	209	202	411	11	12	23	220	214	434
5	GANTIWARNO	168	133	301	88	78	166	21	7	28	109	85	194
6	JATINOM	375	386	761	181	197	378	47	32	79	228	229	457
7	JUWIRING	246	244	490	58	74	132	23	11	34	81	85	166
8	KALIKOTES	118	100	218	106	90	196	18	3	21	124	93	217
9	JOGONALAN	231	168	399	117	71	188	75	22	97	192	93	285
10	KARANGANOM	173	187	360	96	90	186	42	10	52	138	100	238
11	KARANGDOWO	186	191	377	138	150	288	31	15	46	169	165	334
12	KARANGNONGKO	226	177	403	138	121	259	16	7	23	154	128	282
13	KEBONARUM	62	55	117	35	28	63	3	4	7	38	32	70
14	KEMALANG	492	423	915	206	145	351	55	30	85	261	175	436
15	KLATEN SELATAN	96	77	173	96	77	173	0	0	0	96	77	173
16	KLATEN TENGAH	100	78	178	88	66	154	23	4	27	111	70	181
17	KLATEN UTARA	94	77	171	68	60	128	22	2	24	90	62	152
18	MANISRENGGO	230	204	434	185	144	329	12	8	20	197	152	349
19	NGAWEN	129	127	256	94	81	175	33	8	41	127	89	216
20	PEDAN	230	203	433	197	153	350	15	5	20	212	158	370
21	POLANHARJO	132	116	248	96	84	180	25	7	32	121	91	212
22	PRAMBANAN	160	169	329	82	102	184	41	10	51	123	112	235
23	TRUCUK	437	352	789	341	262	603	43	12	55	384	274	658
24	TULUNG	184	164	348	114	97	211	41	16	57	155	113	268
25	WEDI	270	217	487	63	41	104	33	15	48	96	56	152
26	WONOSARI	288	276	564	140	118	258	54	24	78	194	142	336
	TOTAL	5477	4933	10410	3330	2910	6240	765	328	1093	4095	3238	7333

Sumber: PBDT TNP2K, 2015

Dari tabel 2.45 dapat dilihat masih sangat banyak Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah di Kabupaten Klaten. Data tersebut diperoleh dari hasil verifikasi analisis data PBDT 2015 untuk anak usia sekolah yang tidak sekolah di tahun 2016. Dan ada kemungkinan besar jumlah tersebut meningkat di tahun 2017, dikarenakan data tersebut di atas hanya memuat data anak rumah tangga miskin yang diverifikasi dan validasi. Sedangkan di

luar anak rumah tangga miskin masih banyak lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah dengan berbagai penyebabnya.

Masih tingginya jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah ini juga ditunjukkan dengan masih banyaknya anak putus sekolah. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah 2.46

Tabel 2.46 Perkembangan Prosentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/ MI						
1) Dalam Jumlah	Kasus	32	31	27	33	44
2) Dalam Persentase	%	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/ MTs						
1) Dalam Jumlah	Kasus	81	36	56	43	92
2) Dalam Persentase	%	0.16	0.07	0.10	0.08	0.23
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/ MA/ SMK						
1) Dalam Jumlah	Kasus	374	285	295	283	
2) Dalam Persentase	%	0.92	2.12	0.73	0.69	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

NB : Untuk data jenjang SMA/ MA/ SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis administrasi sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasar pada tabel 2.46 di atas, terlihat bahwa Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada dua tahun terakhir terjadi kenaikan. Jenjang pendidikan SD/MI dari 33 kasus pada tahun 2016 menjadi 44 kasus pada tahun 2017. Jenjang pendidikan SMP/MTs dari 43 kasus pada tahun 2016 menjadi 92 kasus pada tahun 2017. Sedangkan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK pada dua tahun terakhir mengalami penurunan kasus, dari 295 kasus pada tahun 2015 menjadi 283 kasus pada tahun 2016.

Tabel 2.47 Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Negeri					Swasta				
		SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Prambanan	1	1			2	-	-			-
2	Gantiwarno	-	2			2	-	-			-
3	Wedi	2	4			6	1	-			1
4	Bayat	-	2			2	-	4			4
5	Cawas	1	1			2	-	-			-
6	Trucuk	2	3			5	-	-			-
7	Kalikotes	-	7			7	-	-			-
8	Kebonarum	3	-			3	-	-			-
9	Jogonalan	-	2			2	-	4			4
10	Manisrenggo	1	-			1	-	-			-
11	Karangnongko	3	3			6	-	-			-
12	Ngawen	-	-			-	-	-			-
13	Ceper	2	2			4	-	-			-
14	Pedan	-	-			-	-	-			-
15	Karangdowo	-	4			4	-	3			3
16	Juwiring	7	-			7	-	-			-
17	Wonosari	1	1			2	-	-			-
18	Delanggu	8	-			8	-	-			-
19	Polanharjo	-	1			1	-	-			-
20	Karanganom	1	1			2	-	1			1
21	Tulung	1	2			3	-	2			2
22	Jatinom	2	3			5	-	4			4

No	Kecamatan	Negeri					Swasta				
		SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Kemalang	-	2			2	-	2			2
24	Klaten Selatan	1	2			3	-	1			1
25	Klaten Tengah	-	-			-	-	-			-
26	Klaten Utara	-	5			5	-	21			21
Jumlah 2017		36	48	-	-	84	1	42	-	-	43
2016		27	22	22	69	140	1	13	1	179	194
2015		22	20	24	70	136	-	22	4	186	212
2014		28	19	15	37	99	-	5	4	210	219
2013		56	37	29	69	191	-	22	7	249	278

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

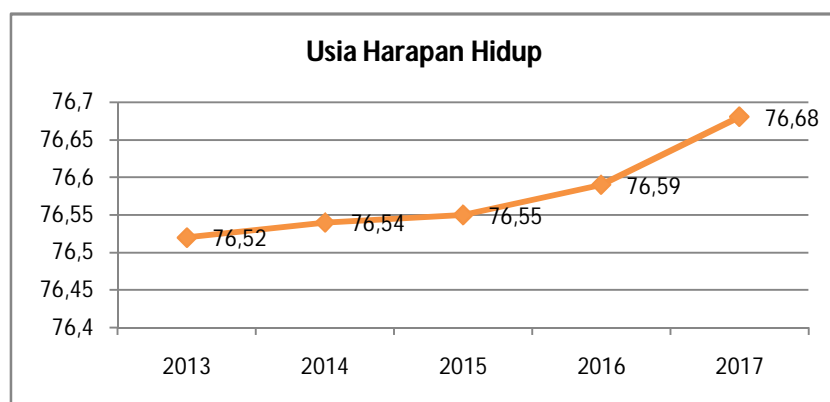
Dari tabel 2.47 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah anak putus sekolah di usia sekolah. Ditunjukkan pada tahun 2016 jumlah anak putus sekolah dari jenjang SD sampai pada tingkat SLTP di sekolah negeri sebanyak 84 anak, sedangkan di jenjang SD sampai tingkat SLTP pada sekolah swasta sebanyak 43 anak. Sedangkan di tahun 2016 jumlah anak putus sekolah pada jenjang SD sampai pada tingkat SLTP di sekolah negeri sebanyak 49 anak, sedangkan di jenjang SD sampai tingkat SLTP pada sekolah swasta sebanyak 14 anak. Dalam hal ini angka anak putus sekolah sampai dengan tingkat SLTP dari tahun terakhir dibandingkan tahun sebelumnya ada kenaikan dari 22 anak menjadi 48 anak untuk sekolah negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta ada kenaikan dari 13 anak menjadi 42 anak. Untuk jenjang pendidikan SLTA tidak ada data dikarenakan mulai tahun 2017 urusan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Dari kedua tabel tersebut diatas mengindikasikan bahwa anak usia sekolah yang tidak sekolah menjadi salah satu permasalahan yang muncul dalam bidang pendidikan di Kabupaten Klaten dan harus menjadi prioritas untuk segera mendapat intervensi kebijakan maupun program untuk segera dituntaskan.

B. Bidang Kesehatan

1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup dalam arti usia hidup panjang dan sehat, di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2013-2017 masyarakat Kabupaten Klaten cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini atau anak usia Bawah Lima Tahun (BALITA). Perkembangan UHH masyarakat di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17 Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2018, diolah

2. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Proporsi puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat didominasi Puskesmas sebagai ujung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Gambaran Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.48

Tabel 2.48 Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017

Tahun	Puskesmas		Puskesmas Keliling		Pustu	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2014	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2015	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2016	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2017	34	0,003	34	0,003	86	0,007

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2018

Puskesmas merupakan prasarana kesehatan umum yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat ini dimaksudkan agar masyarakat terjaga kualitas kesehatannya sehingga masyarakat di wilayah Puskesmas tersebut tetap bisa menjalankan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan Posyandu diharapkan mampu menjadi sarana melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dan simultan. Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

3. Rasio Dokter

Proporsi dokter umum di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 lebih besar dibanding dokter spesialis dan dokter gigi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih didominasi oleh dokter umum sebagai ujung pelayanan kesehatan dasar kepada

masyarakat. Adapun gambaran Rasio Dokter Per Satuan Penduduk secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	138	0,030	38	0,002	34	0,002
2014	146	0,020	29	0,002	27	0,002
2015	115	0,078	41	0,028	19	0,0128
2016	352	0,237	110	0,074	97	0,0653
2017	507	-	136	-	70	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2018

4. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunisation* (UCI) di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 adalah sama, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada cakupan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat sudah lebih baik, adapun gambaran Cakupan Desa/Kelurahan UCI secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.50

Tabel 2.50 Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah desa/kel	Jumlah ds/kel UCI	Cakupan
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	401	401	100 %
2014	401	401	100 %
2015	401	401	100 %
2016	401	401	100 %
2017	401	401	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

5. Tenaga Medis Puskesmas dan sarpras

Tenaga dokter umum di setiap kecamatan rata-rata ada 1 sampai 3 orang dokter merata disetiap kecamatan. Dokter gigi ada 1 orang merata disetiap kecamatan kecuali di kecamatan Klaten Selatan dan Klaten Utara ada 2 orang tenaga dokter gigi. Tenaga bidan rata-rata ada 5 sampai 18 orang disetiap kecamatan. Tenaga Kesehatan Asisten Apoteker, Gizi dan Kesehatan Lingkungan ada 1 sampai 2 orang merata disetiap kecamatan. Sedangkan tenaga medis yang tidak merata disetiap kecamatan adalah tenaga kesehatan Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Terapi Fisik dan Fisio Terapi. Dari data tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan tenaga medis di Kabupaten Klaten terutama di Puskesmas Pembantu. Berikut daftar jumlah tenaga medis menurut Puskesmas dan Kecamatan seperti yang tertera pada tabel 2.51

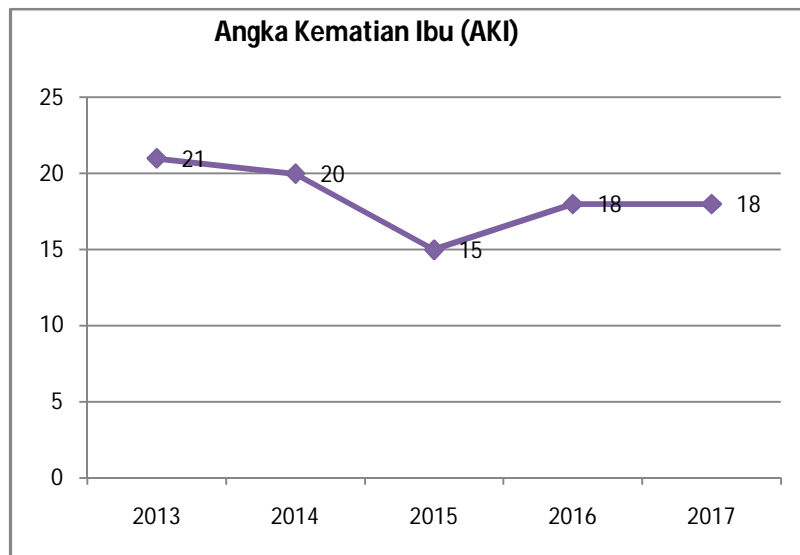
Tabel. 2.51 Jumlah Tenaga Medis Menurut Puskesmas dan Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Kecamatan	Puskesmas	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan		Tenaga Kesehatan						
				PNS	PTT	Kefarmasian (Apoteker)	Kesehatan Masyarakat	Asisten Apoteker	Gizi	Kesehatan Lingkungan	Terapi Fisik	Fisioterapi
Prambanan	Prambanan	3	1	11		-	1	1	1	-		1
	Kebondalem Lor	1	1	11		1	-	1	1	2		-
Gantiwamo	Gantiwamo	2	1	16		-	-	1	-	1		1
Wedi	Wedi	3	1	16		-	1	1	1	2		-
Bayat	Bayat	2	1	15		1	-	1	1	2		1
Cawas	Cawas I	2	1	10		-	-	1	1	1		1
	Cawas II	1	1	6		-	-	1	1	3		-
Trucuk	Trucuk I	2	1	10		1	-	-	1	2		1
	Trucuk II	1	1	11		-	-	1	1	1		-
Kalikotes	Kalikotes	1	1	8		1	-	-	1	1		-
Kebonarum	Kebonarum	1	1	8		-	1	1	1	1		1
Jogonalan	Jogonalan I	2	1	12		-	1	1	1	1		1
	Jogonalan II	1	2	8		-	-	1	1	1		-
Manisrenggo	Manisrenggo	2	1	14		-	1	1	1	1		-
Karangnongko	Karangnongko	1	1	14		-	1	1	1	-		-
Ngawen	Ngawen	1	1	13		-	-	1	1	2		1
Ceper	Ceper	2	1	10		-	1	1	1	1		-
	Jambukulon	1	1	10		-	-	1	1	1		-
Pedan	Pedan	3	1	15		-	-	1	1	1		1
Karandowo	Karandowo	2	1	22		-	-	2	1	1		1
Juwiring	Juwiring	2	1	17		-	-	1	1	2		-
Wonosari	Wonosari I	3	1	8		-	-	2	1	-		1
	Wonosari II	1	1	10		-	-	1	1	1		-
Delanggu	Delanggu	3	1	17		-	-	1	1	-		1
Polanharjo	Polanharjo	1	1	18		-	-	1	1	2		-
Karanganom	Karanganom	3	1	18		-	-	1	1	2		-
	Tulung	1	-	11		-	-	1	2	1		-
Jatinom	Majegan	2	1	9		1	1	-	1	-		-
	Jatinom	3	1	11		-	1	1	2	1		1
Kemalang	Kayumas	1	1	7		-	-	1	-	2		-
	Kemalang	3	1	14		-	-	1	1	2		1
Klaten Selatan	Klaten Selatan	2	2	12		-	1	1	1	-		-
Klaten Tengah	Klaten Tengah	2	1	5		-	-	1	1	2		1
Klaten Utara	Klaten Utara	2	2	8		1	-	1	1	1		2
Jumlah 2017		63	36	405	0	6	10	33	34	41	0	17

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2018

6. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kondisi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi. Adapun angka kasus kematian ibu yang tinggi berada di kecamatan: Bayat, Juwiring, Ceper dan Jogonalan. Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.18.



Gambar 2.18 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2018

Tabel 2.52 Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Prambanan	Prambanan	0	0	2	0	0
		Kebondalem Lor	0	0	0	0	0
2	Gantiwarno	Gantiwarno	0	1	0	0	1
3	Wedi	Wedi	0	0	1	3	0
4	Bayat	Bayat	0	3	1	0	1
5	Cawas	Cawas I	0	1	0	0	2
		Cawas II	0	1	1	0	1
6	Trucuk	Trucuk I	1	1	1	1	1
		Trucuk II	0	1	0	0	1
7	Kalikotes	Kalikotes	1	1	0	1	0
8	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0
9	Jogonalan	Jogonalan I	1	0	2	1	1
		Jogonalan II	1	0	0	0	0
10	Manisrenggo	Manisrenggo	1	0	0	1	0
11	Karangnongko	Karangnongko	0	0	0	0	1
12	Ngawen	Ngawen	1	1	0	0	0
13	Ceper	Ceper	3	1	0	0	2
		Jambukulon	0	2	0	1	0
14	Pedan	Pedan	0	1	1	0	0
15	Karandowo	Karandowo	0	0	0	1	1
16	Juwiring	Juwiring	3	0	0	3	0
17	Wonosari	Wonosari I	2	0	0	0	1
		Wonosari II	0	0	0	1	0
18	Delanggu	Delanggu	2	1	0	1	1
19	Polanharjo	Polanharjo	2	0	1	0	0
20	Karanganom	Karanganom	0	0	1	0	2
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	0
		Majegan	0	0	0	1	0
22	Jatinom	Jatinom	0	1	0	0	0
		Kayumas	0	0	0	1	0
23	Kemalang	Kemalang	0	1	1	0	2
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	2	1	0	0
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	2	1	1	1	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	1	0	1	1	0
Jumlah			21	20	15	18	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.52 diatas bisa dilihat bahwa setiap tahun masih ada ibu mati karena melahirkan, perkembangannya sangat fluktuatif dari tahun ke tahun, dan kasus ini di tahun 2017 jumlahnya sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 18 kasus kematian ibu melahirkan. Hal ini bisa

disebabkan salah satunya karena alur pelayanan di fasilitas kesehatan yang agak panjang, terlebih untuk yang memakai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mana rujukan harus dilakukan ketika ibu yang hendak melahirkan memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih memadai, namun banyak kendala dalam penerapannya. Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat pasien harus mengikuti alur rujukan sesuai aturan dan ini terkadang membuat pasien terlambat ditangani dan masih banyak faktor medis dan non medis lainnya yang menyebabkan angka kematian ibu melahirkan cukup tinggi di Kabupaten Klaten.

7. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Penyebab kematian bayi di samping karena pengaruh ibu dalam kondisi hipertensi dan pendarahan, juga diakibatkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat masih perlu di tingkatkan terutama di wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu melahirkan yang tinggi, seperti kecamatan: Trucuk, Ngawen dan Jogonalan. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.53

Tabel 2.53 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Bayi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Prambanan	Prambanan	3	5	3	2	7
		Kebondalem Lor	3	2	0	1	1
2	Gantiwarno	Gantiwarno	4	12	9	5	2
3	Wedi	Wedi	5	7	7	5	7
4	Bayat	Bayat	7	9	10	15	3
5	Cawas	Cawas I	6	1	5	4	3
		Cawas II	7	4	0	4	1
6	Trucuk	Trucuk I	5	7	13	7	4
		Trucuk II	7	6	5	2	4
7	Kalikotes	Kalikotes	3	3	7	8	2
8	Kebonarum	Kebonarum	1	8	5	6	6
9	Jogonalan	Jogonalan I	2	1	7	6	7
		Jogonalan II	7	3	6	6	1
10	Manisrenggo	Manisrenggo	9	8	12	11	4
11	Karangnongko	Karangnongko	7	6	3	3	5
12	Ngawen	Ngawen	4	6	15	7	4
13	Ceper	Ceper	1	4	4	3	2
		Jambukulon	7	6	5	2	8
14	Pedan	Pedan	10	13	7	12	10
15	Karangdowo	Karangdowo	1	9	5	7	7
16	Juwiring	Juwiring	9	8	11	13	15
17	Wonosari	Wonosari I	1	6	4	6	5
		Wonosari II	1	1	3	2	4
18	Delanggu	Delanggu	1	8	10	10	9
19	Polanharjo	Polanharjo	1	7	5	5	3
20	Karanganom	Karanganom	8	4	8	7	11
21	Tulung	Tulung	3	4	3	9	2
		Majegan	5	3	3	2	1
22	Jatinom	Jatinom	7	6	5	2	2
		Kayumas	1	2	7	1	5
23	Kemalang	Kemalang	7	4	11	9	6
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	1	6	9	10	3

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Bayi				
			2013	2014	2015	2016	2017
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	2	6	5	2	3
26	Klaten Utara	Klaten Utara	4	6	8	3	5
Jumlah			150	191	220	197	162
ANGKA KEMATIAN BAYI DILAPORKAN)			8.5	11.04	12.94	11.69	10.15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

8. Angka Penderita HIV/AIDS

Seiring dengan kemajuan teknologi makin berkembang pula informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Hal ini tidak hanya membawa dampak positif bagi kemajuan masyarakat, namun juga berdampak negatif dari akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut, yaitu dengan munculnya beberapa perilaku menyimpang di masyarakat seperti pergaulan bebas, *free sex* dan lain sebagainya, yang berakibat munculnya penyakit menular HIV/AIDS. Peningkatan persebaran penyakit HIV/AIDS yang cukup tinggi terjadi di kecamatan: Ceper, Klaten Tengah, Klaten Selatan dan Trucuk.

Perkembangan jumlah penderita penyakit HIV/AIDS Di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.54.

Tabel.2.54 Perkembangan Jumlah Penderita AIDS/HIV Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Penderita AIDS/HIV				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Prambanan	Prambanan	3	1	4	2	2
		Kebondalem Lor	1	1	2	1	3
2	Gantiwarno	Gantiwarno	0	5	2	1	2
3	Wedi	Wedi	3	1	5	6	6
4	Bayat	Bayat	2	3	2	4	8
5	Cawas	Cawas I	1	1	1	5	5
		Cawas II	1	2	1	2	1
6	Trucuk	Trucuk I	0	1	4	6	2
		Trucuk II	6	1	8	0	1
7	Kalikotes	Kalikotes	3	5	3	5	7
8	Kebonarum	Kebonarum	1	1	2	1	2
9	Jogonalan	Jogonalan I	0	1	1	3	7
		Jogonalan II	4	2	2	2	2
10	Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	1	2	1
11	Karangnongko	Karangnongko	3	0	1	1	2
12	Ngawen	Ngawen	1	4	8	6	6
13	Ceper	Ceper	6	2	7	8	14
		Jambukulon	1	0	2	5	1
14	Pedan	Pedan	2	3	4	6	4
15	Karangdowo	Karangdowo	0	2	6	2	3
16	Juwiring	Juwiring	1	0	2	8	3
17	Wonosari	Wonosari I	0	0	2	0	2
		Wonosari II	0	2	0	1	1
18	Delanggu	Delanggu	2	1	2	2	5
19	Polanharjo	Polanharjo	0	1	0	1	1
20	Karanganom	Karanganom	3	3	7	4	4
21	Tulung	Tulung	0	0	2	5	1
		Majegan	0	1	2	0	2
22	Jatinom	Jatinom	2	3	2	3	7
		Kayumas	1	0	1	0	0
23	Kemalang	Kemalang	0	2	4	5	1
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	2	6	3	6	5
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	6	5	5	9	8
26	Klaten Utara	Klaten Utara	3	1	2	3	6
Jumlah			58	61	100	115	125

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.54 di atas dapat dilihat perkembangan jumlah penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun di Kabupaten Klaten terjadi peningkatan yang cukup tinggi.

9. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Cakupan dalam pencegahan dan penanganan skrining kesehatan diusia produktif maupun diusia lansia telah optimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, demikian juga terhadap penderita penyakit TBC Paru, BTA di Kabupaten Klaten juga sudah cukup optimal dilakukan, sejak tahun 2011 hingga 2017 sudah mencapai 99%. Dalam cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD selama ini di Kabupaten Klaten telah menunjukkan tingkat yang optimal. Selama periode 2013-2017 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sudah mencapai 100%.

Jumlah kasus penyakit Hipertensi dan Diabetusmilletus dari tahun ke tahun angka kesakitannya mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif, hal ini disebabkan banyak hal terutama adalah adanya perubahan perilaku atau gaya hidup dari masyarakat, dimana saat ini masyarakat lebih menyukai hal-hal yang praktis sehingga fasilitas yang tersedia saat ini sangat mendukung keinginan dari masyarakat tersebut. Karena adanya perubahan perilaku tersebut sehingga berdampak kepada peningkatan angka kesakitan Hipertensi dan Diabetusmilletus. Untuk melihat perkembangan kasus penyakit Hipertensi dan Diabetusmilletus maka mulai tahun 2014 yang dilaporkan adalah jumlah kasus baru bukan lagi semua kasus lama dan baru. Sehingga dalam rekapan mulai tahun 2014 jumlah kasus yang dilaporkan angkanya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan.

Jumlah kasus yang ada di Kabupaten Klaten yang dilaporkan lewat Puskesmas dan beberapa RS dari tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.55 Kasus Hipertensi dan Diabetusmilitus yang Terlaporkan lewat Puskesmas Tahun 2013-2017

No	Kasus	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
1	Hipertensi	59.579	45.556	23.670	8.319	71.067	Mulai Tahun 2014 hanya kasus baru yang dilaporkan
2	Diabetusmilletus	13.349	12.170	5.842	1.667	29.811	

TB dan HIV menjadi penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kabupaten Klaten. Angka Prevalensi TB di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan, begitu pula dengan penemuan kasus HIV mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk meningkatkan langkah preventif melalui advokasi, dan pemberian pemahaman bagi masyarakat serta pendampingan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

10. Kasus Gizi Buruk

Kasus Gizi Buruk adalah Jumlah balita yang berat badan dan tinggi badannya (BB/TB) kurang dari standar deviasi.

Tabel 2.56 Jumlah Kasus Gizi Buruk Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kasus Gizi Buruk				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Prambanan	Prambanan	0	2	0	0	1
		Kebondalem Lor	0	0	1	1	0
2	Gantiwarno	Gantiwarno	0	1	1	3	5
3	Wedi	Wedi	0	0	0	0	0
4	Bayat	Bayat	0	0	0	0	0
		Cawas I	0	0	0	0	1
5	Cawas	Cawas II	0	1	1	1	0
		Trucuk I	0	0	1	0	0
6	Trucuk	Trucuk II	0	0	1	1	0
		Kalikotes	3	3	2	3	2
7	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0
9	Jogonalan	Jogonalan I	1	0	2	1	2
		Jogonalan II	2	2	1	0	1
10	Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	1	0	1
11	Karangnongko	Karangnongko	0	1	0	0	0
12	Ngawen	Ngawen	1	0	0	0	0
13	Ceper	Ceper	0	1	0	1	0
		Jambukulon	0	0	0	0	1
14	Pedan	Pedan	2	0	0	0	0
15	Karangdowo	Karangdowo	0	0	0	0	0
16	Juwiring	Juwiring	0	0	0	0	0
17	Wonosari	Wonosari I	0	1	0	0	0
		Wonosari II	0	0	0	0	0
18	Delanggu	Delanggu	0	2	0	0	0
19	Polanharjo	Polanharjo	0	1	0	0	0
20	Karanganom	Karanganom	0	0	0	0	0
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	0
		Majegan	0	0	0	0	0
22	Jatinom	Jatinom	0	0	0	2	0
		Kayumas	1	0	2	0	0
23	Kemalang	Kemalang	0	0	0	0	0
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	1	0	0	0
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	0	0	1	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	0	0	0	1	0
Jumlah Kasus			11	16	13	15	14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan tabel 2.56 diatas, Kondisi jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab balita gizi buruk karena kondisi sosial ekonomi keluarga dan faktor medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus balita gizi buruk yang tinggi.

11. Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Upaya mengubah perilaku masyarakat buang air besar sembarangan menjadi salah satu program prioritas di Kabupaten Klaten. Upaya ini dilakukan dengan menggugah hati dan menyadarkan masyarakat secara terus-menerus untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sekaligus mengajak masyarakat untuk memiliki jamban sehat atau jamban keluarga di rumahnya masing-masing. Melalui kegiatan jambanisasi

Kabupaten Klaten berupaya untuk mewujudkan Desa Open Defecation Free (ODF) atau desa bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Kabupaten Klaten terus berusaha mewujudkan akses masyarakat terhadap jamban sehat mencapai 100%. Berikut capaian Desa ODF Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2017 :

Tabel 2.57 Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	BABS	% Akses Progres	Desa ODF	Desa Belum ODF
CAWAS	20	0	100.00	20	0
BAYAT	18	0	100.00	18	0
KEMALANG	13	157	98.67	10	3
KARANGDOWO	19	315	97.74	11	8
KLATEN TENGAH	9	282	97.67	3	6
KLATEN UTARA	8	271	97.46	1	7
CEPER	18	517	97.40	6	12
PRAMBANAN	16	470	96.89	9	7
KALIKOTES	7	508	96.71	4	3
PEDAN	14	546	95.47	0	14
GANTIWARNO	16	662	94.51	8	8
JATINOM	18	1171	93.17	7	11
MANISRENGGO	16	788	92.87	6	10
JOGONALAN	18	1267	92.44	5	13
KARANGNONGKO	14	925	91.52	5	9
WEDI	19	1391	91.44	3	16
DELANGGU	16	1170	89.86	3	13
TRUCUK	18	2141	89.84	7	11
NGAWEN	13	1737	88.33	0	13
KARANGANOM	19	1792	87.28	4	15
POLANHARJO	18	2154	83.64	0	18
KEBONARUM	7	914	83.35	0	7
JUWIRING	19	2955	83.05	1	18
WONOSARI	18	3971	78.24	0	18
KLATEN SELATAN	12	2619	76.02	0	12
TULUNG	18	4134	72.03	1	17
	401	32988	90.77	132	269

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah desa/kelurahan yang belum ODF berjumlah 269 masih lebih banyak dibanding desa/kelurahan yang sudah ODF yang berjumlah 132. Sehingga dengan pencapaian Desa/kelurahan ODF seperti tertera dalam tabel 2.57, sehingga hal tersebut masih menjadi permasalahan yang perlu segera dituntaskan.

12. Stunting

Stunting adalah Kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama dan menyebabkan terlambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Penyebab dari stunting sendiri adalah kekurangan gizi dalam waktu yang lama 1000 hari pertama kehidupannya pada masa kehamilan, janin akan berdampak pada pertumbuhan kerdil ketika anak lahir. Kesadaran masyarakat terhadap pemberian gizi yang salah atau kurang tepat, pola asuh yang tidak sesuai, infeksi bakteri/kuman yaitu pola hidup yang tidak bersih (BAB sembarangan). Akibat dari stunting adalah perkembangan otak dan fisik terhambat, sulit berprestasi, rentan terhadap penyakit, dan ketika dewasa mudah menderita kegemukan sehingga

beresiko terkena penyakit jantung, diabetes dan penyakit tidak menular lainnya.

Gizi buruk merupakan salah satu dari sekian banyak faktor penyebab stunting. Gangguan gizi pada masa janin akan berdampak pada pertumbuhan kerdil ketika anak lahir. Kesadaran masyarakat terhadap pemberian gizi pada anak yang salah atau tidak tepat juga akan berdampak pada naiknya prevalensi stunting di Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten menjadi salah satu dari 100 Kabupaten/Kota prioritas penanganan stunting. Hal ini dikarenakan angka stunting di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2017 masih mencapai 27,2 % dari jumlah balita yang ada. Berikut angka kecenderungan Prevalensi Stunting di Kab. Klaten. Dari 391 desa ada 10 desa prioritas penanganan stunting di 7 (tujuh) kecamatan, Yaitu :

- a. Desa Sanggrahan (Prambanan)
- b. Desa Randusari (Prambanan)
- c. Desa Titang (Jogonalan)
- d. Desa Sumyang (Jogonalan)
- e. Desa Granting (Jogonalan)
- f. Desa Ngaren (Pedan)
- g. Desa Butuhan(Delanggu)
- h. Desa Keprabon (Polanharjo)
- i. Desa Tibayan (Jatinom)
- j. Desa Gemblegan (Kalikotes)



Gambar 2.19 Kecenderungan Prevalensi Stunting dan *Underweight* pada Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017

Dari gambar 2.19 diatas bisa dilihat bahwa perkembangan Prevalensi Stunting dan *Underweight* pada balita selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif.

Angka stunting dari hasil survey Penilaian Status Gizi (PSG) dari 400 responden angka stunting sebanyak 27,2%. Sedangkan dari angka pengukuran serentak yang dilaksanakan tahun 2017 diperoleh angka prevalensi sebanyak 8,11%. Pengukuran ini didapat dari hasil status gizi TB/U yaitu dengan status gizi sangat pendek ditambah dengan status gizi pendek dibagi dengan jumlah balita yang diukur TB/BB nya.

13. Kesehatan Lingkungan

Tabel 2.58 Capaian Rumah tangga Sehat Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Rumah Tangga Sehat				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Prambanan	Prambanan	77.50	95.60	100.00	99.03	93.48
		Kebondalem Lor	86.00	91.60	84.10	82.72	83.44
2	Gantiwarno	Gantiwarno	90.50	99.70	93.50	94.18	91.64
3	Wedi	Wedi	50.00	100.00	91.40	84.33	84.29
4	Bayat	Bayat	99.90	100.00	99.80	95.11	99.40
		Cawas I	93.20	96.20	89.50	89.52	85.63
		Cawas II	96.60	95.90	96.00	89.52	95.88
6	Trucuk	Trucuk I	87.80	81.60	91.80	84.08	90.44
		Trucuk II	100.00	100.00	73.30	73.33	88.29
7	Kalikotes	Kalikotes	97.40	95.80	95.30	95.76	99.71
8	Kebonarum	Kebonarum	93.80	86.50	89.90	84.84	91.01
9	Jogonalan	Jogonalan I	78.10	70.60	82.10	99.54	99.00
		Jogonalan II	90.00	98.60	98.70	98.89	90.25
10	Manisrenggo	Manisrenggo	80.10	99.00	100.00	100.00	100.00
11	Karangnongko	Karangnongko	97.90	68.50	100.00	94.03	92.43
12	Ngawen	Ngawen	97.90	99.80	99.00	94.10	97.58
13	Ceper	Ceper	98.10	98.30	97.90	97.11	99.28
		Jambukulon	98.50	92.00	0.00	29.67	28.35
14	Pedan	Pedan	100.00	92.10	98.00	100.00	94.66
15	Karangdowo	Karangdowo	95.60	97.70	97.80	98.48	100.00
16	Juwiring	Juwiring	100.00	96.00	95.00	93.12	88.79
17	Wonosari	Wonosari I	81.10	70.80	76.00	96.19	70.37
		Wonosari II	75.70	82.90	81.00	0.00	82.36
18	Delanggu	Delanggu	53.70	43.90	71.00	73.00	73.01
19	Polanharjo	Polanharjo	97.60	94.50	95.50	95.83	92.80
20	Karanganom	Karanganom	97.80	100.00	98.80	99.39	100.00
21	Tulung	Tulung	71.30	81.30	89.80	91.19	91.55
		Majegan	96.00	95.80	96.70	87.30	44.45
22	Jatinom	Jatinom	92.90	90.10	90.80	96.82	93.34
		Kayumas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Kemalang	Kemalang	100.00	77.30	100.00	100.00	93.42
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	93.40	91.20	92.30	97.29	90.31
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	93.50	74.40	86.80	100.00	81.73
26	Klaten Utara	Klaten Utara	24.60	68.80	100.00	92.62	82.38
Cakupan Rumah Tangga Sehat			84.90	90.80	89.90	92.27	88.69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.58 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan capaian rumah tangga sehat di dua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari 92,27 % menjadi 88,69 %. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan.

14. Tenaga Medis dan Sarpras Kesehatan

Tabel 2.59 Sarana Kesehatan Yang Berizindi Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian		2013	2014	2015	2016	2017
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
SWASTA						
1	Rumah Sakit	9	6	2	9	9
2	Balai Pengobatan	-	-	-	17	17
3	Rumah Bersalin	-	-	-	--	-
4	Dokter Praktek	219	200	202	559	559

Uraian		2013	2014	2015	2016	2017
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
5	Apotek	121	31	6	44	44
NEGERI						
1	Rumah Sakit Umum	4	1	-	2	2
2	Rumah Sakit Jiwa	1	1	-	1	1
3	Apotek Daerah	1	1	-	-	-
4	Toko Obat Berijin	9	-	2	3	3
5	Balai Pengobatan Kesehatan Paru Masyarakat	1	1	0	-	-
6	Puskesmas / Balai Pengobatan	34	34	34	34	34
7	Puskesmas Pembantu	81	84	84	84	84
8	Puskesmas Yang Ada Fasilitas Rawat Inap	16	15	15	15	15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.59 di atas terlihat bahwa sarana kesehatan yang sangat menonjol adalah tenaga medis swasta berijin yakni tenaga dokter yang pada tahun terakhir (2017) berjumlah 713 orang. Sementara sarana prasarana fasilitas kesehatan yang lain baik swasta maupun negeri jumlahnya relatif masih rendah.

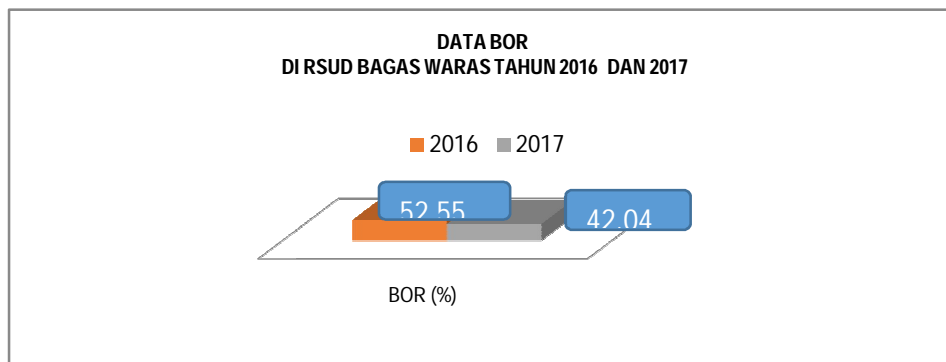
15. Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

RSUD Bagas Waras ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014. Sedangkan untuk Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diterbitkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 445/301 Tahun 2015, dan untuk mendukung operasional RSUD Bagas Waras diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten Nomor 503.24/002/OP/2015/29 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit. Adapun kinerja pelayanan RSUD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). Adapun BOR per November 2015 s/d April 2016 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.60. Jumlah Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Klaten Tahun 2017

NO.	BULAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	JMLH TT	JUMLAH PASIEN	JUMLAH PASIEN MISKIN	LAMA RAWAT	HARI RAWAT	JUMLAH PASIEN KELUAR			JMLH KEMATI AN	JMH PASIEN KELUAR
									HIDUP	MATI			
										< 48 JAM	> 48 JAM		
1	JAN	3710	493	143	4203	2295	1812	2156	468	16	9	25	493
2	PEB	3649	449	143	4098	2293	1565	2017	432	12	5	17	449
3	MRT	4478	575	143	5053	2360	2645	901	541	17	17	34	575
4	APRL	4180	502	143	4682	2305	1757	1525	481	14	7	21	502
5	MEI	4538	451	143	4989	2318	1359	1525	430	10	11	21	451
6	JUN	3463	383	143	3846	2280	1314	1879	375	3	5	8	383
7	JUL	4218	516	143	4734	2326	1533	1533	495	14	7	21	516
8	AGST	4301	479	143	4780	2319	1608	1642	465	6	8	14	479
9	SEPT	4118	475	143	4593	2326	1334	2101	456	17	2	19	475
10	OKT	4701	573	143	5274	2354	1745	2308	556	12	5	17	573
11	NOP	4850	510	161	5360	2310	1638	2228	500	9	1	10	510
12	DES	3931	560	161	4491	2365	2590	2590	545	10	5	15	560
		50137	5966		56103	27851			5744	140	82	222	5966

Sumber: Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klaten 2018



Gambar 2.20 Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

Sumber : RSD Bagas Waras, 2018

Berdasar pada tabel 2.61 dan gambar 2.20 indikator BOR diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 terjadi penurunan Persentase pemakaian tempat tidur dibanding tahun 2016 sebesar 10,51%.

C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang yang harus ditangani sesuai kewenangan Provinsi meliputi jalan dan jembatan, sumberdaya air, air minum dan sanitasi.

1. Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km.

- a. Aksesibilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- b. Mobilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan terhadap jumlah total penduduk Kabupaten Klaten dalam satuan km/10.000 jiwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk minimal untuk suatu wilayah yang kepadatannya 1000 s/d 5000 jiwa/km² adalah 3 km per 10.000 jiwa. Pencapaian SPM indeks mobilitas pada tahun 2015 sudah mencapai 174,33 termasuk kategori 1 dengan tingkat kerapatan penduduk < 100 jiwa/km².
- c. Keselamatan, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, tingkat keselamatan lalu lintas tahun 2017 mencapai 99.77%.
- d. Kondisi jalan, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Berdasarkan pencapaian dan penerapan SPM, tahun 2017 dari total panjang jalan 769,63 km, jalan kondisi baik 470,61 km, jalan kondisi sedang

sepanjang 163,03 km. Untuk jalan rusak ringan 62,90 km dan rusak berat 67,09 km. Dari capaian tersebut, jalan kondisi baik mencapai 61,15%, sedang 21,96 %, rusak ringan 8,17% dan rusak berat 8,72%. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%, artinya kondisi jalan sudah melampaui target yang ditetapkan.

- e. Kondisi jembatan, dengan indikator tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Total jembatan yang ada di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2017 ini tercatat ada 348 buah, kondisi jembatan tersebut 283 buah kondisinya baik sedangkan 65 buah kondisinya rusak dan sedang.

2. Prasarana Sumber Daya Air

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 29.713 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

Kondisi fisik dan tingkat kefungsi jaringan irigasi perlu dikenali untuk menemukan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang dalam keadaan rusak dan memerlukan perbaikan atau rehabilitasi. Bila terdapat kondisi baik maka jaringan irigasi tersebut dapat berfungsi dengan baik pula. Kondisi rusak ringan memerlukan pemeliharaan dan rusak berat mengharuskan rehabilitasi oleh pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Kondisi DI Kabupaten Klaten Tahun 2017 sebagai berikut :

- DI kondisi baik : 7.208 ha (24,26%)
- DI rusak sedang : 15.303 ha (51,50%)
- DI rusak berat : 7.202 ha (24,24%)

3. Pelayanan Air Bersih Dan Sanitasi

Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi, khususnya jamban sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai target *Millenium Development Goal's*. Capaian air bersih tahun 2017 mencapai 87,31%, dengan perincian untuk wilayah perkotaan 90,15% dan perdesaan 84,47%. Sedangkan cakupan akses sanitasi telah sampai 91,75% akses dengan perincian 92,90% wilayah perkotaan dan 90,60% wilayah perdesaan. Cakupan

Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017*

NO	SEKTOR	SKALA	Capaian Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Air Minum	Kabupaten	987.075	1.186.952	1.270.967	1.290.796	1.138.976
			%	75,29	80,80	83,40	87,2
		Perkotaan	426.142	469.399	525.706	531.477	470.511
			%	86,52	85,63	87,60	90,02
		Perdesaan	560.933	717.553	745.261	759.319	668.465
			%	68,53	77,90	80,73	84,38
2	Sanitasi	Kabupaten	921.757	1.149.253	1.259.221	1.286.924	1.196.896
			%	70,31	84,80	85,40	88,22
		Perkotaan	384.523	477.656	482.213	487.035	452.964
			%	78,07	87,00	88,42	89,01
		Perdesaan	537.234	771.597	815.008	822.189	764.672
			%	65,64	84,40	86,88	87,43

Sumber: BAPPEDA KAB. KLATEN (hasil olahan)

***)2017 merupakan Data Konsolidasi Bersih Semester I-2017**

Sesuai Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi pada tahun 2019. Selain itu, berbagai program juga diarahkan untuk mencapai target akses universal (*universal acces*), yakni tercapainya akses 100 persen air minum dengan perincian 85 persen jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan (BJP) terlindungi dan 15 persen BJP tak terlindungi.

Upaya pemenuhan akses universal khususnya terkait air minum dan sanitasi dilakukan melalui PDAM, optimalisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, CSR, maupun program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, program Kotaku, Sanimas, USRI dan program lainnya.

4. Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2031, yang selama ini dijadikan pedoman oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, termasuk untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pemerintah kabupaten juga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten di wilayahnya. Sampai dengan Tahun 2017 belum ada bagian wilayah perkotaan yang ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/Kota.

Dari aspek pengendalian tata ruang, kondisi hingga Tahun 2015, diketahui tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 85,7%, dengan pengertian terdapat simpangan sebesar 14,7% seperti terlihat pada tabel 2.62. Hal ini menunjukkan perlu adanya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perlu peningkatan kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Tabel 2.62 Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang

No	Prosentase	%
1	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas rencana lahan pertanian	0,04
2	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	0,02
3	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas rencana lahan permukiman	19,14
4	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	8,86
5	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai, mata air, dan Rel KA terhadap total luas rencana lahan sempadan sungai, mata air, dan Rel KA	54,40
6	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai dan mata air terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	5,94
Total Simpangan (%)		14,7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

D. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam aspek penyediaan sarana permukiman yaitu hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan hunian baru dan layak bagi penduduk Kabupaten Klaten. Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten masih menjadi permasalahan dalam penyediaan sarana permukiman. Kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya rumah layak huni di Kabupaten Klaten setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun dalam penanganannya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni dimana pada tahun 2015 sebanyak 24.774 unit berkurang menjadi 23.884 unit pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 23.108 unit. Data jumlah rumah tidak layak huni Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Klaten

No.	Kecamatan	Tahun		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bayat	4530	4309	4261
2	Cawas	1523	1299	1263
3	Ceper	348	348	295
4	Delanggu	207	207	190

No.	Kecamatan	Tahun		
		2015	2016	2017
5	Gantiwarno	461	461	427
6	Jatinom	2128	1947	1890
7	Jogonalan	454	453	418
8	Juwiring	741	741	698
9	Kalikotes	399	386	379
10	Karanganom	528	518	474
11	Karangdowo	1172	1075	1038
12	Karangnongko	1264	1232	1201
13	Kebonarum	168	167	154
14	Kemalang	1372	1341	1314
15	Klaten Selatan	168	159	141
16	Klaten Tengah	375	369	360
17	Klaten Utara	195	195	184
18	Manisrenggo	1022	1013	975
19	Ngawen	521	514	492
20	Pedan	416	414	400
21	Polanharjo	143	143	119
22	Prambanan	729	719	695
23	Trucuk	2844	2842	2803
24	Tulung	1052	1051	1013
25	Wedi	1268	1248	1214
26	Wonosari	746	733	710
Total		24774	23884	23108

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

Masih belum tercapainya 100% cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi sebagai sarana dan prasarana permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Klaten dan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan adanya permukiman kumuh. Sesuai profil kumuh tahun 2014, luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten seluas 236,5 Ha.

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan stabilitas sosial politik melalui penciptaan kondusivitas daerah, peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara, peningkatan kesadaran politik dan demokratisasi, serta peningkatan kesadaran bela negara. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut maka akan semakin menumbuhkan kesadaran dalam keikutsertaan secara aktif sebagai pemilih dalam Pemilu.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Toma/ga dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan).

Memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos

Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu pelacuran dalam kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangannya bersifat fluktuatif, Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 2.63.

Minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Klaten jumlahnya juga bersifat fluktuatif, temuan terbesar terjadi pada tahun 2015, sedangkan paling sedikit pada tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.64

Tabel 2.64 Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Pelacuran Oleh Satpol PP Kabupaten Klaten Tahun 2017

NO	TAHUN	JUMLAH KEGIATAN	HASIL OPERASI PENERTIBAN					
			PGOT		PSK/ WTS	PASANGAN TIDAK RESMI	ANJAL/PUNK	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2013	10	6	5	7	20	4	6
2	2014	10	4	8	8	38	8	7
3	2015	10	11	5	10	50	8	2
4	2016	12	14	7	8	46	12	4
5	2017	15	15	8	6	58	12	14
SANKSI								
<ul style="list-style-type: none"> - Bagi profesi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan ; - Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang ; - Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut; - Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP. 								

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2018

Tabel 2.65 Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Oleh Satpol PP Kabupaten Klaten Tahun

NO	TAHUN	JUMLAH KEGIATAN	HASIL OPERASI PENERTIBAN			
			CIU	VODKA	ANGGUR PUTIH	ANGGUR MERAH
1	2013	5	60 liter	45 botol	2 dus	5 dus
2	2014	6	120 liter	60 botol	10 dus	20 dus
3	2015	6	200 liter	40 botol	5 dus	4 dus
4	2016	4	60 liter	-	2 dus	2 dus
5	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
SANKSI						
<ul style="list-style-type: none"> - Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu; - Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten. 						

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2018

- Adanya Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan Gerakan yang Bersifat Radikalisme yang Kadang Bersifat Laten serta Kenakalan Remaja.

Tabel 2.66 Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum di Kabupaten Klaten

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ancaman Terorisme	10	7	-	17	-
2.	Konflik Sara	6	5	-	17	3
3.	Gerakan Radikalisme	6	3	4	21	9
4.	Kenakalan Remaja	4	4	3	4	3

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

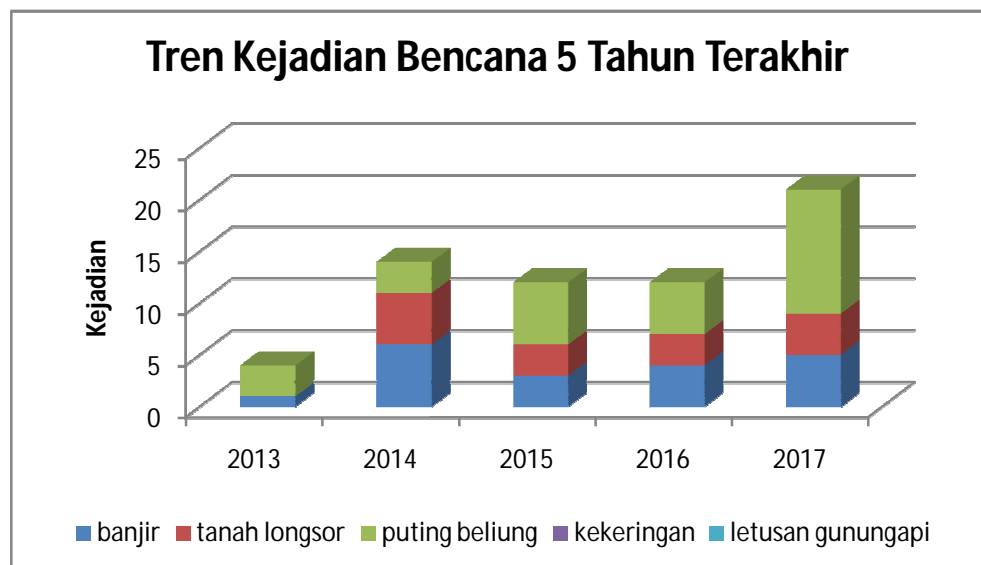
- Kebencanaan

Berikut adalah data kejadian bencana di Kabupaten Klaten yang terekam di dalam DIBI dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.67 dan gambar 2.21

Tabel 2.67 Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2013-2017

Jenis Bencana	Tahun (jumlah kejadian bencana)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Banjir	1	6	3	4	5
tanah longsor		5	3	3	4
puting beliung	3	3	6	5	12
Kekeringan					
letusan gunungapi					
Jumlah	4	14	12	12	21

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>



Gambar 2.21 Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2018

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>

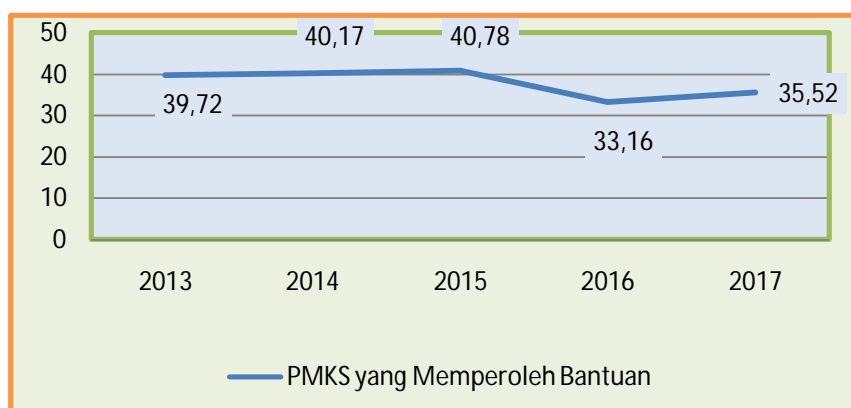
Dari Tabel 2.67 dan Gambar 2.21 bencana banjir adalah kejadian yang paling sering terjadi dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Klaten yaitu 19 kali, kemudian puting beliung 29 kali, dan tanah longsor 15 kali. Kejadian bencana tersebut berdampak kepada penduduk seperti menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan mengungsi. Selain itu, bencana juga menyebabkan kerusakan bangunan (rumah, fasilitas pendidikan dan kesehatan) serta lahan pertanian. Kejadian bencana tersebut langsung ditangani oleh pemerintah Kabupaten Klaten sampai tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Mitigasi dapat berupa struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan lain-lain, maupun dengan melakukan mitigasi non struktural dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menjaga kepekaan dan kesiapsiagaan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bencana. Di Kabupaten Klaten beberapa mitigasi baik struktural maupun non struktural telah dilakukan antara lain :

- a. pembangunan infrastruktur
- b. pengadaan peralatan siaga bencana,
- c. pembangunan taman kebencanaan
- d. pelatihan tanggap bencana,
- e. pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana,
- f. penyelenggaraan Sekolah Sungai,
- g. pembentukan Desa Tangguh Bencana. Sampai dengan tahun 2017 ada tiga desa tangguh bencana yang terbentuk yaitu Desa Ngandong (Kecamatan Gantiwarno), Sidorejo (Kemalang), dan Balak (Cawas).
- h. Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)

F. Bidang Sosial

Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan sosial diukur dengan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Gambaran PMKS yang memperoleh bantuan dapat dilihat pada Gambar 2.22.



Sumber: Dinas Sosial P3AKB, PP dan PA Kabupaten Klaten, 2018

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2016-2017 sudah dipihaki dengan penganggaran dana program dan kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD I,

dan APBD II. Dalam kurun waktu tersebut jumlah PMKS di Kabupaten Klaten bertambah sebanyak 4.052 jiwa. Salah satu bentuk pemihakan yang dilakukan dalam penanganan PMKS adalah dengan program pemberdayaan melalui KUBE, bantuan anggaran dari dana Bantuan Sosial, dan panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Perkembangan Penanganan PMKS Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel 2.68.

Tabel 2.68 Perkembangan Pemberian Bantuan Kepada PMKS Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017

Uraian	Jumlah	Prosentase
PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE		
Jumlah PMKS	138.984	
Jumlah Penerima KUBE	100	0,07 %
PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial		
Jumlah PMKS	138.984	
Penanganan PMKS	43.510	31,31 %
Panti Sosial (milik swasta)		
Jumlah panti	25	
Jumlah panti yang menyediakan sarpras pelayanan kessos	16	64 %

Tabel 2.69 Perkembangan Penanganan PMKS Kabupaten Klaten tahun 2016-2017

NO	JENIS PMKS	SATUAN	TAHUN		SUMBER DANA
			2016	2017	
1	Anak Terlantar	jiwa	645	625	APBD II/I
2	Anak Berhadapan dengan Hukum	jiwa	105	622	
3	Anak Jalanan	jiwa	40	-	APBD I
4	Anak Cacat	jiwa	238	250	APBN DAN APBD I
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	jiwa	50	-	APBD I
6	Lanjut Usia Terlantar	jiwa	50	2.550	APBN
7	Penyandang Cacat	jiwa	150	-	APBD II melalui PPCK
8	Bekas penderita penyakit eks kronis	jiwa	-	-	
9	Penyandang HIV/Aids	jiwa	-	-	
10	Tuna Susila	jiwa	-	-	
11	PGOT	jiwa	136	96	
12	Pekerja Migran bermasalah	jiwa	-	-	
13	Fakir Miskin melalui KUBE	jiwa	100	-	APBD I
14	Keluarga berumah tidak layak huni	jiwa	50	-	APBN
15	Keluarga bermasalah psikologis	jiwa	43	-	APBD I/II
16	Komunitas Adat Terpencil	jiwa	40	-	APBD I
17	Korban bencana alam	jiwa	119	2.112	APBD I
	Lain-lain :				
18	Pelayanan Adopsi	jiwa	22	24	
19	Pengunduran diri KIS	jiwa	386	389	
20	Rekomendasi BPJS	jiwa	899	1.601	
21	Kehabisan Bekal	jiwa	250	101	APBD II
22	Bansos tak direncanakan sebelumnya	jiwa	1.083	959	APBD II
23	Mayat terlantar	jiwa	14	8	APBD II
24	PKH	jiwa	41.597	40.732	APBN
	Jumlah		46.017	50.069	

Begitu pula upaya penanganan terhadap penyandang disabilitas juga cenderung bersifat fluktuatif. Gambaran jumlah penyandang disabilitas menurut kecamatan dan jenisnya dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70 Penderita Disabilitas Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2016

Kecamatan	Cacat Tubuh	Cacat Netra	Cacat Mental	Cacat Rungu dan Wicara	Cacat Ganda	Eks Psikotik	Fisik dan Mental
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Prambanan	110	40	32	14	7	29	37
02 Gantiwarno	155	51	44	18	8	49	90
03 Wedi	151	61	55	24	5	50	53
04 Bayat	150	88	52	30	10	55	41
05 Cawas	171	78	55	26	14	70	93
06 Trucuk	130	79	96	38	11	52	76
07 Kalikotes	93	43	14	12	6	28	34
08 Kebonarum	34	16	8	1	1	17	41
09 Jogonalan	135	75	43	14	8	42	47
10 Manisrenggo	92	37	41	13	3	41	57
11 Karangnongko	114	33	20	7	2	33	69
12 Ngawen	105	60	25	4	6	32	27
13 Ceper	85	50	40	11	6	66	84
14 Pedan	115	57	30	18	3	33	49
15 Karangdowo	133	68	26	20	5	38	35
16 Juwiring	121	79	68	23	5	42	80
17 Wonosari	128	51	44	25	10	29	55
18 Delanggu	56	42	25	17	7	39	56
19 Polanharjo	102	43	33	13	8	34	77
20 Karanganom	74	43	14	19	10	48	49
21 Tulung	115	54	21	12	1	27	33
22 Jatinom	114	48	49	16	6	29	44
23 Kemalang	85	50	23	8	1	23	51
24 Klaten Selatan	89	27	17	6	1	25	45
25 Klaten Tengah	31	21	8	4	2	18	25
26 Klaten Utara	51	28	18	6	6	14	24
Jumlah 2016	2.739	1.322	901	399	152	963	1372
2015	561	722	2.870	523	1023	797	
2014	2.810	1.020	1.697	995	481	984	
2013	2.436	850	1.049	714	383	811	

Sumber : Dinsos P3AKB Kab. Klaten, 2017

Dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Terhadap keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak

2.3.2. Fokus Pelayanan Penunjang

A. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015. Lingkungan merupakan tempat bagi kelangsungan makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara, harus bersih atau berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran, sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat.

Berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Klaten di masa datang adalah penyediaan air bersih, sanitasi, sampah, persoalan limbah,

dan polusi udara. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.71

Tabel 2.71 Timbulan Sampah dan Kapasitas Terangkut di Kabupaten Klaten

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (KK)	Timbulan Sampah (m3/hari)	Kapasitas Terangkut (m3/hari)	Prosentase Sampah Terangkut (%)
1	Bayat	18701	187,01	6,33	0,17%
2	Cawas	18309	183,09	8,00	0,22%
3	Ceper	20106	201,06	13,00	0,35%
4	Delanggu	11937	119,37	6,04	0,16%
5	Gantiwarno	10401	104,01	9,67	0,26%
6	Jatinom	15370	153,70	7,33	0,20%
7	Jogonalan	16384	163,84	14,67	0,40%
8	Juwiring	16901	169,01	16,00	0,43%
9	Kalikotes	9319	93,19	10,00	0,27%
10	Karanganom	13212	132,12	14,17	0,38%
11	Karangdowo	14051	140,51	12,04	0,33%
12	Karangnongko	10977	109,77	6,00	0,16%
13	Kebonarum	5766	57,66	5,17	0,14%
14	Kemalang	10496	104,96	12,67	0,34%
15	Klaten Selatan	10888	108,88	22,00	0,60%
16	Klaten Tengah	14547	145,47	36,00	0,97%
17	Klaten Utara	11480	114,80	14,33	0,39%
18	Manisrenggo	11990	119,90	7,00	0,19%
19	Ngawen	15356	153,56	10,00	0,27%
20	Pedan	13130	131,30	6,00	0,16%
21	Polanharjo	12714	127,14	7,00	0,19%
22	Prambanan	14559	145,59	18,00	0,49%
23	Trucuk	22482	224,82	8,00	0,22%
24	Tulung	14743	147,43	16,50	0,45%
25	Wedi	16495	164,95	14,50	0,39%
26	Wonosari	19188	191,88	7,67	0,21%
JUMLAH		369.502	3695,02	308,08	8,34%

Sumber : SSK Kabupaten Klaten, 2017

Besarnya jumlah sampah yang ditimbulkan dan belum terpadunya sistem pengelolaannya, maka menjadikan pemikiran bersama untuk mengantisipasi sejak dini, agar tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten di masa datang. Hal ini dilakukan karena masih rendahnya kesadaran dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta terbatasnya TPA di Kabupaten Klaten. Adapun TPA yang sudah tidak dapat difungsikan adalah TPA di Beteng, Jomboran, dan Joho, dan saat ini TPA yang masih berfungsi adalah TPA Candirejo dan mulai dialihkan ke TPA di Troketon Pedan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi persampahan perlu untuk terus dilakukan dan dikembangkan, mengingat jumlah Industri Kecil/UKM di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sudah mencapai 34.155 UMKM, 131 unit usaha industri menengah/besar dan 207 pusat perdagangan/pasar dan jumlah sentra Industri sebanyak 45 buah. Efek dari kegiatan industri di samping menghasilkan limbah cair juga menghasilkan limbah dan polusi udara. Sehingga limbah cair yang dihasilkan dari limbah industri perlu dipantau sebagai langkah pengendalian pencemaran, karena dengan bertambahnya kegiatan industri maka jumlah limbah yang dihasilkan berpotensi terhadap

pencemaran lingkungan, terlebih sebagian besar industri yang berada di Kabupaten Klaten belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL). Permasalahan lain terkait industri di bidang lingkungan adalah masih sedikitnya industri yang telah memiliki izin Amdal. Data terkait izin lingkungan/ perlindungan lingkungan dapat dilihat pada tabel 2.72

Tabel 2.72 Data Izin Lingkungan/ Perlindungan Lingkungan

Izin Lingkungan/ Perlindungan Lingkungan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Izin Amdal	1	0	-	0
Izin UKL /UPL	32	90	52	53
Izin SPPL	85	701	832	546
Izin Pembuangan Air limbah (IPAL)	1	4	1	3
Izin Penyimpanan sementara limbah B3	5	4	9	6
Izin Lingkungan	23	50	52	53

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Klaten, 2017

Pencemaran udara di Kabupaten Klaten di sebabkan oleh aktifitas kegiatan industri dan transportasi. Pencemaran berupa emisi gas ke udara berupa CO, CO², SO², NO², debu dan partikel, serta kebisingan. Untuk membuat lingkungan yang nyaman melalui penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) perlu adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Proporsi ruang terbuka hijau tersebut mencakup 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Proporsi RTH Kabupaten Klaten saat ini masih jauh dari harapan karena hanya sekitar 6,7%. Melihat kondisi RTH tersebut, masih ada kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu untuk mencapai angka 30%. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi ketentuan proporsi Ruang Terbuka Hijau Privat karena menyangkut kepentingan kepemilikan lahan.

Masih sedikitnya dokumen terkait data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Klaten merupakan salah satu permasalahan dalam inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan. Dokumen yang dimiliki terkait sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Klaten adalah SLHD/ IKPLHD dan MIH. Selain keterbatasan dokumen, di Kabupaten Klaten sendiri masih sangat kurang terkait optimalisasi unit laboratorium lingkungan dimana baru dapat menguji 4 parameter dari 7 parameter bidang lingkungan. Rendahnya data dan informasi serta sarana dan prasarana terkait lingkungan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Klaten dalam penegakan hukum di bidang lingkungan, dimana dinas terkait hanya menjalankan sebagai fungsi pengawas yang melakukan kegiatan pembinaan sehingga masih banyaknya angka pelanggaran di bidang lingkungan.

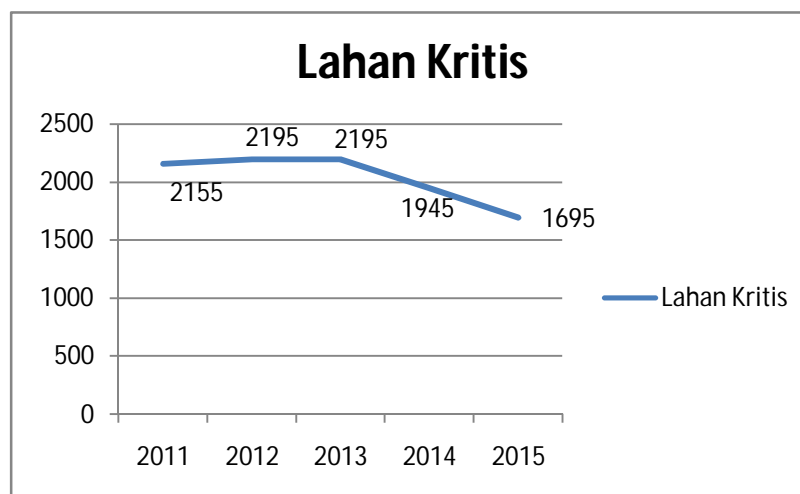
2. Kehutanan

Hutan di Kabupaten Klaten terdapat 2 (dua) jenis hutan yang masuk dalam kawasan hutan negara yaitu Hutan Lindung seluas 810,6 Ha dan Hutan Produksi seluas 639,8 Ha. Hutan negara ini dikelola oleh Perum

Perhutani, sedangkan hutan lainnya adalah Hutan Rakyat seluas 1.202 Ha. Kondisi dan letak hutan di Kabupaten Klaten di antaranya:

- a. Hutan Lindung, terletak di bagian barat dan secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kemalang yang mencakup Desa Tegalmulyo dan Desa Sidoharjo, serta berada di lereng Gunung Merapi pada ketinggian 700 – 1.200 m dpl.
- b. Hutan Produksi, terletak di 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu: *Kecamatan* Bayat, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Kalikotes. Hutan produksi ini terletak pada perbukitan Sekis –filit dan perbukitan kapur/batu gamping dengan ketinggian antara 300 – 500m dpl.
- c. Hutan Rakyat, hutan rakyat ini merupakan program pemerintah melalui program penghijauan dan *rehabilitasi* lahan serta konservasi tanah. Hutan Rakyat ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang mempunyai lahan kering, diantaranya Kecamatan: Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, Tulung, Prambanan, Bayat dan Wedi.

Sampai dengan saat ini masih terdapat lahan kritis seluas 1.695 Ha pada tahun 2015, mengalami penurunan seluas 250 Ha dibanding Tahun 2014 seluas 1.945 Ha. Sehingga masih diperlukan adanya Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, khususnya di wilayah kecamatan Kemalang, Tulung, Jatinom, Karangnongko, Bayat, Prambanan, Wedi, dan Cawas. Adapun perkembangan lahan kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada Gambar 2.23.



Gambar 2.23Perkembangan Lahan Kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2011–2015

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2016

Selain itu di Kabupaten Klaten juga terdapat pengembangan hasil hutan non kayu, meliputi: budidaya tawon madu serta penangkaran burung berkicau, seperti: burung jalak bali, kenari, jalak suren, murai, jalak putih, cucak rowo, perkutut, dan burung love bird sampai dengan saat ini di Kabupaten sudah terdapat 190 penangkar burung (yang sudah resmi terdaftar).

B. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) pentahapan, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan/ Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adapun jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada Tabel 2.73

Tabel 2.73 Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Jenis Akte	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kelahiran	30.505	27.550	23.503	22.356	23.256
2	Kematian	137	285	1.336	615	1.400
3	Perkawinan	499	435	595	441	450
4	Perceraian	55	56	58	58	58

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten, 2016

Selain itu untuk mewujudkan penerapan *single identity number* program e-KTP sampai dengan tahun 2017 baru tercatat penduduk yang ber-KTP sebanyak 910.556 orang.

1. Pemahaman masyarakat terhadap dokumen resmi kependudukan

Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang belum memiliki kartu identitas (baik kartu identitas dalam bentuk akta lahir dan Kartu Tanda Penduduk) dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 2.74. Adanya sejumlah masyarakat yang belum memiliki kartu identitas ini disebabkan adanya permasalahan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan perlu ditingkatkan, namun dengan adanya fenomena penurunan angka dari kurun waktu tahun 2013-2017 ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan ini sudah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun meskipun belum signifikan.

Tabel 2.74 Penduduk Kabupaten Klaten Belum Memiliki Akte Lahir Dan KTP Elektronik Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Belum Memiliki Akte LAhir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2013	1.108.611	196.521
2	2014	1.104.326	188.574
3	2015	967.452	106.872
4	2016	927.310	93.846
5	2017	894.986	91.538

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

2. Pelayanan dokumen administrasi kependudukan

Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten sudah menjadi kegiatan rutin oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab terkait akses dan inovasi pelayanan informasi dokumentasi administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Klaten. Peserta kegiatan sosialisasi ini

dalam kurun waktu tahun 2013-2017 sangat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75. Sosialisasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Dana (Rp.)	Peserta	Keterangan
1	2013	59.440.000	760	Camat, Kasi Tapem, Kades/Lurah, Kepala UPTD, Pekerja Sosial Tk. Kec, Penyuluh KB Tk. Kec, Ketua TP PKK Kec, Pokja IV Kecamatan, Pokja IV Kab, Toga, Toma, Pemuka Agama, IBI, Bikor, Forum Anak, SKPD Terkait
2	2014	49.855.000	550	TP PKK, Kades/ Lurah, Pemuka Agama, Aliran Kepercayaan, Klinik Bersalin, Dinas/ Instansi terkait
3	2015	107.802.000	625	Camat, TP PKK, Pemuka Agama, Kemenag, KUA, UPTD Pendidikan, Bikor, Instansi terkait
4	2016	75.000.000	500	Perangkat Desa/ Kelurahan, Kasi Tapem, PKK, Bhayangkari, Persit Candra Kirana, Bikor, Klinik Bersalin, Poliklinik, RS
5	2017	30.000.000	150	TP PKK, Bhayangkari, Persit Chandra Kirana, Bikor, IBI, UPTD Pendidikan, Instansi terkait

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, disamping untuk mendorong kemandirian desa juga untuk menanggulangi kemiskinan. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan didukung oleh lembaga dan atau konsultan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan.

Lembaga ekonomi perdesaan terdiri dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan Pasar Desa. Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa saat ini gencar untuk mengembangkan beberapa lembaga ekonomi pedesaan.

Jumlah BUMDes dalam kurun waktu tahun 2013-2014 masih relatif rendah karena belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada tahun 2015 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Dari 215 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. BUMDes Dasar sejumlah 47;
2. BUMDes Tumbuh sejumlah 89;
3. BUMDes Berkembang sejumlah 21; dan
4. BUMDes Maju sejumlah 4.

Selain BUMDes yang telah diklasifikasi, terdapat pula BUMDes yang belum diklasifikasi sebanyak 54 BUMDes dikarenakan baru terbentuk.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tabel 2.76 Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola oleh Desa
2013	25	40	5
2014	12	40	5
2015	28	40	5
2016	75	40	5
2017	56	40	5
Jumlah	196		

Lembaga ekonomi perdesaan lainnya yaitu Pasar Desa juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2013-2017 ada 7 jenis pelatihan sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

Tabel. 2.77 Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Pembuatan Aneka macam kue Pemanfaatan TTG di Desa Barepan Kec. Cawas peserta dari desa Barepan, Kedungampel, Tugu, Pakisan dan Desa Bendungan Masing-masing Desa sebanyak 5 (lima) orang	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Kalikotes dengan peserta dari semua desa se Kec. Kalikotes masing desa sebanyak 5 (lima) orang	1. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Drono peserta dari Desa Drono, Tempursari, Desa Ngawen Kec. Ngawen Desa Wiro Kec. Bayat Desa Ngawonggo Kec. Ceper	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmiliran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa Kebon dan Desa Gununggajah, Bayat 3. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipedesaan	1. Posyantek Kec. Cawas	1. Posyantek Kec. Kalikotes	1. Posyantek Kec. Ngawen	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karangnom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karangnom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
						2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)

Mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten, diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Data yang tersaji dalam pengembangan kawasan perdesaan hanya ada pada tahun 2016 dan 2017, dikarenakan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan ini baru dimulai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 hanya ada 1 data pengembangan kawasan pedesaan yaitu pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon, dan Desa Melikan di Kecamatan Wedi. Pengembangan kawasan perdesaan tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa, Penempatan lokasi tersebut di dasarkan pada hasil penelitian Universitas Tidar Kabupaten Magelang. Sedangkan pada tahun 2017 pengembangan kawasan desa ada 5 data pengembangan kawasan pedesaan dan masih dalam proses penyusunan RPKP, yaitu:

Pengembangan kawasan desa sentra batik di Desa Jarum, Banyuripan, Beluk dan Kebon di Kecamatan Bayat. Pengembangan kawasan desa batik tersebut telah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut sebagai sentra penghasil batik di Kabupaten Klaten.

Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik di Desa Tlingsing, Mlese, Balak dan Baran di Kecamatan Cawas. Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa secara umum maka diperlukan Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bintek) aparatur desa.

Selain itu sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pelaksanaan tertib administrasi keuangan desa menggunakan system aplikasi bernama SISKEUDES. Dan dalam penerapannya tidaklah serta merta sistem tersebut dapat teraplikasikan dengan baik, karena perlu adanya pendalaman untuk Pelatihan/ Bimbingan Teknis (Bintek) selanjutnya karena sistem SISKEUDESnya sendiri juga masih mengalami penyempurnaan. Berikut datanya,

Tabel 2.78. Pelatihan Siskeudes

No	DATA	2013	2014	2015	2016	2017
1	BINTEK SISKEUDES (ORANG)	-	-	-	391	417
2	BINTEK SID (ORANG)	-	-	-	-	183
3	APARAT YANG SUDAH BINTEK/PELATIHAN (ORANG)	343	391	-	-	48
4	INVENTARISASI ASET DESA	10	16	7	9	11
5	PERMASALAHAN ASET DESA	2	4	3	3	4

Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi di Desa Taskombang, Solodiran, Kranggan, dan Nagsri di Kecamatan Manisrenggo. Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi di Desa Balerante, Sidorejo, dan Bumiharjo di Kecamatan Kemalang. Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi tersebut sudah sesuai dengan potensi desa yang terletak di lereng gunung merapi. Rician tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.79. Lokasi Pengembangan Wisata.

Tabel 2.79. Lokasi Pengembangan Wisata

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
2013				
2014				
2015				
2016	Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan	Kecamatan wedi : Ds. Kaligayam, Ds. Kadilanggon, Ds. Melikan	Sudah menyusun RPKP	SK Bupati No. 050/221 Tahun 2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Kabupaten Klaten
2017	Kawasan Sentra Batik	Kecamatan Bayat : Ds. Jarum, Ds. Banyuripan, Ds. Beluk, Ds. Kebon	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Sentra Industri Lurik dan Pertanian Organik	Kecamatan Cawas : Ds. Tlingsing, Ds. Mlese, Ds. Balak, Baran	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Budaya Berbasis Ekonomi	Kecamatan Manisrenggo : Ds. Taskombang, Ds. Solodiran, Ds. Kranggan, Ds. Nagsri	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Alam Lereng Merapi	Kecamatan Kemalang : Ds. Balerante, Ds. Sidorejo, Ds. Bumiharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
Jumlah	5 kawasan			

D. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2013 sebanyak 25.905 peserta KB baru, tahun 2014 naik menjadi 28.254 peserta KB baru, dan pada tahun 2015 turun menjadi 23.559 peserta KB baru, tahun 2016 naik menjadi 28.254 peserta KB baru, namun pada tahun 2017 turun menjadi 26.481 peserta KB baru. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga sejahtera, dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.80

Tabel 2.80 Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
2013	204.998	25.905	168.751
2014	206.812	28.254	172.333
2015	203.448	23.559	154.422
2016	201.950	26.461	158.943
2017	211.577	23.783	169.626

Sumber : Kantor PP dan KB Kab. Klaten, 2018

Adanya keterbatasan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi serta bahan pendukung lainnya, juga masih terbatasnya jumlah penyuluh KB yang hanya berjumlah 69 orang membina 401 desa dan kelurahan, sedang idealnya 1(satu) PLKB membina 2-3 desa/kelurahan. Data terkait jenis metode kontrasepsi dan pelayanan yang telah dilakukan terlihat pada tabel 2.81

Tabel 2.81 Data Pelayanan KB Berdasarkan PUS Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Jenis Pelayanan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jumlah		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Rata-rata		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
%		100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos P3KB

2. Jumlah Keluarga Sejahtera

Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun 2012-2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2012 jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 68.039 jiwa, jumlah keluarga sejahtera-1 sebanyak 73.848, jumlah keluarga sejahtera sebanyak 211.962 jiwa, pada tahun terakhir (2016) jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 67.400 jiwa, jumlah keluarga sejahtera-1 sebanyak 83.239 jiwa, jumlah keluarga sejahtera sebanyak 239.583 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai hasil yang optimal. Jumlah keluarga sejahtera dan proses perkembangannya bisa terlihat pada tabel 2.82

Tabel 2.82 Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	3.866	4.345	8.083	16.294
02 Gantiwarno	3.567	4.009	5.037	12.641
03 Wedi	2.757	4.839	8.885	16.426
04 Bayat	6.570	3.306	9.584	19.200

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
05 Cawas	3.633	4.100	11.423	19.159
06 Trucuk	8.913	8.276	5.332	23.566
07 Kalikotes	1.971	2.432	6.777	11.180
08 Kebonarum	797	2.308	2.966	6.073
09 Jogonalan	3.311	4.014	11.214	18.539
10 Manisrenggo	2.355	9.399	2.823	14.574
11 Karangnongko	2.300	2.192	7.382	11.873
12 Ngawen	2.485	4.508	6.391	13.384
13 Ceper	1.585	6.411	12.035	20.031
14 Pedan	2.256	3.296	9.285	14.937
15 Karangdowo	3.079	480	8.050	15.209
16 Juwiring	3.273	3.713	10.373	17.359
17 Wonosari	5.488	7.274	5.549	18.311
18 Delanggu	2.453	3.331	7.063	12.847
19 Polanharjo	2.231	6.213	3.572	12.016
20 Karanganom	1.616	4.496	8.281	14.393
21 Tulung	4.252	6.061	5.632	15.945
22 Jatinom	5.411	6.540	5.930	17.881
23 Kemalang	2.441	2.460	7.367	12.268
24 Klaten Selatan	1.436	5.067	6.277	12.780
25 Klaten Tengah	1.016	2.885	8.056	11.957
26 Klaten Utara	1.873	2781	9.627	14.281
Jumlah 2017	80.935	114.736	192.994	393.124
2016	67,400	83,239	239,583	390,222
2015	68,814	80,446	236,200	385,460
2014	65,271	75,559	223,226	364,056
2013	67,205	74,637	216,320	358,162

Sumber: *Dissos P3AKB Kabupaten Klaten, 2018*

E. Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Klaten telah memiliki website yaitu www.klatenkab.go.id, sementara untuk warung internet (warnet) sudah menyebar di 26 kecamatan dan telah menjadi konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Penyiaran radio lokal terdapat 7 stasiun penyiaran (1 milik pemerintah daerah/RSPD, 6 lainnya milik swasta/komunitas) dan terdapat 7 buah surat kabar lokal.

Kurangnya informasi yang disampaikan di website Kabupaten Klaten disebabkan karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana dalam bidang komunikasi dan informasi. Jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Klaten juga dirasakan masih belum optimal, karena masih banyaknya wilayah yang minim akan akses internet. Hal ini juga menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam bidang komunikasi dan informasi. Selain itu, belum adanya sistem yang memadai dalam mendukung efisiensi pelayanan publik dan transparansi birokrasi menjadi kendala tersendiri bagi Kabupaten Klaten dalam komunikasi antar dinas pemerintahan dan masyarakat.

F. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai bagian pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten diantaranya meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat dari koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana

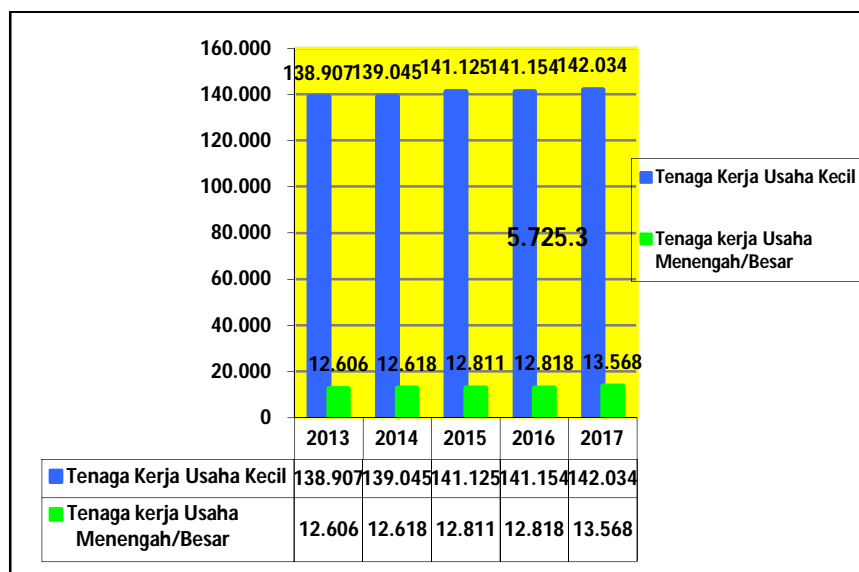
paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Data pengembangan usaha nasional di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada Tabel 2.83

Tabel 2.83 Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2013 – 2017

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Koperasi	890	890	905	943	883
2	KUD	34	34	34	34	34
3	Koperasi Aktif	534	534	543	566	581
4	Koperasi Tidak Aktif	356	356	362	377	302
5	Koperasi Sehat	10	10	11	12	14
6	Koperasi Cukup Sehat	524	524	532	554	567
7	Jumlah Pengusaha	Jumlah (Orang)				
	a).Pengusaha Kecil	34.251	34.155	34.666	34.672	34.760
	b).Pengusaha Menengah/Besar	130	131	133	134	159
8	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah (Orang)				
	a).Usaha Kecil	138.907	139.045	141.125	141.154	142.034
	b).Usaha Menengah/Besar	12.606	12.618	12.811	12.818	13.568

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, 2018

Penyerapan kerja yang terserap bersifat fluktuatif, terutama usaha kecil dari 138.907 orang pada tahun 2013 menjadi 142.034 orang pada tahun 2017. Sedangkan jumlah tenaga kerja usaha menengah/besar pada tahun 2013 sebanyak 12.606 orang menjadi sebanyak 13.568 orang pada tahun 2017. Gambaran trend jumlah tenaga kerjadi perusahaan kecil dan menengah/besar Tahun 2013–2017dapat dilihat pada Gambar 2. 24.



Gambar 2.24 Trend Jumlah Tenaga Kerja Di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2013 – 2017

Sumber : Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.78 tentang Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja cukup fluktuatif terutama pada usaha kecil. Hal ini disebabkan karena : 1) pemasaran produk, banyak produk-produk yang menumpuk pada para pelaku kecil, yang tentu sajasecara tidak langsung akan berdampak pada pemberhentian tenaga kerja; 2) disamping itu juga disebabkan karena faktor usaha musiman, yaitu bahwa pada musim-musim tertentu pelaku usaha akan kebanjiran pesanan

sehingga akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan begitu juga untuk sebaliknya di saat sepi pesanan.

Sedangkan kondisi UKM sampai dengan saat ini yang memiliki daya saing baru mencapai 5% dari total jumlah UKM sebanyak 34.760 unit usaha. Kemudian dari sejumlah 883 unit koperasi, sampai dengan tahun 2017, koperasi yang aktif sebanyak 581 unit, yang sehat sebanyak 14 unit dan cukup sehat sebanyak 567 unit koperasi dengan manager yang memiliki sertifikat baru ada 65 orang. Sedangkan untuk penurunan jumlah koperasi pada tahun 2017 disebabkan adanya penutupan sejumlah koperasi yang betul-betul sudah tidak aktif dan tidak operasional.

Disamping itu di Kabupaten Klaten juga telah menetapkan 7 (tujuh) Produk Unggulan Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 050/84 Tahun 2016 yaitu Batik, Lurik, Konveksi, Mebel, Logam, Keramik dan Tembakau. Disamping itu Kabupaten Klaten juga telah memiliki 11 (sebelas) Klaster UKM yaitu Klaster Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Mebel, Logam, Handycraft, Makanan Olahan, Lereng Merapi, Desa Wisata dan Minapolitan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 050/91 Tahun 2017.

Pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola klaster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi *trademark* dan *brand image* bagi Kabupaten Klaten.

G. Bidang Statistik

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pengendalian evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

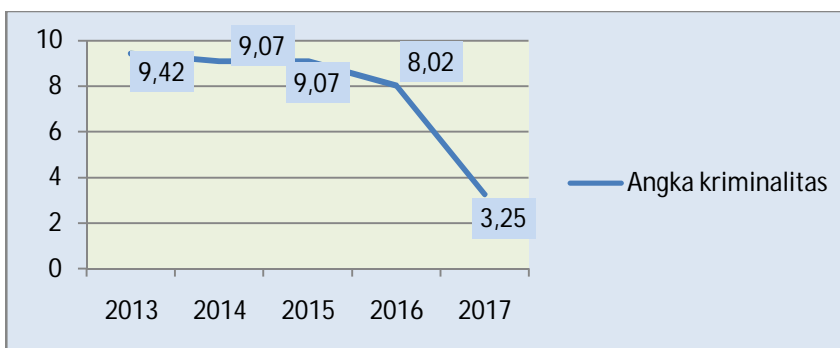
Kualitas data diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: akurat, relevan, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), koheren (*coherence*) yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi (*interpretability*). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan 3 (tiga) langkah: (i) Peningkatan kualitas data; (ii) Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; dan (iii) Peningkatan kapasitas SDM.

Dalam upaya mewujudkan data dan informasi pemerintah Kabupaten Klaten menerbitkan dokumen Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA), Kajian Ekonomi Daerah (KED), Input-Output, Profil Desa, Profil Daerah, Evaluasi RKPD, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Semua dokumen ini dimaksudkan sebagai ukuran kinerja daerah untuk setiap tahunnya.

H. Bidang Persandian

1. Angka Kriminalitas

Adapun angka kriminalitas di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 sebagaimana Gambar 2.25.



Gambar 2.25.

Angka Kriminalitas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber: *Kesbangpol 2018, (diolah)*

Sedangkan kondisi jumlah tindak pidana atau tindak kejahatan di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 cenderung semakin menurun, dari 888 tindak kejahatan pada tahun 2013 menjadi 546 tindak kejahatan pada tahun 2017. Jumlah tindak kejahatan yang relatif menurun di Kabupaten Klaten disebabkan karena intensifnya pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan ketertiban umum, penegakan hukum dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum. Gambaran jumlah tindak kejahatan pada tahun 2013-2017 di Kabupaten Klaten, dapat dilihat pada Tabel 2.84

Tabel 2.84 Data Jumlah Kejahatan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

NO	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	POLRES KLATEN	415	392	298	211	122
2	POLSEK KLATEN	45	34	38	33	15
3	POLSEK KETANDAN	41	44	54	54	37
4	POLSEK KEBONARUM	10	12	6	8	9
5	POLSEK WEDI	34	13	23	18	14
6	POLSEK JOGONALAN	23	9	12	22	21
7	POLSEK GANTIWARNO	10	8	4	15	8
8	POLSEK PRAMBANAN	36	29	28	35	43
9	POLSEK MANISRENGGO	12	13	15	14	18
10	POLSEK KEMALANG	14	11	19	22	14
11	POLSEK KARANGNONGKO	7	3	7	7	7
12	POLSEK JATINOM	14	15	17	9	6
13	POLSEK KARANGANOM	15	7	8	7	16
14	POLSEK TULUNG	11	9	11	11	22
15	POLSEK POLANHARJO	10	17	9	9	11
16	POLSEK DELANGGU	47	19	18	30	22
17	POLSEK WONOSARI	30	22	30	21	14
18	POLSEK JUWIRING	14	19	17	7	23
19	POLSEK CEPER	20	10	16	32	27
20	POLSEK PEDAN	27	18	22	16	36
21	POLSEK KARANGDOWO	7	4	15	17	14
22	POLSEK TRUCUK	13	12	24	24	12
23	POLSEK CAWAS	8	15	12	6	11
24	POLSEK BAYAT	14	15	14	12	12
25	POLSEK KALIKOTES	11	10	13	8	12
JUMLAH		888	760	730	648	546

Sumber : *Polres Kabupaten Klaten, 2018*

2. Kualitas Kehidupan Demokrasi

Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu dalam kurun waktu tahun 2013-2015 bersifat fluktuatif. Partisipasi masyarakat di dalam pemilu paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu pada saat Pemilu Legislatif, sedangkan partisipasi paling rendah terjadi pada tahun 2013 yaitu pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa

Tengah. Hal ini dikarenakan salah satunya banyaknya penduduk yang bekerja dan sekolah diluar daerah provinsi.

Tabel 2.85 Data Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Klaten

No	Pemilu	Jumlah Partisipasi Masyarakat
1.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	74,76 %
2.	Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014	75,73%
3.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	57,49 %
4.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015	68,23 %

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Klaten, 2018

I. Bidang Perpustakaan

Pada tahun 2017 jumlah perpustakaan desa sebanyak 43 unit dan perpustakaan kelurahan sebanya 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Adapun perkembangan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86 Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	36020	38481	41464	43979	44687
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	6.842	7.648	7.673	40.003	41.225

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

1. Pengunjung Perpustakaan

Jumlah angka pengunjung perpustakaan Kabupaten Klaten dapat menggambarkan minat baca masyarakat Kabupaten Klaten. perkembangan lima tahun terakhir minat baca masyarakat mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Tabel 2.87 Jumlah Pengunjung berdasarkan kalangan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Umum	14
2	Instansi	2
3	Mahasiswa	23
	JUMLAH	39

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengunjung perpustakaan di tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 97,03 % dari tahun sebelumnya. Jumlah pengunjung di tahun tahun 2017 jumlah pengunjung sebanyak 41.225, ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 40.003.

2. Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perpustakaan

Di kantor arsip dan perpustakaan terdapat beberapa Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.88 Jenis Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

NO	URAIAN
1	SOP Pelayanan Perpustakaan Umum
2	SOP Pelayanan Perpustakaan Keliling
3	SOP Rolling Buku
4	SOP Pembinaan dan Pembenahan Arsip
5	SOP Peminjaman Arsip

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 2018

Dari beberapa jenis SOP diatas, SOP yang berdampak langsung terhadap pengunjung adalah SOP pelayanan Perpustakaan Umum dan SOP Pelayanan Perpustakaan Keliling. Meskipun SOP pelayanan sudah ada namun pelayanan di Perpustakaan dinilai masih kurang bagus dan masih perlu diperhatikan dan disempurnakan, Karena ada banyak faktor yang mendukung untuk terwujudnya pelayanan prima, selain SOP juga adanya ketersediaan SDM yang kompeten di bidangnya.

3. Perpustakaan Desa

Seiring dengan berkembangnya jaman dan berkembangnya jenis bahan bacaan untuk memenuhi kebutuhan baca masyarakat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi maka bermunculan perpustakaan di lingkup desa. Berikut jumlah perpustakaan yang sudah terbentuk di desa-desa bisa dilihat dalam tabel 2.89.

Tabel 2.89 Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2017

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	DESA	KECAMATAN
1	Perpustakaan Desa Krakitan	Krakitan	Bayat
2	Perpustakaan Desa Paseban	Paseban	Bayat
3	Perpustakaan Desa Ceper	Ceper	Ceper
4	Perpustakaan Desa Jambu Kulon	Jambu Kulon	Ceper
5	Perpustakaan Desa Delanggu	Delanggu	Delanggu
6	Perpustakaan Desa Towangsan	Towangsan	Gantiwarno
7	Perpustakaan Desa Bengking	Bengking	Jatinom
8	Perpustakaan Desa Bonyokan	Bonyokan	Jatinom
9	Perpustakaan Desa Cawan	Cawan	Jatinom
10	Perpustakaan Desa Tibayan	Tibayan	Jatinom
11	Perpustakaan Desa Ngering	Ngering	Jogonalan
12	Perpustakaan Desa Titang	Titang	Jogonalan
13	Perpustakaan Desa Jogosetran	Jogosetran	Kalikotes
14	Perpustakaan Desa Kalikotes	Kalikotes	Kalikotes
15	Perpustakaan Desa Tambongwetan	Tambongwetan	Kalikotes
16	Perpustakaan Desa Gempol	Gempol	Karanganom
17	Perpustakaan Desa Karang	Karang	Karanganom
18	Perpustakaan Desa Pondok	Pondok	Karanganom
19	Perpustakaan Desa Bakungan	Bakungan	Karangdowo
20	Perpustakaan Desa Karangtalun	Karangtalun	Karangdowo
21	Perpustakaan Desa Sentono	Sentono	Karangdowo
22	Perpustakaan Desa Basin	Basin	Kebonarum
23	Perpustakaan Desa Karangduren	Karangduren	Kebonarum
24	Perpustakaan Desa Keputran	Keputran	Kemalang
25	Perpustakaan Desa Gayamprit	Gayamprit	Klaten Selatan
26	Perpustakaan Desa Kabupaten	Kabupaten	Klaten Tengah
27	Perpustakaan Desa Barenglor	Barenglor	Klaten Utara

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	DESA	KECAMATAN
28	Perpustakaan Desa Nglinggi	Nglinggi	Klaten Selatan
29	Perpustakaan Desa Ngawen	Ngawen	Ngawen
30	Perpustakaan Desa Ponggok	Ponggok	Polanharjo
31	Perpustakaan Desa Sidowayah	Sidowayah	Polanharjo
32	Perpustakaan Desa Joho	Joho	Prambanan
33	Perpustakaan Desa Pereng	Pereng	Prambanan
34	Perpustakaan Desa Palar	Palar	Trucuk
35	Perpustakaan Desa Puluhan	Puluhan	Trucuk
36	Perpustakaan Desa Daleman	Daleman	Trucuk
37	Perpustakaan Desa Majegan	Majegan	Tulung
38	Perpustakaan Desa Pucangmiliran	Pucangmiliran	Tulung
39	Perpustakaan Desa Sukorejo	Sukorejo	Wedi
40	Perpustakaan Desa Gunting	Gunting	Wonosari
41	Perpustakaan Desa Tronanggan	Tronanggan	Ngawen
42	Perpustakaan Kelurahan Gergunung	Gergunung	Klaten Utara
43	Perpustakaan Desa Sapen	Sapen	Manisrenggo
44	Perpustakaan Desa Talun	Talun	Kemalang
45	Perpustakaan Kelurahan Kota	Kota	Klaten Tengah

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 2018

Perkembangan dalam lima tahun terakhir jumlah perpustakaan yg ada di desa-desa Kabupaten Klaten bisa dilihat pada tabel 2.90

Tabel 2.90 Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017

NO	Tahun	JUMLAH PERPUSTAKAAN
1	2017	45
2	2016	44
3	2015	44
4	2014	42
5	2013	40

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

Dari tabel di atas perkembangan lima tahun terakhir bahwa terdapat peningkatan jumlah perpustakaan yang didirikan di desa-desa setiap tahunnya. Namun demikian jumlah perpustakaan desa sampai dengan tahun terakhir hanya sejumlah 45 desa dari 391 desa. Dengan demikian hanya 11,50 %.

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Kepustakawanan

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pendukung kualitas layanan dan tercapainya target kinerja dari pelayanan. Untuk bidang Perpustakaan ketersediaan SDM Kepustakawanan memang sangat diperlukan. Jumlah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Perpustakaan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.91

Tabel 2.91 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

TOTAL PEGAWAI		25
MENURUT PENEMPATAN		
1	Sekretariat	7
2	Bidang Arsip	8
3	Bidang Perpustakaan	10
MENURUT JENIS KELAMIN		
1	Pria	12
2	Wanita	13
MENURUT PENDIDIKAN FORMAL		
1	Pendidikan S2	2
2	Pendidikan S1	8
3	Pendidikan D3, D2, D1	5
4	Pendidikan SLTA	9
5	Pendidikan SLTP	1
MENURUT GOLONGAN		
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	14
3	Golongan II	9
4	Golongan I	-

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten 2018

J. Bidang Kearsipan

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset pemerintah daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebanyak 65.526 arsip, dan pada tahun 2017 sudah mencapai 78.434 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.92

Tabel 2.92 Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Arsip	Jumlah	65.526	71.161	68.700	74.700	78.434

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

Pelayanan arsip untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip.

Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi arsip dan semakin mutakhirnya pengelolaan kearsipan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Daerah.

Begitu pentingnya pengelolaan arsip bagi suatu instansi, SKPD, desa, atau kelurahan, maka perlu adanya peningkatan kualitas dalam pengelolaan dan penataan arsip daerah.

K. Bidang Umum Pemerintahan

Di samping berdasarkan urusan wajib, dan urusan pilihan Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, penganggaran, pengawasan dan kepegawaian.

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu Tahun 2014. Sebanyak 17 orang dari Fraksi PDIP, 8 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PAN, 7 orang dari Fraksi Keadilan Sejahtera, 4 orang dari Fraksi PHN

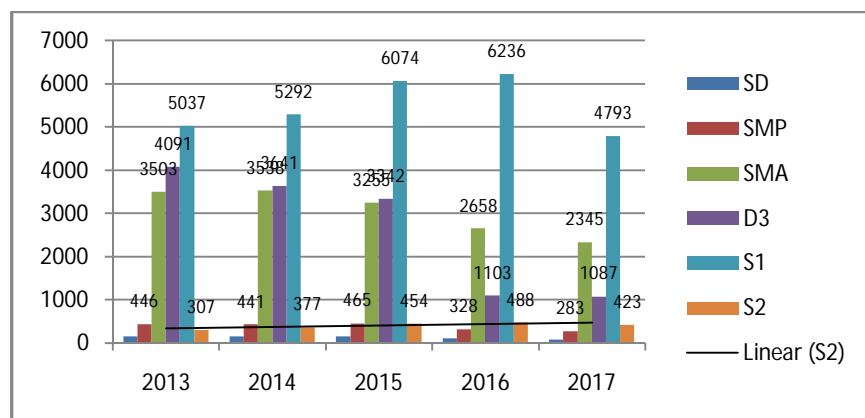
(Pembangunan Hati Nurani), 4 orang dari PKN (Partai Kebangkitan Nasional). Dari sebanyak 50 orang anggota DPRD, terbagi ke dalam 4 komisi, yaitu: (i) Komisi I sebanyak 10 orang, (ii) Komisi II sebanyak 12 orang, (iii) Komisi III sebanyak 10 orang, dan (iv) Komisi IV sebanyak 13 orang. Selama kurun waktu 2014-2015, DPRD periode 2014-2019 telah menghasilkan beberapa produk hukum. Sebagai gambaran kinerja DPRD diukur dari jenis dan jumlah keputusan selama tahun 2013 -2017 berupa Perda, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, keputusan panitia anggaran dan keputusan panitia musyawarah, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.93

Tabel 2.93 Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD 2013 - 2017

No	Komisi	Fraksi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perda	22	12	13	19	11
2	Keputusan DPRD	47	38	32	50	38
3	Keputusan Pimpinan DPRD	18	23	22	17	18
4	Keputusan Panitia Anggaran	7	6	9	8	18
5	Keputusan panitia Musyawarah	12	13	16	16	12
	Jumlah	106	92	92	110	97

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten, 2018

Dipihak lain, berdasar data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten, pada tahun 2017 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten telah mencapai sebanyak 10.756orang. Gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Gambar 2.26.



Gambar 2.26 Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

Sumber : BKD Kabupaten Klaten, 2016

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah mengamanatkan bahwa pembentukan perangkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus dengan pertimbangan rasional, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Klaten pada bulan Oktober 2017 telah mengesahkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan mulai di implementasikan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2017.

Melalui peraturan yang ditetapkan, terjadi pembengkakan jumlah jabatan struktural, yang berakibat juga pada struktur organisasinya. Jumlah Dinas bertambah dari 10 (2011) menjadi 16 (2017), kemudian Kantor berkurang

dari 6 (2011) menjadi 1 (2017), jumlah Badan dari 5 (2011) menjadi 4 (2017) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas bertambah dari 75 (2007) menjadi sebanyak 87 (2010). Guna upaya meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah, maka perlu diterapkan sistem merit dalam penempatan jabatan.

L. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan pengamatan terhadap bahan galian dan pertambangan (sumber daya mineral) yang ada di Kabupaten Klaten, bahan galian tersebut pada umumnya termasuk dalam galian golongan C, dapat dilihat pada disajikan pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94 Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m3)	Keterangan
1.	Andesit Karangdowo	Desa Ringin Puiti, Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	1.424.933	Jumlah deposit layak ditambang, belum banyak dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan bangunan
2.	Batu Gamping Kalkarenit	Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat	100.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan
3.	Batu Gamping Keras	Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes	280.803	Masih dapat ditambang, namun jika terlalu dalam mengakibatkan kecelakaan penambangan
		Desa Wiro, Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	277.060	
4.	Batu gamping Nummulites	Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
5.	Batu pasir Tufaan	Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
6.	Gabro dan Diorite	Desa Jerukan, Desa Gampingan, Kecamatan Bayat	60.000	Jumlah deposit layak ditambang dapat digunakan kontruksi dan bahan uruk
7.	Lempung Aluvial	Desa Mlese, Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno	6.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku batu merah
		Desa Semenden, Kecamatan Karangnongko	6.300	
		Desa Rejoso, Desa Pakahan, Desa Kwaran, Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan,	309.000	
		Desa Basin, Desa Gondang Kecamatan Kebonarum	1.895.100	
		Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Nginggi Kec. Klaten Selatan	103.500	
8.	Lempung Residual	Desa Beluk, Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat	85.950	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku keramik, gerabah, genteng dan bata
9.	Marmer	Desa Bawak, Kecamatan Cawas	75	Jumlah deposit tidak layak ditambang,
10.	Pasir Vulkanik & Andesit Vulkaniki	Desa Balerante, Desa Sidorejo, Desa Taluh, Desa Panggang	3.133.849	Jumlah deposit layak ditambang, kualitas pasir vulkanik sangat baik untuk bahan bangunan
11.	Zeolit	Desa Nengahan, Kec. Bayat	100	Deposit tidak layak ditambang

Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

M. Pertanahan

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada urusan

pertanahan. Penerbitan pada kurun waktu 2011-2015 bersifat fluktuatif. Adapun gambaran Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2011-2015 dan sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95 Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2015-2017

No	Detail Kegiatan (Bulan)	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	1,164	1,456	1,010
2	Februari	995	1,099	577
3	Maret	1,179	1,006	590
4	April	1,049	907	1,565
5	Mei	1,171	2,539	1,195
6	Juni	1,241	1,691	1,145
7	Juli	823	875	2,491
8	Agustus	1,191	1,236	2,055
9	September	917	1,281	2,258
10	Oktober	776	843	11,236
11	November	1,251	1,189	5,485
12	Desember	1,021	669	4,365
TOTAL		12,778	14,791	33,972

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, 2017

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pendapatan dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula pengeluaran rumah tangga. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.96

Tabel 2.96 Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2011–2015 (dalam persen)

<i>Golongan Pengeluaran</i>	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
< 40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000 – 59.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000 – 79.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000 – 99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000 – 149.999	0,64	1,31	1,09	1,02	0,71
150.000 – 199.999	5,01	5,19	5,25	5,11	3,17
200.000 – 299.999	24,56	26,41	25,66	23,07	12,07
> 300.000	69,79	67,09	68,00	70,80	84,05
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk menurut golongan pengeluaran, pada tahun 2015 terjadi peningkatan untuk golongan > Rp.300.000,- sedangkan untuk golongan lainnya mengalami penurunan. Meskipun uang yang dibelanjakan tidak dapat untuk mengkonsumsi banyak pilihan, sedangkan pendapatan tidak ada perubahan/penambahan, maka ada kecenderungan untuk

tidak membeli barang yang sifatnya tidak mendesak karena uang yang dimiliki tidak mencukupi. Pergeseran ke kelompok pengeluaran yang lebih tinggi karena adanya peningkatan harga-harga kebutuhan yang harus dicukupi.

Tabel di bawah ini menunjukkan sebagian besar pengeluaran penduduk adalah untuk makanan dibanding untuk non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan makan sebagai kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan non makan yang sifatnya sekunder. Pemenuhan kebutuhan makanan cenderung menurun, pada tahun 2011 sebesar 55,14% , dan pada tahun 2015 menjadi 48,07%, sebaliknya untuk pemenuhan non makanan pada tahun 2011 sebesar 44,86%, dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 51,93%. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.97

Tabel 2.97 Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011– 2015

Rata-rata Pengeluaran Penduduk	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan	55,14	51,30	51,23	51,21	48,07
2. Non Makanan	44,86	48,70	48,77	48,79	51,93
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

A. Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat dari produk wisata dan pasar wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten antara lain mencakup:

1. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada pada Tabel 2.98

Tabel 2.98 Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Sunan Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganom
12.	Candi Plaosan, Sojiwan, Sewu dan Candi Bubah	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Ponggok, Nganten, Siblarak dan	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
	Umbul Nilo		
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Susuhan	Wisata Air	Kec. Ngawen
18.	Umbul Brintik, Brondong, Geneng dan Umbul Pluneng	Wisata Air	Kec. Kebonarum
19.	Desa Wisata Bugisan	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Prambanan
20.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
21.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
22.	Desa Wisata Sidowayah	Wisata Air, Outbond, Kampung Dolanan dan Oase	Kec. Polanharjo
23.	Desa Wisata Soropaten	Wisata Budaya	Kec. Karanganyam
24.	Desa Wisata Beku	Wisata Air dan Outbond	Kec. Karanganyam
25.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Wisata Budaya, Sejarah dan Industri	Kec. Prambanan
26.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
27.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
28.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
30.	Desa Wisata Paseban	Wisata Religi, Budaya dan Industri	Kec. Bayat
31.	Desa Wisata Gunung Gajah	Wisata Alam	Kec. Bayat
32.	Desa Wisata Jotangan	Wisata Alam	Kec. Bayat
33.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
34.	Desa Wisata Karangnongko	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Karangnongko
35.	Desa Wisata Balerante	Wisata Alam dan Air	Kec. Kemalang
36.	Desa Wisata Sidorejo	Wisata Alam dan Agro	Kec. Kemalang
37.	Desa Wisata Tegalmulyo	Wisata Alam, Outbond dan Embung	Kec. Kemalang
38.	Desa Wisata Nglinggi	Wisata Pemancingan dan Kuliner	Kec. Klaten Selatan
39.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
40.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Klaten , 2018

Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah masih perlunya peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan. Serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

2. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

3. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwu di Deles.

4. Jumlah Obyek Wisata Dan Pengunjung

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.99

Tabel 2.99 Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2013	82	256.150	50	1	0,5	350	500
2014	82	320.687	185	1	0,5	475	750
2015	82	329.021	220	1	0,5	550	1.000
2016	82	377.409	372	1	1	750	1.500
2017	82	320.693	510	1	1	1.000	2.000

Sumber: Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.99 dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relative lebih sedikit. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh karena banyaknya bermunculan destinasi wisata baru di wilayah sekitar Kabupaten Klaten yang dikelola oleh Bumdes maupun swasta, sehingga banyak pengunjung yang ingin merasakan suasana yang baru dan destinasi alternatif. Sedangkan wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung di Candi Prambanan. Selain itu juga kurangnya promosi pariwisata dan belum dimilikinya Kawasan Wisata Unggulan serta masih kurangnya sarana prasarana pendukung pariwisata.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,5 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relative belum begitu besar, untuk wisatawan nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,-

Tabel 2.100 Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Jenis Obyek Wisata/ Perayaan	Target (Rp. 000)					Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perayaan Padusan	57.500	57.500	57.500	52.500	52.500	57.500	57.500	57.500	52.500	57.500
2	Perayaan	26.450	26.000	26.000	28.000	28.000	21.000	26.100	26.000	28.000	28.000

No	Jenis Obyek Wisata/ Perayaan	Target (Rp. 000)					Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	Maleman										
3	Perayaan Syawalan	86.250	47.000	47.000	51.700	51.700	46.080	47.000	47.000	51.700	52.500
4	Perayaan Yagowiyu	23.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
5	Deles Indah	11.500	12.500	12.500	14.000	14.000	4.379,4	12.500	12.500	14.000	15.600
6	OMAC	679.000	555.045	555.045	600.000	600.000	437.956	481.149	559.175	609.976	739.919
7	Jombor Permai	86.250	62.500	62.500	65.000	65.000	86.250	72.915	68.205	65.495	68.050
8	Makam Pandanaran	57.500	100.000	100.000	134.000	114.000	37.590,85	162.900	152.300	143.300	144.500
9	Makam Ronggowarsito	1.180	1.605	1.605	1.800	1.800	1.250	1.740	1.880	1.890	2.000
10	Pemandian Jolotundo	17.250	22.000	22.000	24.200	24.200	6.300	22.000	22.017,5	24.200	50.170
11	Candi Plaosan	690	2.500	2.500	5.000	50.000	623,5	7.101	7.758	53.883	80.454
12	Makam Ki Ageng Gribig	1.725	2.000	2.000	3.000	3.000	1.725	2.000	2.000	3.000	3.030
13	Lain-lain	10.350	21.350	21.350	21.350	21.350	6.425	20.717	21.350	23.850	13.450
	Jumlah	1.058.645	910.000	910.000	1.000.550	1.025.550	727.679,75	913.622	977.685,5	1.071.794	1.255.173

Sumber data : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih belum optimal. Pada tahun 2013 realisasi pendapatan tidak memenuhi target, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2014-2017 pencapaiannya diatas target, tetapi masih belum signifikan. Sehingga pendapatan dari sektor pariwisata tersebut masih perlu dioptimalkan.

B. Pertanian

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km². Pada Tahun 2017 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 33.022 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.581 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 25.996 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19,012 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10,877 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 1.484 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1,649 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering.

Adapun Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.101

Tabel 2.101 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Lahan Bukan Pertanian (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.240	13	1.190	2.443
02 Gantiwarno	1.625	155	784	2.564
03 Wedi	1.553	18	867	2.438
04 Bayat	814	785	2.344	3.943
05 Cawas	2.314	46	1.087	3.447
06 Trucuk	1.907	2	1.472	3.381
07 Kalikotes	750	8	540	1.298
08 Kebonarum	716	2	249	967
09 Jogonalan	1.571	1	1.098	2.670
10 Manisrenggo	1.508	139	1.049	2.696

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Lahan Bukan Pertanian (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Karangnongko	764	851	1.059	2.674
12 Ngawen	1.038	8	651	1.697
13 Ceper	1.526	7	912	2.445
14 Pedan	868	445	604	1.917
15 Karangdowo	2.046	69	808	2.923
16 Juwiring	1.996	12	972	2.979
17 Wonosari	2.213	14	892	3.114
18 Delanggu	1.292	1	576	1.878
19 Polanharjo	1.820	92	473	2.384
20 Karanganom	1.679	11	716	2.406
21 Tulung	1.735	467	997	3.200
22 Jatinom	602	1.543	1.406	3.553
23 Kemalang	54	1.848	3.264	5.166
24 Klaten Selatan	799	3	641	1.443
25 Klaten Tengah	291	1	600	892
26 Klaten Utara	301	40	680	1.041
Jumlah 2017	33.022	6.581	25.996	65.556
2016	33.066	6.581	25.909	65.556
2015	33.111	6.581	25.684	65.556
2014	33.166	6.581	25.809	65.556
2013	33.220	6.581	25.755	65.556

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.102

Tabel 2.102 Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukkan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
2017	45,7611	40,2981	4,515	-	0,948	45,7611
2016	45,392	33,058	8,910	0,113	3,311	45,392
2015	55,230	40,899	13,663	-	0,668	55,230
2014	54,140	40,480	13,660	-	-	54,140
2013	79,7688	44,893	31,160	-	3,7158	79,7688

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018

Di Kabupaten Klaten juga dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten. Hal ini mengingat sampai dengan saat ini pengembangan kawasan Agropolitan belum dapat direalisasikan.

Tabel 2.103 Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	2013		2014		2015		2016		2017	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	65.552	63.145	65.678	65.671	69.158	68.661	76.029	73.627	74.964	73.962
2	Jagung	9.665	9.664	15.256	11.427	11.784	11.484	9.682	9.549	11.713	11.085
3	Kedelai	742	676	2.245	2.244	2.820	2.816	1.935	1.523	2.562	2.234
4	Kacang Tanah	1.954	1.927	2.102	1.919	2.074	2.073	1.224	1.067	955	909
5	Kacang Hijau	80	75	180	175	116	115	350	299	240	228
6	Ubi Kayu	827	631	801	704	707	707	822	685	435	395
7	Ubi Jalar	123	86	124	108	32	28	24	20	26	21

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018

Tabel 2.104 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	2013		2014		2015		2016		2017	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
1	Padi	406.674	59,64	359.474	56,12	437.623	63,29	426.028	57,87	380.268	51,41
2	Jagung	80.140	82,93	87.422	76,50	94.416	82,22	72.583	74,97	90.343	81,50
3	Kedelai	823	12,17	3.485	15,52	5.656	20,06	2.759	18,12	4.440	19,87
4	Kacang Tanah	2.379	12,18	713,24	3,72	3.151	15,20	1.784	14,58	1.527	16,79
5	Kacang Hijau	97	12,13	284.608	15,81	134.634	11,61	260	8,72	285	12,50
6	Ubi Kayu	14.623	231,74	11.992	170,35	20.370	288,12	32.224	392,11	9.778	224,99
7	Ubi Jalar	1.193	138,32	1.215	112,54	369,15	131,84	356	143,55	251	119,28

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.103 dan 2.104 terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi. Produksi tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 437.623 Ton dan terendah pada tahun 2014 sebesar 359.474 Ton.

Tabel 2.105 Produksi Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	PRODUKSI (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tebu					
2	Tembakau Rajangan	1.026,890	1.201,755	2.191,360	2.193,575	1.233,527
3	Tembakau Asepan	1.640,374	1.167,656	1.164,270	1.038,530	1.070,724
4	Tembakau Vorsterland	109,000	164,552	453,740	303,930	239,455
5	Kelapa Dalam	5.312,531	5.203,615	5.384,477	4.097,630	4.697,582
6	Kelapa Hibrida	45,123	45,023	43,556	45,510	45,600
7	Kelapa Deres	122,193	115,917	82,861	99,470	98,740
8	Kopi Arabica	101,564	101,361	101,940	105,250	81,320
9	Kopi Robusta	1,828	4,856	4,856	9,830	9,990
10	Cengkeh	33,691	42,339	46,378	44,220	45,630
11	Lada	14,223	14,256	9,717	13,150	12,110
12	Tebu	5.041,545	4.352,390	4.184,222	6.289,000	3.258,940

Sumber Data: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018

Komoditas perkebunan sebagaimana tersebut pada tabel 2.105 merupakan komoditas andalan dan unggulan di Kabupaten Klaten. Tetapi perkembangan produksi dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, untuk komoditas unggulan Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 2.193,575 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2013 sebesar 1.640,374 Ton.

Hal ini disebabkan adanya fluktuasi luas areal tanam dan luas panen serta pengaruh iklim maupun ketersediaan benih unggul. Sedangkan untuk produksi tebu tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 6.289,000 Ton dan terendah pada tahun 2017 sebesar 3.258,940 Ton. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas areal tanam dari tahun 2016 seluas 1.027,780 Ha menjadi 807,070 Ha di tahun 2017. Kemudian untuk produksi Kopi Arabica pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 81,320 Ton jika dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 105,250 Ton. Hal ini disebabkan adanya tanaman kopi yang sudah mulai menurun produksinya dan perlu dilakukan peremajaan tanaman kopi.

Tabel 2.106 Produksi Holtikultura (Buah-buahan dan Sayuran) Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	PRODUKSI (Kw)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kacang Panjang	7.844	6.709	5.424	6.553	6.650
2	Terong	6.442	4.573	2.719	7.075	6.510

No	Jenis Komoditas	PRODUKSI (Kw)				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Kobis	492	395	89	300	168
4	Kembang Kol	15	17	17	16	18
5	Bayam	140,03	215,97	134,97	161	182
6	Kangkung	60	220	7	161	190
6	Petsai/Sawi	4.355	4.376	2.972	1.879	1.971
7	Mentimun	13.166	8.018	6.799	7.361	8.142
8	Tomat	4.515	4.465	4.560	4.664	4.759
9	Cabe Merah	7.878	6.851	7.366	8.512	5.957
10	Cabe Rawit	3.575	4.197	2.834	8.424	8.631
11	Melon	3.485	4.183	6.230	2.505	3.316
12	Semangka	597	2.995	3.635	8.371	2.938
13	Rambutan	20.202	45.427	20.807	26.268	25.176
14	Jeruk Siam	1.759	15.135	6.001	10.495	10.225
15	Mangga	24.270	192.842	24.723	270.454	271.890
16	Pisang	37.348	41.093	34.544	38.757	40.200
17	Pepaya	16.628	67.750	16.551	53.517	54.325
16	Durian	2.501	24.626	15.291	11.803	16.702

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan Kab. Klaten, 2018

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa perkembangan produksi tanaman hortikultura baik sayur-sayuran maupun buah-buahan mengalami fluktuatif, hal ini disamping dipengaruhi oleh luas areal tanam dan panen juga dipengaruhi oleh adanya iklim global serta serangan organisme pengganggu tanaman. Sedangkan untuk tanaman mangga pada tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan produksi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 270,454 Ton dan 271,890 Ton. Hal ini disebabkan tanaman mangga sudah memasuki puncak masa produksi.

Tabel 2.107 Populasi Ternak Tahun 2013-2017

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi Potong	95,913	98,753	99,438	88,343	88,850
2	Sapi Perah	6,170	5,340	5,486	5,795	6,098
3	Kambing	91,629	86,367	92,014	88,343	88,957
4	Domba	42,336	42,894	43,982	38,489	38,570
5	Ayam Bukan Ras	1,057,109	1,359,177	1,446,963	2,801,581	3,256,177
6	Ayam Pedaging	1,436,496	1,866,432	1,936,862	2,898,344	3,385,400
6	Ayam Petelur	1,187,867	1,044,474	1,045,869	867,822	930,234
7	Itik	243,987	323,839	292,929	395,436	575,100
8	Burung Puyuh	456,268	448,226	454,596	451,193	452,332

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa populasi ternak sapi potong mengalami penurunan sebesar 88.343 ekor pada tahun 2016 jika dibanding pada tahun 2015 yang sebesar 99.438 ekor. Penurunan terbanyak dari sapi potong betina yang disebabkan sudah memasuki usia tidak produktif dan banyak yang dipotong. Sedangkan untuk sapi perah mengalami peningkatan populasinya. Sedangkan untuk jenis hewan ternak yang lain perkembangan populasinya juga mengalami fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya penyakit hewan ternak, keterlambatan peremajaan dan tingkat kegagalan inseminasi buatan masih cukup tinggi.

Tabel 2.108 Produksi Peternakan Tahun 2013-2017

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Susu (Liter)	4,259,568	4,200,567	4,030,895	4,878,662	5,903,181
2	Daging (Kg)	3,109,024	2,750,101	2,549,885	2,749,351	2,963,800
3	Telur (Butir)	279,151,338	278,730,823	246,585,003	375,376,131	570,571,719

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab Klaten, 2018

Untuk perkembangan produksi susu, daging dan telur rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh tingkat populasi hewan ternak serta pemeliharaan yang sudah cukup baik.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

A. Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik yang dapat dilihat pada pada Tabel 2.109

Tabel 2.109 Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)
1	2	3	4	5	6
01 Sepeda Motor					
02 Mobil Penumpang					
03 Mobil Barang	10.241	10.819	11.049	10.657	9.622
04 Mobil Bus					-
* Umum	347	344	386	464	397
Bus Besar	13	119	80	44	65
Bus Sedang	105	125	196	131	261
Bus Kecil	229	100	110	289	71
* Bukan Umum	214	199	155	137	105
05 Kendaraan Khusus/Alat Berat	9	3	9	9	6
06 Mobil Penumpang Umum					
07 Kendaraan Roda Tiga					-
Jumlah	10.811	11.365	11.599	11.267	10.130

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Adapun data terkait fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.110

Tabel 2.110 Data Pemasangan Perlengkapan Jalan

PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN 2017																
No	Jenis	Satuan	Kebutuhan	Terpasang										Jumlah Terpasang	Persentase	Sisa Kebutuhan
				s/d 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Rambu lalu lintas biasa	buah	3979	1998	77	55	42	112	126	120	23	81	247	2881	72,41%	1098
2	Rambu RPPJ	buah	200	24	7	4	4	28	20	5	12	11	12	127	63,50%	73
3	Rambu tipe F	buah	100	-	-	-	5	5	-	16	-	-	12	38	38,00%	62
4	Marka Jalan	m ²	34965	8240	1384	980	2575	1847	1216	1235	1058	-	-	18535	53,01%	16430
5	Traffic Light	unit	40	28	-	-	-	1	-	-	-	-	-	29	72,50%	11
6	Guardrail	m	3000	-	-	-	-	-	-	-	888	1060	520	2468	82,27%	532
7	Paku marka/ mata kucing	buah	97125	-	-	-	-	-	-	-	1685	-	-	1685	1,73%	95440
8	Traffic cone	buah	500	-	-	-	-	-	-	-	-	40	15	55	11,00%	445
9	Delinator	buah	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	10000
10	Cermin tikungan	buah	200	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	24	12,00%	176
11	Zona Selamat Sekolah	unit	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,00%	9
12	Lampu kedip	buah	20	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25,00%	15
13	Rambu elektronik VMS	unit	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	5
14	Kamera CCTV Jalan	unit	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6,00%	47
	Jumlah														447,42%	
	Rata-rata														31,96%	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Kabupaten Klaten mempunyai terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi, dengan luasan dan kapasitas yang berbeda-beda. Secara umum, kondisi Adapun data terkait dengan Kondisi

sub terminal angkutan penumpang umum di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.111 Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Klaten

NO	TERMINAL	ALAMAT	TYPE	LUAS	FASILITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²	1. Kantor pengawas 2. Loker/ retribusi 3. Kios/ toko/ warung makan 4. Kamar mandi/ WC 5. Parkir antar jemput 6. Taman/ penghijauan 7. Loker agen bus	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²	1. Kantor pengawas 2. Loker/ retribusi 3. Kios/ toko/ warung makan 4. Kamar mandi/ WC 5. Musholla 6. Ruang tunggu penumpang	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²	1. Kantor pengawas 2. Loker/ retribusi 3. Kios/ toko/ warung makan 4. Kamar mandi/ WC 5. Parkir antar jemput 6. Ruang tunggu penumpang	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²	1. Loker/ retribusi 2. Kios/ toko/ warung makan 3. Ruang tunggu penumpang	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²	1. Loker/ retribusi 2. Kios/ toko/ warung makan 3. Ruang tunggu penumpang	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²	1. Loker/ retribusi 2. Ruang tunggu penumpang	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²	1. Kantor pengawas 2. Ruang tunggu penumpang 3. Kamar mandi/ WC	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²	1. Kantor pengawas 2. Loker/ retribusi 3. Kios/ toko/ warung makan 4. Kamar mandi/ WC 5. Musholla 6. Taman/ penghijauan 7. Ruang tunggu penumpang 8. Loker agen bus	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Banyaknya sarana dan prasarana angkutan di Kabupaten Klaten memerlukan pengujian untuk mengetahui kondisi sarana angkutan. Adapun alat uji untuk mengetahui kondisi sarana dan prasana angkutan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.112

Tabel 2.112 Alat Uji Sarana dan Prasaran Angkutan

No.	JENIS ALAT UJI	FUNGSI ALAT UJI	KETERANGAN
1	BRAKE TESTER	MENGUJI GAYA REM KENDARAAN	TERKALIBRASI
2	AXLE LOAD TESTER	MENGUJI BERAT KENDARAAN	TERKALIBRASI
3	SIDE SLIP TESTER	MENGUJI KINCUP RODA DEPAN KENDARAAN	TERKALIBRASI
4	HEADLIGHT TESTER	MENGUJI KEKUATAN PANCAR LAMPU UTAMA KENDARAAN	TERKALIBRASI
5	SOUND LEVEL TESTER	MENGUJI TINGKAT KEBISINGAN KLAKSON KENDARAAN	TERKALIBRASI
6	TINT TESTER	MENGUJI KEGELAPAN KACA KENDARAAN	TERKALIBRASI
7	SMOKE TESTER	MENGUJI KETEBALAN ASAP KENDARAAN (BENSIN DAN SOLAR)	RUSAK
8	KOMPRESOR	SUPLAI ANGIN BERTEKANAN UNTUK ALAT UJI CARLIFT DAN BRAKE	TERKALIBRASI
9	JANGKA SORONG	MENGUJI KETEBALAN BAN KENDARAAN	TERKALIBRASI
10	CARLIFT	MENGANGKAT KENDARAAN YANG DIUJI	TERKALIBRASI
11	TOOLKIT	PERALATAN MEKANIK LENGKAP	TERSEDIA
12	GAS ANALYZER MODULE	MENGUJI EMISI GAS BUANG MESIN BENSIN	BELUM TERSEDIA
13	DISEL SMOKE TESTER MODULE	MENGUJI EMISI GAS BUANG MESIN DIESEL	BELUM TERSEDIA
14	SPEDOMETER TESTER	MENGUJI KECEPATAN KENDARAAN	BELUM TERSEDIA
15	AXLE PLAY DETECTOR	MENGUJI KAKI - KAKI KENDARAAN (SUSPENSIS&SISTEM KEMUDI)	BELUM TERSEDIA
16	GENSET	SUMBER LISTRIK DARURAT JIKA ALIRAN LISTRIK PLN MATI	BELUM TERSEDIA

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Pelayanan pengujian sarana dan prasarana angkutan di Kabupaten Klaten masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya alat uji yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Data terkait pengujian sarana dan prasarana angkutan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.113

Tabel 2.113 Data Uji Sarana dan Prasarana Angkutan

No.	BULAN	PENGUJI	IJIN TRAYEK
	1	2	3
1	Januari	63.684.660	155.000
2	Februari	69.380.920	125.000
3	Maret	74.388.420	385.000
4	April	61.355.420	125.000
5	Mei	74.094.200	292.500
6	Juni	52.843.040	-
7	Juli	71.642.540	277.500
8	Agustus	76.590.040	500.000
9	September	68.561.420	-
10	Oktober	73.250.730	125.000
11	November	73.152.320	382.500
12	Desember	58.844.630	125.000
	2017	817.788.340	2.492.500
	2016	971.713.370	2.555.000
	2015	969.686.510	5.037.500
	2014	1.034.951.980	3.798.000
	2013	99.170.060	5.321.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Di Kabupaten Klaten keterpaduan sistem jaringan jalan antar moda, antara lain perlintasan sebidang masih belum memadai. Perlintasan sebidang kereta api yang tidak terpasang palang pintu perlintasan sebanyak 22 (dua puluh dua) lokasi dengan rincian sebagai berikut :

1. 6 (enam) lokasi dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua); dan
2. 16 (enam belas) lokasi hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 (dua), sepeda dan pejalan kaki. Adapun daftar perlintasan kereta api di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.114
- 3.

Tabel 2. 114 Jumlah Perlintasan Sebidang Kereta Api

No	Jumlah Perlintasan Sebidang Kereta Api			Lokasi
	Jumlah	Berpalang Pintu dan Berjaga	Tidak Berpalang Pintu dan Tidak Berjaga	
1	2	2	0	Jalan Nasional
2	1	1	0	Jalan Provinsi
3	49	27	22	Jalan Kabupaten dan Jalan Desa
Total	52	30	22	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Tingginya mobilitas dan belum optimalnya pengawasan pada angkutan golongan C di Kabupaten Klaten, khususnya daerah Kemalang dan Karangdowo menyebabkan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kelebihan batas muatan/tonase. Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.115.

Tabel 2.115 Data Operasional Penertiban Lalu Lintas

No.	BULAN	JUMLAH PEMERIKSA	JUMLAH DITINDAK (DITILANG)
1	Januari	2.256	154
2	Februari	253	157
3	Maret	209	127
4	April	792	45
5	Mei	865	256
6	Juni	405	32
7	Juli	379	87
8	Agustus	249	28
9	September	499	160
10	Oktober	253	131
11	November	2.791	235
12	Desember	230	90
	JUMLAH	8.181	1.502

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2017

B. Pasar

Pasar merupakan pendukung keberhasilan daerah dalam memasarkan produk daerah. Fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya, dapat dibedakan menjadi: (i) milik pemerintah, (ii) milik desa, dan (iii) milik perorangan. Gambaran Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang dapat dilihat pada Tabel 2.116.

Tabel 2.116 Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Kecamatan	Pasar			Jumlah		
	Pemerintahan	Desa	Perorangan	Kios	Los	Pedagang
01 Praban	2	0	-	114	32	113
02 Gantiwarno	3	2	-	43	13	197
03 Wedi	3	1	-	285	18	503
04 Bayat	3	1	-	106	57	495
05 Cawas	3	5	-	272	18	694
06 Trucuk	1	3	-	85	23	137
07 Kalikotes	1	2	-	119	14	216
08 Kebonarang	1	-	-	13	0	13
09 Jogonalan	1	2	-	73	23	300
10 Manisrenggo	1	-	-	61	9	181
11 Karangnongko	1	-	-	74	4	142
12 Ngawen	2	3	-	43	8	178
13 Ceper	-	1	1	2	16	27
14 Pedan	1	1	-	226	6	1.340
15 Karangdowo	2	2	-	55	6	206
16 Juwiring	3	1	-	173	17	573
17 Wonosari	1	1	-	28	2	247
18 Delanggu	1	-	-	319	2	98
19 Polanharjo	-	1	-	12	4	4

Kecamatan	Pasar			Jumlah		
	Pemerintahan	Desa	Perorangan	Kios	Los	Pedagang
20 Karanganom	2	1	-	55	4	325
21 Tulung	1	3	-	78	17	593
22 Jatinom	2	2	-	189	16	805
23 Kemalang	2	1	-	80	83	1634
24 Klaten Selatan	1	-	-	36	-	0
25 Klaten Tengah	7	-	-	535	106	1.083
26 Klaten Utara	4	-	-	65	8	31
Jumlah 2017	49	33	1	5.859	922	17.981
2016	50	41	2	2.993	791	11.293
2015	49	48	2	3.655	1.823	11.189
2014	49	48	2	2.884	790	13.749
2013	48	54	1	2.595	862	13.415

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, 2018

C. Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan pendukung kegiatan pembangunan di segala bidang. Jaringan listrik di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2015 KWH terjual sudah mencapai 600.177.101 Kwh, dan 2.209.751 Kvarh. Gambaran selengkapnya terlihat pada Tabel 2.117

Tabel 2.117 KWH Terjual PLN Menurut Bulan Tahun 2015

Tahun	Pedan		Tulung		Klaten		Delanggu	
	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2015	159.682.405	710.528	132.982.842	195.264	234.886.147	1.160.923	72.625.707	143.036
2014	154.481.066	479.800	130.131.858	135.712	222.424.785	1.420.765	68.882.418	214.629
2013	145.477.079	592.698	120.070.726	49.141	205.095.237	631.249	62.244.093	82.001
2012	135.474.329	483.506	118.246.829	54.937	185.073.854	120.729	58.323.388	11.982
2011	124.677.127	448.968	110.498.196	55.651	169.563.614	144.562	53.866.330	1.179

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

D. Jaringan Air Bersih

Produksi air bersih di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Jumlah produksi air bersih tahun 2011 sebesar 9.872.088 m³, dan pada tahun 2015 sudah mencapai 11.678.870 m³. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.118

Tabel 2.118 Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Tahun	Jumlah Sumber	Jumlah Pelanggan	Kapasitas Produksi	Air yang Didistribusikan	Air yang Terjual	Air yang Hilang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	16	37.941	11.678.870	10.983.558	8.473.591	2.509.967
2014	16	37.071	11.711.094	11.257.296	7.909.837	3.347.154
2013	16	34.933	10.366.903	10.216.812	7.486.919	2.729.893
2012	16	32.449	10.066.160	9.914.382	7.214.415	2.699.967
2011	16	30.814	9.872.088	9.687.483	6.969.519	2.717.964

Sumber: PDAM Kabupaten Klaten, 2016

Dilihat dari jumlah sumber air yang ada, baik yang berasal dari sumber mata air dan dari waduk atau rawa-rawa, ada 4 (empat) kecamatan yang mempunyai sumber air dari mata air terbanyak, yaitu: (i) Kecamatan Manisrenggo sebanyak 24 sumber mata air, (ii) Kecamatan Tulung sebanyak 24 sumber mata air, (iii) Kecamatan Karangnongko sebanyak 17 sumber mata air, dan (iv) Kecamatan Ngawen sebanyak 16 sumber mata air. Sementara hanya ada 1 (satu) kecamatan yang mempunyai sumber air dari waduk, yaitu Kecamatan Bayat.

E. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi yang berupa panjang jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sepanjang 777 km terdiri dari jalan aspal, jalan kerikil dan jalan

tanah. Berdasarkan kondisi jalan yang ada, tingkat kerusakan jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada dapat dilihat pada Tabel 2.119

Tabel 2.119 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (Km)

Keadaan	Status Jalan											
	Jalan Negara			Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten					
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2			3			4					
I Jenis Permukaan												
a. Aspal/Hotmix/Lapen/sandsheet	33,52	33,52	33,52	41.360	41.360	41.360	754	754	753,94	753,94	753,94	
b. Berbatu/Macadam	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	3,16	3,16	3,16	
c. Hotmix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Kerikil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e. Tanah/Jalan Belum Tembus	-	-	-	-	-	-	21,37	21,37	12,53	12,53	12,53	
f. Beton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah - I	33,52	33,52	33,52	41.360	41.360	41.360	777	777	769,63	769,63	769,63	
II Kondisi Jalan												
a. Baik	3,9	3,9	3,9	25,76	25,76	25,76	344,42	550,57	381,08	432,91	470,61	
b. Sedang	29,62	29,62	29,62	15,61	15,61	15,61	213,52	86,63	206,61	190,92	169,03	
c. Rusak	-	-	-	-	-	-	86,63	-	68	63,51	62,9	
d. Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	132,44	132,44	113,94	82,29	67,09	
Jumlah - II	33,52	33,52	33,52	41,37	41,37	41,37	777	769,64	769,63	769,63	769,63	
III Kelas Jalan												
a.Kelas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.Kelas III	-	-	-	41.360	41.360	41.360	-	-	-	-	-	
d.Kelas IIIA	33,52	33,52	33,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
e.Kelas IIIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f.Kelas IIIC	-	-	-	-	-	-	777	777	769,63	769,63	769,63	
g.Kelas IV	-	-	-	-	-	-	754	754	-	-	-	
h.Kelas Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	-	-	-	
Jumlah - III	33,52	33,52	33,52	41,36	41,36	41,36	777	777	769,63	769,63	769,63	

Sumber : DPU PR Kabupaten Klaten

Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: (i) Jalan Provinsi, (ii) Jalan Kabupaten, (iii) Jalan Poros Desa, dan (iv) Jalan Lingkungan seperti terlihat pada Tabel 2.50. Dari tabel tersebut dapat dilihat kecamatan-kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: (i) Kecamatan Cawas 8.100 km; (ii) Kecamatan Pedan 6.100 km; (iii) Kecamatan Tulung 6.000 km; serta (iv) Kecamatan Ceper 5.000 km.

Jenis/kategori jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan adalah (i) Kecamatan Gantiwarno 47.540 km; (ii) Kecamatan Klaten Tengah 42.880 km; (iii) Kecamatan Prambanan 39.140 km; dan (i) Kecamatan Karangnongko 38.320 km. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.120

Tabel 2.120 Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam km)

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prambanan	-	39,140	78,580	43,350
2	Gantiwarno	-	47,540	136,950	27,900
3	Wedi	-	24,880	88,068	48,160
4	Bayat	-	25,630	87,815	93,130
5	Cawas	8,100	37,180	101,215	87,335
6	Trucuk	0,940	36,920	104,635	98,287
7	Kalikotes	-	20,580	84,688	74,373
8	Kebonarum	-	20,440	42,825	10,725
9	Jogonalan	-	25,970	81,141	65,710
10	Manisrenggo	-	28,430	105,840	51,050
11	Karangnongko	-	38,320	74,540	37,735

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Ngawen	2,900	25,220	64,460	58,700
13	Ceper	5,000	16,370	81,570	77,255
14	Pedan	6,100	25,210	64,520	75,005
15	Karangdowo	-	22,140	107,315	37,319
16	Juwiring	-	31,190	121,645	83,074
17	Wonosari	-	31,020	54,810	57,820
18	Delanggu	-	20,920	57,543	57,415
19	Polanharjo	-	28,610	95,266	56,275
20	Karanganom	-	26,200	100,650	81,088
21	Tulung	6,000	37,370	107,330	79,390
22	Jatinom	4,400	33,060	83,550	98,780
23	Kemalang	-	35,810	137,450	26,100
24	Klaten Selatan	-	26,700	59,280	30,404
25	Klaten Tengah	-	42,880	24,850	13,460
26	Klaten Utara	1,400	29,230	24,500	24,770
	JUMLAH	34,840	776,960	2.171,006	1.494,610

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

F. Sarana Akomodasi

Sarana akomodasi penunjang perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klaten terdapat sarana akomodasi penginapan sebanyak 42 hotel/losmen, walaupun belum ada yang berbintang, tetapi cukup memadai bagi wisatawan asing maupun domestik. Sedangkan untuk *Tour and Travel* (biro perjalanan) sudah tersedia sebanyak 18 buah, dengan perincian dapat dilihat pada Tabel 2.121

Tabel 2.121 Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten

Biro Perjalanan	
1. PT Ekapari	10. Persada Indah Tour
2. CV. Dewa Nusantara Tour	11. Sargedede Tour and Travel
3. CV. Pulo Mas Tour	12. Pradana Tour
4. PT. Danita Tour Service	13. Selendang Sutera
5. Adi Tour	14. Bintang Timur
6. Giri Sampurna Putra Tour	15. Galihayu Tour and Travel
7. H and R Tour	16. Astuti Pinastika Tour
8. Multi Pratama	17. Graphindo Tour Travel
9. Sembilan Buana Tour	18. Kharisma Tour

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman Modal atau investasi merupakan mesin penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*) melalui peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Klaten.

Peningkatan peluang investasi dilaksanakan dengan perbaikan pelayanan perijinan, pemberian insentif investasi, penciptaan keamanan dan ketertiban kota, pengembangan penanaman modal dan investasi daerah, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, mendorong tumbuhnya industri kreatif. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas merupakan daya tarik investasi, hal ini merupakan prasyarat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*) diperlukan untuk

menjawab tantangan terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tingginya kedua variable tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Gambaran jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017, tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.122

Tabel 2.122 Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal dalam Negeri			Total PMA + PMDN		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Total Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)
2013	1.460.300	18.983.900	8	-52	25.000	2	-99	19.008.900	10	-55
2014	3.090.300	40.173.900	12	112	5.744.100	1	22.876	45.918.000	13	142
2015	420.700	5.469.100	25	-86	20.598.400	5	259	26.067.500	30	-43
2016	6.372.700	82.845.100	28	1.415	62.385.300	13	203	145.230.400	41	457
2017	10.257.000	138.469.500	30	61	246.727.200	29	295	385.196.700	59	165

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Klaten, 2018

A. Penanaman Modal

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi, Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.123

Tabel 2.123 Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	11	1	21	12	23
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.000	100	3.959	2.861	575
3	Nilai Investasi (Rp.000)	Rp.	167.500.000	25.000.000	93.965.000	98.663.000	103.596.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Klaten, 2018

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.124

Tabel 2.124 Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	5	6	5	5	2
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.075	521	230	1.468	79
3	Nilai Investasi	(US \$)	6.700.000	12.246.600	72.629.000	76.260.450	80.073.473

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.124 tentang Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dan Tabel 2.126 tentang Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017, terlihat bahwa Penanaman modal daerah, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

dan Penanaman Modal Asing (PMA) semuanya mengalami peningkatan. Indikator perkembangan penanaman modal daerah menggunakan 3 (tiga) tolok ukur meliputi jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, dan nilai investasi (baik dalam ribu rupiah maupun US \$).

Ada beberapa hal sebagai faktor kunci terkait dengan peningkatan/perkembangan penanaman modal di sini, antara lain meliputi:

- a. Kemudahan dalam proses perijinan (kejelasan persyaratan perijinan, transparansi biaya, serta proses pengurusan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku);
- b. Adanya respon positif dari masyarakat dengan masuknya investasi ke daerah, disertai dengan suatu kesadaran masyarakat bahwa investor akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah;
- c. Upah Minimum Kerja (UMK) yang masih terjangkau juga menjadi daya tarik bagi investor, disamping dengan jumlah ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai; dan
- d. Dukungan sarana prasarana yang semakin baik dari tahun ke tahun baik dari harga tanah yang relatif bersaing, sara infrastruktur, sarana tenaga listrik maupun ketersediaan air serta letak yang sangat strategis Kabupaten Klaten.

B. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya yang peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasar merupakan sektor utama untuk menggerakkan perekonomian, dan selama 3 (tiga) tahun jumlah pasar tidak ada perubahan. Gambaran pasar menurut jenisnya, dapat dilihat pada terlihat pada Tabel 2.125

Tabel 2.125 Pasar Menurut Jenisnya Tahun 2013–2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Departemen Store	1	1	1	10	21
02 Pasar Swalayan	108	118	118	757	894
03 Pasar Umum/Rakyat	81	81	81	55	57
04 Pasar Hewan	12	9	9	12	12
05 Pasar Buah	1	1	1	1	1
06 Pasar Sepeda	2	2	2	7	7
07 Pasar Ikan	0	0	0	0	0
08 Lain-Lain / Pasar Burung	4	4	4	12	12
09 Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	210	217	217	872	1.006

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, 2018

Dari Tabel 2.125 diatas dapat diketahui bahwa sarana perdagangan yang berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah sangat bervariasi, mulai dari bentuk departemen store, pasar swalayan sampai dengan pasar klitikan. Dari tabel di atas terlihat pula bahwa pasar swalayan yang paling dominan, hampir tiap tahun selalu ada perkembangan atau bertambah.

Hal ini disebabkan karena masyarakat yang semakin bervariasi dan berkembang seiring dengan perkembangan penduduk dan teknologi, kondisi

iklim usaha yang kondusif di daerah, disamping itu pemerintah juga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau masyarakat untuk mendirikan pasar swalayan dengan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Disamping itu dari sejumlah 49 pasar tradisional milik Pemerintah Daerah masih banyak yang belum di revitalisasi. Sampai dengan tahun 2017 baru terdapat 14 pasar yang direvitalisasi.

Kemudian dari sejumlah 2.274 unit usaha di bidang olahan pangan masih banyak yang produksinya belum memiliki PIRT. Sampai dengan tahun 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM baru dapat memfasilitasi sebanyak 39 UKM. Sehingga masih banyak UKM yang perlu mendapatkan fasilitasi untuk mendapatkan PIRT.

Selain itu sejalan dengan kebijakan penyerahan urusan kewenangan kemeteorologian dari provinsi ke kabupaten pada tahun 2017 Kabupaten Klaten telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kemeteorologian, sehingga diperlukan kesiapan penyediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia guna mendukung kelembagaan unit pengelola meteorology.

C. Perindustrian

Dalam komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB ADHK sebesar 8,6% (atau Rp.6.506.551,46juta) pada tahun 2013 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 7,50% (Rp.8.601.225,22juta).

Basis ekonomi untuk *sektor industri manufaktur* berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan.

Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2016 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri besar dan sedang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri selama tahun 2013-2017 yang mengalami peningkatan adalah perusahaan industri tekstil, industri lainnya cenderung mengalami penurunan. Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui Pola Klaster. Sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster yang terdiri dari : (1) Klaster Batik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang dan Prambanan (2) Klaster Lurik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Cawas, Pedan, Trucuk, Juwiring dan Karangdowo (3) Klaster Konveksi yang tersebar di Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Karanganom dan Wonosari (4) Klaster Logam yang tersebar di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu dan Wonosari (5) Klaster Keramik yang tersebar di Kecamatan Wedi dan Bayat (6) Klaster Makanan Olahan yang tersebar di Kecamatan Wedi,

Jogonalan, kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan dan Kemalang (7) Klaster Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang (8) Klaster Mebel tersebar di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring (9) Klaster Desa Wisata tersebar di Kecamatan Prambanan, Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum dan Kemalang (10) Klaster Handycraft tersebar di Kecamatan Ceper, Klaten Utara, Klaten selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko dan Polanharjo (11) Klaster Minapolitan yang tersebar di Kecamatan Karanganom, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen.

Sedangkan untuk sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Tulung, Jatinom, Karanganom, Gantiwarno, Jogonalan, Trucuk, Karangdowo, Pedan, Wonosari dan Ceper.

Tabel 2.126 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
I INDUSTRI BESAR / MENENGAH					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	97	10,577	926,307,036	1,959,405,385
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	45	5,101	250,310,633	1,153,902,491
Sub Jumlah A 2017		142	15,678	1,176,617,672	3,143,307,876
2016		133	12,818	627,637,166	2,893,307,876
2015		134	12,811	627,276,505	2,891,861,945
2014		131	12,618	623,604,195	2,866,219,819
2013		130	12,606	622,984,310	2,863,370,694
II INDUSTRI KECIL					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	17,598	71,628	545,760,452	2,276,256,721
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	17,074	69,526	445,648,807	1,850,555,185
Sub Jumlah B 2017		34,672	141,154	991,409,259	4,126,811,906
2016		34,672	141,154	991,409,259	4,126,811,906
2015		34,666	141,126	991,211,017	4,135,983,708
2014		34,155	139,045	986,211,337	4,105,175,489
2013		34,121	138,907	985,231,008	4,101,094,798
Jumlah A + B 2017		34,814	156,832	2,168,026,931	7,270,119,782
2016		34,805	153,972	1,619,046,425	7,020,119,782
2015		34,800	153,937	1,618,487,522	7,027,845,653
2014		34,285	151,664	1,609,815,532	6,971,395,308
2013		34,251	151,513	1,608,215,318	6,964,465,492

Sumber : Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pertumbuhan industri menengah dan besar pada tahun 2017 mengalami penambahan sebanyak 9 unit usaha berupa PMA 2 unit dan PMDN 7 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp.548.980.506.000,-. Sedangkan untuk industri kecil pertumbuhannya relatif tetap.

Kemudian untuk industri mebel dari sejumlah 2.200 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel sampai dengan tahun 2017 baru terdapat 168 unit usaha yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan di dorong untuk mendapatkan

SVLK sebagai salah satu persyaratan ekspor mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya.

Di sisi lain dari 34.672 IKM yang memiliki daya saing pada tahun 2017 baru mencapai 4,5% meningkat jika dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 2,5%, sehingga masih diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

United Nation Development Programme (UNDP) merumuskan Pembangunan Manusia sebagai upaya memperluas peluang dan pilihan maupun taraf yang telah dan akan dicapai sehingga upaya tersebut dapat diketahui secara transparan. Konsep Pembangunan Manusia menuntut terjadinya formasi (*formation*) atas kemampuan manusia yang terlihat melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan serta daya beli sehingga penduduk memperoleh/menemukan manfaatnya terutama dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, dan ini berarti menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Klaten menurut standar UNDP sudah berada pada tingkat “menengah atas” di mana IPM Kabupaten Klaten sudah mencapai 73,97 pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 sudah mencapai 74,25.

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah, (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Adapun Hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.127

Tabel 2.127 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2017

Indikator IPM	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Usia harapan Hidup	76,52	76,54	76,55	76,59	76,62
Angka harapan lama sekolah	12,27	12,74	12,85	12,85	12,97
Rata-rata lama sekolah	7,74	7,92	8,16	8,22	8,23
Pengeluaran Riil Per kapita (d/m Ribuan Rp)	10.962	10.965	11.178	11.227	11.369
IPM	72,42	73,19	73,81	73,97	74,25

Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten, 2018

Dari Tabel 2.127 di atas dapat dilihat bahwa IPM di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan, yaitu dari 72,42 pada tahun 2013, menjadi 73,19 pada tahun 2014, dan meningkat lagi menjadi sebesar 74,25 pada tahun 2017. Besaran

IPM yang meningkat (walaupun masih relatif kecil) menunjukkan terjadinya peningkatan mutu/kualitas SDM di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2017

Di Kawasan Subosukawonosraten, posisi IPM Kabupaten Klaten pada tahun 2017 menempati urutan ke-4 (atau urutan 11 tingkat Provinsi Jawa Tengah) setelah Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.128

Tabel 2.128 Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2017

Kabupaten	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Perkapita (Rp 000)	IPM	Peringkat Provinsi
Klaten	76,62	12,97	8,23	11.369	74,25	7
Boyolali	75,72	12,15	7,44	12.262	72,64	12
Sukoharjo	77,49	13,80	8,71	10.765	75,56	5
Wonogiri	76,00	12,44	6,68	8.765	68,66	24
Sragen	75,55	12,64	7,04	12.041	72,40	13
Karanganyar	77,31	13,65	8,50	10.722	75,22	6
Surakarta	77,06	14,51	10,38	13.986	80,85	3

Sumber: IPM Kabupaten Klaten 2017

Keterangan :

UHH: Usia Harapan Hidup

AMH: Angka Melek Huruf

MYS: *Mean Years of Schooling* (Rata-rata Lama Sekolah)

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Tahun 2011 jumlah pencari kerja wanita sebanyak 5.150 orang, pada Tahun 2015 menjadi 4.287 pencari kerja. Jumlah pencari kerja laki-laki Tahun 2011 sebanyak 5.150 orang, tahun 2015 menjadi 4.596 orang.

Jumlah pencari kerja, baik laki-laki maupun perempuan dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif, dan gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.129

Tabel 2.129 Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017

Tahun	SD		SMP		SMA/SMK		Sarjana Muda		Sarjana		Jumlah	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2017												
2016	17	58	244	393	3.485	2.403	155	455	283	427	4.184	3.738
2015	12	36	304	425	3.728	2.848	220	491	332	487	4.596	4.287
2014	9	21	268	384	3.265	2.340	176	514	529	1.086	4.237	4.345
2013	9	35	402	701	4.593	3.886	483	970	1.550	2.457	7.037	8.049

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2017

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Klaten berpedoman pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Berdasarkan ketentuan perundang–undangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam perda tersebut meliputi : kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan Realisasi Semester Pertama dan Perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD, kekayaan dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) serta pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia. Analisis pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten dilakukan terhadap pelaksanaan APBD dan neraca daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017, digambarkan berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Klaten bersumberkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang Sah (diantaranya penerimaan BLUD

RSUD Bagas Waras). Adapun perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017

No	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	Pendapatan Asli Daerah	115.441.420.053	177.922.415.860	190.622.670.128,45	224.197.408.481	371.718.439.306,04	36,18
1.1	Pajak Daerah	52.818.646.651	62.623.053.793	68.201.277.234,00	75.574.747.729	105.290.677.595,00	30,19
1.2	Retribusi Daerah	21.631.992.941	21.220.132.236	21.894.721.448,00	22.559.038.217	12.668.781.932,00	-5,38
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.586.865.621	6.902.381.491	7.477.951.040,00	9.025.861.668	9.742.870.570,00	19,64
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35.403.914.840	87.176.848.340	93.048.720.406,45	117.037.760.867	244.016.109.209,04	60,28

Sumber: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.

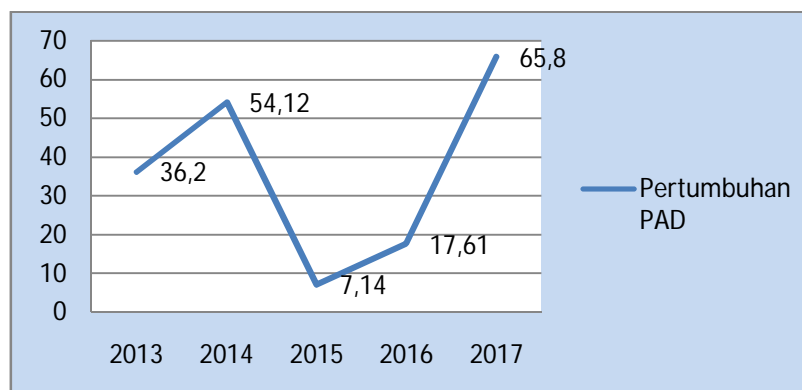
Berdasar data tersebut di atas terlihat bahwa trend pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selalu naik dari tahun ke tahun, akan tetapi untuk pos retribusi daerah bersifat fluktuatif. Untuk mengetahui Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

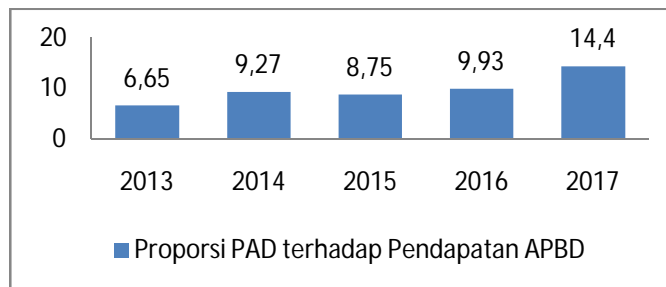
No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)*100%
01.	2013	115.441.420.053,00	1.735.589.679.346,00	6,65
02.	2014	177.922.415.860,00	1.919.961.769.290,00	9,27
03.	2015	190.622.670.128,00	2.177.820.724.857,45	8,75
04.	2016	224.197.408.481,00	2.258.604.630.605,00	9,93
05.	2017	371.718.439.306,04	2.581.515.295.917,04	14,40

Sumber: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun meningkat kecuali tahun 2015 mengalami penurunan sebesar kurang lebih 0,52%, tetapi rata-rata pertumbuhan baru mencapai angka 9,79%, meskipun di tahun 2017 sudah bisa menembus besaran hingga lebih dari 10%. Hal ini menunjukkan, bahwa tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap DAU masih sangat besar. Di lain pihak, jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2013 hingga 2017 bersifat fluktuatif pada kisaran angka 36,2% - 65,4%. Artinya dari sisi daya tumbuh sudah besar, hanya dari kontribusinya pada Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan 3.2.



Gambar 3.1 Tingkat Pertumbuhan PAD di Kab Klaten Tahun 2013– 2017 (%)



Gambar 3.2 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kab Klaten Tahun 2013 - 2017 (%)

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat, namun posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, ditempu dengan mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Gambaran Postur Pendapatan Daerah selama tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 3.3

Tabel 3.3 Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = ((3)+(4)+(5))
01.	2013	115.441.420.053,00	1.174.619.195.741,00	445.529.063.552,00	1.735.589.679.346,00
02.	2014	177.922.415.860,00	1.250.626.353.033,00	491.413.000.397,00	1.919.961.769.290,00
03.	2015	190.622.670.128,45	1.279.990.558.283,00	707.207.496.446,00	2.177.820.724.857,00
04.	2016	224.197.408.481,00	1.573.615.108.481,00	460.792.113.643,00	2.258.604.630.605,00
05.	2017	371.718.439.306,04	1.624.715.625.119,00	585.081.231.492,00	2.581.515.295.917,04

Sumber: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.

Dari Tabel 3.3 tersebut di atas terlihat bahwa proporsi pendapatan terbesar masih mengandalkan pada dana perimbangan. Dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD cenderung mengalami perkembangan yang relatif menurun. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mengharuskan Pendapatan Dana BOS dan Pendapatan BLUD dimasukkan dalam Lain-lain PAD Yang Sah, yang mana nilainya relatif besar sehingga mengakibatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD menurun. Selama tahun 2013-2017 tingkat kontribusinya bersifat fluktuatif dan menurun. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Pajak thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6) = ((3) / (4))
01.	2013	52.818.646.651,00	21.631.992.941,00	45,75
02.	2014	62.623.053.793,00	21.220.132.236,00	35,20
03.	2015	68.201.277.234,00	21.894.721.448,00	35,78
04.	2016	75.574.747.729,00	22.559.038.217,00	33,71
05.	2017	105.290.677.595,00	371.718.439.306,04	28,33

Sumber: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2017, yang diambil dari data Realisasi Anggaran.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB, dengan munculnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi Pajak Daerah. Untuk Kabupaten Klaten BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011, sedangkan PBB P2 mulai tahun 2013.

Proporsi dana perimbangan terhadap Pendapatan APBD relatif besar, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2013	1.174.619.195.741,00	1.735.589.679.346,00	67,68
02.	2014	1.250.626.353.033,00	1.919.961.769.290,00	65,14
03.	2015	1.279.990.558.283,00	2.177.820.724.857,00	58,77
04.	2016	1.573.615.108.481,00	2.258.604.630.605,00	69,67
05.	2017	1.624.715.625.119,00	2.581.515.295.917,04	62,94

Sumber: *Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.*

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Klaten bersumber dari: (i) Pendapatan Hibah, (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, (iii) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, (v) Penerimaan Lainnyadan (vi) Dana Desa.

Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Klaten relatif kecil dibanding dengan dana perimbangan, namun sangat menunjang kemampuan pendanaan APBD. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/ kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi lain-lain

pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Klaten, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan yg Sah thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2013	445.529.063.552,00	1.735.589.679.346,00	25,67
02.	2014	491.413.000.397,00	1.919.961.769.290,00	25,59
03.	2015	707.207.496.446,00	2.177.820.724.857,00	32,47
04.	2016	460.792.113.643,00	2.258.604.630.605,00	20,40
05.	2017	585.081.231.492,00	2.581.515.295.917,04	22,66

Sumber: *Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.*

Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3. 7 Perkembangan Dan Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	
1	2					7	8	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN DAERAH											
1.1	Pendapatan Asli Daerah	115.441.420.053	OT	177.922.415.860	OT	190.622.670.128,45	OT	224.197.408.481	OT	371.718.439.306,04	OT	28,68
1.1.1	Pajak Daerah	52.818.646.651	OT	62.623.053.793	OT	68.201.277.234,00	OT	75.574.747.729	OT	105.290.677.595,00	OT	27,16
1.1.2	Retribusi Daerah	21.631.992.941	UT	21.220.132.236	OT	21.894.721.448,00	UT	22.559.038.217	OT	12.668.781.932,00	UT	9,39
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.586.865.621	OT	6.902.381.491	UT	7.477.951.040,00	OT	9.025.861.668,00	OT	9.742.870.570,00	OT	19,11
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	35.403.914.840	OT	87.176.848.340	OT	93.048.720.406,45	OT	117.037.760.867,19	OT	244.016.109.209,04	OT	48,17
1.2	Dana Perimbangan	1.174.619.195.741	OT	1.250.626.353.033	OT	1.279.990.558.283	UT	1.573.615.108.481	OT	1.624.715.625.119	UT	8,76
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	47.125.348.741	OT	41.463.345.033	OT	38.414.990.283	UT	50.275.933.273	OT	50.852.354.977	UT	-3,67
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.066.318.427.000	E	1.142.586.588.000	E	1.164.196.398.000	E	1.204.344.586.098	OT	1.271.590.067.902	E	10,3
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.175.420.000	E	66.576.420.000	E	77.379.170.000	E	318.994.589.110	UT	302.273.202.240	UT	-0,2
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	445.529.063.552	OT	491.413.000.397	OT	707.207.496.446	OT	460.792.113.643	UT	585.081.231.492	OT	19,59
1.3.1	Hibah	1.809.833.374	UT	1.053.091.397	UT	1.779.632.600	UT	0	UT	942.739.891	UT	6,79
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	87.633.165.698	OT	115.022.833.000	OT	142.333.018.338	OT	143.325.208.643	UT	171.067.103.920	OT	25,66
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	319.829.819.000	E	307.400.751.000	E	413.181.317.000	UT	0	E	55.646.870.000	OT	27,25
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36.256.245.480	UT	67.936.325.000	UT	41.238.559.508	UT	73.600.480.000	UT	46.337.071.481	UT	6,85
1.3.7	Dana Desa	0	-	0	-	108.674.969.000	E	243.866.425.000	E	311.087.446.200	E	0
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.735.589.679.346	OT	1.919.961.769.290	OT	2.177.820.724.857,45	OT	2.258.604.630.605	OT	2.581.515.295.917	UT	12,42

Keterangan: OT (Over Target), UT (Under Target), E (Equal Target)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

b. Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD Pemerintah Kabupaten Klaten, dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam pemenuhan pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kabupaten Klaten pernah melakukan pinjaman, sehingga ada pos Pembayaran Bunga Pinjaman.
 - c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa, dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk menjamin pemberian subsidi dapat tepat sasaran.
 - d. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD, dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah.
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
 - f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
 - g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan. Pemberian bantuan

keuangan kepada partai politik dapat dianggarkan, tetapi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Gambaran perkembangan Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.8 Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Total Belanja (Rp)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
01.	2013	1.067.791.179.116,00	1.621.602.407.460,00	65,85
02.	2014	1.153.532.178.451,00	1.884.326.293.738,00	61,22
03.	2015	1.180.489.400.884,45	2.077.785.996.047,45	56,81
04.	2016	1.238.738.884.717,00	2.282.330.771.499,00	54,28
05.	2017	1.032.184.118.848,00	2.481.861.743.842,22	41,59

Sumber: *Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran.*

Dari tabel di atas terlihat bahwa meskipun di tahun 2017 proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah sudah mendekati angka 40%, akan tetapi rata-rata proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas sehingga tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Gambaran perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 3.9

Tabel 3.9 Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2013 REALISASI	2014 REALISASI	2015 REALISASI	2016 REALISASI	2017 REALISASI	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2	BELANJA DAERAH						
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.231.648.343.886	1.371.866.130.869	1.504.110.830.929,45	1.780.715.488.258	1.716.862.293.365	9,83
2.1.1	Belanja Pegawai	1.067.791.179.116	1.153.532.178.451	1.180.489.400.884,45	1.238.738.884.717	1.032.184.118.848	1,12
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	0	0	-20,00
2.1.4	Belanja Hibah	22.051.956.000	20.414.548.593	43.174.386.818,00	32.171.055.836	48.124.969.930	50,06
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.255.817.000	12.085.520.000	10.174.075.000,00	11.810.425.000	1.149.725.000	-19,98
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	468.086.495	562.563.825	613.004.277,00	5.826.321.071	9.970.076.237	190,42
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	128.767.165.275	184.455.220.000	269.659.963.950,00	491.908.747.434	625.433.403.350	59,99
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.314.140.000	816.100.000	-	260.054.200	0	233,89
2.2	Belanja Langsung	389.954.063.574	512.460.162.869	573.675.165.118,00	501.615.283.241	764.999.450.477,22	18,76
2.2.1	Belanja Pegawai	22.524.865.518	26.874.641.533	25.991.120.706,00	27.421.377.821	60.130.715.274,40	32,79
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.545.654.960	217.028.485.527	241.611.733.549,00	253.434.818.137	339.931.253.564,82	17,86
2.2.3	Belanja Modal	186.883.543.096	268.557.035.809	306.072.310.863,00	220.759.087.283	364.937.481.638,00	19,49
	Jumlah Belanja Daerah	1.621.602.407.460	1.884.326.293.738	2.077.785.996.047,45	2.282.330.771.499	2.481.861.743.842,22	11,54

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

Proporsi belanja tidak langsung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, rata-rata sebesar 9,83%. Komponen yang menyebabkan kenaikan belanja tidak langsung adalah belanja hibah sebesar 50,06%, belanja bantuan keuangan pada pemerintah desa mengalami kenaikan rata-rata sebesar 190,42 %, sementara untuk komponen lainnya mengalami penurunan.

Belanja langsung mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 18,76%, akan tetapi nominalnya masih jauh dibawah belanja tidak langsung. Kenaikan terbesar disumban oleh naiknya belanja pegawai sebesar 32,79%. Belanja modal naik rata-rata sebesar 19,49% sedangkan belanja barang dan jasa naik rata-rata sebesar 17,86%.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Gambaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel 3.10 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2013 REALISASI	2014 REALISASI	2015 REALISASI	2016 REALISASI	2017 REALISASI	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	164.527.643.342	265.628.451.228	286.555.911.908	406.198.863.893,00	374.231.954.686,16	29,63
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	22.442.938.777	0,00	0,00	-20,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	63.231.687,00	0	-20,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	2.126.284.398	0,00	0,00	-20,00
	- Jumlah Penerimaan Pembiayaan	164.527.643.342	265.628.451.228	311.125.135.083	406.262.095.580,00	374.231.954.686,16	29,24
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				0	0	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000	6.000.000.000	0	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-6,67
3.2.2	Penyertaan Modal (<i>Investasi</i>) Pemerintah Daerah	4.961.000.000	3.758.000.000	4.961.000.000	5.304.000.000,00	13.200.000.000,00	41,64
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0,00	0,00	-20,00
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Daerah	1.925.464.000	4.950.014.872	0	0,00	0,00	46,94
	- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.886.464.000	14.708.014.872	4.961.000.000	8.304.000.000,00	18.200.000.000,00	19,21
	Pembiayaan Netto	151.641.179.342	250.920.436.356	306.164.135.083	397.958.095.580,00	356.031.954.686,16	34,14

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

Dari Tabel 3.10 tersebut terlihat, bahwa perkembangan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun perkembangannya fluktuatif, hal ini mengingat bahwa struktur pembiayaan sangat dipengaruhi kebijakan pembelanjaan daerah.

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Neraca Daerah merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Neraca daerah dapat memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas dan fleksibilitas keuangan daerah. Neraca daerah dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif dan dapat mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kinerja Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten selama kurun waktu Tahun 2013 – 2017 yang telah di audit dapat dilihat pada Tabel 3.11

Tabel 3.11 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 -2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	285.620.514.893	302.285.121.763	437.690.241.287	410.382.878.167	554.188.344.902,01	27,65
1.1.1.	Kas	265.652.176.311	286.597.112.808	407.787.395.839	377.061.328.850	455.698.293.160,98	24,99
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0,00
1.1.3.	Piutang	8.739.113.731	5.908.034.822	11.502.937.848	11.485.245.890	24.768.949.105,58	95,74
1.1.4.	Beban dibayar dimuka	0	0	331.077.122	321.124.429	590.700.392,38	16,19
1.1.5.	Persediaan	11.229.224.851	9.779.974.134	18.068.830.478	21.515.178.997	73.130.402.243,07	39,82
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	100.252.828.930	105.820.727.339	113.532.100.866	123.767.913.031	133.715.351.862,86	7,53
1.2.1.	Investasi jangka Panjang	100.252.828.930	105.820.727.339	113.532.100.866	123.767.913.031	133.715.351.862,86	7,53
1.2.	ASET TETAP	5.854.712.911.191	6.076.201.185.121	2.018.864.139.349	2.836.455.459.908	2.958.585.555.502,38	-2,80
1.2.1.	Tanah	787.057.915.090	787.057.915.090	587.794.216.923	1.291.905.063.673	1.281.651.012.843,00	18,74
1.2.2.	Peralatan dan mesin	430.294.349.550	457.867.431.178	635.690.333.679	746.367.762.112	716.935.744.066,99	13,08
1.2.3.	Gedung dan bangunan	2.974.196.179.457	3.034.548.541.218	722.861.663.470	761.362.497.206	701.477.235.200,18	-14,95
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.515.867.087.106	1.543.939.927.005	863.956.941.426	888.503.282.799	1.019.259.420.540,00	-3,85
1.2.5.	Aset tetap lainnya	66.092.925.566	70.098.119.359	253.279.160.830	260.590.146.678	339.502.207.078,21	60,74
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	81.204.454.422	182.689.251.271	80.027.889.411	88.444.314.356	100.702.381.485,00	200,02
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan	0	0	-1.124.746.066.390	-1.200.717.606.916	1.200.942.445.711,00	0,00
1.3	DANA CADANGAN	14.926.888.371	22.442.938.777	0	3.019.210.084	8.422.000.455,00	41,53
1.3.1	Dana Cadangan	14.926.888.371	22.442.938.777	0	3.019.210.084	8.422.000.455,00	41,53
1.4.	ASET LAINNYA	25.709.856.351	23.513.749.710	127.237.373.547	109.962.520.042	71.821.862.345,00	81,67
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	0	0	0	0	0,00	0,00
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian	4.208.280.997	719.224.500	0	0	0,00	-36,95

No.	Uraian daerah	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	10.138.665.074	10.138.665.074	10.138.665.074	10.138.665.074	10.138.665.074,00	0,00
1.4.4.	Aset tak berwujud	11.275.949.280	12.568.899.136	0	7.757.994.761	2.973.112.557,00	4,34
1.4.5.	Aset Lain-lain	86.961.000	86.961.000	117.098.708.473	92.065.860.207	58.710.084.714,00	26.880,60
JUMLAH ASET DAERAH		6.281.222.999.736,15	6.530.263.722.710,67	2.697.323.855.048,81	3.483.587.981.231,42	3.726.733.115.067,25	-35,55
2.	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23.725.083	41.200.900	3.858.482.765	4.793.147.073	12.014.878.813,00	1.889,99
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	23.725.083	41.200.900	13.644.613	15.301.815	12.786.400,00	0,33
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	0	0	0	0	0,00	0,00
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	0	0	0	853.383.637	765.686.875,00	-2,06
2.1.4.	Utang Beban	0	0	3.844.838.152	3.924.461.621	4.896.212.678,00	4,95
2.1.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0	6.340.192.860,00	0,00
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0,00	0,00
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0,00	0,00
2.2.1.	Utang Luar Negeri	0	0	0	0	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		23.725.083	41.200.900	3.858.482.765	4.793.147.073	12.014.878.813,00	1.889,99
3.	EKUITAS DANA	6.281.199.274.654	6.530.222.521.811	2.693.465.372.284	3.475.537.595.081	3.714.718.236.254,25	-2,56
3.1	EKUITAS DANA	6.281.199.274.654	6.530.222.521.811	2.693.465.372.284	3.475.537.595.081	3.714.718.236.254,25	-2,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		6.281.222.999.737	6.530.263.722.711	2.697.323.855.049	3.480.330.742.154	3.726.733.115.067,25	-2,51

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

Sedangkan untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013 – 2017 sebagaimana Tabel 3.12

Tabel 3.12 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013 – 2017

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio lancar (current ratio)	85.423,08	54.114,61	680,12	559,23	262,49
2.	Rasio quick (quick ratio)	84.949,78	53.877,23	675,43	554,74	256,41
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,000003	0,000005	0,0008	0,0008	0,004
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,000004	0,000006	0,001	0,001	0,003
5.	Rata-rata umur piutang	1,15	1,39	1,46	1,86	2,56
6.	Rata-rata umur persediaan	395,77	392,04	281,28	335,77	236,19

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.:

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah yaitu rasio lancar dan rasio *quick*.

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2017 adalah sebesar 262,49. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan seluruh aset lancar Pemerintah Kabupaten Klaten cukup besar, yaitu lebih dari 262 kali.

2. Rasio Quick

Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasio Quick pada Tahun 2017 adalah sebesar 256,41. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih lancar (kas dan setara kas) adalah sangat baik, lebih dari 256 kali..

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas :

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2017 sebesar 0,004. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada Tahun 2017 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Klaten. Hal ini menunjukkan bahwa Klaten tidak tergantung pada hutang.

Rasio aktivitas terdiri dari dua perhitungan yaitu rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

1. Berdasarkan Tabel 3.12 rasio rata-rata umur piutang Tahun 2017 sebesar 2,56. Hal ini menunjukkan bahwa hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), adalah kurang dari 3 hari.
2. Rata-rata umur persediaan Tahun 2017 sebesar 236,19 hari, hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mencukupi input berupa persediaan yang dimasukkan untuk menghasilkan output pelayanan publik dalam satu tahun relatif baik.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2017

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Untuk mengetahui efisiensi serta efektifitas belanja dan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis terhadap proporsipenggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dalam hal ini dilakukan dengan melakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Klaten dari tahun 2013-2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.13 dan 3.14.

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Realisasi				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
A.	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	787.366.981.924	806.358.187.788	846.942.405.611	877.336.557.352	726.286.627.644
2	Belanja Tambahan Penghasilan	272.757.794.850	338.827.293.536	325.243.845.148	352.368.203.015	294.815.595.537
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.172.000.000	4.773.120.000	4.703.820.000	4.747.920.000	6.873.120.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.210.928.502	3.573.577.127	2.901.706.250	3.201.693.750	3.777.764.289
B.	Belanja Langsung					
1	Belanja Honorarium PNS	6.182.920.350	25.834.617.033	23.459.269.706	8.595.060.850	11.221.516.000
2	Belanja Uang Lembur	951.387.500	1.040.024.500	1.395.346.000	1.104.515.000	11.584.146.841
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	493.500.000	0	1.162.000.000	448.000.000	0
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	545.080.128	0	1.398.102.902	1.872.075.669	2.982.495.386
5	Belanja premi asuransi kesehatan	616.754.000	0	341.652.678	9.265.525.311	8.859.617.031
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	12.151.872.538	0	19.007.526.525	18.284.220.469	35.552.221.032

No.	Uraian	Realisasi				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	141.100.000	0	683.979.620	361.794.500	643.892.070
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.692.906.000	0	725.177.500	420.934.500	1.329.192.100
9	Belanja perjalanan dinas	22.118.701.731	0	29.722.053.978	36.778.501.757	52.803.734.979
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0	0	0	0	0
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0	0	0
12	Belanja Modal (Kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	91.374.589.343	0	120.702.685.149	198.349.846.715	64.736.175.589
TOTAL		1.202.776.516.866	1.180.406.819.984	1.378.389.571.067	1.513.134.848.888	1.221.466.098.498

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

Tabel 3.14 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun 2013	1.202.776.516.866	1.634.488.871.460	74
2	Tahun 2014	1.180.406.819.984	1.899.034.308.610	62
3	Tahun 2015	1.378.389.571.067	2.082.746.996.047	66
4	Tahun 2016	1.513.134.848.888	2.290.634.771.499	66
5	Tahun 2017	1.221.466.098.498	2.492.861.743.842	49

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 relatif menurun.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi defisit yang harus ditutup oleh pembiayaan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah maka akan terjadi surplus.

Defisit riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Defisit riil, komposisi penutup Defisit Riil dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten selama kurun waktu Tahun 2013- 2017 sebagaimana Tabel 3.15 dan Tabel 3.16

Tabel 3.15 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.735.589.679.346	1.919.961.769.290	2.177.820.724.857,45	2.258.604.630.605	2.581.515.295.917,04
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.621.602.407.460	1.884.326.293.738	2.077.785.996.047,45	2.282.330.771.499	2.481.861.743.842,22
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.886.464.000	14.708.014.872	4.961.000.000,00	8.304.000.000,00	18.200.000.000,00
A	Surplus/Defisit riil	101.100.807.886	20.927.460.680	95.073.728.810,00	-23.726.140.893,84	99.653.552.074,82
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran	164.527.643.342	265.628.451.228	286.555.911.908,00	406.198.863.893,00	374.231.954.686,16

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
	sebelumnya					
5.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	22.442.938.777,00	0,00	0,00
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0,00	63.231.687,00	0
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0,00	0,00
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0,00	0,00
9.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	2.126.284.398,00	0,00	0,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	164.527.643.342	265.628.451.228	311.125.135.083,00	406.262.095.580,00	374.231.954.686,16
A+ B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	265.628.451.228	286.555.911.908	406.198.863.893,00	374.231.954.686,16	455.685.506.760,98

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

Tabel 3.16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017

No.	Uraian	2015		2016		2017		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA	406.198.863.893	100	374.231.954.686	100	455.685.506.760,98	100	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	22.154.827.628	5,45	20.497.700.481,19	5,48	36.205.998.306,04	7,95	6,29
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-1.213.257.717	-0,30	91.421.538.661,00	24,43	(76.414.215.783,00)	-16,77	2,45
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.500.279.446	1,35	-27.865.164.357,00	-7,45	8.546.697.492,00	1,88	-1,41
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	398.840.640.718,00	98,19	369.172.722.999,16	98,65	455.685.506.760,82	100,00	98,95
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran wajib dan mengikat dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Tahun 2013 sejumlah Rp.1,1 Trilyun, tahun 2017 menjadi Rp.2,088 Trilyun, dengan pengeluaran terbesar pada belanja tidak langsung. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.17

Tabel 3.17 Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1)	2	3)	4)	5)	6)	7	8
A	Belanja Tidak Langsung	941.826.207.770	1.016.563.332.418	1.498.247.755.929	1.411.990.601.693	1.416.688.197.161	12,47
1	Belanja Pegawai	787.367.000.000	806.358.000.000	1.180.489.400.884	877.336.557.352	726.286.627.644	1,48
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH	3.172.000.000	4.773.000.000	4.311.000.000	4.747.920.000	6.873.120.000	23,92
3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00
4	Belanja Hibah	22.051.956.000	20.414.548.593	43.174.386.818	32.171.055.836	48.124.969.930	32,04
5	Balena Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	468.086.495	562.563.825	613.004.277	5.826.321.071	9.970.076.237	237,68
6	Balena Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	128.767.165.275	184.455.220.000	269.659.963.950	491.908.747.434	625.433.403.350	49,75
B	Belanja Langsung	373.612.118.056	493.572.162.869	570.257.044.412	496.826.235.722	747.835.869.405	-14,15
1	Belanja Honorarium PNS / Non PNS /Non Pegawai	6.182.920.000	7.986.641.533	22.573.000.000	23.080.330.303	42.967.134.202	75,05
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	493.500.000	0	1.162.000.000	448.000.000	0	-65,36
3	Belanja Barang dan Jasa	180.545.654.960	217.028.485.527	241.611.733.549	252.986.818.136	339.931.253.565	17,65
4	Belanja Modal	186.883.543.096	268.557.035.809	306.072.310.863	220.759.087.283	364.937.481.638	23,78
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.886.464.000	14.708.014.872	11.000.000.000	8.304.000.000	18.200.000.000	20,90
1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000	6.000.000.000	0	3.000.000.000	5.000.000.000	-8,33
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.961.000.000	3.758.000.000	11.000.000.000	5.304.000.000	13.200.000.000	66,39
3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0,00
4	Pembayaran Kewajiban Daerah	1.925.464.000	4.950.014.872	0	0	0	-25,00
TOTAL (A+B+C)		1.328.324.789.826	1.524.843.510.159	2.079.504.800.341	1.917.120.837.415	1.477.855.331.363	5,11

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

3.3.2 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

3.3.2.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Dari perhitungan realisasi pendapatan daerah kurun waktu 5 tahun sebelumnya terlihat bahwa ketergantungan dana dari pusat sangat tinggi. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun 2018 - 2021.

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2018 - 2021, sebagai berikut

1. Mencapai target pendapatan daerah di Kabupaten Klaten sehinggalapada tahun 2021 dapat mencapai Rp.2.947.748.443.338,- berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan kebijakan:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan tiap tahun sebesar 7% dan secara bertahap diharapkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus meningkat.
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara: (i) intensifikasi pajak dan retribusi daerah, (ii) optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, khususnya PBB, (iii) penyesuaian tarif retribusi daerah, (iv) pemberian stimulus penghargaan pajak dan retribusi daerah .
3. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah, ditempuh dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan retribusi daerah, yang didukung dengan regulasi yang jelas, baik dari sisi pengelolaannya maupun tarifnya.
 - c. Peningkatan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah antara lain PDAM, PD BPR Bank Klaten dan PD BPR Bank Kredit Kecamatan serta peningkatan pembagian deviden Bank Jateng.
 - d. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - f. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
 - g. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.

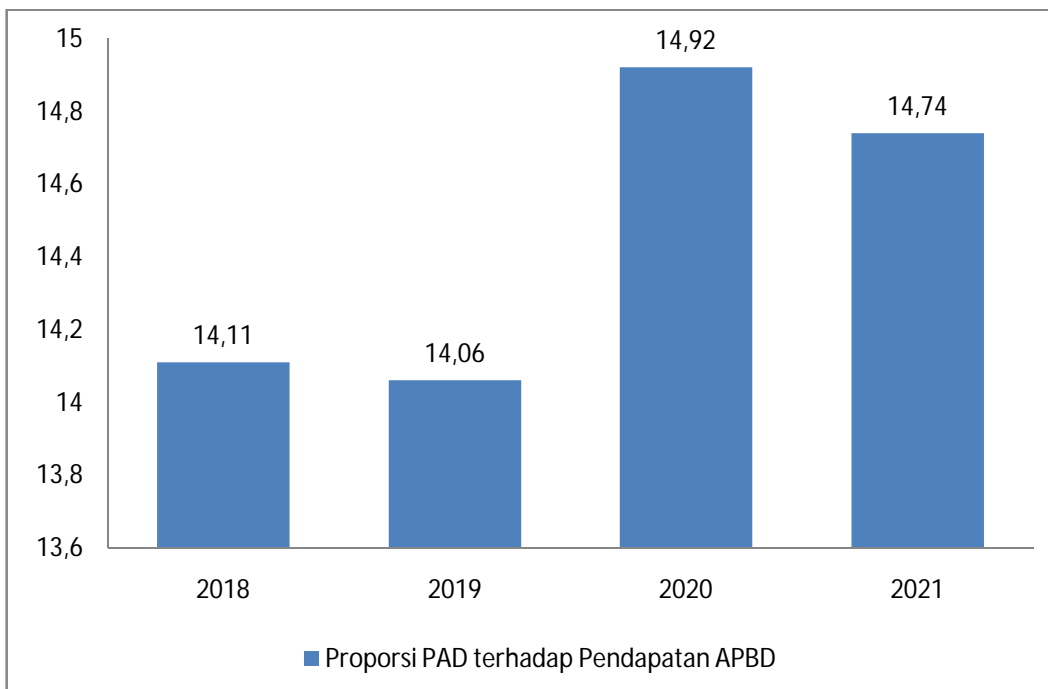
4. Pajak dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan diusahakan untuk mendorong perkembangan investasi daerah.
5. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan bantuan keuangan dari provinsi diasumsikan besarnya tetap setiap tahun, berdasarkan angka tahun 2018.
6. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang ditempuh dengan cara:
 - a. Perbaikan sistem dan manajemen dalam pengelolaan pendapatan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
 - b. Penegakan Perda terhadap WP dan WR yang tidak taat melakukan pembayaran kewajibannya.
7. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan reward secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
8. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan cara penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.
9. Dana desa besarnya diasumsikan sama dengan tahun 2018.

Adapun Proyeksi perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018-2021 sebagaimana Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Proyeksi Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

No.	URAIAN POS PENDAPATAN	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	354.566.542.500	379.386.200.475	405.943.234.508	434.359.260.924
1.1.1	Pajak Daerah	100.232.189.000	107.248.442.230	114.755.833.186	122.788.741.509
1.1.2	Retribusi Daerah	14.797.502.000	15.833.327.140	16.941.660.040	18.127.576.243
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.827.999.000	10.515.958.930	11.252.076.055	12.039.721.379
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	229.708.852.500	245.788.472.175	262.993.665.227	281.403.221.793
1.2	Dana Perimbangan	1.679.025.419.000	1.732.369.077.486	1.720.139.192.536	1.894.438.137.013
1.2.1	Bagi Hasil dari Pajak dan Bukan Pajak	46.839.153.000	38.644.153.000,00	50.852.354.977,00	60.852.354.977,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.237.967.327.000	1.237.967.327.000,00	1.271.590.067.902,00	1.310.590.067.902,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	394.218.939.000	455.757.597.486,00	397.696.769.656,53	522.995.714.134,46
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	478.661.181.000	587.498.065.000	594.571.339.401	618.951.045.401
1.3.1	Hibah	4.580.000.000	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	152.560.887.000	152.560.887.000,00	171.067.103.920,00	181.067.103.920,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0,00	55.646.870.000,00	55.646.870.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	113.416.884.000,00	46.337.071.481,00	52.237.071.481,00
1.3.6	Dana Desa	321.520.294.000	321.520.294.000,00	321.520.294.000	330.000.000.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.512.253.142.500	2.699.253.342.961	2.720.653.766.445	2.947.748.443.338

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018



Gambar 3.3. Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan APBD (dalam persen)

3.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018-2021

Pengelolaan Belanja Daerah diarahkan pada pendekatan beban kinerja yang berorientasi pada pencapaian. Hal ini bertujuan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah. Adapun arah pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2021 sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. **Prioritas.** Penggunaan anggaran Tahun 2016-2021 diprioritaskan untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja.** Belanja daerah pada setiap urusan disertai indikator kinerja dan target kinerja.
4. **Optimalisasi Belanja Langsung.** Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efisien dan efektif.
5. **Transparan dan Akuntabel.** Pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, juga akan ditempuh:

1. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dengan menekankan pada aspek: efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Proyeksi belanja pegawai (belanja tidak langsung) karena sudah tidak ada lagi kebijakan kenaikan gaji pegawai maka dihitung berdasarkan belanja pegawai tahun yang lalu. Sekalipun akan ada penambahan CPNS di tahun 2019, tetapi jumlahnya lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun.

3. Komponen belanja tidak langsung yang lain diasumsikan sama dengan sebelumnya dan berpedoman pada perhitungan yang sudah ditentukan.
4. Belanja Langsung untuk tahun 2018 berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2018. Untuk tahun 2019-2021 sesuai dengan proyeksi kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah.
5. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat. Adapun proyeksi perkembangan belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021 sebagaimana Tabel 3.19 dan Tabel 3.20

Tabel 3.19 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kabupaten Klaten Tahun 2018 – 2021

NO.	URAIAN	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung	1.788.124.791.500	1.802.858.641.961	1.812.013.820.433	1.802.237.291.338
1	Belanja Pegawai	1.161.909.785.500	1.161.909.785.500	1.161.909.785.500	1.161.909.785.500
2	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	11.395.502.000	12.308.176.937	13.169.749.323	14.091.631.775
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	611.819.504.000	628.640.679.524	636.934.285.610	626.235.874.063
4	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	0	0	0
B	Belanja Langsung	202.217.883.867	132.517.107.780	135.379.477.307	138.303.674.016
1	Belanja Honorarium Non PNS	43.720.865.024	16.746.009.262	17.107.723.062	17.477.249.880
2	Belanja Pegawai BLUD	7.306.716.200	4.644.078.113	4.744.390.201	4.846.869.029
3	Belanja Jasa Kantor	35.641.295.483	53.972.675.346	55.138.485.133	56.329.476.412
4	Belanja Bahan Pakai Habis	29.213.290.936	22.031.674.225	22.507.558.388	22.993.721.649
5	Belanja premi Asuransi	9.290.867.000	9.902.316.504	10.116.206.540	10.334.716.601
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.683.892.893	3.209.188.501	3.278.506.972	3.349.322.723
7	Belanja barang dan jasa BLUD	73.360.956.331	22.011.165.829	22.486.607.011	22.972.317.722
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.000.000.000	13.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000.000	10.000.000.000	0	3.000.000.000
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0
4	Pembayaran Kewajiban Daerah	0	0	0	0
TOTAL (A+B+C)		2.001.342.675.367	2.001.342.675.367	1.824.584.070.390	1.833.019.743.098

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

Tabel 3.20 Prediksi Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

No.	URAIAN POS BELANJA	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.846.597.441.500	1.845.458.641.961	1.884.613.820.433	1.844.337.291.338
2.1.1	Belanja Pegawai	1.161.909.785.500,00	1.161.909.785.500	1.161.909.785.500	1.161.909.785.500
2.1.4	Belanja Hibah	55.987.450.000,00	40.500.000.000	70.500.000.000	40.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.485.200.000,00	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	11.395.502.000,00	12.308.176.937	13.169.749.323	14.091.631.775
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	611.819.504.000	628.640.679.524	636.934.285.610	626.235.874.063
2.1.8	Belanja Tidak Tersangka / Terduga	3.000.000.000,00	0	0	0
2.2	Belanja Langsung	809.905.701.000	840.794.701.000	859.039.946.012	1.097.411.152.000
2.2.1	Belanja Pegawai	77.712.564.564,00	50.000.000.000	51.085.000.000	52.193.544.500
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	414.653.337.665,00	250.000.000.000	255.425.000.000	260.967.722.500
2.2.3	Belanja Modal	317.539.798.771,00	540.794.701.000	552.529.946.012	784.249.885.000
Jumlah Belanja Daerah		2.656.503.142.500	2.686.253.342.961	2.743.653.766.445	2.941.748.443.338
Surplus / (Defisit)		-144.250.000.000	13.000.000.000	-23.000.000.000	6.000.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

3.3.2.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018–2021 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah diarahkan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi, dengan upaya untuk menekan pertumbuhannya.
- b. Pinjaman daerah ditempuh sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah, sebagai opsi pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- c. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
- d. Intensifikasi penagihan piutang pajak dan retribusi daerah, terutama piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk:

- a. Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020.
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah diupayakan dengan memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- c. Merumuskan kerangka kebijakan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat/swasta untuk mendanai pembangunan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).

Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021 sebagaimana Tabel 3.21

Tabel 3.21 Prediksi Perkembangan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (dalam Rupiah)

No.	URAIAN POS BELANJA	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	155.250.000.000	0	0	0
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	26.000.000.000	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	155.250.000.000	0	26.000.000.000	0
	- Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000.000	10.000.000.000	0	3.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0
3.2.5	Pembayaran Kewajiban Daerah	0	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000	13.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000
	Pembiayaan Netto	144.250.000.000	-13.000.000.000	23.000.000.000	-6.000.000.000
	Sisa Lebih Pembayaran Tahun Berkenaan	0	0	0	0

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018.

3.3.2.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan selama kurun waktu 2018-2021, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah guna mendanai pembangunan, sebagaimana terlihat pada tabel 3.22

Tabel 3.22 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Guna Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan	2.512.253.142.500	2.699.253.342.961	2.720.653.766.445	2.947.748.443.338
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	26.000.000.000	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA)	155.250.000.000	0	0	0
4.	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0	0
	Total Penerimaan	2.667.503.142.500	2.699.253.342.961	2.746.653.766.445	2.947.748.443.338
	Dikurangi :				
5.	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat (Prioritas I)	2.001.342.675.367	1.824.584.070.390	1.833.019.743.098	1.849.995.908.146
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	666.160.467.133	874.669.272.571	913.634.023.347	1.197.752.535.192

Sumber : BAPPEDA dan BPKD Kabupaten Klaten, 2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang belum dialokasikan dengan proyeksi sebagaimana terlihat pada tabel 3.23

Tabel 3.23 Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kapasitas Keuangan Daerah	2.667.503.142.500	2.699.253.342.961	2.746.653.766.445	2.947.748.443.338
	Prioritas I (Wajib dan mengikat)	2.001.342.675.367	1.948.375.749.741	1.950.393.297.740	1.946.540.965.354
1.1	Belanja Tidak Langsung	1.788.124.791.500	1.802.858.641.961	1.812.013.820.433	1.802.237.291.338
1.2	Belanja Langsung	202.217.883.867	132.517.107.780	135.379.477.307	138.303.674.016
1.3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.000.000.000	13.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	666.160.467.133	750.877.593.220	796.260.468.705	1.001.207.477.984
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	607.252.117.133	676.952.893.220	674.090.523.693	671.166.326.984
2.1	Belanja Langsung Penunjang Pencapaian visi misi Bupati	58.541.037.125	58.541.037.125	58.541.037.125	58.541.037.125
2.2	Belanja Langsung Untuk Mendanai Program dan Kegiatan sebagai Penjabaran dari Misi Pasangan Bupati Terpilih	548.711.080.008	618.411.856.095	615.549.486.568	612.625.289.859
3	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	58.472.650.000	42.600.000.000	72.600.000.000	42.100.000.000
3.1	Belanja Hibah	55.987.450.000	40.500.000.000	70.500.000.000	40.000.000.000
3.2	Belanja Bantuan Sosial	2.485.200.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
4	Surplus Anggaran Riil / Berimbang	435.700.000	31.324.700.000	49.569.945.012	287.941.151.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

Dengan demikian, dapat diketahui Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang dialokasikan untuk memenuhi Belanja Prioritas I, II dan III sebagaimana terlihat pada tabel 3.24

Tabel 3.24 Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II dan III Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2021

No.	Uraian	Alokasi							
		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Prioritas I	2.001.342.675.367	75,04	1.948.375.749.741	73,03	1.950.393.297.740	72,31	1.946.540.965.354	73,18
2.	Prioritas II	607.252.117.133	22,77	676.952.893.220	25,37	674.090.523.693	24,99	671.166.326.984	25,23
3.	Prioritas III	58.472.650.000	2,19	42.600.000.000	1,60	72.600.000.000	2,69	42.100.000.000	1,58
	Total	2.667.067.442.500		2.667.928.642.961		2.697.083.821.433		2.659.807.292.338	

Sumber : BAPPEDA dan BPKD Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan dan perhitungan kerangka pendanaan tersebut di atas, maka dapat dihitung proyeksi APBD Kabupaten Klaten periode 2018 – 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 3.25

Tabel 3.25 Proyeksi APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1.	PENDAPATAN	2.512.253.142.500	2.699.253.342.961	2.720.653.766.445	2.947.748.443.338
A	Pendapatan Asli Daerah	354,566,542,500	379,386,200,475	405,943,234,508	434,359,260,924
1	Pajak Daerah	100,232,189,000	107,248,442,230	114,755,833,186	122,788,741,509
2	Retribusi Daerah	14,797,502,000	15,833,327,140	16,941,660,040	18,127,576,243
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9,827,999,000	10,515,958,930	11,252,076,055	12,039,721,379
4	Lain-lain PAD yang sah	229,708,852,500	245,788,472,175	262,993,665,227	281,403,221,793
B	Dana Perimbangan	1.679.025.419.000	1.732.369.077.486	1.720.139.192.536	1.894.438.137.013
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	46.839.153.000,00	38.644.153.000,00	50.852.354.977,00	60.852.354.977,00
2	DAU	1.237.967.327.000,00	1.237.967.327.000,00	1.271.590.067.902,00	1.310.590.067.902,00
3	DAK	394.218.939.000,00	455.757.597.486,00	397.696.769.656,53	522.995.714.134,46
C	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	478.661.181.000	587.498.065.000	594.571.339.401	618.951.045.401
2	BELANJA	2.656.503.142.500	2.686.253.342.961	2.743.653.766.445	2.941.748.443.338
A	Belanja Tidak Langsung	1.846.597.441.500	1.845.458.641.961	1.884.613.820.433	1.844.337.291.338
1	Belanja Mengikat	1,788,124,791,500	1,680,677,378,284	1,696,823,529,326	1,676,891,156,814
2	Prioritas III	58,472,650,000	164,781,263,677	187,790,291,107	167,446,134,524
B	Belanja Langsung	809.905.701.000	840.794.701.000	859.039.946.012	1.097.411.152.000
1	Prioritas I	202,217,883,867	163,841,807,780	184,949,422,319	426,244,825,016
2	Prioritas II	607,252,117,133	676,952,893,220	674,090,523,693	671,166,326,984
	Surplus/Defisit	-144,250,000,000	13,000,000,000	-23,000,000,000	6,000,000,000
3	PEMBIAYAAN	144,250,000,000	-13,000,000,000	23,000,000,000	-6,000,000,000
A	Penerimaan	155,250,000,000	0	26,000,000,000	0
B	Pengeluaran	11,000,000,000	13,000,000,000	3,000,000,000	6,000,000,000
	Total APBD	2,656,503,142,500	2,686,253,342,961	2,743,653,766,445	2,941,748,443,338

Sumber : BAPPEDA dan BPKD Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

Berdasarkan kerangka pendanaan tersebut, akan dilaksanakan berbagai program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan Kabupaten Klaten selama empat tahun ke depan melalui dana APBD Kabupaten Klaten. Mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Klaten diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya yaitu APBN, APBD Provinsi, Corporate Social Responsibility/Program Kemitraan, Sumbangan Pihak Ketiga dan partisipasi masyarakat.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Penyajian permasalahan daerah dan permasalahan pembangunan daerah beserta rumusannya menempati bagian awal dalam penyajian isu-isu strategis daerah. Penyajian yang sistematis dan terstruktur akan mampu menjelaskan isu-isu strategis daerah yang akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 3 tahun mendatang atau sampai akhir periode 2021. Permasalahan dan analisis isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dari Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Seiring dengan penambahan penduduk dan dinamika perkembangan jaman yang cepat maka secara umum Kabupaten Klaten menghadapi permasalahan daerah sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan pengangguran tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata dan penanganannya direncanakan harus dengan baik, sistematis, terukur dan berlanjut ;
2. Peningkatan jumlah penduduk dengan dinamika di dalamnya mempengaruhi struktur dan pola ruang wilayah kabupaten sehingga pengendalian ruang tidak semudah yang direncanakan dalam tata ruang ;
3. Perubahan peruntukan pemanfaatan lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian untuk keberlangsungan budidaya manusia khususnya perumahan dan permukiman tidak dapat dihindari padahal luas lahan tetap ;
4. Luasan lahan pertanian abadi tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga salah satu dampaknya kontribusi sektor Pertanian dalam struktur PDRB sudah tidak lagi menjadi penyumbang yang terbesar padahal Kabupaten Klaten dikenal dengan kesuburan tanah dan perannya sebagai salah satu penyangga pangan bagi Provinsi Jawa Tengah ;
5. Kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C (*pasir , kerikil dan batu*) di sepanjang aliran Sungai Woro apalagi yang tidak berijin dan lokasinya di luar zona yang ditentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 yang masuk wilayah kawasan Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko menjadi tumpuan penghidupan ribuan masyarakat sejak puluhan tahun lalu semakin kompleks dinamikanya dan hasil penambangan tersebut berdampak rusaknya infrastruktur jalan jembatan yang dilalui padahal secara umum seharusnya Wilayah Kecamatan Kemalang menjadi kawasan tangkapan/serapan air bagi wilayah Kabupaten Klaten ;
6. Kontribusi/proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Struktur APBD masih <10% sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
7. Mengingat letak wilayah Kabupaten Klaten relatif di tengah Pulau Jawa maka potensi kerawanan terjadinya bencana alam gempa bumi tektonik dan letusan Gunung Merapi cukup besar selain bencana tanah longsor, angin topan, banjir dan kekeringan yang terjadi hampir selalu terjadi setiap tahun sehingga Wilayah Kabupaten Klaten dapat dikatakan sebagai “ *laboratorium bencana alam* ” ;
8. Terjadinya kesenjangan (*disparitas*) perkembangan wilayah di mana wilayah/jalur tengah sepanjang jalan nasional Surakarta-Yogyakarta memiliki perkembangan sangat pesat

sedangkan wilayah utara dan selatan relatif kurang berkembang/*stagnan*. Hal ini untuk wilayah utara (Wilayah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko dan Tulung) boleh jadi salah satunya disebabkan letaknya berdekatan dengan Gunung Merapi dan untuk wilayah selatan (Kecamatan Cawas, Bayat, Gantiwarno dan Prambanan) boleh jadi disebabkan potensi kegempaan yang berada pada tingkat menengah sehingga tanahnya labil yang berpengaruh terhadap kekuatan struktur bangunan ;

9. Pertumbuhan investasi/penanaman modal di Wilayah Kabupaten Klaten tidak sebesar yang masuk ke kabupaten tetangga kawasan “ *subosukawonosraten* “ (Kabupaten Boyolali, Sukoharjo dan Karanganyar, Wonogiri dan Sragen).

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum bentuk/wujud pembangunan dibedakan menjadi (1) pembangunan fisik/material dan (2) non fisik/non material. Walaupun wujud/bentuknya berbeda namun sarannya manusia dan keduanya bertujuan memperlancar kelangsungan kehidupan serta meningkatkan taraf hidup kesejahteraan manusia. Baik pembangunan fisik maupun non fisik apabila pada saat perencanaan dengan pelaksanaan dan kenyataan hasil tidak sesuai maka dikatakan terjadi “permasalahan”.

Secara umum permasalahan pembangunan pada aspek ini meliputi 3 (tiga) fokus : (1) Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ; (2) Kesejahteraan Sosial dan (3) Seni Budaya dan Olah Raga. Faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan terdiri dari : faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hal-hal yang ada dan mempengaruhi bidang/urusan/sector sendiri serta relatif dapat dikendalikan sedangkan faktor eksternal meliputi hal-hal yang mempengaruhi, bersal dari luar dan relatif tidak dapat dikendalikan namun hanya diprediksikan dengan pendekatan batasan-batasan tertentu.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat, keluarga dan individu selain ditentukan seberapa besar kemampuan produktifitas masyarakat, keluarga dan individu dalam memproduksi barang/jasa sendiri juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian lokal Kabupaten Klaten. Kondisi makro perekonomian Kabupaten Klaten dipengaruhi kondisi perekonomian kawasan regional Subosukawonosraten atau Joglo Semar dan Nasional. Fokus ini kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencakup : pertumbuhan ekonomi, kondisi PDRB baik konstan maupun berlaku dan inflasi. Secara umum permasalahan yang ditemukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2013-2017 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Klaten masih *fluktuatif*,
2. Kontribusi lapangan usaha/sector Pertanian terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku semakin menurun padahal Kabupaten Klaten berperan sebagai salah satu penyangga pangan bagi Provinsi Jawa Tengah ;

3. Kontribusi lapangan usaha/sector Perdagangan Besar dan Eceran terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku masih belum sesuai harapan (< 3 %) ;
4. Kontribusi lapangan usaha/sector Industri Pengolahan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan masih fluktuatif dan masih di bawah 2 digit (6–9 %) ;
5. Kontribusi lapangan usaha/sector *real estate* terhadap PDRB Harga Berlaku sangat kecil atau masih <5% ;
6. Inflasi di Kabupaten Klaten masih *fluktuatif* karena dipengaruhi kondisi perekonomian regional dan nasional;
7. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten sebesar 14,15% melebihi rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional ;
8. Kabupaten Klaten dengan sumber daya yang memiliki tanah yang subur, sumber air yang banyak, posisi strategis di antara Kota Surakarta dan Yogyakarta jalur tengah transportasi darat Pulau Jawa, etos kerja masyarakat yang tinggi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat termasuk urutan ke 7 (tujuh) kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah ;
9. Upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Kabupaten Klaten bukan belum optimal dan terpadu namun lebih pada pengaruh variabel-variabel lain yang tinggi.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Terdiri dari bidang: (1)Ketenagakerjaan; (2)Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3)Pangan dan (4)Kelautan dan Perikanan. Fokus ini ditekankan pada nilai eksistensi/peran dan kebutuhan manusia yang seharusnya. Secara umum permasalahan setiap bidang sebagai berikut :

1. Bidang Ketenagakerjaan menghadapi permasalahan:
 - a. Tingginya pengangguran/pencari kerja usia angkatan kerja;
 - b. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,35%;
 - c. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian semakin menurun;
 - d. Tingkat kesejahteraan tenaga kerja/buruh masih rendah;
 - e. Minat bekerja di luar wilayah Kabupaten Klaten masih tinggi;
 - f. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja disebabkan: (i)Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii)Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii)Ketidaksiharian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki dan (iv)Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
 - g. Belum optimalnya perlindungan dan advokasi terhadap tenaga kerja.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadapi permasalahan:
 - a. Kesempatan memperoleh hak pelayanan pendidikan (*harapan dan rata-rata lama sekolah*) belum sebaik laki-laki ;

- b. Peran dan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga publik dan parlemen daerah semakin menurun ;
 - c. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
 - d. Posisi tawar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum sesuai harapan ;
 - e. Kasus kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual dan penelantaran terhadap perempuan dan anak masih tinggi.
3. Bidang Pangan menghadapi permasalahan :
- a. Diversifikasi dan tata kelola pangan nabati non padi/kacang (kedelai) dan tebuserta hewani (daging sapi dan susu) belum dikelola maksimal dan didorong ke arah kemandirian pangan;
 - b. Kelembagaan distribusi pangan belum berperan sebagaimana mestinya;
 - c. Pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari belum optimal;
 - d. Rendahnya kualitas produk pangan yang mampu bersaing di pasarglobal baik berbentuk pangan mentah maupun olahan.
4. Bidang Kelautan dan Perikanan menghadapi permasalahan :
- a. Sarana prasarana, kapasitas petani dan kelembagaan belum sebagaimana yang diharapkan apabila dituntut berperan menghasilkan benih unggul/berkualitas ;
 - b. Pengelolaan perikanan terpadu berbasis sistem minapolitan yang sudah berjalan masih perlu ditingkatkan ;
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makan ikan, apabila dibanding dengan standart tingkat konsumsi makan ikan di tingkat eks Karesidenan Surakarta maupun Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Pengelolaan manajerial lembaga teknis daerah (Balai Benih Ikan) masih perlu ditingkatkan ;
 - e. Adanya ketergantungan pakan ikan pabrikan;
 - f. Perlunya inovasi dan teknologi tepat guna pembuatan pakan ikan berbahan lokal sekitar dan dapat dikerjakan sendiri.
5. Bidang Transmigrasi menghadapi permasalahan :
- a. Jumlah transmigran yang berangkat tergantung kuota yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah tujuan;
 - b. Berkurangnya minat masyarakat bertransmigrasi swakarsa;
 - c. Masih rendahnya kualitas ketrampilan calon transmigran.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Terdiri dari bidang : (1) Kepemudaan dan Olah Raga serta (2) Kebudayaan. Fokus ini ditekankan pada layanan pemerintah daerah terhadap olah raga dan batin manusia. Secara umum permasalahan setiap bidang sebagai berikut :

1. Kepemudaan dan Olahraga menghadapi permasalahan:

- a. Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang kepemudaan;
 - b. Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang keolahragaan penyandang *disabilitas* ;
 - c. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan dan olah raga;
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar.
2. Bidang Kebudayaan menghadapi permasalahan:
- a. Jumlah sarana prasarana kebudayaan belum sebanding dan belum merata di setiap kecamatan;
 - b. Belum optimalnya pelestarian seni budaya lokal dan situs serta cagar budaya dikarenakan keterbatasan anggaran ;
 - c. Kurangnya pembinaan, promosi serta pengembangan atraksi dan seni budaya daerah dikarenakan keterbatasan anggaran ;
 - d. Belum optimalnya perlindungan/pelestarian kekayaan budaya daerah berbentuk HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual);
 - e. Komitmen dan konsistensi penggunaan kewajiban berbahasa jawa masih lemah.

4.1.2. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum

Secara umum aspek pelayanan umum ditekankan pada sejauh mana daerah dalam menyediakan layanan sarana prasarana dasar dan sosial dasar serta unsur penunjangnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Aspek ini meliputi 2 (dua) fokus : (1) Pelayanan Dasar dan (2) Pelayanan Penunjang. Mengingat peran dan fungsi yang strategis maka dalam pembangunan pelayanan dasar diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

A. Fokus Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan permasalahan yang dihadapi diantaranya :
 - a. Masih terdapatnya anak usia sekolah yang berhak mendapat layanan pendidikan dasar tetapi tidak sekolah;
 - b. Angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) berkisar 0,04-0,23% ;
 - c. Masih terdapatnya peserta didik pendidikan dasar yang tidak lulus di setiap tahun;
 - d. Semakin berkurangnya tenaga pendidik/guru kelas berstatus PNS pada sekolah dasar negeri;
 - e. Menurunnya minat masyarakat menyekolahkan anaknya pada satuan layanan pendidikan dasar milik daerah/sekolah negeri;
 - f. Belum meratanya kualitas layanan pendidikan dasar negeri (*terdapatnya anggapan sekolah favorit dan bukan favorit*);
 - g. Belum semua guru memenuhi kualifikasi pendidikan standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1).

- h. Belum semua kualitas sarana prasarana layanan pendidikan sekolah dasar negeri dalam kondisi baik ;
 - i. Belum semua satuan layanan pendidikan dasar/Sekolah Dasar memiliki sarana prasarana penunjang (perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga dan Ruang UKS) ;
2. Bidang Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi diantaranya :
- a. Angka kematian ibu, bayi dan balita masih cukup tinggi;
 - b. Meningkatnya masyarakat yang terinfeksi HIV dan AIDS;
 - c. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian penyakit tidak menular dan *degeneratif* (Diabetes Militus DM, Tuberculosis, Kardiovaskuler dan kanker);
 - d. Masih adanya balita gizi buruk dan *Stunting*;
 - e. Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) masyarakat perdesaan masih cukup tinggi (67%) ;
 - f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan;
 - g. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi permasalahan :
- a. Masih 17-20% infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi sedang dan rusak berat ;
 - b. Masih 50% sarana prasarana pengairan dalam kondisi sedang dan rusak berat ;
 - c. Perlunya data base sistem pengairan yang terintegrasi ;
 - d. Masih perlunya sarana prasarana penyediaan air minum perdesaan dan perkotaan ;
 - e. Perlunya sarana dan prasarana sanitasi pada permukiman masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air belum optimal;
 - g. Masih terdapat daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten;
 - h. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan ;
 - i. Belum jelasnya kebijakan *insentif-desinsentif* dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang ;
 - l. Belum optimalnya penanganan limbah secara terpadu;
 - m. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum memenuhi luasan yang ditentukan 30%.
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menghadapi permasalahan :
- a. Adanya rumah tidak layak huni yang tersebar merata di setiap kecamatan;
 - b. Sarana dan prasarana pendukung permukiman;
 - c. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menghadapi permasalahan :
 - a. Masih adanya penyakit masyarakat dan kenakalan remaja ;
 - b. Adanya potensi ancaman terorisme, konflik SARA (vertikal maupun horizontal) dan gerakan *bersifat* radikalisme/ laten ;
 - c. Potensi kerawanan bencana alam terjadi setiap tahun ;
 - d. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih masyarakat pada pilgub 2013 dan pilbup Tahun 2015.
 6. Bidang Sosial menghadapi permasalahan :
 - a. Angka kemiskinan Kabupaten Klaten 14,15% melebihi rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ;
 - b. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
 - c. Kualitas pengelolaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu ditingkatkan ;
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan, fasilitasi hak sosial dan advokasi bagi penyandang *difabel*;
 - e. Kurang optimal dan sinergisnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).
- B. Fokus Pelayanan Penunjang
1. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - a. Lingkungan Hidup menghadapi permasalahan :
 - 1) Kinerja armada dan petugas persampahan baru mampu mengangkut 8,34% dari keseluruhan timbulan sampah harian ke lokasi tempat pengolahan akhir (TPA) ;
 - 2) Belum optimalnya peran tempat pengolahan akhir (TPA) sampah terpadu ;
 - 3) Masih kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) publik;
 - 4) Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan;
 - 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan dan pelestarian lingkungan;
 - 6) Meningkatnya pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan;
 - 7) Kesadaran pengelolaan dampak lingkungan para pelaku usaha atas usahanya belum optimal baik berbentuk AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) maupun SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan);
 - 8) Banyaknya pelaku industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL);
 - 9) Belum optimalnya peran laboratorium lingkungan daerah ;
 - 10) Belum adanya instalasi pengolah limbah bahan berbahaya beracun (B3);
 - 11) Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat;

- 12) Masih perlunya pengembangan tanaman bunga-bunga guna mendukung Klaten menjadi kota bunga sejuta warna.
- b. Bidang Kehutanan menghadapi permasalahan :
 - 1) Masih adanya lahan kritis;
 - 2) Kurang optimalnya pelestarian dan pengelolaan hutan bersama masyarakat;
 - 3) Masih kurang optimalnya perlindungan dan pelestarian satwa yang dilindungi;
 - 4) Kurangnya pemberdayaan masyarakat penangkar satwa burung nusantara ;
 - 5) Beralihnya kewenangan kehutanan ke pemerintah provinsi mengakibatkan birokrasi dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan menjadi panjang.
2. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi permasalahan:
 - a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan;
 - b. Masih kurangnya inovasi proses pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan tepat ;
 - c. Sentralisasi kewenangan pengadaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menjadikan pelayanan tidak cepat.
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menghadapi permasalahan:
 - a. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa ;
 - b. Masih lemahnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa ;
 - c. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan desa ;
 - d. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - e. Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan berbasis potensi dan kapasitas sumber daya lokal.
 4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadapi permasalahan :
 - a. Belum semua pasangan usia subur sadar mengikuti Program Keluarga Berencana (masih 17-25% yang belum ber KB) ;
 - b. Kurangnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/ ujung tombak lapangan sehingga setiap PLKB kelebihan beban kerja(secara rata-rata 1 orang PLKB harus melayani 5-6 desa padahal idealnya hanya melayani 2-3 desa) ;
 - c. Masih terdapat 8 kecamatan (30%) yang belum memiliki gedung dan pendukung kerja Program KB di lapangan ;
 - d. Kurang memadainya sarana prasarana gedung/kantor Bidang Keluarga Berencana kabupaten ;
 - e. Menurunnya kesadaran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mendukung gerakan/Program KB;

- f. Capaian kinerja atas program ikutan Program KB (penguatan Keluarga Sejahtera, Bina Keluarga Balita dan Remaja, Posyandu dll) belum sebagaimana yang diharapkan karena keterbatasan PLKB.
5. Bidang Komunikasi dan Informatika menghadapi permasalahan:
 - a. Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - b. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas penunjang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - c. Belum diterapkannya Dokumen Rencana Induk (*master plan*)e-government Kabupaten Klaten secara konsisten ;
 - d. Belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi ke seluruh wilayah kecamatan ;
 - e. Masih lemahnya koordinasi terkait komunikasi informasi.
 6. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menghadapi permasalahan :
 - a. Masih sekitar 30% koperasi dalam kondisi tidak aktif ;
 - b. Hanya sekitar 2-3% koperasi sehat dan 97-98% koperasi cukup sehat dari 70% koperasi dalam kondisi aktif ;
 - c. Masih rendahnya kualitas pelaku usaha, manajerial dan pengelolaan kelembagaan usaha mikro dan kecil;
 - d. Rendahnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing produk usaha kecil dan mikro ;
 - e. Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro kecil berbasis klaster ;
 - f. Belum adanya kesepakatan produk unggulan daerah yang menjadi *trademark dan brand image* Klaten;
 - g. Belum optimalnya pengembangan akses sumber daya produktif (modal, pasar dan teknologi informasi).
 7. Bidang Statistik menghadapi permasalahan:
 - a. Belum akurat dan terpadunya data dasar statistik ;
 - b. Belum terintegrasinya pengelolaan data spasial ;
 - c. Belum sinkronnya data kependudukan dengan BPS.
 8. Bidang Persandian menghadapi permasalahan:
 - a. Terbatasnya kapasitas dan jumlah SDM bidang persandian;
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung persandian.
 9. Bidang Perpustakaan menghadapi permasalahan :
 - a. Masih rendahnya minat dan tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah (rata-rata sekitar 36-45 orang/hari) ;
 - b. Waktu pelayanan perpustakaan daerah hanya 5 hari kerja ;
 - c. Masih belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan Daerah ;
 - d. Masih rendahnya kesadaran pemerintah desa/kelurahan akan pentingnya budaya dan kesadaran membaca bagi warganya (baru 45 desa dari 401 desa/kelurahan atau baru 11% yang memiliki perpustakaan desa/kelurahan) ;
 - e. Belum dikembangkannya digitalisasi dan *e-library* ;

- f. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - g. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan satuan layanan pendidikan (sekolah) ;
 - h. Terbatasnya SDM Pustakawan yang kompeten.
10. Bidang Kearsipan menghadapi permasalahan :
- a. Kurangnya SDM dan sarana prasarana pendukung kerja ;
 - b. Belum optimalnyakesadaran tata kelola kearsipan daerah;
 - c. Belum populernya digitalisasi/aplikasi teknologi informasi.
11. Bidang Energi Sumberdaya Mineral menghadapi permasalahan :
- a. Tidak adanya kewenangan kabupaten terkait ESDM ;
 - b. Belum optimalnya tata kelola pertambangan Golongan C;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan energi terbarukan;
 - d. Posisi dilematis kabupaten antara tidak adanya kewenangan dan harus melihat kenyataan dan permasalahan lapangan.
12. Bidang Umum Pemerintahan menghadapi permasalahan sebagai berikut :
- a. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja birokrasi pemda mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja.
 - b. Masih adanya deviasi antara target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja yang dilaksanakan ;
 - c. Masih adanya ketidaksepahaman pendekatan pembangunan antara pihak eksekutif dengan legislatif ;
 - d. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih <10% ;
 - e. Ketergantungan pembiayaan pembangunan terhadap pusat dan provinsi masih sangat besar > 90% ;
 - f. Belum tertibnya pengelolaan aset-aset daerah ;
 - g. Masih kurangnya jumlah dan kapasitas aparatur pengawasan internal;
 - h. Masih belum optimalnya sistem pengawasan internal;
 - i. Masih rendahnya jumlah produk hukum daerah.

4.1.3. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing Daerah

Secara umum aspek daya saing daerah ditekankan pada sejauh mana daerah segala potensi yang dimiliki daerah dengan segala kelebihan dan kekurangannya dikelola dan didayagunakan semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini letak geografis, sumber daya alam, SDM, regulasi dan hal-hal lainnya dikelola semaksimal mungkin. Aspek ini meliputi 4 (empat) fokus : (1)Kemampuan Ekonomi Daerah; (2)Fasilitas Infrastruktur Wilayah; (3)Iklim Berinvestasi dan (4) Sumber Daya Manusia (SDM).

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur berdasarkan seberapa besar belanja yang dikeluarkan oleh setiap rumah tangga. Secara umum pengeluaran setiap rumah tangga sebesar >Rp.300.000,00/bulan setiap tahun meningkat dan kondisi terakhir sudah > 80%. Hal ini menandakan bahwa

telah terjadi peningkatan taraf hidup walaupun proporsi antara belanja makanan dan non makanan relatif seimbang 49% dan 51%.

Hal lain yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi daerah adalah kepariwisataan dan pertanian. Letak geografis di sepanjang jalur transportasi darat bagian tengah Pulau Jawa serta di tengah antara Kota Wisata Yogyakarta dan Kota Budaya Surakarta dan potensi kepariwisataan daerah yang lengkap (potensi wisata alam, sumber air, budaya, religi dan buatan) apabila dikelola secara terencana, terpadu dan profesional serta menerus akan mampu menjadi sumbangan bagi PAD. Kesuburan tanah yang sudah dikenal sejak jaman kolonial menjadikan sektor pertanian menjadi andalan sebagian besar masyarakat dan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai penyangga pangan bagi Provinsi Jawa Tengah. Secara umum kedua bidang itu memiliki permasalahan.

1. Bidang Pariwisata menghadapi permasalahan :
 - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai;
 - b. Masih lemahnya SDM dan kelembagaan pengelola kepariwisataan;
 - c. Kurangnya informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
 - d. Belum berkembangnya wisata unggulan sebagai destinasi wisata;
 - e. Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal;
 - f. Belum berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada kawasan dan potensi lokal.
2. Bidang Pertanian menghadapi permasalahan :
 - a. Masih rendahnya produksi dan produktivitas hasil pertanian/perkebunan;
 - b. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
 - c. Masih banyaknya jaringan irigasi pertanian kurang baik ;
 - d. Belum berkembangnya sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan berbasis agropolitan;
 - e. Masih lemahnya kapasitas petani dan kelembagaannya ;
 - f. Kurangnya sarana prasarana Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesmavet yang memenuhi standar;
 - g. Terbatasnya SDM Penyuluh Pertanian dan Pengamat Hama;
 - h. Masih kurangnya sarana prasarana perkebunan yang berkualitas pada kawasan penghasil tembakau;
 - i. Belum berkembangnya pemanfaatan tanaman refugia dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - j. Kurang memadainya sarana prasarana inseminasi buatan dan tenaga teknis lapangan yang handal.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Dalam rangka pengembangan wilayah secara merata dan adil maka sektor perhubungan berperan vital. Namun demikian kondisi sekarang Bidang Perhubungan menghadapi permasalahan :

- a. Kurang seimbang antara volume kendaraan bermotor dan kapasitas prasarana jalan;
 - b. Kurangnya fasilitas dan penunjang keselamatan lalu lintas ;
 - c. Kurangnya disiplin pengguna jalan dalam berlalu lintas ;
 - d. Belum terpadunya sistem jaringan jalan antar moda ;
 - e. Lemahnya manajemen rekayasa lalu lintas;
 - f. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan;
 - g. Kondisi sub terminal kurang memadai;
 - h. Belum tersedianya terminal barang/bongkar muat barang;
 - i. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - j. Belum optimalnya pengawasan terhadap kelebihan batas muatan.
- C. Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus ini terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu: (1) penanaman modal; (2) perdagangan dan (3) perindustrian. Sebagaimana diketahui bahwa penanaman modal atau investasi merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*). Secara prinsip yang diyakinkan daerah terhadap pemilik modal (investor) bahwa daerah antara lain: (1) Kepastian hukum peruntukan lahan; (2) Menawarkan kemudahan regulasi/insentif; (3) Memberikan insentif pajak sebelum usaha berjalan normal; (4) Menjamin *zero* faktor non teknis; (5) Kesiapan tenaga kerja lokal; (6) Sedikit banyak mampu menyediakan bahan produksi dan (7) Menjamin keamanan.

Walaupun Pemerintah Kabupaten Klaten sudah berusaha maksimal namun kenyataannya masing-masing bidang masih dihadapkan/menghadapi permasalahan.

1. Bidang Penanaman Modal menghadapi permasalahan :
 - a. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi guna promosi potensi dan penawaran ber-investasi di daerah ;
 - b. Belum optimalnya *assessment* dan *deregulasi/insentif pro-investasi* daerah ;
 - c. Terbatasnya lahan peruntukan zona atau kawasan industri ;
 - d. Lahan peruntukan kawasan industri yang direncanakan tidak terlalu diminati investor ;
 - e. Masih banyaknya faktor non teknis.
2. Bidang Perdagangan menghadapi permasalahan:
 - a. Masih banyaknya pasar tradisional milik daerah yang belum di-*revitalisasi* (baru 14 pasar atau 28% yang di-*revitalisasi*);
 - b. Menurunnya minat masyarakat belanja di pasar tradisional ;
 - c. Pengelolaan pasar tradisional masih konvensional ;
 - d. Masih banyaknya produk Usaha Kecil dan Mikro yang memiliki legalisasi (minimal memiliki PIRT) ;
 - e. Masih terbatasnya aparatur dan sarana prasarana kerja ke-*meteorologi*-an;

- f. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar serta pita cukai;
 - g. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
3. Bidang Perindustrian menghadapi permasalahan :
- a. Belum berkembangnya Industri Kecil Mikro berbasis produk unggulan daerah ;
 - b. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM bidang Industri Kecil, Menengah;
 - c. Rendahnya (hanya 4,5%) Industri Kecil Mikro yang memiliki daya saing global ;
 - d. Kurangnya koordinasi pelaku usaha dan pemerintah daerah serta pelaku satu dengan lainnya ;
 - e. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
 - f. Belum semua IKM mebel memiliki SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu);
 - g. Belum terwujudnya pola kemitraan antara industri besar dengan industri kecil.

D. Fokus Sumberdaya Manusia

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah tidak hanya semata-mata ditentukan oleh adanya sumber daya alam yang strategis, bernilai ekonomi dan melimpah. Fakta menunjukkan bahwa kecerdasan, kapasitas, kompetensi dan ketrampilan masyarakat (sumber daya manusia) walaupun minim sumber daya alam mampu membuat daerah dan masyarakatnya sejahtera.

Hal itu hanya akan terjadi apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dalam sistem tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta adanya aparatur daerah yang berintegritas.

Selain dukungan aparatur, kemajuan dan kemakmuran daerah tidak dapat dilepaskan dari adanya budaya membaca, melek teknologi serta semangat dan budaya kreasi dan inovasi (krenova). Dukungan daerah terhadap apresiasi krenova masyarakat, teknologi tepat guna (TTG) dan semangat membangun jejaring/kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha serta perekayasa ataupun penemu (inventor) sangat diperlukan. Diseminasi dan *Hilir*-isasi hasil-hasil litbang perguruan tinggi dan lembaga litbang akan mengoptimalkan potensi dan proses produksi masyarakat yang sudah berjalan. Walaupun perannya yang sangat strategis namun kenyataannya fokus ini masih menghadapi permasalahan.

1. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menghadapi permasalahan sebagai berikut :
- a. Kurangnya tenaga fungsional guru sekolah dasar negeri dan fungsional teknis lainnya ;

- b. Lemahnya sistem manajemen pengelolaan dan penataan kepegawaian ;
 - c. Belum adanya sistem penilaian antara beban kerja dan hak aparatur yang adil dan proporsional.
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah menghadapi permasalahan sebagai berikut :
- a. Struktur kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah belum sebagaimana yang diharapkan ;
 - b. Masih minimnya implementasi nyata atas Nota Kesepahaman (MoU) antara daerah dengan perguruan tinggi yang ada ;
 - c. Masih minimnya diseminasi dan *hilir*-isasi hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa lembaga penelitian di daerah ;
 - d. Masih belum optimalnya peran Dewan Riset Daerah (DRD) ;
 - e. Masih minimnya tindak lanjut hasil kreatifitas dan inovasi (krenova) masyarakat dan pelajar.
 - f. Belum adanya kompetisi hibah penelitian daerah.

4.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis menjadi hal penting yang akan berpengaruh di masa datang terhadap perkembangan Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2021. Dengan demikian pada bagian perumusan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang muncul diprioritaskan akan menjadi agenda utama dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Klaten

Kemajuan ilmu dan teknologi mengakibatkan mudahnya koneksitas antara dunia internasional, nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya, melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif. Beberapa kondisi yang menjadi dasar dalam analisis lingkungan strategis, adalah sebagai berikut.

A. Lingkungan Internasional

1. Globalisasi Perdagangan dan Jasa

Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran. Hal ini terkait pelaksanaan MEA, dan ekspor produk mebel harus memiliki SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu).

2. Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang

internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima pemerintah kabupaten.

3. Degradasi Lingkungan

Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob) dan pencemaran yang mengakibatkan meningkatnya gas emisi karbon. Akibat lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian serta dapat menimbulkan berbagai penyakit

4. Komitmen Internasional

Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut diantaranya adalah *Millenium Development Goals (MDG's)* yang dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)* tentang paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* tentang pembangunan dan Pemberdayaan perempuan, *Hyogo Framework* tentang peredaman bencana, *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)* tentang perdagangan bebas di kawasan Asean, *Ecolabelling* atau sertifikasi produk dan sebagainya.

B. Lingkungan Nasional

1. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG's yaitu yang berpenghasilan kurang dari 1US\$ lebih kurang sebanyak 16,5 juta jiwa atau 7,5%.

Kemiskinan di Kabupaten Klaten hingga saat ini masih belum ditangani secara optimal. Meskipun pada tahun 2015, angka kemiskinan di Kabupaten Klaten mengalami penurunan, tetapi masih menempati peringkat tujuh dari lima belas 14,15% sebagai desa merah di Jawa Tengah. Kecenderungan kemiskinan di Kabupaten Klaten mempunyai dimensi pokok, yaitu: rumah tidak layak huni, kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan. Pemerintah Kabupaten Klaten bagaimana program pembangunan harus benar-benar difokuskan kepada Rumah Tangga Miskin.

2. Krisis Energi

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

3. Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas.

4. Bencana Alam

Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam berupa gempa, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, angin, kebakaran dan tanah longsor. Pelaksanaan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat.

5. Kemampuan Keuangan Negara

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalan pendapatan asli daerah dan investasi. Dalam RPJM Nasional 2014-2018 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

6. Stabilitas Keamanan dan Ketentraman

Salah satu dampak buruk kemajuan iptek adalah makin canggihnya kejahatan, diawali dari tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga mendorong orang untuk berperilaku melawan, merugikan dan meresahkan. Selain itu isu tentang SARA dan politik perlu diantisipasi dan diwaspadai agar tidak berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Hambatan Perdagangan Antar Daerah

Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil

dan menengah adalah ketatnya persaingan kualitas produk untuk menembus segmentasi pasar antar daerah.

8. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Indikator pembangunan gender secara resmi adalah *Gender-related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measurement (GEM)*. Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu, termasuk akses terhadap pembangunan.

9. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Kasus gizi buruk, partisipasi sekolah, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, anak jalanan dan anak yang berhadapan dengan hukum adalah fakta yang menunjukkan belum terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan anak.

10. Daya Saing Teknologi dan Industri

Kemajuan teknologi yang sangat pesat belum diimbangi dengan kemampuan SDM dalam pemanfaatannya, sehingga daya saing produk industri yang dihasilkan masih kurang mampu bersaing di pasar global.

C. Kondisi Lingkungan Regional Jawa Tengah

Isu strategis dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2003-2018 secara ringkas, adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan,
2. Pengurangan pengangguran,
3. Pembangunan infrastruktur,
4. Kedaulatan pangan,
5. Kedaulatan energi, dan
6. Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah.

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Klaten

Mendasari pokok permasalahan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan apabila dianalisa SWOT (*Strength Weaknesses Opportunities Threats*), secara ringkas adalah sebagai berikut :

A. Kekuatan:

1. Posisi geografis Kabupaten Klaten yang strategis terletak diantara Yogyakarta-Surakarta akan memungkinkan terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa, sekaligus memungkinkan berkembang menjadi kota satelit dan penyangga bagi kebutuhan barang dan jasa.

2. Memiliki sumber daya aparatur yang cukup besar dan memiliki kompetensi dibidangnya.
3. Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai.
4. Memiliki jumlah UKM yang sangat besar.
5. Memiliki luas wilayah dan penduduk yang cukup besar serta terbagi menjadi 26 Kecamatan dan 401 Desa/Kelurahan.
6. Memiliki Potensi sumber daya alam termasuk sumber daya pertanian yang besar.
7. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah cukup tinggi.
8. Memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan perundangan dan kebijakan daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah.
9. Nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah tetap terpelihara dengan baik.
10. Potensi budaya dan kepariwisataan yang beragam menjadi modal dasar dalam pengembangan sektor pariwisata.
11. Adanya infrastruktur dasar publik yang cukup memadai dan terbukanya akses ke setiap wilayah.
12. Tersedianya Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025.
13. Tersedianya Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.

B. Kelemahan :

1. Masih kurangnya para pelaku UKM yang mampu mengakses sumber daya produktif (modal, teknologi, informasi dan pasar).
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran.
3. Belum meratanya kualitas pendidikan dan akses pelayanan kesehatan antar wilayah.
4. Belum terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam kerangka keruangan/wilayah pembangunan sampai tingkat desa.
5. Masih terbatasnya akses data dan informasi pendukung dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah baik sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun penelitian dan pengembangan.
6. Masih rendahnya IKM dan UKM yang memiliki daya saing.
7. Masih tingginya ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat.
8. Belum optimalnya pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

C. Peluang

1. Adanya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan ruang lebih besar untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi,

pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

2. Adanya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan ruang lebih besar untuk melakukan penggalian sumber-sumber keuangan dari pajak dan retribusi daerah secara maksimal, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Semakin menguatnya pengintegrasian perekonomian dunia yang ditandai dengan perekonomian global yang memperbesar akses pasar bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari Kabupaten Klaten.
4. Terjalannya kerja sama antar daerah dalam Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN akan semakin menciptakan sinergisitas pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah regional di Wilayah Subosukawonosraten yang lebih baik.
5. Terciptanya iklim kondusif atas dasar pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha yang saling menguntungkan akan lebih mendorong tumbuhnya iklim investasi dan mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
6. Adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan memperluas pasar bagi produk barang dan jasa UKM.

D. Ancaman

1. Semakin menguatnya daya saing terhadap produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dari luar Kabupaten Klaten baik dalam lingkungan domestik maupun lingkungan internasional.
2. Adanya persaingan pasar global dan perdagangan bebas.
3. Semakin intensifnya daerah-daerah lain dalam melakukan kebijakan *deregulasi* dan *debirokratisasi* yang memberikan kemudahan berinvestasi di daerah yang bersangkutan.
4. Fluktuatifnya harga minyak internasional dan pangan yang dapat mengakibatkan kenaikan harga BBM dan impor barang.
5. Fluktuatifnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.
6. Adanya keberlanjutan dari krisis keuangan global yang akan berdampak pada sendi-sendi perekonomian nasional.
7. Keluarnya PP 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif yang berupa produk tembakau bagi kesehatan.
8. Adanya pemberlakuan masyarakat ekonomi asean (MEA) akan berpengaruh terhadap persaingan perdagangan produk dan jasa.
9. Adanya ketentuan bahwa untuk ekspor mebel ke Eropa harus dilengkapi dengan dokumen sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

Berdasarkan analisis SWOT sebagaimana tersebut di atas, isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Klaten untuk periode 3 (tiga) tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Pengangguran

Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi isu strategis paling utama dikarenakan angka kemiskinan di tahun 2017 sebesar 14,15% dan pengangguran (TPT sebesar 4,35%) Kabupaten Klaten masih cukup tinggi sehingga diperlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan angka kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang secara signifikan sekitar 14% dan 4%.

2. Pemerataan Kualitas Pendidikan

Masalah pemerataan pendidikan ke semua wilayah kecamatan menjadi permasalahan mendasar selain adanya permasalahan kurangnya sarana prasarana yang belum memenuhi standar, perpustakaan sekolah dasar, Ruang UKS, Laboratorium dan kurangnya tenaga pendidik guru kelas berstatus negeri pada satuan pendidikan Sekolah dasar khususnya di wilayah perdesaan dan perbatasan. Selain itu pemenuhan hal-hal tersebut di atas, kebijakan rayonisasi dan pemanfaatan teknologi informasi (*on line*) proses penerimaan peserta didik baru harus menjadi komitmen bersama. Dengan pemerataan kualitas pendidikan ke semua wilayah maka akan mendorong keberhasilan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM).

3. Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi daerah terhadap masyarakat khususnya terkait dengan target pencapaian misi I (pertama) RPJMD ini. Dengan demikian maka pemerintah daerah berkewajiban menjamin kesehatan masyarakat dalam bentuk penyediaan layanan kesehatan dan menjamin pembiayaan asuransi kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu sebagai ketentuan.

4. Komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Isu reformasi birokrasi selama ini belum menyentuh akar permasalahan peningkatan pelayanan publik dalam hal memperbaiki tata kelola pemerintahan yang mencakup seluruh aspek manajemen untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yang meliputi birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

5. Kedaulatan pangan

Kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun demikian masih perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai kedaulatan pangan melalui pengembangan pola pertanian terpadu dengan berbasis pada teknologi. Hal tersebut mengingat potensi pertanian di Kabupaten Klaten cukup besar.

Kedaulatan pangan menjadi isu yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Klaten ke depan, melalui kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode dan ramah lingkungan, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan

bagi petani dan nelayan kecil penghasil pangan serta pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan. Dengan demikian diharapkan kedepannya banyak investor yang tertarik untuk menanamkan investasi di Kabupaten Klaten, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli bagi daerah.

6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Konsistensi Tata Ruang

Isu lingkungan hidup di Kabupaten Klaten sama dengan isu nasional yang dihadapi. Pembangunan yang dilakukan sekarang yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan potensi dan sumber dayanya. Secara tidak langsung tindakan ini akan mengakibatkan rusaknya lingkungan dan mengancam pada kelangsungan hidup manusia. Keteledoran manusia dalam mendirikan bangunan dengan tanpa memperhatikan dampak dari usaha atau industri yang akan berlangsung pada bangunan tersebut juga akan merusak lingkungan baik fisik maupun biologis secara perlahan dan tidak langsung, sehingga menghasilkan pencemaran lingkungan. Dalam melestarikan kualitas lingkungan, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup perlu dilakukan dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya perencanaan, kemungkinan dampak buruk di lingkungan sekitar bisa diantisipasi terlebih dahulu, sehingga kerusakan lingkungan akan dapat dikurangi atau bahkan dicegah sama sekali. Berdasarkan alasan inilah maka perlu dibuat sebuah rencana pengelolaan lingkungan demi terciptanya keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Klaten di masa kini dan masa datang adalah penyediaan air bersih, sanitasi, sampah, persoalan limbah, pencemaran air, polusi udara, serta penataan ruang.

Selain isu lingkungan yang diuraikan di atas, isu tata ruang di Kabupaten Klaten lebih mengutamakan konsep tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah utara, tengah dan selatan. Diharapkan dalam tiga tahun ke depan dengan menumbuhkan pusat-pusat kegiatan di wilayah utara dan selatan akan pemeratakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Konsep tata ruang di Kabupaten Klaten diterjemahkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

7. Pertumbuhan Investasi dan Penanaman Modal

Investasi dan penanaman modal merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*). Kabupaten Klaten tertinggal dibanding kabupaten tetangga kawasan “Subosukawonosraten” dalam menarik investor. Dengan demikian daerah wajib meyakinkan terhadap pemilik modal (investor) bahwa : (1) Ada kepastian hukum peruntukan lahan ; (2) Menawarkan kemudahan regulasi/insentif ; (3) Memberikan insentif pajak sebelum usaha berjalan normal ; (4) Menjamin zero faktor non teknis ; (5) Kesiapan tenaga kerja lokal ; (6) Sedikit banyak mampu menyediakan bahan produksi dan (7) Menjamin keamanan.

8. Kesenjangan (disparitas) Perkembangan Wilayah

Terjadinya kesenjangan (*disparitas*) perkembangan wilayah di mana wilayah/jalur tengah sepanjang jalan nasional Surakarta-Yogyakarta memiliki perkembangan sangat pesat sedangkan wilayah utara dan selatan relatif kurang berkembang/*stagnan*. Hal ini untuk wilayah utara (Wilayah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko dan Tulung) boleh jadi salah satunya disebabkan letaknya berdekatan dengan Gunung Merapi dan untuk wilayah selatan (Kecamatan Cawas, Bayat, Gantiwarno dan Prambanan) boleh jadi disebabkan potensi kegempaan yang berada pada tingkat menengah sehingga tanahnya labil yang berpengaruh terhadap kekuatan struktur bangunan

9. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan HIV/AIDS

Isu kekerasan dalam rumah tangga yang merebak akhir-akhir ini menyebabkan perlunya perlindungan anak dan perempuan guna merealisasikan Kabupaten Klaten Layak Anak menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut boleh jadi disebabkan :masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak, lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan nasional harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak baik perempuan maupun laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Selain pergaulan bebas, perubahan gaya hidup dan faktor-faktor lain menyebabkan peningkatan masyarakat Kabupaten Klaten yang terinfeksi virus HIV/AIDS. Dengan demikian peran insan kesehatan dan relawan sangat diperlukan guna menekan perkembangannya.

10. Penanganan Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur daerah menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Salah satu yang menjadi perhatian dan menarik minat investor untuk ber-investasi salah satunya adanya infrastruktur yang baik. Hal ini juga sudah ditegaskan dengan Instruksi Presiden agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% APBN/APBD untuk sektor infrastruktur.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: “*Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur*”.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: “*Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestar*”.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “*Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya*”. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Sejahtera**, yang dimaksud sejahtera adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. **Berketuhanan**, yang dimaksud berkeTuhanan adalah bahwa masyarakat Klaten yang dicita-citakan adalah masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercermin pada masyarakat yang agamis.
4. **Cerdas**, yang dimaksud cerdas adalah masyarakat Klaten menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), serta mampu menerapkannya dalam pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
5. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
6. **Berbudaya**, yang dimaksud berbudaya adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral dan budaya sebagai adat-istiadat.

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021 adalah: “**MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING**”. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. **Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

5.2 Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Misi Pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan meningkatnya perluasan layanan kesehatan serta semakin mantapnya kearifan lokal. Wujud dari masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada Agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan mantapnya kualitas pelayanan, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar, ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang didukung oleh swasembada pangan, keterkaitan hubungan desa-kota, optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah

yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah. Wujud dari masyarakat Agropolitan tersebut yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi desa-kota, meningkatnya daya beli masyarakat dengan didukung keunggulan kompetitif dan berdaya saing.

3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, meningkatnya kemandirian daerah, dan penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan sosial dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Wujud dari kegiatan dan target tersebut yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan semakin terpenuhi dan meratanya kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar di seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana sosial dasar dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk dalam mendukung pembangunan daerah.

5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, mantapnya kehidupan masyarakat dan penegakan HAM, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin meningkatnya kesejahteraan sosial.

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan semakin berkurangnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya jumlah pengangguran.

6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan bersinar, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Misi1: Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;

- Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- Misi 3: Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
- Misi 4: Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
- Misi 5: Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
- Misi 6: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
- Misi 7: Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
- Misi 8: Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Pemahaman dan pengertian tujuan dan sasaran adalah hasil tahap penetapan rumusan sasaran strategis yang mencerminkan skala prioritas tertinggi di dalam Dokumen RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pencapaian kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sementara itu tujuan sendiri mengandung pengertian sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu atau periode lima tahun. Tujuan ditentukan dengan mengacu visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran akan dicapai selama periode waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

5.3.1. Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya

Masyarakat yang cerdas disertai kesehatan yang terjamin dengan tetap mengedepankan budaya ketimuran merupakan sebuah konsep besar yang dimana pemerintah harus memegang peran utama guna mewujudkan keberhasilannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan kemandirian. Pemberdayaan adalah proses tata pelaksanaan pembangunan yang mampu menggiring pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kejuangan, cara mencapai tingkat kesejahteraan lahir dan batin dengan tetap bersendi pada budaya ketimuran. Kemandirian adalah lingkup independensi kelompok masyarakat dikarenakan pengembangan kecerdasan yang dimiliki. Dengan demikian akan semakin rendah tingkat ketergantungan kepada pihak lain, untuk mencapai keberhasilan program pembangunan yang telah ditargetkan.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Menurunnya persentase penduduk miskin;
2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komponen angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah khususnya tercapainya persentase Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);

3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komponen usia harapan hidup khususnya tercapainya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita dan Prevalensi Gizi Buruk;
4. Menurunnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
6. Meningkatnya aset budaya tersertifikasi dan
7. Meningkatnya minat baca masyarakat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perpustakaan daerah.

Secara umum ditandai dengan masyarakat yang berpendidikan (melek huruf), cakap dan cerdas, sehat, berbudaya sesuai jati diri adat Jawa Mataraman, berjiwa tangguh dan ulet, siap berkompetisi, berakhlak mulia dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

5.3.2. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan menjadi faktor kunci dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*goodcleangovernance*). Jalannya roda pemerintahan akan baik dan aspiratif apabila ruang informasi dan aksesibilitas publik terhadap kebijakan pemerintah terbuka lebar yang diimbangi dengan tanggung jawab yang baik. Aspek transparansi merupakan salah satu elemen pembentuk konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu teori dan mempertimbangkan kondisi *factual* dan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan kebijakan yang memberikan ruang komunikasi cukup dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperluas peran masyarakat sebagai unsur pembangun kebijakan dalam memberikan aspirasi dan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien khususnya meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Persentase ASN Perencana yang bersertifikat;
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah ditandai diraihnya Opini “*Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*” dari BPK;
3. Meningkatnya produk hukum Perda yang ditetapkan tepat waktu;
4. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan daerah dan ketepatan waktu perencanaan daerah;
5. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
6. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

7. Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD);
8. Menurunnya tingkat inflasi daerah;
9. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi;
10. Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
11. Meningkatnya pengadaan barang/jasa secara elektronik;
12. Meningkatnya publikasi dan komunikasi kebijakan kepala daerah;
13. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum menggambarkan ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5.3.3. Misi 3: Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal

Masyarakat yang terus bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah dapat dikatakan belum mampu mengarungi samudra persaingan. Oleh karenanya kebijakan ekonomi daerah diharapkan menghasilkan kelompok-kelompok masyarakat yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menjadi inspirasi bagi anggota masyarakat lain dilingkungannya menjadi sebuah masyarakat yang mandiri, memiliki kualitas yang dapat diandalkan dan mempunyai daya saing kompetitif secara global.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
4. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap PDRB;
5. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor industri;
6. Meningkatnya penerapan produk kreatifitas dan inovasi dalam pembangunan;
7. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing penanaman modal.

Secara umum menggambarkan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah dan sumbangan antar sub sektor terhadap struktur ekonomi dalam PDRB, kondisi pengangguran riil dan respon/tanggapan investor terhadap peluang investasi yang ditawarkan pemerintah daerah.

5.3.4. Misi 4: Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Kebutuhan SaranaPrasarana Dasar Sosial Masyarakat

Ketersediaan ruang terbuka hijau, penanganan persampahan, penyediaan infrastruktur permukiman yang layak dan penataan daya dukung transportasi merupakan komponen lengkap pembangunan infrastruktur dalam

mewujudkan peran pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana masyarakat.

Konsep kesejahteraan kehidupan masyarakat semestinya tidak hanya berorientasi pada peningkatan taraf hidup dari sisi finansial, namun juga terhadap kenyamanan dan keterjaminan pelayanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Permasalahan lainnya yang perlu diselesaikan adalah permasalahan transportasi dan daya dukung. Langkah dan pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi dengan seluruh stake holders akan mempercepat akselerasi pelaksanaan penataan infrastruktur jalan, sehingga memberikan manfaat yang langsung dapat dirasakan masyarakat.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan sarana prasarana sosial dasar masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan;
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Secara umum menggambarkan kapasitas infrastruktur dan sarana prasarana sosial dasar yang berkualitas guna mendukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat, sosial budaya dan hubungan antar manusia.

5.3.5. Misi 5: Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan dan Kelestarian Sumber Daya Alam yang Selaras Dengan Tata Ruang Wilayah

Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan seharusnya tidak dibenarkan berlawanan dengantata ruang serta daya tampung dan daya dukung lingkungan sehingga berakibat pada penurunan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memberikan daya dukung lingkungan yang memadai bagi keberlangsungan aktivitas produktif masyarakat.

Kondisi persampahan yang merupakan salah satu komponen utama dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat produksi atau volume sampah bersifat rutin setiap hari. Oleh karenanya diperlukan kebijakan mereduksi volume produksi sampah dari sumber sampah, sehingga pengelolaan persampahan lebih efektif dan efisien. Prinsip tataruang adalah integrasi satu ekosistem lingkungan untuk menjaga keseimbangan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Oleh karenanya diperlukan keterpaduan dalam suatu rencana tata ruang, bukan hanya mendasarkan pada logika infrastruktur dasar melainkan mempertimbangkan pula daya dukung dan daya tampung lingkungan di sekitarnya. Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung ini dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup.

Untuk itu diperlukan berbagai langkah yang tepat dan terencana untuk tetap membangun sebuah tata ruang yang memiliki daya ungkit ekonomi sebagai upaya pembangunan perekonomian masyarakat, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Dampak dari ketidakberpihakan pada kelestarian ekosistem akan berdampak luas pada kualitas kehidupan masyarakat.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang;
2. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana dan meningkatnya kapasitas;
3. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan energi.

Secara umum menggambarkan sejauh mana peranan tata ruang dalam mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, menurunnya resiko korban bencana dan terkendalinya sumber daya alam dan energi.

5.3.6. Misi 6: Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian

Masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berakar dan berkepribadian Pancasila dan berwawasan kebangsaan, akan memudahkan pencapaian pembangunan manusia seutuhnya. Karakter masyarakat yang mempunyai jiwa gotong royong akan membuat ketentraman kehidupan masyarakat yang baik. Kebijakan pembangunan perlu dilakukan secara utuh baik lahir maupun batin, sehingga tata kehidupan manusia yang dicita-citakan bisa terwujud. Ketentraman dan kesejahteraan kehidupan tercapai dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah maju, namun tetap berpijak pada karakter dan budaya masyarakat ketimuran.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi;
2. Meningkatnya pengembangan sosial budaya dan kelembagaan organisasi kemasyarakatan;
3. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Secara umum menggambarkan ketercapaian hak-hak masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan dan bernegara.

5.3.7. Misi 7: Meningkatkan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Tuntutan perkembangan jaman mengharuskan kebijakan pemberdayaan kualitas perempuan dan juga peningkatan perlindungan terhadap anak. Terjadinya berbagai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, semestinya disikapi dengan penetapan kebijakan pemerintah terkait langkah-langkah antisipatif dan preventif menghadapi permasalahan tersebut.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan perlindungan perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatnya perlindungan anak.

Secara umum menggambarkan kapasitas perempuan serta perlindungan perempuan dan anak guna mengakses berperan dalam pembangunan.

5.3.8. Misi 8: Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik

Terlaksananya pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditentukan guna mewujudkan kepuasan masyarakat merupakan hal pokok yang ingin dicapai atas misi ini. Pelayanan yang optimal di semua sektor akan mencerminkan dukungan pencapaian maksimal hasil-hasil pembangunan yang menjadi kebijakan daerah.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat;
3. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas;
4. Meningkatnya minat transmigrasi.

Tabel 5.1. menyajikan secara rinci tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat terealisasi dalam rangka ketercapaian setiap misi.

**TABEL 5.1. : VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN KLATEN
VISI : Maju Mandiri dan Berdaya Saing**

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya										
1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah	tahun	12,84	12,85	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,16	8,22	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	43,00	45,00	46,00	48,00	50,00	52,00	55,00	55,00
	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	kasus	15	18	18	17	16	15	14	14
	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	12,94	11,69	10,15	10,13	10,11	10,09	10,07	10,07
	Angka kematian Balita	per 1000 KH	2,99	1,09	1,69	1,67	1,65	1,63	1,61	1,61
	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,75	0,89	0,73	0,73	0,72	0,71	0,7	0,7
a. Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahira (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR		2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1	2,1
b. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
3. Menurunkan tingkat kemiskinan	Prosentase penduduk miskin	%	14,89	14,46	14,15	14,12	14,10	14,05	14,00	14,00
a. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	77	79	81	83	85	87	89	89
	persentase penguatan kapasitas PSKS	%	90	92	94	96	97	99	100	100

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,9	13,7	13,5	13,3	13,1	13	12,9	12,9
4. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,1	1,07	1,05	1,03	1,01	0,98	0,96	0,96
a. Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahira (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR		2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1	2,1
5. Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya	Rasio aset budaya tersertifikasi	%	7/92	8/92	9/92	10/92	11/92	12/92	13/92	13/92
	Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	36	38	41	44	46	47	48	48
a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	5	10	10	10	10	10	10	60
	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5	5	5	5	5	5	30
b. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	6	6	6	6	6	6	36
	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	7	10	10	10	10	10	10	60
6. Meningkatkan minat baca masyarakat	Index Kepuasan Masyarakat	Index	65	65	65	65	70	70	70	70
a. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	4	4	5	5	5	5	5	5
II. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih										
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36	87,36
	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0,08	0,18	1,28	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Prosentase SDM yang memiliki kualifikasi perencanaan	%	50,98	50,98	54,90	58,82	62,75	66,67	70,59	70,59
a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36	87,36
b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	%	70	70	70	85	85	90	90	85
d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	90	100	100	100	100	100	100	100
2. Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah	Index Kepuasan Masyarakat	index	65	65	65	65	70	70	70	70
a. Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	5	5	5	5	5	5	25
3. Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	Prosentase pemerintah desa yang dibina dalam peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan	%	20%	27%	33%	40%	47%	53%	60%	60%
a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15%	15%	31%	46%	72%	87%	100%	100%
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Opini BPK									
a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	level	1	2	2	2	3	3	3	3
	Level Kapabilitas APIP	level	2	2	2	3	3	3	3	3
	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Nilai	47,89 (C)	53.01 (CC)	59 (CC)	64 (B)	66(B)	68(B)	70 (BB)	70 (BB)
b. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,05	3,1	3,1
c. Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	80	80	100	85	90	90	90	90
	Indeks kabupaten peduli HAM	Indeks	0	60	70	75	80	80	80	80
d. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	80	85	88	90	90	90	90	90
e. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	0		100	100	100	100	100	100

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
f. Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	1200	90	92	94	96	98	100	100
	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	90	92	94	96	98	100	100
	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	125	100	92	94	96	98	100	100
g. Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	2,57	4 (± 1)	4 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)
h. Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90	90	90	95	95	95	95
III. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal										
1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39	5,4	5,41	5,42	5,43	5,43	5,43
a. Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,5	12,07	12,15	12,25	12,3	12,4	12,6	12,6
2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	Prosentase LEM, LED yang aktif dan produktif (LEM, LED baik yang baru atau yang sdh berjalan dan yang telah di fasilitasi atau di bantu sehingga dapat berproduksi	%	13%	19%	23%	26%	33%	41%	45%	45%
a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TIG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	12%	19%	27%	35%	42%	50%	58%	58%
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39	5,4	5,41	5,42	5,43	5,43	5,43
	Pendapatan Per kapita (000)	rupiah	20.410	20.410	21.410	22.460	23.560	24.720	24.720	24.720

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	5	10	20	25	25	25	25	130
b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,74	18,86	18,94	19,12	19,37	19,38	19,38
	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	5	7	9	11	13	15	15
c. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	31,82	45,45	63,64	72,73	81,82	86,36	100,00	100,00
d. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja									
	PMDN		189	238	397	417	438	460	483	2.433
	PMA		46	294	294	294	294	294	294	1.764
	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)									
	PMDN	%	1,75	1,75	1,81	1,98	2,20	2,50	2,50	12,74
PMA	%	2,25	2,25	2,40	2,45	2,50	2,55	2,55	14,70	
4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,51	3,94	4,35	4,30	4,25	4,20	4,15	4,15
a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,08	1,08
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76	69,51	69	69	69	69	69
b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	86,81	87,00	87,30	87,60	87,90	88,20	88,20	88,20
5. Meningkatnya daya saing produk industri daerah	Pertumbuhan Industri	%	0,59	0,59	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,63
a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	27,55	33,73	34,76	34,86	34,98	35,2	35,2	35,2
	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	7,50	7,50
IV. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat										
1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat										

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	indeks layanan infrastruktur	%	27,81	30,45	33,30	35,05	37,19	38,96	40,81	40,81
b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	%	36,04	38,92	40,76	45,87	47,41	57,52	57,52	57,52
c. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	indek	57,71	61,61	65,50	70,01	73,75	74,05	74,40	94,40
V. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah										
1. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	indek	36,46	41,35	46,24	51,13	56,03	58,47	60,92	60,92
a. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,86	78,90	78,94	78,98	79,20	79,60	80,00	80,00
b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	indek	16,00	20,89	25,79	30,68	35,57	38,02	40,46	40,46
	Indeks kualitas udara	indek	60,00	64,89	69,79	74,68	79,57	82,02	84,46	84,46
	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	indek	34,14	39,03	43,93	48,82	53,71	56,16	58,60	58,60
2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	Indeks resiko bencana	Indeks		123	122	121	120	119	119	119
a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas		sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
VI. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian										
1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80	75,7
a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80	75,7
2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	Prosentase desa/ kel yang terfasilitasi di bidang sosial budaya dan LK	%	5%	5%	13%	23%	40%	70%	100%	100%

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	16%	16%	33%	49%	66%	83%	100%	100%
3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100	100
a. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100	100
VII. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak										
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	indeks	96,42	96,47	96,52	96,57	96,62	96,67	96,72	96,72
a. Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	59,95	60,02	60,09	60,16	60,23	60,3	60,37	60,37
	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	tingkat	Madya	Madya	madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
VIII. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik										
1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat										
a. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	75,990	77,338	78,762	79,016	80,047	81,078	81,078	81,078
b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai survey kepuasan masyarakat	%	84,50	84,07	79,52	79,52	80,00	80,00	80,00	80,00
c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	Persentase partisipasi masyarakat mengikuti program transmigrasi	%	75,00	75,20	75,40	75,60	75,80	76,00	76,20	76,20
a. Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	-64,62	39,13	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,00

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui penetapan kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan. Kebijakan dan langkah-langkah yang berisikan program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan dikaloborasikan dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, program lintas OPD dan program kewilayahan.

6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan kepala daerah, diuraikan didalam tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pelaksanaannya. Masing-masing misi ketercapaiannya diterjemahkan kedalam berbagai tujuan yang dirinci kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai ditetapkan strategi pencapaiannya. Secara keseluruhan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian misi tertuang didalam tabel 6.1.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi, dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka ditetapkan arah kebijakan dalam kurun waktu 3 tahun mendatang menurut Misi yang akan dicapai. Penetapan arah kebijakan untuk mencapai masing-masing misi selama kurun waktu masa berlaku RPJMD, tertuang didalam tabel 6.2.

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, meliputi :

1. Program Organisasi Perangkat Daerah

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, adalah merupakan program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis - SKPD dan merupakan program yang telah diselaraskan dengan Program RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 atau Program Kabupaten diselaraskan dengan ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, yang dimaksud adalah beberapa Program Kabupaten yang telah diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta didukung oleh kegiatan beberapa OPD.

3. Program Kewilayahan

Program Kewilayahan merupakan program kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Adapun Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi untuk melaksanakan ketercapaiannya didalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, tertuang secara terinci didalam tabel 6.1. Sedangkan rincian program dengan berbagai indikatornya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta kebutuhan pendanaannya dijabarkan pada tabel 6.3.

**TABEL 6.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
KABUPATEN KLATEN**

VISI : Maju Mandiri dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
I.	Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas,		
	1 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat wajib belajar sembilan tahun dengan memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai kualitas pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) sesuai Standar Nasional Pendidikan
	2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan b. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai syarat Standar Pelayanan Minimal untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita yang akan meningkatkan usia harapan hidup masyarakat
	3. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	a. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, penanganan anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial
	4. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	a. Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE sehingga memperkecil angka kelahiran dan peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB)
	5 Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya	a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Memberikan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana olahraga bagi pemuda untuk peningkatan prestasi pemuda

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Melibatkan masyarakat didalam penyelenggaraan event-event seni dan budaya di daerah serta pelestarian benda, situs dan cagar budaya
	6. Meningkatkan minat baca masyarakat	a. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Mengembangkan budaya baca bagi masyarakat melalui pembinaan pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan		
	1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Melakukan pembinaan kompetensi ASN, menegakan kedisiplinan, dan pemberian kompensasi
		b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta mengoptimalkan inventarisasi aset daerah.
		c. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Menjamin fasilitasi lembaga legislasi daerah agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal
		d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
	2. Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah	a. Meningkatnya tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penataan dan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan.
	3. Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Melakukan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan mendorong pelaksanaan tata kelola administrasi desa yang sesuai ketentuan
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Mengoptimalkan fungsi lembaga pengawasan untuk menjamin terlaksananya reformasi birokrasi di pemerintahan kabupaten Klaten

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, memperluas kerjasama, memastikan batas wilayah, pelaksanaan pemerintah kecamatan yang berkualitas, dan memperluas cakupan layanan telekomunikasi, serta penyediaan data statistik daerah
		c. Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Melakukan penataan pengelolaan pembentukan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan yang direncanakan
		d. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi atau kesenjangan antara target dan relaisasi pembangunan
		e. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Melakukan pelaksanaan penyediaan barang dan jasa secara elektronik
		f. Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Memberikan pesan dan informasi kepala daerah yang akurat ke masyarakat melalui media dan fasilitasi keprotokolan kepala daerah
		g. Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Melakukan koordinasi pelaksanaan bidang sumberdaya alam, pengembangan ekonomi dan usaha daerah
		h. Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama
III.	Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah		
	1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Menjamin ketersediaan bahan pangan dan perbaikan mutu konsumsi pangan Melakukan pembinaan dan fasilitasi didalam proses produksi komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan
			Meningkatkan pemantauan bidang pertanian

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat pedesaan didalam menerapkan teknologi tepat guna dan fasilitasi terbentuknya BUMDes
	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Melakukan pengembangan kemitraan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran destinasi wisata serta meningkatkan daya tarik obyek wisata
		b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pengembangan keunggulan kompetitif dan satuan pendukung sektor usaha kecil menengah (UKM), pembinaan kelembagaan UKM dan pedagang kaki lima, serta memberikan perlindungan konsumen
		c. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Mendorong tumbuhnya inovator-inovator di masyarakat dan penerapan hasil litbang/inovasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah
		d. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Peningkatan promosi potensi usaha di kabupaten Klaten untuk meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi
	4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja serta fasilitasi dan informasi kebutuhan tenaga kerja
		b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Penyelesaian terhadap sengketa dan permasalahan antara tenaga kerja dan pengusaha
	5. Meningkatkan daya saing produk industri daerah	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Mengembangkan kemampuan teknologi industri bagi industri kecil menengah untuk mendapatkan ISO dan SNI serta standar produk manufaktur dan SVLK untuk IKM meubel
IV.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan		
	1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan, jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah serta peningkatan pengelolaan persampahan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai dan kelengkapan keselamatan jalan di ruas jalan kabupaten Klaten
		c. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi, penerangan jalan bagi perumahan dan permukiman serta meningkatkan pembangunan rumah tidak layak huni
V.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan		
	1. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	a. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Melakukan perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan sesuai konsep tata ruang serta memperbaiki pengelolaan ruang terbuka hijau
		b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Memperluas cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL oleh investor dengan melibatkan masyarakat terdampak dan memperluas cakupan pemantauan kualitas udara dan air
	2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Melakukan fasilitasi dan pembinaan untuk menjadi desa tangguh bencana serta meningkatkan kualitas dan kuantitas relawan yang terlatih tanggap bencana
VI.	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang		
	1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Memberikan wawasan kebangsaan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan sosial
	2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Memberikan fasilitasi kedesa-desa dibidang sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan agar lebih aktif menjaga pelestarian adat dan budaya
	3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Memberikan rasa ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan memperluas cakupan perlindungan, pelayanan bencana kebakaran, dan mempersingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran, serta penegakan perda dan perkara konsistn

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VII.	Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan		
	1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	a. Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Memberikan pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) agar lebih kuat, mendorong peran serta perempuan didalam pembangunan dan memberikan perlindungan dan hak terhadap perempuan dan anak
VIII.	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik		
	1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	a. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Memberikan pelayanan yang selalu ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang layanan perhubungan, perijinan investasi, dan administrasi kependudukan
		b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	
		c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	a. Pengembangan ketransmigrasian	Memberikan pemahaman dan pengertian tentang ketransmigrasian serta melakukan pengembangan lokasi atau wilayah penempatan transmigrasi

**TABEL 6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KLATEN**

VISI : Maju Mandiri dan Berdaya Saing

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
MISI - 1						
1.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan non formal menuju wajar dikdas 12 tahun
	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik sekolah dasar	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik sekolah dasar	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik SMP	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik PAUD	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik PAUD
2.	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa
		Penyusunan Perbub Kesehatan Ibu dan anak	Sosialisasi Perbub Kesehatan ibu dan anak	Monitoring dan evaluasi Penerapan Perbub KIA	Monitoring dan evaluasi Penerapan Perbub KIA	Monitoring dan evaluasi Penerapan Perbub KIA
	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar
		Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur
		Fasilitasi pembentukan Pos pembinaan Terpadu Penyakit tidak menular (Posbindu PTM)	Optimasiliasi Pelaksanaan Posbindu	Optimasiliasi Pelaksanaan Posbindu	Optimasiliasi Pelaksanaan Posbindu	Optimasiliasi Pelaksanaan Posbindu
	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia
	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita
	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita	Peningkatan skrining , promotif , preventif dan pelayanan kuratif penderita
	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita
	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader
	Penyusunan Perda HIV	Sosialisasi Regulasi/Perda HIV	Penerapan Perda HIV	Penerapan Perda HIV	Penerapan Perda HIV	Penerapan Perda HIV

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
3.	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
4.	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah	1. Penyelenggaraan pagelaran/ event-event seni budaya di daerah
	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional	2. Partisipasi pengiriman duta seni di level nasional dan internasional
	3. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya, situs dan benda cagar budaya	2. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya, situs dan benda cagar budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya	3. Pelestarian Cagar Budaya dan Revitalisasi Cagar Budaya
	Sinergitas program kegiatan olahraga dengan dinas terkait dan organisasi keolahragaan	Inventarisasi dan pemetaan cabang olahraga potensial	Pembinaan cabang olahraga potensial	Pembibitan dan pembinaan atlet usia dini	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif
	Mengembangkan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja	Meningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme	Peningkatan prestasi pemuda	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam mengembangkan kepemimpinan dan kepeloporan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam mengembangkan kepemimpinan dan kepeloporan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam mengembangkan kepemimpinan dan kepeloporan
5.	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa	Kunjungan ke sekolah dan Desa
	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan	Sosialisasi layanan perpustakaan
	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan
MISI - 2						
1.	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial	Peningkatan Kompetensi manajerial
	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional	Peningkatan kompetensi fungsional
	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis
	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS	Peningkatan kompetensi jabatan CPNS
			Peningkatan Kompetensi Pemerintahan	Peningkatan Kompetensi Pemerintahan	Peningkatan Kompetensi Pemerintahan	Peningkatan Kompetensi Pemerintahan

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya	Penempatan PNS sesuai kualifikasi dan kompetensinya
	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat	Peningkatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat
	Peningkatan kelancaran penjarangan gaji PNS	Peningkatan kelancaran penjarangan gaji PNS	Peningkatan kelancaran penjarangan gaji PNS	Peningkatan kelancaran penjarangan gaji PNS	Peningkatan kelancaran penjarangan gaji PNS	Peningkatan kelancaran penjarangan gaji PNS
	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Peningkatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
2.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah
	Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI	Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
3.	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah
4.	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi	Pendataan dan penataan arsip yang terakuisisi
	Mengakuisisi arsip milik daerah	Mengakuisisi arsip milik daerah	Mengakuisisi arsip milik daerah	Mengakuisisi arsip milik daerah	Mengakuisisi arsip milik daerah	Mengakuisisi arsip milik daerah
	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah	Pemilahan arsip kategori inaktif dan kategori musnah
	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa	Sosialisasi pengamanan kearsipan desa
5.	Pembinaan aparat pemerintahan desa	Pembinaan aparat pemerintahan desa	Pembinaan aparat pemerintahan desa	Pembinaan aparat pemerintahan desa	Pembinaan aparat pemerintahan desa	Pembinaan aparat pemerintahan desa
	-	Penyusunan dan sosialisasi regulasi pemerintahan desa	Penyusunan dan sosialisasi regulasi pemerintahan desa	Penyusunan dan sosialisasi regulasi pemerintahan desa	Penyusunan dan sosialisasi regulasi pemerintahan desa	Penyusunan dan sosialisasi regulasi pemerintahan desa
	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan administrasi pemerintahan desa
6.	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
7.	Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mewujudkan Mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel
	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah
	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam mewujudkan Kejelasan batas antar daerah/wilayah
8.	Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan/Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
	Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan/Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
	Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Meningkatkan mutu sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan/Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
9.	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air
	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Pertambangan
10.	Menyusun kebijakan terkait dengan kerukunan beragama, meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Menyusun kebijakan terkait dengan kerukunan beragama, meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas	Meningkatkan bantuan sarpras tempat ibadah , kapasitas SDM, kelembagaan, pembinaan dan koordinasi kepada OPD/Toga/Tomas

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
11.	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Peningkatan ketersediaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan
	Penguatan terhadap pengawasan internal sinergi pemeriksanaan dan pengawasan intern	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal	Penguatan terhadap akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan sinergi perencanaan penganggaran, pengadaan pelaksanaan dan monev terhadap kinerja internal
MISI - 3						
1.	Meningkatkan ketersediaan energi dan protein per kapita	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular
	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah	Meningkatkan Diversifikasi dan cadangan pangan daerah
	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan
	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas	Optimalisasi sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk pengembangan komoditas
	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemeliharaan kesehatan hewan/ikan dan pencegahan penyakit hewan menular
2.	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD	Pemanfaatan TTG, Posyantek, Posyantekdes, Pembinaan BP-SPAMS dan TMMD

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Fasilitasi pembentukan LED BUMDes	Fasilitasi pembentukan dan pembinaan LED BUMDes	Fasilitasi pembentukan dan pembinaan LED BUMDes dalam pengklasifikasian	Fasilitasi pembentukan dan pembinaan LEM, LED BUMDes dalam pengklasifikasian	Fasilitasi pembinaan LEM, LED BUMDes dalam pengklasifikasian	Fasilitasi pembinaan LEM, LED BUMDes dalam pengklasifikasian
	Fasilitasi kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan
3.	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan
	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan	Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan
4.	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal
	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan
	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat
5.	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat	Fasilitasi hasil-hasil litbang yang applicable di masyarakat
6.	Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal	Meningkatkan fungsi koordinasi antar lembaga atas pengimplementasian Rencana Umum Penanaman Modal	Meriview Rencana Umum Penanaman Modal	Meningkatkan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum dan kepastian lahan usaha	Memantapkan peningkatan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum dan kepastian lahan usaha	Memantapkan peningkatan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum dan kepastian lahan usaha
	Melaksanakan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Meningkatkan fungsi Koordinasi antar lembaga atas pengimplementasian Rencana Umum Penanaman Modal	Mengembangkan strategi promosi yang terarah, fokus, dan inovatif	Meningkatkan kegiatan promosi investasi berskala nasional	Meningkatkan kegiatan promosi investasi berskala nasional
		Meningkatkan fungsi koordinasi antar lembaga dalam rangka pengembangan potensi daerah	Menyusun profil potensi dan peluang investasi			
7.	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja
	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha
8.	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri	Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri
	MISI - 4					
1.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid / beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah
	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana perhubungan di ruas jalan kabupaten Klaten
3.	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Kawasan Perkotaan
4.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan gedung pemerintah	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat
5.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan bangunan gedung pemerintah

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
6.	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat
MISI - 5						
1.	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya pembangunan berkelanjutan
2.	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan	Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen / ijin lingkungan
	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri	Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri
	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil	Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil
	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat	Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat
	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3	Peningkatan pengelolaan limbah B3
	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan
	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan	Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan
	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten	Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kab. Klaten
	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim	Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim
				Peningkatan pelestarian flora dan fauna (keanekaragaman hayati)	Peningkatan pelestarian flora dan fauna (keanekaragaman hayati)	Peningkatan pelestarian flora dan fauna (keanekaragaman hayati)
	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat	Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat
	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan LH

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Peningkatan peran serta lembaga/sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan	Peningkatan peran serta sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan
	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat
3.	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana
	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana
	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana
MISI - 6						
1.	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Delanggu	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di wilayah rentan permasalahan sosial eks Tubup Kota	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Jatinom	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Pedan	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Gondang Winangun	Peningkatan pembangunan karakter bangsa bagi elemen masyarakat dan pelajar di eks Tubup Gondang Winangun
2.	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik	Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tenteram di wilayah yang rawan konflik
3.	Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM	Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM
	-	Penyusunan Regulasi, sosialisasi dan pembentukan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pembinaan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pendampingan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pendampingan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Pendampingan kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK	Penguatan kapasitas kelembagaan PKK

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Penguatan kapasitas posyandu dan KPMD	Penguatan kapasitas posyandu dan KPMD	Penguatan kapasitas posyandu, KPMD dan LK Lainnya	Penguatan kapasitas posyandu, LKMD, KPMD dan LK lainnya	Penguatan kapasitas posyandu, LKMD, KPMD dan LK lainnya	Penguatan kapasitas posyandu, LKMD, KPMD dan LK lainnya
4.	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral
5.	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai	Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai
	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat
	MISI - 7					
1.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
2.	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak

No.	ARAH KEBIJAKAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	MISI -8					
1.	Menyusun Standar Pelayanan	Penyempurnaan Standar Pelayanan	Mengembangkan pelayanan perizinan on line	Pemantapan Pelayanan perizinan On Line	Pemantapan Pelayanan perizinan On Line	Pemantapan Pelayanan perizinan On Line
2.	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan
	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal
	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)	Penyediaan Daftar Penduduk pemilih Potensial Pemilu (DP4)
	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan	Pengendalian dan keamanan pemfaatan data dan dokumen kependudukan
3.	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik	Penerapan SOP pelayanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik
4.	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi	Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi

TABEL 6.3. : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN KLATEN

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
TOTAL KEBUTUHAN PENDANAAN				392.443.275		659.188.495		606.672.769		751.634.372		688.285.150		699.260.096				
I. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya																		
1.	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah	tahun	12,84	12,85	12,97		12,97		12,97		12,97		12,97		12,97		
		Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,16	8,22	8,23		8,23		8,23		8,23		8,23		8,23		
a.	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	43,00	45,00	46,00		48,00		50,00		52,00		55,00		55,00		
		Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	65,00	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		
1)	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	anak	48.430	48.025	3.528.000	43.027	1.567.800	43.328	1.062.800	43.631	1.169.080	43.937	1.285.988	44.244	1.414.587	44.244	PELAKSANA URUSAN PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	92,19	92,37		78,61		92,59		92,79		92,99		93,19		93,19	
2)	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	94,53	105,23	24.330.200	97,45	23.688.000	97,65	14.743.000	97,85	16.217.300	98,05	17.839.030	98,25	19.622.933	98,25	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	87,58	97,57		90,93		91,13		91,33		91,53		91,73		91,73	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	81,60	91,26		86,84		87,04		87,24		87,44		87,64		87,64	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	63,94	72,77		68,22		68,42		68,62		68,82		69,02		69,02	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96,64	92,43		88,28		88,48		88,68		88,88		89,08		89,08	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,03		0,04		0,03		0,02		0,01		0,01		0,01	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,10	0,08		0,23		0,18		0,13		0,08		0,03		0,03	
		Angka Kelulusan SD/MI	%	97,78	99,34		98,27		98,47		98,67		98,87		99,07		99,07	
		Angka Kelulusan SMP/MTs	%	95,55	97,73		98,11		98,13		98,15		98,17		98,19		98,19	
3)	Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,78	99,57	1.235.950	99,62	990.000	99,72	245.000	99,73	269.500	99,74	296.450	99,75	326.095	99,75	
4)	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	86,42	87,83	1.771.800	76,97	765.000	79,97	800.000	82,97	880.000	86	968.000	89	1.064.800	89	
		Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	98,08	98,76		98,27		98,47		98,67		98,87		99,07		99,07	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	96,58	96,78		93,55		93,75		93,95		94,15		94,35		94,35		
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI	Rasio	1 : 12	1 : 13		1 : 14		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs	Rasio	1 : 11	1 : 12		1 : 14		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		
5)	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	99,78	99,57	270.000	99,62	220.000	99,72	220.000	99,73	242.000	99,74	266.200	99,75	292.820	99,75		
6)	Manajemen Pelayanan Pendidikan	%	96,64	92,43	891.000	88,28	623.176	88,78	1.305.000	89,28	1.435.500	89,78	1.579.050	90,28	1.736.955	90,28		
2.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Tahun	71,81	76,59		76,62		76,62		76,62		76,62		76,62		76,62		
a.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	kasus	15	18		18		17		16		15		14		14		
	Menurunnya Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	12,94	11,69		10,15		10,13		10,11		10,09		10,07		10,07		
	Menurunnya angka kematian Balita	per 1000 KH	2,99	1,09		1,69		1,67		1,65		1,63		1,61		1,61		
	Menurunnya prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,75	0,89		0,73		0,73		0,72		0,71		0,7		0,7		
1)	Upaya Kesehatan Masyarakat	%	91,72	92,84	2.112.884	92,85	5.098.552	97	6.026.200	98	4.505.000	99	7.300.000	100	7.400.000	100		PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Ibu hamil (K4)	%	96,3	96,98		97,2		98		99		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3)	%	95,72	97,59		97,57		98		99		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	90,79	94		95,25		96		97		98		99		99		
	Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	98,96	96,04		99,67		99,2		99,4		99,6		100		100		
	Cakupan BBLR	%	5,22	5,25		5,14		5,10		5,06		5,02		5,00		5,00		
	Cakupan Anemia Wanita Usia Subur	%	-	-		-		35		33		30		28		28		
2)	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	%	-	20	430.000	30	560.000	50	689.000	70	670.525	90	766.000	100	766.000	100		
	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)	%	-	10		30		70		90		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC	%	70,44	81,88		99,65		100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	%	56,7	60		70		80		90		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Diabetis mellitus	%	76	30		40		50		70		90		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderit Gangguan jiwa berat	%	-	70		80		90		100		100		100		100		100
	Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	12	27,48		64,81		75		80		90		100		100		100
	Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Discharged Campak > 2/100.000 Penduduk	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 Jam	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi	%	80	100		100		90		100		100		100		100		100
	Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	90	98,7		95,08		92,5		93		95		95		95		95
	Cakupan Bias C/DT/TD	%	98	98,8		98,72		98		98		98		98		98		98
3)	Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	95,83	96	5.369.285	97	2.836.251	98	4.913.243	99	4.815.000	100	4.919.004	100	5.025.254	100	100	PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
4)	Pengawasan Obat dan Makanan	%	50	50	52.000	50	50.000	55	55.000	58	130.000	100	58.000	100	58.000	100	100	PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
	Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	%	100	100		100		100		100		100		100		110		110
5)	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	83.720	100	141.000	100	156.500	100	155.000	100	180.000	100	190.000	100	100	PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
	Kebijakan Yang Dibuat	Jumlah/ Buah	1	4		4		5		7		9		11		11		11
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	74	75,2		75,4		75,5		75,7		80		80,2		80,2		80,2
	Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk Kesehatan	%	8	6		8		14		20		24		28		28		28
	Proporsi Posyandu Mandiri	%	42	42		44		47		49		51		53		53		53
	Persentase Desa Didampingi SMD MMD	%	80	80		100		100		100		100		100		100		100
6)	Perbaiki Gizi Masyarakat	%	100	100	61.500	100	60.000	100	135.000	100	150.000	100	160.000	100	170.000	100	100	PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat	%	73,59	81,6		72		79		80		81		82		82		82
	Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif	%	26,1	27,6		27,2		27,3		27		26,8		26,6		26,6		26,6
	Cakupan Balita Stunting	%	8,4	10,9		10,5		10,8		10,5		10,2		10		10		10

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Cakupan Balita Underweight	%	16,1	19,1		18		18,3		18,1		18		18		18		18
	Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes)	%	1,69	1,38		1,13		2,8		2,5		2,3		2,0		2,0		2,0
	Partisipasi Posyandu (D/S)	%	-	81,4		81,6		85		85		85		85		85		85
7)	Pengembangan Lingkungan Sehat																	
	Cakupan desa <i>open defecation free</i> (ODF)	%	14	19,95	1.173.836	32,92	571.656	100	963.540	100	995.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	
	Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja	%	-	-		26,342		25		30		40		50		50		50
8)	Standarisasi Pelayanan Kesehatan																	
	Akreditasi Puskesmas	%	-	20,59	4.200.000	47,06	70.000	32,35	50.000	20,59	100.000	47,06	60.000	32,35	60.000		60.000	
9)	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin																	
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	10	5	9.114.222	5	9.060.000	5	9.311.222	5	9.680.730	5	16.000.000	5	16.000.000		16.000.000	
10)	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya																	
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/30.000 pend	0,28	0,29	16.471.016	0,29	17.537.000	0,29	8.163.389	0,29	37.441.856	0,29	18.000.000	0,29	18.000.000		18.000.000	
	Rasio Pustu per satuan penduduk	/10.000 pend	0,23	0,22		0,22		0,22		0,22		0,22		0,22		0,22		0,22
11)	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata																	
	Ratio tempat tidur Rumah sakit per satuan penduduk	/1.000 pend	1,34	1,34	0	1,38	0	1,38	200.000	1,38	2.540.000	1,38	10.000.000	1,38	10.000.000		10.000.000	
b.	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kemalitan di Rumah Sakit																	
	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59		76,62		76,62		76,62		76,62		76,62		76,62		76,62
1)	Program Pelayanan Kesehatan																	
	BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka Penggunaan tempat tidur	%	14,7%	52,55%	72.448.000	42,04%	69.447.669	62%	37.000.000	65%	46.600.000	70%	46.000.000	70%	47.000.000	70%	47.000.000	70%
	NDR (Net Death Rate) angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar rumah sakit	%	9,5 %	25%		13,74 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %
	GDR (Gross Death Rate) angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	%	56,8 %	28%		37,21%		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %
3.	Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS																	
	Menurunnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,9	13,7		13,5		13,3		13,1		13		12,9		12,9		12,9
a.	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM																	
	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	77	79		81		83		85		87		89		89		89
	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	90	92		94		96		97		99		100		100		100
	Prosentase penduduk miskin	%	14,89	14,46		14,15		14,12		14,10		14,05		14,00		14,00		14,00

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17
1) Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	%	94	95	1.143.000	96	1.167.689	97	1.192.911	98	1.718.000	99	1.755.109	100	6.976.802	46,78	PLAKSANA URUSAN SOSIAL
2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	5,1	5,3	654.350	24	668.484	26	682.923	28	850.000	30	868.360	32	4.144.315	32	
3) Pembinaan para penyandang disabilitas, trauma, dan korban bencana	Persentase difabel, trauma, dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	%	18	20	50.000	22	50.000	24	51.080	26	200.000	28	204.320	30	555.418	30	
4) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	%	100	100	465.900	100	475.963	100	486.244	100	863.600	100	507.477	100	2.950.770	100	
4. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,1	1,07		1,05		1,03		1,01		0,98		0,96		0,96	
a. Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR		2,2	2,3		2,18		2,16		2,14		2,12		2,1		2,1	
1) Program Pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	%	75,9	78,7		64,93	1.553.000	64,97	8.029.000	65	8.510.000	65,03	8.625.000	65,06	8.710.000	65,06	PELAKSANA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	%	5,5	5,5		5,5		5,3		5,1		4,98		4,95		4,95	
	Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)	%	14,3	10,13		9,3		9		8,97		8,94		8,91		8,91	
2) Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age specific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old)	Per-1000 perempuan usia 15-19 tahun	41	40	10.500	39	10.500	37	14.500	35	35.000	33	45.000	31	55.000	31	
3) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri	Persentase peserta KB mandiri	%	32,58	33,58	236.429	34,08	246.500	34,58	285.000	35,08	300.000	35,58	325.000	36,08	335.000	36,08	
	persentase IMP terbentuk	%	0	0		0		100		100		100		101		100	
	Persentase BKB aktif	%	66	70		75		80		85		90		100		100	
	Persentase BKR aktif	%	55	65		75		80		85		90		100		100	
	Persentase BKL aktif	%	70	75		80		85		90		95		100		100	
	Persentase UPPKS aktif	%	45	50		60		70		80		90		100		100	
5. Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya	Rasio aset budaya tersertifikasi	%	7/92	8/92		9/92		10/92		11/92		12/92		13/92		13/92	
	Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	36	38		41		44		46		47		48		48	
a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	5	10		10		10		10		10		10		60	
	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5		5		5		5		5		5		30	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17
1) Peningkatan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	60	64	25.000	66	450.000	66	550.000	69	810.000	69	835.000	72	900.000	72	PELAKSANA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase Wirausaha Muda yang Dibina	%	15	0		15		20		20		25		25		25	
2) Peningkatan Prestasi dan Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	2	2	150.000	15	160.000	0	0	25	250.000	20	100.000	25	200.000	25	
b. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	6		6		6		6		6		6		36	
	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	7	10		10		10		10		10		10		60	
1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	6	2.424.000	6	3.558.000	6	2.121.000	6	2.660.000	6	2.850.000	6	2.850.000	6	PELAKSANA URUSAN KEBUDAYAAN
2) Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	7	8	60.000	9	165.000	10	110.000	11	110.000	12	110.000	13	110.000	13	
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kenaikan Organisasi Kebudayaan/ Kelompok Kesenian yang Difasilitasi	%	5	5	0	5	100.000	5	125.000	5	125.000	5	135.000	5	135.000	30	
6. Meningkatkan minat baca masyarakat	Index Kepuasan Masyarakat	Index	65	65		65		65		70		70		70		70	
a. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	4	4		5		5		5		5		5		5	
1) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Kenaikan Jumlah Kunjungan Masyarakat	Orang	7.673	8.000	253.400	8.500	452.800	9.000	640.847	9.500	690.000	10.000	740.000	10.000	760.000	10.000	PELAKSANA URUSAN PERPUSTAKAAN
II. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih																	
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02		81,29		82,06		84,07		87,36		87,36		87,36	
	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0,08	0,18		1,28		1,03		1,03		1,03		1,03		1,03	
	Prosentase SDM yang memiliki kualifikasi perencanaan	%	50,98	50,98		54,90		58,82		62,75		66,67		70,59		70,59	
a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02		81,29		82,06		84,07		87,36		87,36		87,36	
1) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti lulus uji kompetensi	%	6	0,62	1.187.446	0,65	3.317.600	0,51	5.365.000	3,58	6.240.000	3,62	6.140.000	3,62	7.490.000	3,62	PELAKSANA URUSAN KEPEGAWAIAN
2) Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase jumlah pelanggaran disiplin yang tertangani	%	27	13	1.763.750	57,14	2.249.530	59,43	2.666.655	33,06	2.943.000	31,06	3.004.000	29,07	3.040.000	29,07	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17		
b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WDP		WDP		WDP		WDP		WDP		WTP		WTP			
1) Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	%	7,14	17,61	8.663.630	50,30	10.839.353	7,24	10.903.596	7,34	11.139.114	7,44	12.674.700	7,54	12.949.741	7,54	12.949.741	7,54	PELAKSANA URUSAN KEUANGAN
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu	
	Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu	
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu	
	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	%	51,6	51,6		51,6		52,5		53,0		53,5		53,9		53,9		53,9	
	Persentase penyerapan belanja daerah	%	84,0	85,0		81,0		82,0		83,0		84,0		85,0		85,0		85,0	
c. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	%	70	70		70		85		85		90		90		85		85	
1) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	18.591.300	Ada	18.992.872	Ada	35.577.711	Ada	35.796.862	Ada	37.231.050	Ada	37.231.050	Ada	37.231.050	Ada	
	Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam RPJM maupun RKPD	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	PELAKSANA URUSAN PENUNJANG KESEKRETARIATAN DEWAN
	Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
	Jumlah produk Pembentukan Perda	Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama	15	23		23		28		22		22		22		22		22	140
	Jumlah produk pengawasan DPRD	rekomendasi	14	14		14		14		14		14		14		14		14	84

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17		
	Jumlah Produk Perda tentang anggaran pemerintahan daerah	Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18		
d.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1)	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	1.930.000	Ada	1.809.150	Ada	2.045.917	Ada	2.120.000	Ada	2.200.000	Ada	2.300.000	Ada	PELAKSANA URUSAN PERENCANAAN	
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya dokumen perencanaan RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPDP	%	85	90		95		95		100		100		100		100		
		Penjabaran konsistensi program RKPDP ke dalam APBD	%	85	90		95		95		100		100		100		100		
2)	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah klaster UKM yang telah ditetapkan	klaster	11	11	560.000	11	470.000	11	525.000	11	400.000	11	450.000	11	500.000	11		
		Jumlah produk unggulan daerah yang telah ditetapkan	PUD	0	0		7		7		7		7		7		7		
		Kontribusi dana CSR terhadap pembangunan	%	2,06	4,8		1,45		1,41		1,76		1,85		2,00		2,00		
		Ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
3)	Program perencanaan sosial dan budaya	Ketersediaan data dan informasi di bidang sosial dan budaya	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	730.000	Ada	590.000	Ada	350.000	Ada	400.000	Ada	450.000	Ada	500.000	Ada		
		Jumlah KKN Perguruan Tinggi yang dikoordinasikan	PT	4	4		6		7		7		8		10		10		
		Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	52 SKPD	52	52	350.000	52	350.000	52	350.000	52	350.000	52	350.000	52	350.000	52		
		Pengembangan Pendidikan Untuk Semua/ PUS	2 SKPD & 26 KEC	28	28	50.000	28	50.000	28	50.000	28	50.000	28	50.000	28	50.000	28		
		Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/ Nangkis	52 SKPD	52	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium/ GAKY	2 kegiatan	2	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2
4)	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	408.850	Ada	675.000	Ada	330.000	Ada	400.000	Ada	450.000	Ada	500.000	Ada	Ada
		Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	Ada
2.	Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah	Index Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kearsipan	index	65	65		65		65		70		70		70		70	
a.	Meningkatnya tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	5		5		5		5		5		5		25	
1)	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kenaikan Jumlah Koleksi Arsip	buah	68.700	5.500	172.371	6.000	180.250	6.500	190.000	7.000	352.500	7.500	400.000	8.000	450.000	8.000	PELAKSANA URUSAN BIDANG KEARSIPAN
2)	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	OPD	10	10	10.000	14	10.000	15	20.000	30	150.000	30	150.000	35	200.000	35	
3.	Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	Prosentase pemerintah desa yang dibina dalam peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan	%	20%	27%		33%		40%		47%		53%		60%		60%	
a.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15%	15%		31%		46%		72%		87%		100%		100%	
1)	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	13%	13%	137.003	35%	1.444.270	47%	610.000	77%	6.665.000	89%	3.505.000	100%	4.480.000	100%	PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2)	Program Tata Kelola Pemerintah Desa	Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	%	15%	15%	501.721	31%	497.405	46%	900.000	72%	1.500.000	87%	1.680.000	100%	1.795.000	100%	
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Opini BPK																
a.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	level	1	2		2		2		3		3		3		3	
		Level Kapabilitas APIP	level	2	2		2		3		3		3		3		3	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Nilai	47,89 (C)	53,01 (CC)		59 (CC)		64 (B)		66(B)		68(B)		70 (BB)		70 (BB)	
1)	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa	%	52,3	52,3	3.073.345	65,5	3.139.729	50,0	5.500.000	50,0	5.500.000	50,0	6.000.000	74,5	6.000.000	74,5	PELAKSANA URUSAN PENGAWASAN
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase rekomendasi temuan yang ditindak lanjut	%	50	60		65		70		75		80		85		85	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Persentase APIP yang tercukupi kebutuhan pengembangan profesi	%	0	0	0	0	0	16,1	450.000	17,2	450.000	17,9	450.000	18,5	450.000	18,5		
2)	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah	%	60	60	0	70	0	75		80		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
3)	Penyelenggaraan reformasi birokrasi	Nilai	0	0	0	0	0	60	75.000	70	100.000	75	100.000	80	100.000			
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	71,36	79,14		79,94		80,7		81		81,5		82		82		
b.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Skor	2,6	2,7		2,8		2,9		3		3,05		3,1		3,1		
1)	Peningkatan kinerja kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%	100	100	385.000	100	695.000	100	695.000	100	420.000	100	440.000	100	500.000	100		SEKRETARIAT DAERAH
2)	Peningkatan Kerjasama daerah	%	10	10	60.000	15	125.000	15	150.000	15	155.000	15	160.000	15	170.000	85		
3)	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Pilar	50	50	50.000	50	110.000	50	400.000	50	410.000	50	425.000	250	425.000	250		
	Jumlah obyek rupa bumi yang terbakar	obyek	50	50		50		50		50		50		50		250		
4)	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan	%	60	65	60.000	70	80.000	80	90.000	90	90.000	100	100.000	100	100.000	100		
5)	Pengembangan komunikasi informatika mass media	%	32,2	32,2	425.000	52,2	285.000	52,2	905.000	53,6	6.240.000	55,08	8.275.000	56,5	10.310.000	56,5		PELAKSANA URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Desa	%	15	30		46		61,5		73		84,6		100		100		
	Persentase pelayanan publik dan non publik berbasis e-government	%	10	10		14		40		60		80		100		100		
	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik	skor						54		60		65		70		70		
6)	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	dokumen	1	1	45.000	1	155.000	4	155.000	4	190.000	4	200.000	4	200.000	4		PELAKSANA URUSAN STATISTIK
7)	Program Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Bidang Pembangunan Kecamatan	%	90	90	897.000	60	1.300.000	65	1.300.000	66	1.690.000	68	1.820.000	69	1.300.000	69		KECAMATAN
	Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu	%	95	80		60		65		70		70		70		70		
	Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu	%	90	90		90		90		90		90		90		90		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD	%	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
8)	Program Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Bidang Pemerintahan Kecamatan	%	60	60	1.170.000	50	1.170.000	70	1.326.000	75	1.430.000	75	1.430.000	80	1.560.000	80	80	
	Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes	%	50	80	80	80	80	80	83	83	85	85	85	85	85	85	85	90
	Persentase kelembagaan (BPD, LPM/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
9)	Program Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Bidang Kemasyarakatan Kecamatan	jumlah kejadian	40	41	2.080.000	20	2.080.000	15	2.197.000	15	2.210.000	15	2.210.000	15	2.340.000	15	15	
	Jumlah penerima beras sejahtera (Rastra)	KK	5552	5552	5235	5235	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238	5238
	Jumlah warga penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)	orang	3104	3029	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714
	Jumlah warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS)	orang	31315	31268	31268	31268	33527	33527	33527	33527	33527	33527	33527	33527	33527	33527	33527	33527
	Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	KK	1354	1338	2286	2286	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273
c.	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	%	80	80	100	100	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Indeks kabupaten peduli HAM	Indeks	0	60	70	70	75	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1)	Penataan peraturan perundang undangan	%	100	100	1.177.526	100	1.843.000	100	2.970.000	90	2.955.891	90	3.000.700	90	3.000.700	90	90	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perda yang terselesaikan	%	100	100	100	100	90	90	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	Persentase perkara yang terselesaikan	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase produk hukum yang terdigitalisasi	%	100	113	108	108	113	113	77	77	90	90	90	90	90	90	90	90
2)	Peningkatan pelayanan bantuan hukum	%	2	4	417.560	4	552.494	6	438.000	6	722.395	4	794.634	4	794.634	4	4	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17		
d. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%																	
1) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor	%	100,00	100	619.220	100	690.498	100	702.464	100	850.754	100	935.829	100	1.029.412	100	1.029.412	100	SEKRETARIAT DAERAH
	Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi dan waktu pelaksanaan) dengan kondisi realita lapangan (capaian)	%	100,00	100		100			100			100		100		100		100	
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu	%	100,00	100		100			100			100		100		100		100	
e. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	0			100			100			100		100		100		100	
1) Peningkatan koordinasi layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang ditayangkan	%	0			100	211.963	100	355.416	100	480.000	100	500.000	100	550.000	100	550.000	100	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselesaikan	%	0			100			100			100		100		100		100	
	Analisis sajian/ penyebab kegagalan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Ada/ Tidak ada	0			Tidak Ada			Tidak Ada			Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada	
f. Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokololan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	1200	90		90			90			90		90		90		90	
	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	90		90			90			90		90		90		90	
	Persentase pelayanan keprotokololan kegiatan kepala daerah	%	125	100		100			100			100		100		100		100	
1) Penyampaian pesan dan informasi kepala daerah	Media sosial	Pesan	0	360	488.000	360	680.000	420	654.000	420	654.000	480	760.000	480	480.000	480	480.000	2520	SEKRETARIAT DAERAH
	Media papan ruang	Agenda	100	120		120			140			160		160		160		840	
	Media pemerintah	Berita	100	120		120			180			180		240		240		1080	
	Media massa	Berita	100	120		120			180			180		240		240		1080	
	Dokumentasi kegiatan kepala daerah	Dokumen	100	120		120			140			140		160		160		840	
	Sambutan	Naskah	420	480		480			480			480		480		480		2880	
2) Fasilitasi keprotokololan kepala daerah	Acara resmi dan kenegaraan	Agenda	125	150	0	200	55.000	200	176.100	200	230.000	225	250.000	225	275.000	225	275.000	1200	
3) Kemitraan dengan insan kehumasan dan pers	Pers rilis	Agenda	120	240	786.000	240	786.000	240	972.000	240	972.000	240	985.000	240	985.000	240	985.000	1440	
	Iklan	Pesan	36	36		36			48			48		48		48		264	
	Fasilitasi insan media	Agenda	4	6		6			12			12		15		15		66	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17		
g. Meningkatkan fasilitasi dan pengawasan kebijakan daerah bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	2,57	4 (± 1)		4 (± 1)		3,5 (± 1)		3,5 (± 1)		3,5 (± 1)		3,5 (± 1)		3,5 (± 1)			
1) Peningkatan fungsi koordinasi bidang SDA, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha daerah	Persentase peningkatan Pendapatan BUMD	%	6,23	2	500.825	2	897.368	2	743.000	2	1.016.000	2	1.112.000	2	1.140.000	2		SEKRETARIAT DAERAH	
	Alokasi pupuk bersubsidi	Ton	59.750	57.530		54.350		63.450		88.035		88.035		88.035		88.035		88.035	
	Debitur penerima KUR	Orang	6.650	32126		28.034		30.534		33.034		35.534		38.034		38.034		38.034	
h. Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90		90		90		95		95		95		95		95	
1) Kesejahteraan sosial, kesehatan kependudukan dan keluarga berencana	Persentase kenaikan penanganan lanjut usia (lansia)	%	0	10,95	80.226	0	52.226	2,75	90.745	2,74	116.000	4,12	124.000	6,84	137.000			SEKRETARIAT DAERAH	
III. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal																			
1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39		5,4		5,41		5,42		5,43		5,43		5,43		5,43	
a. Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,5	12,07		12,15		12,25		12,3		12,4		12,6		12,6		12,6	
1) Peningkatan Kinerja Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)	91,71	92	900.000	92,25	1.000.000	92,5	1.435.000	92,75	1.335.000	93	1.335.000	93,25	1.335.000	93,25	1.335.000	93,25	PELAKSANA URUSAN PANGAN
2) Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produktifitas padi	(kwt/ha)	63,97	63,98	9.521.359	63,99	10.020.000	63,99	6.492.000	64	10.807.000	64,01	10.900.000	64,01	10.925.000	64,01	10.925.000	64,01	
3) Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi tembakau rajang	(ton)	815	815	2.388.910	1.037	2.490.500	1.087	2.985.000	1.091	3.218.000	1.092	3.348.000	1.092	3.373.000	1.092	3.373.000	1.092	PELAKSANA URUSAN PERTANIAN
	Produksi tembakau asepan	(ton)	1.164	1.038		808		952		1.167		946		946		946		946	
4) Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi sapi	(ekor)	99.438	93.788	330.000	97.954	534.000	104.450	2.125.000	108.628	2.125.000	112.973	2.125.000	117.492	2.125.000	117.492	2.125.000	117.492	
	Produksi daging sapi	(ton)	2.140	2.289		2.450		2.621		2.805		3.001		3.211		3.211		3.211	
5) Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	(ton)	27.831	28.660	2.528.295	29.515	2.198.000	30.396	1.971.000	31.302	2.483.000	31.467	2.483.000	31.467	2.483.000	31.467	2.483.000	31.467	PELAKSANA URUSAN PERIKANAN
	Konsumsi Ikan	(kg/kapita/ tahun)	13	15,14		17,2		18,72		19,91		20,41		20,41		20,41		20,41	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	Prosentase LEM, LED yang aktif dan produktif (LEM, LED baik yang baru atau yang sdh berjalan dan yang telah di fasilitasi atau di bantu sehingga dapat berproduksi	%	13%	19%		23%		26%		33%		41%		45%		45%		
a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	12%	19%		27%		35%		42%		50%		58%		58%		
1) Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna	%	7%	7%	389.371	29%	217.504	46%	427.000	64%	591.000	82%	704.000	100%	875.000	100%	PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes	%	14%	29%	142.102	43%	144.560	51%	225.000	58%	300.000	64%	370.000	70%	450.000	70%		
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,51	0,51		0,51		0,52		0,52		0,53		0,53		0,53		
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39		5,4		5,41		5,42		5,43		5,43		5,43		
	Pendapatan Per kapita (000)	rupiah	20.410	20.410		21.410		22.460		23.560		24.720		24.720		24.720		
a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	5	10		20		25		25		25		25		130		
1) Program Pengembangan Kemitraan	Persentase kenaikan lembaga pariwisata yang bermitra	%	10	10	195.000	10	290.000	10	500.000	10	630.000	10	720.000	10	720.000	60	PELAKSANA URUSAN PARIWISATA	
2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	%	5	60	378.000	70	1.000.000	70	635.000	70	1.010.000	70	1.095.000	70	1.095.000	410		
	Rata - rata lama kunjungan wisatawan	hari	0,5	1		1		1		1		1		1		1		
3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata andalan	%	45	45	380.000	45	5.560.000	45	3.934.800	45	5.220.000	45	5.350.000	45	5.350.000	45		
b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,74		18,86		18,94		19,12		19,37		19,38		19,38		
	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	5		7		9		11		13		15		15		
1) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM	unit usaha	54.916	54.941	150.000	54.966	250.000	55.016	350.000	55.066	350.000	55.091	350.000	55.141	350.000	55.141	PELAKSANA URUSAN KOPERASI DAN UNIT USAHA MENENGAH	
2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran	UMKM	15	5	250.000	55	450.000	105	650.000	106	650.000	105	650.000	105	650.000	494		
3) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	72,20	72,52	75.000	80,07	175.000	80,20	250.000	80,18	250.000	80,59	250.000	80,97	250.000	80,97		
	Pertumbuhan koperasi	unit	946	962		883		894		908		917		925		925		
	Persentase manajer koperasi yang bersertifikasi	%	4,39	4,37		7,07		9,76		11,68		13,53		16		16		
4) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal	%	0,10	0,11	50.000	0,13	100.000	0,13	430.000	0,14	800.000	0,15	800.000	0,15	800.000	0,90	PELAKSANA URUSAN PERDAGANGAN	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Persentase cakupan pelayanan UTTP	%	0	0		0		16,6		35		50		75		75		
5) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pasar PEMDA yang direvitalisasi	%	30,61	2,041	1.900.000	4,082	16.074.000	4,082	11.550.000	4,082	11.550.000	4,082	11.550.000	4,08	11.550.000	53,06		
	Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang	%	0,72	0,72		0,72		0,72		0,72		0,72		0,72		0,72		
	Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%	1,5	1,51		1,52		1,54		1,56		1,58		1,75		1,75		
6) Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase PKL dan asongan yang terdaftar	%	66,67	72,22	50.000	58,96	50.000	61,95	50.000	65,65	100.000	69,56	100.000	73,16	100.000	73,16		
c. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	31,82	45,45	-	63,64		72,73		81,82		86,36		100,00		100,00		
1) Program penelitian dan pengembangan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova	peserta	29	20	250.000	22	250.000	25	400.000	30	400.000	30	400.000	35	500.000	35	PELAKSANA URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	jenis inovasi	7	10		14		16		18		19		22		22		
d. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja																	
	PMDN		189	238		397		417		438		460		483		2.433		
	PMA		46	294		294		294		294		294		294		1.764		
	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)																	
	PMDN	%	1,75	1,75		1,81		1,98		2,20		2,50		2,50		12,74		
	PMA	%	2,25	2,25		2,40		2,45		2,50		2,55		2,55		14,70		
1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)			25.525		50.636		158.500		570.000		580.000		640.000			PELAKSANA URUSAN PENANAMAN MODAL	
	PMDN (dim ribu Rp)	Rp	89.208.500	89.208.500		90.823.174		92.621.473		94.659.145		97.025.624		99.451.264		563.789.180		
	PMA (dim ribu US\$)	US\$	11.278,80	11.278,80		11.549.491		11.832.454		12.128		12.438		12.755		23.430.544		
	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)																	
	PMDN	investor	12	12		13		14		15		16		17		87		
	PMA	investor	5	5		5		5		5		5		5		30		
4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,51	3,94		4,35		4,30		4,25		4,20		4,15		4,15		
a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor kelenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	0,99		1,01		1,03		1,05		1,07		1,08		1,08		
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76		69,51		69		69		69		69		69		
1) Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	50	52	3.100.500	54	3.490.550	56	2.904.605	58	3.195.066	60	3.514.572	62	3.866.029	62	PELAKSANA URUSAN KETENAGA KERJAAN	
2) Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	24,74	25,00	2.725.000	25,10	3.159.500	25,20	3.428.450	25,30	3.768.295	25,40	4.142.125	25,50	4.553.337	25,50		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	86,81	87,00		87,30		87,60		87,90		88,20		88,20		88,20		
1) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	36,36	36,50	575.000	37,00	632.000	37,50	325.490	38,00	358.039	38,50	393.843	39,00	433.227	39,00		PELAKSANA URUSAN KETENAGA KERJAAN
	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	‰	0,75	0,7		0,68		0,66		0,64		0,66		0,68		0,68		
5. Meningkatkan daya saing produk industri daerah	Pertumbuhan Industri	%	0,59	0,59		0,59		0,60		0,61		0,62		0,63		0,63		
a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	27,55	33,73		34,76		34,86		34,98		35,2		35,2		35,2		
	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	2,50	3,50		4,50		5,50		6,50		7,50		7,50		7,50		
1) Pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI	%	5,00	5,40	2.217.020	5,80	2.615.000	6,20	1.650.125	6,60	1.440.000	7,00	2.215.000	7,40	2.215.000	7,40		PELAKSANA URUSAN PERINDUSTRIAN
2) Peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	%	3,00	3,20	75.000	3,40	950.000	3,60	1.100.000	3,80	1.225.000	4,00	625.000	4,30	625.000	4,30		
	Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK	%	9,50	10,00		10,50		11,00		11,50		12,00		12,50		12,50		
IV. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat																		
1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat																		
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	indeks layanan infrastruktur	%	27,81	30,45		33,30		35,05		37,19		38,96		40,81		40,81		
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	49,51	56,25	55.226.452	61,15	185.120.000	63,94	215.455.544	66,93	225.515.225	69,66	234.700.077	72,52	244.322.357	72,52		PELAKSANA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	angka	0,000595683	0,000592		0,000590		0,000587		0,000584		0,000582		0,000579				
2) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Prosentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	20,00	22,20	10.000.000	24,26	12.000.000	26,00	11.000.000	28,00	11.500.000	30,00	12.000.000	32,00	12.000.000	32,00		
3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan	%	13,93	12,89	16.986.343	14,49	19.410.000	15,20	22.029.824	16,63	24.105.933	17,21	24.936.376	17,92	25.974.431	17,92		
b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	%	36,04	38,92		40,76		45,87		47,41		57,52		57,52		57,52		
1) Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Terminal Bis / Terminal Penumpang	unit	9	9	2.598.466	9	7.070.870	9	5.839.927	9	10.200.000	9	14.575.000	9	14.575.000	9		PELAKSANA URUSAN PERHUBUNGAN

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17			
	Jumlah Terminal barang	unit	0	0		0		0		0		1		1		1				
	Prosentase Perlengkapan Jalan Terpasang	%	22,07	27,85		31,53		33,88		36,96		40,03		40,03		40,03		40,03		
	Jumlah Simpang ATCS	simpang	0	0		0		3		5		8		8		8		8		
	Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik	%	72	76		82		85		86		87		87		87		87		
c.	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman																			
1)	Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	unit	406	145	1.400.000	1173	14.200.000	250	2.500.000	250	2.500.000	250	2.500.000	250	2.500.000	250	2.500.000	2.318	PELAKSANA URUSAN PEKERJAAN UMUM	
2)	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	ha	294,58	0,000784	500.000	0,36	1.100.000	0,7	2.500.000	0,1	2.000.000	0,1	2.000.000	0,1	2.000.000	0,1	2.000.000	295,9		
3)	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	%	92,58	93,82	21.000.000	95,05	22.000.000	96,29	31.000.000	97,53	31.000.000	98,76	31.000.000	100,00	36.000.000	100	36.000.000	100	PELAKSANA URUSAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	%	0,78	0,00		0,39		0,19		0,00		0,00		0,00		0,00		100		
4)	Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	%	69,68	77,26	18.500.000	84,84	27.500.000	92,42	33.000.000	100	35.080.000	100	19.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100		
	Prosentase layanan Air Limbah	%	60,52	70,39		80,26		90,13		100		100		100		100		100		
	Prosentase layanan Drainase	%	blm prny data																	
5)	Penataan dan pengelolaan tata bangunan	unit	7	8	30.100.000	13	93.100.000	11	43.100.000	19	100.100.000	5	33.100.000	5	15.100.000	61	15.100.000	61		
	Jumlah Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB)	unit	871	891		497		800		800		800		800		800		4588		
V.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah																			
1.	Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	indek	36,46	41,35		46,24		51,13		56,03		58,47		60,92		60,92			
a.	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,86	78,90		78,94		78,98		79,20		79,60		80,00		80,00		80,00	PELAKSANA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1)	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,86	78,90	250.000	78,94	550.000	78,98	605.307	79,20	606.993	79,60	610.058	80,00	613.124	80,00	613.124	80,00	
b.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	indek	16,00	20,89		25,79		30,68		35,57		38,02		40,46		40,46		40,46	
		Indeks kualitas udara	indek	60,00	64,89		69,79		74,68		79,57		82,02		84,46		84,46		84,46	
		Indeks tutupan vegetasi (lahan)	indek	34,14	39,03		43,93		48,82		53,71		56,16		58,60		58,60		58,60	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
1) Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	%	48%	59%	175.000	70%	340.000	77%	520.000	81%	660.000	83%	770.000	50%	870.000	86%	PELAKSANA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	70%	71%		80%		82%		85%		88%		90%		90%		
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang dibitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten	%	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	5%	5%	160.000	9%	455.000	18%	502.160	27%	554.367	36%	606.621	45%	658.924	45%		
	Prosentase turus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga	%	0	0		29.525		29.525		29.525		29.525		29.525		29.525		
3) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat	%	2,5%	2,5%	4.317.500	5,0%	15.380.756	7,5%	750.000	10,0%	600.000	12,5%	800.000	15,0%	800.000	15%		
2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	Indeks resiko bencana	Indeks		123		122		121		120		119		119		119		
a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas		sedang		sedang		sedang		sedang		sedang		sedang		sedang		
1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Kenaikan Desa Tangguh Bencana (desa)	%		0	175.000	1	944.000	3	1.515.000	2	915.000	2	1.010.000	2	1.030.000	2	PELAKSANA PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN KEBENCANAAN	
	Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana	orang		0	225		225		225		225		225		225			225
	Sekolah Siaga Bencana	Sekolah		0	15		15		15		15		15		15			15
	Sekolah Sungai	Komunitas		0	0		0		2		3		3		2			2
2) Penanganan Darurat Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	%	100	100	993.600	100	1.511.000	100	1.445.000	100	1.300.000	100	1.300.000	100	1.500.000	100		
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
3) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana	%	100	100	100.000	100	150.000	100	125.000	100	125.000		150.000	100	150.000	100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
VI. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian																		
1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	Indeks demokrasi	%	69,75	70		72		75		77		80		80			75,7	
a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	%	69,75	70		72		75		77		80		80			75,7	
1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik sosial	%	85	85	370.000	85	355.000	90	370.000	90	570.000	95	600.000	95	600.000		90	PELAKSANA URUSAN PERSANDIAN
2) Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	Persentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu	%	5	0	190.500	0	240.000	4	645.000	5	845.000	6	650.000	6	650.000		21	
	Persentase ormas aktif yang terbina	%	70	75		80		80		85		85		90			82,5	
2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	Prosentase desa/ kel yang terfasilitasi di bidang sosial budaya dan LK	%	5%	5%		13%		23%		40%		70%		100%			100%	
a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	16%	16%		33%		49%		66%		83%		100%			100%	
1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	Prosentase kelompok pelestarian adat isliadat	%	7%	7%	125.024	7%	88.864	17%	160.000	33%	310.000	67%	355.000	100%	405.000		100%	PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	%	13%	26%	775.309	39%	801.873	52%	856.000	65%	935.000	78%	941.000	91%	990.000		91%	
3) Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Prosentase KPMD yang di latih	%	0	17%	447.659	33%	59.572	50%	134.000	67%	155.000	83%	170.000	100%	170.000		100%	
3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90		93		95		97		99		100			100	
a. Tenujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90		93		95		97		99		100			100	
1) Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	31	31	267.000	31	1.454.900	31	1.868.200	31	2.150.036	31	2.188.036	31	2.204.236		100	PELAKSANA URUSAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100		100		100		100		100		100			100	
	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	%	40	50		64		70		75		75		80			80	
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	91	91		91,25		91,5		91,75		92		92,25			92,25	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	%	90,91	91,00		91,25		91,50		91,75		92,00		92,25		92,25		
VII. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak																		
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	indeks	96,42	96,47		96,52		96,57		96,62		96,67		96,72		96,72		
a. Meningkatkan kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	59,95	60,02		60,09		60,16		60,23		60,3		60,37		60,37		
	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	tingkat	Madya	Madya		Madya		Nindya		Nindya		Nindya		Nindya		Nindya		
1) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	persen	0	50	205.000	55	215.000	60	275.000	65	375.000	70	400.000	80	450.000	80		PELAKSANA BIDANG PANGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK
2) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	rasio	5,21	5,21	215000	5,10	220.000	5,00	169.000	4,90	275.000	4,80	350.000	4,70	425.000	4,70		
	Rasio perempuan korban kekerasan	rasio	2,18	1,54		1,5		1,45		1,40		1,35		1,30		1,30		
VIII. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik																		
1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	Indeks kepuasan layanan masyarakat																	
a. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	75,990	77,338		78,762		79,016		80,047		81,078		81,078		81,078		
1) Peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Trayek Utama	Trayek	4	4	604.000	4	655.000	4	1.347.401	4	1.375.000	4	1.420.000	4	1.420.000	4		PELAKSANA URUSAN PERHUBUNGAN
	Jumlah Trayek Cabang	Trayek	23	23		23		23		23		23		23		23		
	Jumlah Penumpang angkutan umum di terminal	jiwa / tahun	1.340.724	1.354.131		1.367.538		1.380.946		1.394.353		1.407.760		1.407.760		1.407.760		
	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	kendaraan	11.602	11.835		12.071		12.312		12.558		12.809		12.809		12.809		
	Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	87,83	87,83		87,83		87,84		87,84		87,84		87,84		87,84		
	Jumlah Alat Uji	unit	8	8		8		10		12		12		12		12		
	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	menit	1:00:00	1:00:00		0:50:00		0:45:00		0:40:00		0:35:00		0:35:00		0:35:00		
b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	%	84,50	84,07		79,52		79,52		80,00		80,00		80,00		80,00		0 PELAKSANA URUSAN PENANAMAN MODAL
1) Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan	hari	14	14	274.805	14	267.600		501.450		920.000		836.000		900.450			

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	
c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	sdh	sdh		sdh		sdh		sdh		sdh		sdh		sdh		
1) Penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Prosen	0,85	0,88	1.035.000	0,9	2.743.359	0,9	2.965.172	0,9	3.261.689	0,91	3.587.858	0,91	3.946.644			PELAKSANA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Cakupan penerbitan KTP	Prosen	85,33	88,47		89,64		89,98		90,3		90,58		90,94				
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Prosen	86,24	89,73		89,18		89,53		92,81		92,18		92,52				
	Keluarga mempunyai KK	prosen		94		94,62		95,5		96,7		98		98,5			98,5	
	Penduduk berakte kelahiran	prosen		85,2		87,5		90		93,7		95,8		98			98	
	Keluarga yang mempunyai akte nikah (yang non muslim)	akte nikah		226.797		238.546		250.500		263.150		265.850		277.800			277.800	
	Penerbitan Akte kematian	akta kematian		356		1.031		1.731		2.400		2.950		3.500			3.500	
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	Persentase partisipasi masyarakat mengikuti program transmigrasi	%	75,00	75,20		75,40		75,60		75,80		76,00		76,20			76,20	
a. Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	-64,62	39,13		40,00		40,50		41,00		41,50		42,00			42,00	
1) Pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	%	30,43	31,00	378.770	32,00	791.647	33,00	870.812	34,00	957.893	35,00	1.053.682	36,00	1.159.050		36,00	PELAKSANA URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2) Transmigrasi lokal	Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi	%	0	0		41,33		42,00		42,50		43,00		43,50			43,50	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Di dalam bab ini disampaikan proyeksi indikasi pembelanjaan terhadap pengeluaran pembangunan baik pada belanja tidak langsung ataupun belanja langsung. Di samping itu disajikan rencana program pembangunan daerah berdasarkan pada basis urusan yaitu urusan baik wajib pelayanan dasar ataupun yang tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang. Pada setiap rencana program disampaikan target dan indikasi kebutuhan pendanaan untuk bisa melaksanakan dan mencapai target program sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Program merupakan instrumen pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang berisi satu atau lebih target program sesuai indikator yang telah ditetapkan. Di dalam bab ini dirangkum semua program pembangunan daerah baik program yang nantinya ditetapkan menjadi program prioritas dan program perangkat daerah guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang didalam rencana strategis perangkat daerah. Sedangkan program prioritas adalah program yang diprioritaskan oleh pemerintah maupun masyarakat, karena keterdesakannya untuk dilaksanakan, untuk mengatasi pemecahan masalah yang krusial, serta sangat dinanti dan dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat tanpa mengesampingkan program-program yang lainnya. Agar program tersebut betul-betul memenuhi kriteria prioritas dan akuntabel, perlu disertai target capaian yang terukur dan kebutuhan/kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan bersifat indikatif, disesuaikan dengan keinginan pencapaian Misi pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Proyeksi kapasitas pendanaan untuk melaksanakan program-program pembangunan daerah tertuang didalam tabel 7.1. Sedangkan rencana program prioritas dengan indikator capaian dengan target dan pagu indikatifnya yang dikelompokkan di dalam masing-masing urusan diuraikan didalam tabel 7.2.

**Tabel 7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2018 - 2021
KABUPATEN KLATEN**

Kode	KAPASITAS RIIL / BELANJA	Proyeksi Rp. (000)			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Target	Target	Target	Target
1		8	10	11	13
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	666.160.467,13	862.354.226,28	874.031.062,26	895.744.644,68
	BELANJA	2.656.503.142,50	2.671.328.881,00	2.727.867.541,82	2.736.921.336,15
	Belanja Tidak Langsung	1.846.597.441,50	1.843.848.226,29	1.882.430.556,90	1.873.138.368,65
	Belanja Pegawai	1.161.909.785,50	1.161.909.785,50	1.161.909.785,50	1.161.909.785,50
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Hibah	55.987.450,00	40.500.000,00	70.500.000,00	60.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.485.200,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	11.395.502,00	11.502.969,10	12.078.117,56	12.682.023,43
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	611.819.504,00	627.835.471,69	635.842.653,84	636.446.559,72
	Belanja Tidak Tersangka / Terduga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Langsung	809.905.701,00	827.480.654,71	845.436.984,92	863.782.967,49
	Belanja Pegawai	77.712.564,56	50.000.000,00	51.085.000,00	52.193.544,50
	Belanja Barang dan Jasa	414.653.337,67	250.000.000,00	255.425.000,00	260.967.722,50
	Belanja Modal	317.539.798,77	527.480.654,71	538.926.984,92	550.621.700,49

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018

**Tabel 7.2. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN KLATEN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
TOTAL KEBUTUHAN PENDANAAN				10.867.023.965		9.483.876.882		723.674.496		865.984.608		874.418.299		1.131.608.006				
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																		
1. Urusan Pendidikan																		
1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	anak	48.430	48.025	3.163.038	43.027	1.255.213	43.328	1.062.800	43.631	1.169.080	43.937	1.285.988	44.244	1.414.587	44.244	PELAKSANA URUSAN PENDIDIKAN	
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	92,19	92,37		78,61		92,59		92,79		92,99		93,19		93,19		
2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	94,53	105,23		97,45	12.421.565	97,65	14.143.000	97,85	15.557.300	98,05	17.113.030	98,25	18.824.333	98,25		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	87,58	97,57		90,93		91,13		91,33		91,53		91,73		91,73		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	81,60	91,26		86,84		87,04		87,24		87,44		87,64		87,64		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	63,94	72,77		68,22		68,42		68,62		68,82		69,02		69,02		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96,64	92,43		88,28		88,48		88,68		88,88		89,08		89,08		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,03		0,04		0,03		0,02		0,01		0,01		0,01		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,10	0,08		0,23		0,18		0,13		0,08		0,03		0,03		
3) Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan SD/MI	%	97,78	99,34		98,27		98,47		98,67		98,87		99,07		99,07		
	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	95,55	97,73		98,11		98,13		98,15		98,17		98,19		98,19		
4) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,78	99,57	823.380	99,62	838.192	99,72	245.000	99,73	269.500	99,74	296.450	99,75	326.095	99,75		
	Presentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	86,42	87,83	1.423.777	76,97	271.023	79,97	800.000	82,97	880.000	86	968.000	89	1.064.800	89		
	Presentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	98,08	98,76		98,27		98,47		98,67		98,87		99,07		99,07		
	Presentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	96,58	96,78		93,55		93,75		93,95		94,15		94,35		94,35		
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI	Rasio	1 : 12	1 : 13		1 : 14		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		
5) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs	Rasio	1 : 11	1 : 12		1 : 14		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15		
6) Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,78	99,57	259.470	99,62	198.856	99,72	220.000	99,73	242.000	99,74	266.200	99,75	292.820	99,75		
7) Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96,64	92,43	823.850	88,28	642.584	88,78	1.215.000	89,28	1.336.500	89,78	1.470.150	90,28	1.617.165	90,28		
	Penyediaan pendanaan biaya operasi sekolah	siswa	144.998	143.598	5.000.000	144.998	5.799.920	143.929	275.000	145.256	4.707.680	146.656	7.782.800	148.056	9.413.360	148.056		
2. Urusan Kesehatan																		
1) Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ibu hamil (K4)	%	91,72	92,84	1.671.826	92,85	3.307.362	97	9.022.526	98	9.022.526	99	9.473.652	100	9.947.335	100	PELAKSANA URUSAN KESEHATAN	
	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	%	96,3	96,98		97,2		98		99		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3)	%	95,72	97,59		97,57		98		99		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	90,79	94		95,25		96		97		98		99		99		
	Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	98,96	96,04		99,67		99,2		99,4		99,6		100		100		
	Cakupan BBLR	%	5,22	5,25		5,14		5,10		5,06		5,02		5,00		5,00		
	Cakupan Anemia Wanita Usia Subur	%	-	-		-		35		33		30		28		28		
	2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn	%	-	20	358.017	30	381.063	50	669.150	70	670.525	90	670.525	100	704.051		100
		Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)	%	-	10		30		70		90		100		100			100
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC		%	70,44	81,88		99,65		100		100		100		100		100		
Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		%	56,7	60		70		80		90		100		100		100		
Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Diabetes mellitus		%	76	30		40		50		70		90		100		100		
Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Gangguan liwa berat		%	-	70		80		90		100		100		100		100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	12	27,48		64,81		75		80		90		100		100		100
	Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Discharged Campak > 2/100.000 Penduduk	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Respon PIE (Penyakit Infeksi Emergen) < 24 Jam	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100
	Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi	%	80	100		100		90		100		100		100		100		100
	Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	90	98,7		95,08		92,5		93		95		95		95		95
	Cakupan Bias C/DI/TD	%	98	98,8		98,72		98		98		98		98		98		98
3) Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat	%	95,83	96	4.353.461	97	8.205.110	98	4.913.243	99	4.815.000	100	5.030.000	100	5.281.500	100		100
4) Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	%	50	50	51.775	50	48.325	55	55.000	58	130.000	100	130.000	100	136.500	100		100
	Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	%	100	100		100		100		100		100		100		100		110
5) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	77.532	100	133.767	100	492.915	100	492.915	100	517.560	100	543.438	100		100
	Kebijakan Yang Dibuat	Jumlah/ Buah	1	4		4		5		7		9		11		11		11
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	74	75,2		75,4		75,5		75,7		80		80,2		80,2		80,2
	Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk Kesehatan	%	8	6		8		14		20		24		28		28		28
	Proporsi Posyandu Mandiri	%	42	42		44		47		49		51		53		53		53
	Persentase Desa Didampingi SMD MMD	%	80	80		100		100		100		100		100		100		100
6) Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	61.095	100	58.371	100	608.822	100	608.822	100	639.263	100	671.226	100		100
	Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif	%	73,59	81,6		72		79		80		81		82		82		82
	Cakupan Balita Stunting	%	26,1	27,6		27,2		27,3		27		26,8		26,6		26,6		26,6
	Cakupan Balita Wasting	%	8,4	10,9		10,5		10,8		10,5		10,2		10		10		10
	Cakupan Balita Underweight	%	16,1	19,1		18		18,3		18,1		18		18		18		18
	Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes)	%	1,69	1,38		1,13		2,8		2,5		2,3		2,0		2,0		2,0
	Partisipasi Posyandu (D/S)	%	-	81,4		81,6		85		85		85		85		85		85
7) Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa open defecation free (ODF)	%	14	19,95	1.172.458	32,92	325.994	100	1.125.123	100	1.125.123	100	1.181.379	100	1.240.448	100		100
	Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja	%	-	-		26,342		25		30		40		50		50		50
	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	%	100	100	471.420	100	0	100	700.000	100	800.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100		100
8) Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas & RSUD	%	-	20,59	3.836.582	47,06	84.632	32,35	50.000	20,59	100.000	47,06	100.000	32,35	105.000			
9) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase peserta sarasehan dan senam lansia	%	-	94,86	76.102	96,21	50.248	97	90.745	98,00	116.000	98	124.000	98	137.000	98		
10) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	10	5	9.026.398	5	8.689.530	5	10.161.222	5	10.161.222	5	10.669.283	5	11.202.747	5		5
11) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/30.000 pend	0,28	0,29	14.874.604	0,29	13.704.247	0,29	15.971.264	0,29	37.441.856	0,29	24.250.000	0,29	25.462.500			
	Rasio Pustu per satuan penduduk	/10.000 pend	0,23	0,22		0,22		0,22		0,22		0,22		0,22				
12) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	Rasio tempat tidur Rumah sakit per satuan penduduk	/1.000 pend	1,34	1,34	33.712.837	1,38	23.432.581	1,38	4.975.000	1,38	6.540.000	1,38	8.500.000	1,38	8.500.000	1,38		1,38
13) Peningkatan Pelayanan Kesehatan	BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka Penggunaan tempat tidur	%	14,7	52,55	15.767.379	42,04	26.014.678	62	28.000.000	65	29.000.000	70	30.000.000	70	31.000.000	70		70
14) Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan	Persentase pengelolaan SIMRS (sistem informasi manajemen rumah sakit)	%	50,00	80,00	81.613	-	-	-	-	100	3.500.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100%		100%
15) Peningkatan Derajat Kesehatan	NDR (Net Dealt Rate) angka kematian . 48 jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar rumah sakit	‰	9,5	25,00	2.775.000	13,74	6.248.475	< 25	-	< 25	7.000.000	< 25	8.000.000	< 25	9.000.000			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	GDR (Gross Death Rate) angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	%	56,8	28,00		37,21		< 45	-	< 45	-	< 45	0	< 45	0	< 45		
16) Pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru paru/Rumah Sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	442.826	100	47.651	-	-	100	1.300.000	100	1.300.000	100	1.400.000	100		
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1) Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	60,90	61,30	47.453.719,98	61,75	148.861.218,36	62,25	196.851.000,00	81,32	242.450.000,00	81,90	259.100.077,44	82,47	271.222.357,27	82,47	PELAKSANA URUSAN	
	Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	49,51	55,26		56,92		58,68		61,49		64,41		67,40		67,40	PEKERJAAN UMUM	
2) Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong	Prosentase panjang talud jalan yang dibangun	%	-	-	-	15,69	1.162.668,25	41,18	1.200.000,00	60,78	1.000.000,00	80,39	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	DAN PENATAAN	
3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Prosentase volume jalan yang dipelihara	%	12,02	25,85	13.061.775,76	43,09	17.910.016,47	54,31	7.000.000,00	66,33	10.000.000,00	83,17	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	RUANG	
4) Penataan Trotoar Jalan	Prosentase rasio trotoar yang tertata	%	54,00	54,50	452.540,00	55,50	4.341.884,00	56,00	3.000.000,00	57,58	2.000.000,00	59,16	2.000.000,00	60,74	2.000.000,00	60,74		
5) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinarmargaan	Prosentase sarana dan prasarana kebinarmargaan yang tersedia	%	60,38	60,38	-	92,45	6.523.079,60	92,45	-	100,00	550.000,00	100,00	-	100,00	-	100,00		
6) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Prosentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	20,00	22,20	17.689.684	24,26	14.260.898	26,00	20.833.000	28,00	11.500.000	30,00	12.000.000	32,00	12.000.000	32,00		
7) Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang dikelola dalam kondisi baik	%	69,67	71,96	893.359	74,26	4.418.037	76,56	5.350.000	78,86	1.000.000	81,16	1.000.000	83,46	1.000.000	83,46		
8) Pembinaan dan Pengembangan bidang kelenagalistrikan	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang	unit	795	145	2.580.611	1028	32.085.736	250	4.894.262	250	4.894.262	250	4.894.262	250	4.894.262	2.968		
9) Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	12,5%	12,5%	292.246,5	25%	399.334,5	43,75%	1.200.000	62,5%	1.575.000	81,25%	1.525.000	100%	2.475.000	100%		
10) Pemanfaatan Ruang	Prosentase Peningkatan Pelayanan Ketataruangan	%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	35%	575.000	60%	550.000	85%	550.000	85%		
11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%	30%	30%	422.588,1	42%	312.372,95	54%	325.000	66%	350.000	78%	400.000	90%	400.000	90%		
	persentase Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB)	%	19,42	19,42		30,25		47,69		65,13		82,56		100,00		100,00		
12) Program Pembangunan Drainase / gorong-gorong	Prosentase layanan Drainase	%	65	66	48.444,9	66,95	3.295.000,00	71	1.850.000	71,2	2.000.000	71,5	2.250.000	72	2.500.000	72		
13) Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase layanan Air Minum / Air Bersih	%	69,68	77,26	7.192.303	84,84	312.785	88,5	33.000.000	91,37	33.000.000	94,25	33.000.000	97,13	33.000.000	97,13		
	Prosentase layanan Air Limbah	%	60,52	70,39		80,26		92,5		94,37		96,25		98,12		98,12		
14) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	persentase gedung kantor dan non kantor yang terbangun	%	13,11	13,11	-	34,43	29.586.609,79	52,46	69.400.000	83,61	70.000.000	91,80	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00		
15) Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	%	0,78	0,73	-	0,39	2.675.859,25	0,19	52.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	100		
4. Urusan Sosial																		
1) Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	%	94	-	-	-	-	97	100.000	98	130.000	99	132.808	100	135.000	100	PELAKSANA URUSAN	
2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	5,1	5,3	407.870	24	421.076	26	1.190.100	28	974.500	30	995.549	32	1.007.298	32	SOSIAL	
	Persentase kehadiran pengunjung makam yang bersejarah	%	-	88,94	18.071	90,28	18.344	91	21.419	100	21.419	100	21.419	100	21.419	100		
3) Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase difabel, trauma, dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	%	18	-	-	-	-	-	-	26	82.500	28	84.282	30	90.000	30		
4) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	%	100	100	394.532	100	559.505	100	486.244	100	872.000	100	935.000	100	985.000	100		
	Prosentase Organisasi /lembaga yang terfasilitasi	%	-	36,39	9.546	35,67	3.567	70	9.949	90	23.457	100	23.457	100	23.457	100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5) Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, Penyakit lainnya)	Cakupan penanganan PMKS	%	40,78	33,11	115.991	35,52	65.336	43,78	50.250	44,78	82.500	-	-	-	-	-	-	-
6) Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	Persentase kehadiran peserta sosialisasi	%	-	-	-	77,58	45.384	88	50.503	80	100.000	80	105.000	80	115.000	80	80	
7) Peningkatan Keagamaan	Persentase Kehadiran Masyarakat	%	-	64,29	2.708.015	74,34	3.027.166	85	3.371.316	90	3.379.751	90	3.394.756	90	3.394.756	90	90	
8) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	desa	0	0	175.000	1	944.000	3	1.515.000	2	915.000	2	1.010.000	2	1.030.000	2	10	
	Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana	orang	0	225		225		225		225		225		225		225	225	
	Sekolah Siaga Bencana	Sekolah	0	15		15		15		15		15		15		15	15	
	Sekolah Sungai	Komunitas	0	0		0		2		3		3		3		3	3	
9) Penanganan Darurat Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	993.600	100	1.511.000	100	1.445.000	100	1.300.000	100	1.300.000	100	1.500.000	100	100	
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100		100		100		100		100		100		100	100	
	Persentase tercukupinya kebutuhan logistik untuk korban bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		100	100	
10) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	100	100	100.000	100	150.000	100	125.000	100	125.000		150.000	100	150.000	100	100	
11) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Kawasan Bencana	%	100	100	0	100	0	100	0	100	234.824,98	100	239.897,20	100	245.078,98	100	100	
5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1) Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Prosentase Rumah Layak Huni	%	92,58	93,82	-	95,05	-	96,29	31.000.000	97,53	31.000.000	98,76	31.000.000	100,00	36.000.000	100	100	
2) Pengembangan Perumahan	Jumlah pengembangan PSU (perumahan)	unit/blok	0	0	-	0		0		5	500.000	10	1.200.000	10	1.300.000	25	25	
6. Urusan Ketertarikan, Keterseragaman dan Perlindungan Masyarakat																		
1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	%	90	90	408.272	92	691.145	94	685.000	96	1.094.350	98	944.750	100	1.050.000	100	100	
	Prosentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100	672.581	100	744.679	100	1.180.000	100	1.200.000	100	1.200.000	100	1.220.000	100	100	
2) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	persentase keamanan, keterlibatan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal yang terpelihara	%	15	15	276.302	15	9.936	20	10.000	49	20.000	49	20.000	100	25.000	100	100	
	Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba	%	2	2	49.662	4	148.490	4	140.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	22	22	
	Prosentase koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terlaksana	%	100	100	226.642	100	217.220	100	232.000	100	250.000	100	250.000	100	300.000	100	100	
3) Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Anggola korsik yang terlatih	%	100	100	137.095	100	145.054	100	150.000	100	150.000	100	200.000	100	220.000	100	100	
	Prosentase pendataan dan pemetaan masalah ketahanan seni budaya, agama, ekonomi, dan kemasyarakatan	%	-	100	49.499	100	49.599	100	50.000	-	-	-	-	100	60.000	100	100	
4) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Keamanan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertarikan dan keamanan	%	91	3.650	672.909	92	916.440	94	1.452.161	96	2.601.775	98	2.601.775	100	3.000.000	100	100	
	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	31	31		31												
5) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	%	90,91	91,00	53.511	91,25	285.618	91,50	425.000	91,75	475.000	92,00	505.000	92,25	650.000	92,25	92,25	
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertarikan, Ketertarikan, Keindahan)	%	91	91	-	91,25	-											
	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	%	90,91	91,00	-	91,25	-											
6) Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	Prosentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih	%	0	0	0	0	0	15	65.000	13	100.000	12	100.000	40	265.000	40	40	
7) Penanganan Darurat Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100	993.600	100	1.511.000	94	1.138.200	96	1.209.037	98	1.209.037	100	6.060.873	100	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	50	0	64	0										
	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	%	40	50	0	64	0										
8)	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	%	-	-	0	100	89.850	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100			
9)	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	10	10	339.156	10	326.660	10	370.000	10	570.000	10	400.000	10	420.000	60	
10)	Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	%	5	-	97.182	-	145.286	4	801.000	5	925.000	6	830.000	6	330.000	21	
	Proporsitas ormas aktif yang terbina	%	70	75		80		80		85		85		90		82,5	
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
1.	Usuran Tenaga Kerja																
1)	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	1754,45	1997,14	130.148	1770	359.469		830.000		1.309.000		1.400.000		1.500.000		PELAKSANA URUSAN KETENAGA KERJAAN
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76		66,93											
	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	-		2											
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	-	-		-		56		58		60		62		62	
2)	Peningkatan Kesempatan Kerja	%	97,25	97,25	180.430	0	173.560	-	275.000	-	275.000	-	295.000	-	350.000	-	
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	-	-		22,19		25,20		25,30		25,40		25,50		25,50	
3)	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	%	9,24	8,69	175.827	-	103.602	-	169.000	-	201.000	-	213.000	-	300.000	-	
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	-	-		78,95		79,50		80,00		80,50		81,00		81,00	
	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	%	-	-		6,38		6,20		6,70		6,00		5,90		5,90	
2.	Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
1)	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	-	0	41.010	0	48.130	60	60.000	65	275.000	70	400.000	80	450.000	80	PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2)	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	rasio	5,21	3,69	4.000	3,29	83.254	5,00	44.000	4,90	110.000	4,80	350.000	4,70	425.000	4,70	
	Rasio perempuan korban kekerasan	rasio	2,18	1,54		0,25		1,45		1,40		1,35		1,30		1,30	
3)	Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pengambilan kebijakan	%	3,49	3,49	114.231	17,20	164.070	94,01	125.000	100	295.000	100	360.000	100	375.000	100	
4)	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	dokumen	2	2	219.036	3	98.858	9	149.000	10	295.000	-	-	-	-	-	
3.	Usuran Pangan																
1)	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	(Skor PPH)	91,71	92	1.140.880	92,25	876.797	92,5	1.435.000	92,75	1.590.000	93	1.610.000	93,25	1.335.000	93,25	PELAKSANA URUSAN PANGAN
2)	Peningkatan ketahanan pangan	Ton	59.750	57.530	95.107.500	54.350	83.980.400	63.450	495.000	88.035	80.000	88.035	90.000	88.035	100.000	88.035	
	Penerimaan pendapatan DBHCHT	Rupiah	15.168.602.000	14.282.125.000	-	15.666.717.000	-	14.944.437.000	-	15.039.148.000	100.000	14.964.426.000	120.000	15.126.767.000	130.000	15.126.767.000	
4.	Usuran Lingkungan Hidup																
1)	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%	48%	59%	1.819.571,82	70%	630.243	77%	520.000	81%	660.000	83%	770.000	50%	870.000	86%	PELAKSANA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
	AMDAL/UKL-UPL	%	70%	71%		80%		82%		85%		88%		90%		90%	
	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2)	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	5%	5%	148.790.50	9%	296.800,07	18%	502.160	27%	554.367	36%	606.621	45%	658.924	45%	
	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	5%	5%	148.790.50	9%	296.800,07	18%	502.160	27%	554.367	36%	606.621	45%	658.924	45%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada		
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Prosentase lurus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga	%	0	0		20		40		60		80		100		100		100	
3) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	80%	100%	-	100%	-	100%	700.000	100%	700.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	
4) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	%	40%	100%	-	100%	-	100%	600.000	100%	600.000	100%	600.000	100%	600.000	100%	600.000	100%	
5) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan	%	13,93	12,89	15.448.572	14,49	35.619.551	15,20	20.352.825	16,63	22.050.212	17,21	22.989.166	17,92	23.912.860	17,92	23.912.860	17,92	
	Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat	%	2,5%	2,5%		5,0%		7,5%		10,0%		12,5%		15,0%		15,0%		15%	
6) Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	ha	294,58	0,000784	3.751.856	0,36	2.681.121	0,7	5.734.620	0,15	1.228.874	0,125	1.024.039	0,125	1.024.039	0,125	1.024.039	296,0	
5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
1) Penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	0,85	0,88	891.741	0,9	2.448.503	0,9	2.965.172	0,9	3.261.689	0,91	3.587.858	0,91	3.946.644				PELAKSANA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Cakupan penerbitan KTP	%	85,33	88,47		89,64		89,98		90,3		90,58		90,94					
	Cakupan penerbitan akte kelahiran Penduduk usia 1-18 tahun	%	86,24	89,73		89,18		89,53		92,81		92,18		92,52					
	Keluarga mempunyai KK	%		94		94,62		95,5		96,7		98		98,5				98,5	
	Penduduk berakte kelahiran	%		85,2		87,5		90		93,7		95,8		98				98	
	Keluarga yang mempunyai akte nikah (yang non muslim)	%		226.797		238.546		250.500		263.150		265.850		277.800				277.800	
	Penerbitan Akte kematian	akta kematian		356		1.031		1.731		2.400		2.950		3.500				3.500	
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa																			
1) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	13	13	1.292.000	35	951.880	47	100.000	77	6.665.000	89	3.505.000	100	4.480.000	100	4.480.000	100	PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	%	15	15	111.941	31	567.740	46	900.000	72	1.500.000	87	1.680.000	100	1.795.000	100	1.795.000	100	
3) Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna	%	7	7	1.162.392	29	528.142	46	825.000	64	591.000	82	704.000	100	875.000	100	875.000	100	
4) Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes	%	14	29	33.739	43	200.583	51	382.000	58	300.000	64	370.000	70	450.000	70	450.000	70	
5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase kelompok pelestarian adat Istiadat	%	7	7	235.749	7	203.831	17	569.000	33	310.000	67	355.000	100	405.000	100	405.000	100	
6) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	%	13	26	775.309	39	801.873	52	856.000	65	935.000	78	941.000	91	990.000	91	990.000	91	
7) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Prosentase Peningkatan Administrasi Perencanaan Desa	%	0	0	-	0	-	0	-	100	1.000.000	0	-	0	-	-	100		
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
1) Keluarga berencana	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	%	75,9	78,7	1.277.552	64,93	1.274.107	64,97	8.029.840	65	9.188.840	65,03	8.625.000	65,06	8.710.000	65,06	8.710.000	65,06	PELAKSANA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	%	5,5	6		3,9		5,3		5,1		4,98		4,95			4,95		
	Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)	%	14,3	10,13		9,3		9		8,97		8,94		8,91			8,91		
2) Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age specific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old)	Per-1000 perempuan usia 15-19 tahun	41	40	10.001	39	7.593	37	14.500	35	31.500	33	145.000	31	155.000	31	155.000	31	
3) Peningkatan pemberdayaan keluarga sejahtera	Persentase keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	625.000	26	635.000	26	635.000	26	
4) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang Mandiri	Persentase peserta KB mandiri	%	86,31	-	246.281	-	245.785	90	285.000	91	313.000	-	-	-	-	-	-		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada		
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5) Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	%	66	70	15.000	75	11.911	-	-	75	50.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Persentase Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif	%	55	65		75		-	-	75		-	-	-	-	-	-	-	
	Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif	%	70	75		80		-	-	80		-	-	-	-	-	-	-	
	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	%	45	50		60		-	-	65		-	-	-	-	-	-	-	
	6) Pelayanan Kontrasepsi	DO KB	%	18,95	18	139.653	14	92.708	16	92.000	15	188.000	-	-	-	-	-	-	-
		Unmet Need	%	10	17		13		9,5		9		-	-	-	-	-	-	-
	7) Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Peserta Kb Mandiri	%	86,31	-	133.039	-	348.376	89	246.500	90	306.600	-	-	-	-	-	-	-
	8) Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga Pra sejahtera dan KS I	%	38,8	33,58	37.565	34,08	32.813	32	17.500	30	31.500	-	-	-	-	-	-	-
	9) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	BKB	621	621	25.206	622	41.999	636	14.000	641	135.000	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	BKR	271	266		266		281		286		-	-	-	-	-	-	-
Jumlah tenaga pendamping kelompok Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL)		BKL	469	464		464		479		484		-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah tenaga pendamping kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)		UPPKS	581	576		558		591		596		-	-	-	-	-	-	-	
10) Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		Persentase anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang aktif mengikuti kegiatan	%	17	17	19.500	16	24.429	20	54.000	21	175.000	-	-	-	-	-	-	-
8. Urusan Perhubungan																			
1) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersusun	%	0	0	-	0	-	50	150.000	50	-	75	225.000	75	-	75	-	75	
2) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase perlengkapan jalan terpasang	%	22,67	27,85	2.141.573,62	31,53	3.416.764,12	33,88	6.765.214	36,96	12.570.000	40,03	6.535.000	43,00	7.250.000	43,00	-	43,00	
3) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik	%	72	76	432.607,16	82	1.454.807,27	85	266.856	86	1.940.000	87	2.490.000	87,24	3.150.000	87,24	-	87,24	
4) Peningkatan pelayanan angkutan	Indeks kepuasan layanan angkutan umum	indeks	60	63,04	307.245,80	67,25	271.649,80	69,42	447.400	72,17	515.000	74,82	530.000	77,33	550.000	77,33	-	77,33	
5) Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	87,83	87,83	279.626,40	87,83	368.054,90	87,84	1.287.901	87,85	2.692.000	87,86	1.414.000	87,87	2.100.000	87,87	-	87,87	
6) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Terpasang	%	77,78	77,78		77,78		77,78		77,78		83,33	9.775.000,00	88,89	2.000.000,00		-		
9. Urusan Komunikasi dan Informatika																			
1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan telekomunikasi	%	32,2	32,2	413.500	52,2	273.100	52,2	860.000	53,6	320.000	55,08	365.000	56,5	410.000	56,5	-	56,5	
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	15	30		46		61,5		73		84,6		100		100		100	
	Persentase pelayanan publik dan nonpublik berbasis e-government	%	0	10		14		40		60		80		100		100		100	
2) Pengembangan Data/Informasi	Persentase dokumen profil daerah yang tersedia	%	17	17	46.900	33	61.921	50	70.000	67	70.000	83	75.000	100	75.000	100	-	100	
3) Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase event kabupaten terpublikasi	%	0	0	0	0	-	85	250.000	90	675.000	92	742.500	95	812.750	95	-	95	
	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik	skor						0		60		65		70		70		70	
	Persentase Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Melalui Media Massa	%	80	85	482.172	95	590.034	100	768.500	100	800.000	100	850.000	100	900.000	100	-	100	
	Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah	%	90	95	199.657	73	186.372	100	275.000	100	300.000	100	325.000	100	350.000	100	-	100	
	Persentase Publikasi Informasi Kepala Daerah Melalui Media Sosial	%%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	25.000	100	50.000	100	60.000	100	-	100
	Persentase publikasi Kepala Daerah melalui penulisan dan media papan ruang	%	90	90	142.277	74	130.727	100	137.142	100	200.000	100	225.000	100	250.000	100	-	100	
Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui radio	%	96	100	55.000	34	341.000	90	137.000	90	150.000	90	200.000	90	250.000	90	-	90		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui komunikasi budaya	%	-	70	600.000	93	419.000	95	300.000	95	300.000	95	350.000	95	350.000	95		
4) Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM bidang komunikasi dan informasi terlatih	%								33,33	631.000	66,67	694.500	100	764.000	100		
10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																		
1) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan UMKM	%	0,04550	0,09101	187.207	0,18177	494.603	0,27240	500.000	0,36320	1.140.000	0,40842	700.000	0,49872	750.000	0,49872	PELAKSANA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Persentase promosi produk UKM	%	10	10	273.648	30	579.261	40	626.000	50	650.000	60	650.000	70	650.000	70		
3) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	72,20	70,58	74.905	80,07	317.609	80,20	250.000	80,18	580.000	80,59	455.000	80,97	400.000	80,97		
	Persentase pertumbuhan koperasi	%	0,012	0,027		(0,059)				0,012		0,028		0,037		0,045	0,045	
	Persentase manajer koperasi yang bersertifikasi	%	4,39	4,12		5,89				9,76		11,68		13,53		16	16	
11. Urusan Penanaman Modal																		
1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)				7.383		38.064.044		140.000		756.000		775.000		780.000		PELAKSANA URUSAN PENANAMAN MODAL	
	PMDN (dlm ribu Rp)	Rp	89.208.500	89.208.500		90.823.174		92.621.473		94.659.145		97.025.624		99.451.264		563.789.180		
	PMA (dlm ribu US\$)	US\$	11.278.80	11.278.80		11.549.491		11.832.454		12.128.265		12.437.536		12.754.683		71.981.239		
	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)																	
	PMDN	investor	12	12		13		14		15		16		17		87		
	PMA	investor	5	5		5		5		5		5		5		30		
	Peningkatan Pendapatan BUMD	Rupiah	3,24 M	4,09 M	113.857.500	4,59 M	316.000	4,89 M	313.000	5 M	486.000	5,1 M	522.000	5,2 M	56.050.000	5,2 Milyar		
2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rasio daya serap tenaga kerja			254.491		549.950		549.950		715.000		706.000		715.000				
	PMDN	org	189	238		397		417		438		460		483		2.433		
	PMA	org	46	294		294		294		294		294		294		1.764		
	Prosentase kenaikan/penurunan realisasi investasi																	
	PMDN	%	1,75	1,75		1,81		1,98		2,20		2,50		2,50		12,74		
	PMA	%																
	Lama Proses Perizinan	hari	14	14		14												
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	84,50	84,0		80,0		80,0		80,0		80,0		82,0		82,0			
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga																		
1) Peningkatan Peran Serta kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	60	64	24.982	66	348.124	66	350.000	69	810.000	69	835.000	72	900.000	72	PELAKSANA URUSAN KEMUDAAN DAN OLARAHAGA	
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	2	2	148.500	15	159.040	-	-	25	250.000	20	100.000	25	200.000	25		
3) Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Wirausaha Muda yang Dibina (Keluarga Miskin)	%	15	-	-	15	98.670	20	200.000	20	250.000	25	275.000	25	300.000	25		
4) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan narkoba	%	10	-	-	-	-	10	50.503	10	150.000	10	165.000	10	165.000	40		
5) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi	%	77	80	287.218	80	592.951	80	1.250.000	80	1.140.000	83	1.300.000	83	1.300.000	83		
6) Pembinaan pemuda dan olahraga	Persentase kenaikan pemuda yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Besar Nasional	%	10	10	845.021	15	734.652	15	750.000	20	1.300.000	20	1.450.000	20	1.450.000	100		
	Persentase Kehadiran Peserta	%	-	87,14	53.879	93,33	87.568	90	49.798	90	102.500	90	127.500	90	155.500.000	90		
13. Urusan Statistik																		
1) Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen data statistik yang tersedia	%	7,14	7,14	45.000	14,29	72076	42,86	155000	71,43	190000	100	200000	100	200000	100	PELAKSANA URUSAN STATISTIK	
14. Urusan Persandian																		
1) Peningkatan persandian daerah	Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi	%	-	-	-	-	-	-	-	23,5	50.000	25	55.000	27	60.000	27	PELAKSANA URUSAN PERSANDIAN	
15. Urusan Kebudayaan																		
1) Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	6	2.395.161	6	3.203.869	6	2.121.000	6	2.660.000	6	2.850.000	6	2.850.000	6	PELAKSANA URUSAN KEBUDAYAAN	
2) Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	7	8	47.956	9	160.884	10	110.000	11	110.000	12	110.000	13	110.000	13		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
3) Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kenaikan Organisasi Kebudayaan/ Kelompok Kesenian yang Difasilitasi	%	5	5	0	5	99.901	5	125.000	5	125.000	5	135.000	5	135.000	30	
4) Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Persentase Fasilitas Pementasan Budaya Daerah	%	-	-	0	95	390.870	100	300.200	100	300.000	100	330.000	100	360.000	100	
16. Urusan Perpustakaan																	
1) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat	%	-	10	241.545	10	470.662	10	640.847	10	690.000	10	740.000	10	760.000	60	PELAKSANA URUSAN PERPUSTAKAAN
17. Urusan Arsip																	
1) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosentase Kenaikan Koleksi Arsip	%	68.700	5	168.448	5	229.434	5	190.000	5	352.500	5	400.000	5	450.000	30	PELAKSANA URUSAN ARSIP
2) Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Prosentase Peningkatan SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	%	10	10	9.593	10	18.895	10	20.000	10	150.000	10	150.000	10	200.000	60	
3) Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Prosentase peningkatan kelengkapan administrasi kearsipan	%	0	0	0	10	75.000	0	0	20	547.500	10	220.000	10	200.000	50	
C. URUSAN PILIHAN																	
1. Urusan Kelautan dan Perikanan																	
1) Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan budidaya	(ton)	27.831	28.660	2.956.895.042	29.515	1.616.560	30.396	1.771.000	31.302	1.775.000	31.467	1.775.000	31.467	2.483.000	31.467	PELAKSANA URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2) Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan tangkap	(ton)	468	469	19.818.800	506	224.035	516	50.000	526	55.000	537	60.000	537	75.000	537	
3) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi Ikan	(kg/kapita/tahun)	13,0	15.14	0	17,2	245.461	18.72	150.000	19.91	150.000	20.41	200.000	20.41	200.000	20.41	
2. Urusan Pariwisata																	
1) Pengembangan Kemitraan	Persentasi kenaikan lembaga pariwisata yang bemitra	%	5	5	193.768	6	288.114	10	500.000	10	630.000	12	720.000	15	720.000	35	PELAKSANA URUSAN PARIWISATA
2) Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentasi kenaikan kunjungan wisatawan Rata-rata lama kunjungan wisatawan	% hari	5 0,5	791,8 1	375.760	-17,7 1	986.801	5 1	635.000	8 1	1.010.000	10 1	1.095.000	10 1	1.095.000	33 1	
3) Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata andalan	%	17	17	373.308	17	570.654	17	3.934.800	22	5.220.000	28	5.350.000	33	5.350.000	33	
3. Urusan Pertanian																	
1) Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani kelas utama	%	4	4	734.377	5	876.106	5	2.190.000	6	3.830.000	6	3.830.000	6	3.756.000	64,01	PELAKSANA URUSAN PERTANIAN
2) Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktivitas Padi	(kwh/ha)	63,97	63,98	7.661.516	63,99	6.407.975	63,99	5.199.000	64	6.100.000	64,01	6.550.000	64,01	6.550.000	64,01	
	Produktivitas Jagung																
	Produktivitas Kedelai																
3) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Mengikuti agro ekspo	(kali)	2	2	25.000	2	24.775	2	60.000	2	60.000	2	65.000	2	75.000	2	
4) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	fasilitasi operasional Penyuluh	(orang)	209	209	608.395	209	107.023	209	228.000	209	228.000	209	245.000	209	278.000	209	
5) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tembakau Rajang	(ton)	815	815	3.586.459	1.037	1.511.858	1.087	4.800.000	1.091	4.495.000	1.092	4.495.000	1.092	4.356.000	1.092	
	Produksi Tembakau Asepan	(ton)	1.164	1.038		808		952		1.167		946		946		946	
6) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Populasi Sapi	(ekor)	99.438	93.788	48.060	97.954	70.831	104.450	245.000	108.628	245.000	112.973	255.000	117.492	255.000	117.492	
7) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi	(ton)	2.140	2.289	228.974	2.450	127.055	2.621	1.350.000	2.805	1.350.000	3.001	1.445.000	3.211	1.445.000	3.211	
8) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pembinaan usaha peternakan rakyat	(pengusaha)	180	185	44.970	200	299.329	200	530.000	225	855.000	235	855.000	250	900.000	250	
9) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Memanfaatkan potensi sumber daya hutan				95.334												
10) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Merehabilitasi hutan dan lahan				2.961.219												
4. Urusan Perdagangan																	
1) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal	%	0,318	0,364	168.613	0,407	180.148	0,458	165.000	0,521	600.000	0,584	535.000	0,647	535.000	0,647	PELAKSANA URUSAN PERDAGANGAN
	Persentase cakupan pelayanan UTPP	%	0	0	0	0	97.312	16,6	395.000	35	2.500.000	50	900.000	75	900.000	75	
	Inflasi tahunan	%	3	2	168.613.400	3	205.117	3,5 % (±1)	200.000	3,5 % (±1)	250.000	3,5 % (±1)	275.000	3,5 % (±1)	280.000	3,5 % (±1)	
	Persentase konsumen yang terlindungi	%	-	-	0	100	89.850	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	
2) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pasar PEMDA yang direvitalisasi	%	30,61	2,041	2.237.988	8,163	14.290.662	4,082	15.805.000	4,082	28.490.000	4,082	8.810.000	4,08	14.370.000	53,06	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3) Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase PKL dan asongan yang terdaftar	%	66,67	72,22	48.747	77,78	221.283	61,95	300.000	65,65	350.000	69,56	350.000	73,16	350.000	73,16	
5. Urusan Perindustrian																	
1) Pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah industri menengah dan besar	unit usaha		132,00	99.320	135,00	641.600		759.560		1.745.000		1.800.000		2.000.000		PELAKSANA URUSAN PERINDUSTRIAN
	Jumlah Produk yang memiliki ISO dan SNI	dokumen		57,00		60,00											
	Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI	%	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	30534,00	350000	6,60	30700,00	7,00	30900,00	7,40	510000	7,40	31000,00
	Debitur penerima KUR	Orang	6650	32126	99320100	28034	474368										
2) Peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	unit usaha	63,00	68,00	39.087	71	18.430		100.000		570.000		585.000		625.000		
	Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK	pengrajin	-	180,00		183											
	Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	%	0	0		0	3,60			3,80		4,00		4,30		4,30	
	Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK	%	0	0		0	11,00			11,50		12,00		12,50		12,50	
3) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Laju pengembangan sentra industri	%								0,05	250.000	0,10	250.000	0,15	250.000	0,15	
6. Urusan Transmigrasi																	
1) Pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi swakarsa / umum	KK	7	19	271.697	4	122.840	-	218.000	-	391.000	-	391.000	-	400.000	-	PELAKSANA URUSAN TRANSMIGRASI
	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	%	-	-				33,00		34,00		35,00		36,00		36,00	
2) Transmigrasi lokal	Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi	%	-	-		41,33	23.312	42,00	32.000	42,50	68.000	43,00	68.000	43,50	75.000	43,50	
D. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
1. Urusan Perencanaan																	
1) Perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	1.930.000	Ada	1.809.150	Ada	2.045.917	Ada	2.120.000	Ada	2.200.000	Ada	2.300.000	Ada	PELAKSANA URUSAN PERENCANAAN
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	85	90		95		95		100		100		100		100	
	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	85	90		95		95		100		100		100		100	
2) Perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan bidang ekonomi	%	55	55	560.000	60	470.000	65	525.000	70	525.000	75	550.000	80	650.000	80	
	Prosentase ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi	%	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
	Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah	%	22,73	25,97		25,97		26,62		27,27		27,92		28,57		28,57	
3) Perencanaan sosial dan budaya	Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	%	79	83	405.720	85	455.629	87	490.000	90	540.000	92	600.000	100	565.000	100	
	Persentase Ketersediaan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
4) Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	408.850	Ada	675.000	Ada	330.000	Ada	400.000	Ada	450.000	Ada	500.000	Ada	
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW	%	Ada	Ada		Ada		100		100		100		100		100	
5) Peningkatan Kualitas Perencanaan					0		531.236.595										
2. Urusan Keuangan																	
1) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	%	7,14	17,61	7.039.573.340	50,30	8.238.202.333	7,24	10.903.596	7,34	12.345.200	7,44	12.613.071	7,54	12.886.754	7,54	PELAKSANA URUSAN KEUANGAN
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	bulan	3	3		3		3		3		2		2		2	
	Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	bulan	6	6		6		6		6		5		5		5	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	lepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		
	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	%	51,6	51,6		51,6		52,5		53,0		53,5		53,9		53,9		53,9
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	%	84,0	85,0		81,0		82,0		83,0		84,0		85,0		85,0		85,0
	Meningkatkan Pengelolaan aset daerah	%	0,72	0,74	0	0,74	81.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang	%	0	0	0	0	81.830	0,72		0,72		0,72		0,72		0,72		0,72
	Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%	1,5	1,71		1,12		1,54		1,56		1,58		1,75		1,75		1,75
3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																		
1) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat	%	95	95,43	1.121.783	78,52	2.298.065	60	3.475.000	100	5.340.000	100	5.940.000	100	6.590.000	100		PELAKSANA URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	persentase layanan sumber daya aparatur	%	76,00	76,74	15.347	93,66	131.119	94	40.000	95	200.000	95	300.000	96	350.000	96		
	Prosentase Pembinaan Disiplin ASN	%	0	78	229.429	48	172.645	80	172.000	100	193.000	100	194.000	100	195.000	100		
	Prosentase informasi kepegawaian yang akurat	%	0	98,73	152.063	94	132.162	80	190.000	100	400.000	100	445.000	100	480.000	100		
	Prosentase Pengembangan Aparatur	%	0	66,04	810.932	76	1.600.306	80	2.260.000	100	3.250.000	100	2.565.000	100	3.265.000	100		
4. Urusan Penelitian dan Pengembangan																		
1) Penelitian dan pengembangan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova	peserta	29	20	250.000	22	250.000	25	400.000	30	400.000	30	400.000	35	500.000	35		PELAKSANA URUSAN PENELITIAN DAN
	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	jenis inovasi	7	10		14		16		18		19		22		22		
5. Urusan Pengawasan																		
1) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	peningkatan level maturitas SPIP	indek 1-5	1	1,12	2.746.063,615	2,29	#####	2,90	4.669.789	3	6.847.000	3	7.011.000	3	#####	3		PELAKSANA URUSAN PENGAWASAN
2) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	peningkatan level kapabilitas APIP	indek 1-5	2 dc	2 dc	475.336,693	2	352.795,690	3 dc	450.000	3	477.000	3	483.000	3	490.000	3		
3) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	persentase pemeriksaan program tahunan	%	42	48	Rp 2.001,600	50	2.150,500	99,0	5.000	100	33.000	100	36.300	100	39.900	100		
6. Fungsi Lainnya																		
1) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten	%	100	100	16.147.672	100	22.224.464	100	32.675.329	100	35.796.862	100	37.231.050	100	37.231.050	100		PELAKSANA URUSAN PENUNJANG KESEKRETARIATAN DEWAN
	Persentase Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam RPJM mauoun RKPD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Terintegrasinya program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase produk Perda terbentuk	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase produk pengawasan DPRD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Produk Perda anggaran pemerintahan daerah tersusun	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
2) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase OPD yang menyusun LKJP secara benar	%	50	50,11	614.729	90	440.523	90	795.523	90	854.075	92	926.983	95	1.029.681	95		SEKRETARIAT DAERAH
3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase jumlah kebijakan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)	%	60	80,84	137.432	81,71	404.485	83	685.000	85	700.000	87	715.000	90	725.000	90		
4) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelaporan penyelenggaraan	%	100	100	320.639	100	511.735	100	700.000	100	420.000	100	440.000	100	500.000	100		
	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	1.253.282	100	1.141.293	100	925.000	100	1.300.000	100	1.300.000	100	1.500.000	100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase Pendampingan Keprotokolalan Kepala Daerah	%	-	-	-	-	-	100	176.160	100	230.000	100	250.000	100	275.000	100	
5) Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah	%	10	10	44.829	15	97.369	15	150.000	15	155.000	15	160.000	15	170.000	85	
6) Pengembangan Wilayah Perbatasan	Kejelasan batas antar kabupaten	Pilar	50	50	18.407	50	99.592	50	365.000	50	410.000	50	425.000	50	425.000	300	
	Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan	obyek	50	50		50		50		50		50		50		300	
7) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik	%	-	-	-	70	80.000	80	90.000	90	90.000	100	100.000	100	100.000	100	
8) Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Nilai penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	275.000	85	475.000	85	
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	71,36	-	-	-	-	-	-	-	-	81,5		82		82	
9) Penataan peraturan perundang undangan	Persentase raperda yang terselesaikan	%	15	23	1.016.416	23	1.574.850	28	1.485.000	12	1.366.000	20	2.233.000	20	1.720.000	100	
	Persentase perda yang terselesaikan	%	15	23		23		28		12		20		20		100	
	Persentase perkara yang terselesaikan	%	50	68		65		65		50		50		50		100	
	Persentase produk hukum yang terdigitalisasi	%	100	113		108		113		77		90		90		100	
10) Penyuluhan pelayanan bantuan hukum dan HAM	Persentase penanganan permasalahan / kasus hukum dan HAM	%	2	4	303.682	4	425.282	6	658.000	6	-	4	950.000	8	1.034.500	8	
11) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu	%	90	90	897.000	60	1.300.000	65	1.300.000	66	1.690.000	68	1.820.000	69	1.300.000	69	KECAMATAN
	Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu	%	95	80		60		65		70		70		70		70	
	Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu	%	90	90		90		90		90		90		90		90	
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
	Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD	%	0,5	0,5		0,6		0,7		0,8		0,9		0,9		0,9	
12) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu	%	60	60	1.170.000	50	1.170.000	70	1.326.000	70	1.430.000	70	1.430.000	70	1.560.000	70	
	Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes	%	50	80		80		80		80		80		80		80	
	Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/kelurahan yang aktif	%	70%	70%		70%		70%		80%		80%		80%		80%	
13) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	%	40	41	2.080.000	50	2.080.000	60	2.197.000	70	2.210.000	80	2.210.000	90	2.340.000	95	
14) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	Persentase usulan kegiatan musrenbang kelurahan yang terealisasi didalam APBD	%	45	50	167.048	55	189.391	60	244.938	70	269.432	80	296.375	90	326.012	95	KELURAHAN
15) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	40	50	35.776	60	42.042	70	45.500	80	50.050	90	55.055	92	60.561	95	
16) Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persentase kelembagaan pemerintahan kelurahan yang aktif	%	40	50	237.923	60	301.911	70	643.968	80	708.365	90	779.201	92	857.121	95	
17) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor	%	100,00	100	681.552,58	100	719.845	100	862.346	100	1.017.054	100	1.300.059	100	1.626.365	100	SEKRETARIAT DAERAH
	Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi dan waktu pelaksanaan) dengan kondisi realita lapangan (cabaian)	%	100,00	100		100		100		100		100		100		100	
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu	%	100,00	100		100		100		100		100		100		100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja Pada	
				Realisasi	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
18) Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase penyelesaian dokumen regulasi pengadaan barang dan jasa	%	100,00	100		100		100		100		100		100		100		100
	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselesaikan	%	100			100	211.963	100	355.416	100	620.000	100	650.000	100	710.000		100	
	19) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	Bahan pokok	9	9	1.253.282	9	1.141.293	9	92.500	-	-	-	-	-	-	-	6.319.575
20) Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Bulan	12	-	-	-	-	-	-	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000			
	Persentase aduan masyarakat yang tertangani	%				68	75549	70	110000	72	200000	74	220000	76	220000		76	
E. PENUNJANG TUSI PERANGKAT DAERAH																		
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	%	85	87	52.451.232	90	34.162.969	94	42.115.386	98	46.326.925	100	50.959.617	100	56.055.579		SEMUA OPD	
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	%	80	86	26.215.968	88	25.829.487	90	14.847.961	92	16.332.757	94	17.966.033	96	19.762.636			
3) Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran aparatur	%	90	90	413.708	90	230.600	92	732.200	94	805.420	96	885.962	98	974.558			
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase capaian aparatur berkompeten	%	90	90	430.323	92	655.314	94	409.966	96	450.963	98	496.059	100	545.665			

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau *indikator capaian* yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah dari masing-masing program yang dirancang oleh setiap OPD di Kabupaten Klaten diarahkan untuk mewujudkan semua Misi Kepala Daerah Kabupaten Klaten.

Pencapaian kinerja kepala daerah terukur pada Indikator Utama Daerah dan ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya termasuk pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah, terukur pada Indikator Kinerja Kunci. Penjabaran secara terinci jenis dan macam Indikator Kinerja Utama disampaikan pada tabel 8.1., sedangkan penetapan Indikator Kinerja Daerah yang terkelompok didalam aspek dan fokus, tertuang didalam tabel 8.2.

**TABEL 8.1. : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN KLATEN**

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	43,00	45,00	46,00	48,00	50,00	52,00	55,00
2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
3	Kasus kematian Ibu	kasus	15	18	18	17	16	15	14
4	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	12,94	11,69	10,15	10,13	10,11	10,09	10,07
5	Angka kematian Balita	per 1000 KH	2,99	1,09	1,69	1,67	1,65	1,63	1,61
6	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,75	0,89	0,73	0,73	0,72	0,71	0,7
7	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR		2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
9	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	77	79	81	83	85	87	89
10	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36
11	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
12	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15%	15%	31%	46%	72%	87%	100%
13	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	90	100	100	100	100	100	100
14	Level Maturitas SPIP	level	1	2	2	2	3	3	3
15	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Nilai	47,89 (C)	53.01 (CC)	59 (CC)	64 (B)	66(B)	68(B)	70 (BB)
16	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,05	3,1
17	Indeks kabupaten peduli HAM	Indeks	0	60	70	75	80	80	80

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Tingkat Inflasi YoY	%	2,57	4 (± 1)	4 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)
19	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,5	12,07	12,15	12,25	12,3	12,4	12,6
20	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	5	10	20	25	25	25	25
21	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,74	18,86	18,94	19,12	19,37	19,38
22	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)								
	PMDN	%	1,75	1,75	1,81	1,98	2,20	2,50	2,50
	PMA	%	2,25	2,25	2,40	2,45	2,50	2,55	2,55
23	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,08
24	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76	69,51	69	69	69	69
25	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	27,55	33,73	34,76	34,86	34,98	35,2	35,2
26	Indeks layanan infrastruktur	%	27,81	30,45	33,30	35,05	37,19	38,96	40,81
27	Indeks kualitas air	indek	16,00	20,89	25,79	30,68	35,57	38,02	40,46
28	Indeks kualitas udara	indek	60,00	64,89	69,79	74,68	79,57	82,02	84,46
29	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80
30	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100
31	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	59,95	60,02	60,09	60,16	60,23	60,3	60,37
32	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	75,990	77,338	78,762	79,016	80,047	81,078	81,078
33	Nilai survey kepuasan masyarakat	%	84,50	84,07	79,52	79,52	80,00	80,00	80,00

**TABEL 8.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KLATEN**

Aspek/ Fokus /Bidang Urusan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
	Menurunnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,9	13,7	13,5	13,3	13,1	13	12,9	12,9	12,9
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39	5,4	5,41	5,42	5,43	5,43	5,43	5,43
	Pendapatan Per kapita (000)	rupiah	20.410	20.410	21.410	22.460	23.560	24.720	24.720	24.720	24.720
b. Fokus Kesejahteraan Sosial											
1) Urusan Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,08	1,08	1,08
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76	69,51	69	69	69	69	69	69
	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	86,81	87,00	87,30	87,60	87,90	88,20	88,20	88,20	88,20
2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	59,95	60,02	60,09	60,16	60,23	60,3	60,37	60,37	60,37
	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	tingkat	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
3) Urusan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)	91,71	92	92,25	92,5	92,75	93	93,25	93,25	93,25
	Produksi daging sapi	(ton)	2.140	2.289	2.450	2.621	2.805	3.001	3.211	3.211	3.211
4) Urusan Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan	(ton)	27.831	28.660	29.515	30.396	31.302	31.467	31.467	31.467	31.467
	Konsumsi Ikan	(kg/kapita/ tahun)	13	15,14	17,2	18,72	19,91	20,41	20,41	20,41	20,41
5) Urusan Transmigrasi	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	-64,62	39,13	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,00	42,00
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga											
1) Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	5	10	10	10	10	10	10	10	60
	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5	5	5	5	5	5	5	30
2) Urusan Kebudayaan	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	6	6	6	6	6	6	6	36
	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	7	10	10	10	10	10	10	10	60

Aspek/ Fokus /Bidang Urusan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. ASPEK PELAYANAN UMUM											
a. Fokus Pelayanan Dasar											
1) Urusan Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	tahun	12,84	12,85	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,16	8,22	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	43,00	45,00	46,00	48,00	50,00	52,00	55,00	55,00	55,00
	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
2) Urusan Kesehatan	Kasus kematian Ibu	kasus	15	18	18	17	16	15	14	14	14
	Angka kematian Balita	per 1000 KH	2,99	1,09	1,69	1,67	1,65	1,63	1,61	1,61	1,61
	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,75	0,89	0,73	0,73	0,72	0,71	0,7	0,7	0,7
	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
3) Urusan PUPR	Indeks layanan infrastruktur	%	27,81	30,45	33,30	35,05	37,19	38,96	40,81	40,81	40,81
	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,86	78,90	78,94	78,98	79,20	79,60	80,00	80,00	80,00
4) Urusan Perwaskim	Prosentase Rumah Layak Huni	%	92,58	93,82	95,05	96,29	97,53	98,76	100,00	100	100
	Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	%	0,78	10	0,39	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100
5) Urusan Trantibum dan Linmas	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100	100	100
	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas		sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
6) Urusan Sosial	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	77	79	81	83	85	87	89	89	89
	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	90	92	94	96	97	99	100	100	100
	Persentase penduduk miskin	%	14,89	14,46	14,15	14,12	14,1	14,05	14,00	14,00	14,00
b. Fokus Pelayanan Penunjang											
1) Urusan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	indek	16,00	20,89	25,79	30,68	35,57	38,02	40,46	40,46	40,46
	Indeks kualitas udara	indek	60,00	64,89	69,79	74,68	79,57	82,02	84,46	84,46	84,46
	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	indek	34,14	39,03	43,93	48,82	53,71	56,16	58,60	58,60	58,60
2) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh
3) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15%	15%	31%	46%	72%	87%	100%	100%	100%
	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	12%	19%	27%	35%	42%	50%	58%	58%	58%

Aspek/ Fokus /Bidang Urusan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	16%	16%	33%	49%	66%	83%	100%	100%
4) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR		2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1	2,1
5) Urusan Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	%	32,2	32,2	52,2	52,2	53,6	55,08	56,5	56,5
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan desa	%	15	30	46	61,5	73	84,6	100	100
	Persentase pelayanan publik dan non publik berbasis e-government	%	10	10	14	40	60	80	100	100
	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik	skor	-	-	-	54	60	65	70	70
6) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	5	7	9	11	13	15	15
7) Urusan Statistik	Dokumen data statistik	dokumen	1	1	1	4	4	4	4	4
8) Urusan Persandian	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80	75,7
9) Urusan Perpustakaan	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	4	4	5	5	5	5	5	5
10) Urusan Arsip	Prosentase kenaikan OPD mengelola arsip secara baku	%	5	5	5	5	5	5	5	25
11) Urusan Perencanaan	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	90	100	100	100	100	100	100	100
12) Urusan Keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
13) Urusan Pengawasan	Level Maturitas SPIP	level	1	2	2	2	3	3	3	3
	Level Kapabilitas APIP	level	2	2	2	3	3	3	3	3
	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Nilai	47,89 (C)	53.01 (CC)	59 (CC)	64 (B)	66(B)	68(B)	70 (BB)	70 (BB)
14) Fungsi Lainnya	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	%	70	70	70	95	95	95	95	95
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,05	3,1	3,1
	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	0		100	100	100	100	100	100
	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	1200	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	125	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Inflasi YoY	%	2,57	4 (± 1)	4 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)

Aspek/ Fokus /Bidang Urusan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90	90	90	95	95	95	95
3. ASPEK DAYA SAING DAERAH										
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah										
1) Urusan Pariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	5	10	20	25	25	25	25	130
2) Urusan Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,5	12,07	12,15	12,25	12,3	12,4	12,6	12,6
b. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur										
1) Urusan Perhubungan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	%	36,04	38,92	40,76	45,87	47,41	57,52	57,52	57,52
	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	75,990	77,338	78,762	79,016	80,047	81,078	81,078	81,078
c. Fokus Iklim Berinvestasi										
1) Urusan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga kerja									
	PMDN		189	238	397	417	438	460	483	2.433
	PMA		46	294	294	294	294	294	294	1.764
	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)									
	PMDN	%	1,75	1,75	1,81	1,98	2,20	2,50	2,50	12,74
	PMA	%	2,25	2,25	2,40	2,45	2,50	2,55	2,55	14,70
	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	%	84,50	84,07	79,52	79,52	80,00	80,00	80,00	80,01
2) Urusan Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,74	18,86	18,94	19,12	19,37	19,38	19,38
3) Urusan Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	27,55	33,73	34,76	34,86	34,98	35,2	35,2	35,2
	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	7,50	7,50
d. Fokus Sumberdaya Manusia										
1) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36	87,36
2) Urusan Penelitian dan Pengembangan	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	31,82	45,45	63,64	72,73	81,82	86,36	100,00	100,00

BAB IX PENUTUP

Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten disusun sebagai penajaman penjabaran atas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam program-program pembangunan selama 3 tahun kedepan atau sampai periode tahun 2021. Penyusunannya diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya. Dengan konsep pemikiran semacam ini, diharapkan, penerahan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten ke dalam sistem pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dokumen RPJMD secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah pengejawantahan janji politik yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program pembangunan daerah beserta Indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat. Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen RPJMD ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan system pemerintahan Indonesia, Bupati dan Wakil Bupati juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.

BUPATI KLATEN

SRI MULYANI